

SEJARAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1991**

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Tim Penulis

Muhammad Ibrahim

M Arifin

Nasruddin Sulaiman

Rusdi Sufi

Zakaria Ahmad

Hasan Mu'arif Ambary

T. Ibrahim Alfian MA

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA**

1991



DAFTAR DAFTAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Daftar
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menteri
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rudi Sidi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Hutan Muli dan Ampay
T. Idris dan Alim MA

DAFTAR DAFTAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menteri
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rudi Sidi
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Hutan Muli dan Ampay
T. Idris dan Alim MA

**Koreksi Naskah
Soejanto**

2000-01-01
2000-01-01

Cetakan Pertama : Tahun 1979
Cetakan Kedua : Tahun 1991
Penerbit : Proyek IDSN
Pencetak : CV. Tumaritis

Carlson, Mortimer	:	Tahiti 1979
Carlson, Robert	:	Tahiti 1979
Carlson, Robert	:	Tahiti 1979
Carlson, Robert	:	Tahiti 1979
Carlson, Robert	:	Tahiti 1979

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Saya dengan senang hati menyambut terbitnya buku-buku hasil kegiatan penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dalam rangka menggali dan mengungkapkan khasanah budaya luhur bangsa.

Walaupun usaha ini masih merupakan awal dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, namun dapat dipakai sebagai bahan bacaan serta bahan penelitian lebih lanjut.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku ini masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dapat saling memahami kebudayaan-kebudayaan yang ada dan berkembang di tiap-tiap daerah. Dengan demikian akan dapat memperluas cakrawala budaya bangsa yang melandasi kesatuan dan persatuan bangsa.

Akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan proyek ini.

Jakarta, Desember 1991
Direktur Jenderal Kebudayaan



Drs. GHPH. Poeger
NIP. 130 204 562

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978. Proyek tersebut menerbitkannya pada tahun 1979/1980 sebagai cetakan pertama.

Buku ini memuat uraian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimulai dari zaman pra-sejarah yang meliputi asal-usul penghuni yang pertama, teknologi, organisasi masyarakat, kehidupan sosial ekonomi dan sosial budaya serta kepercayaan mereka. Kemudian dilanjutkan ke periode-periode selanjutnya, yaitu zaman kuno zaman baru, abad ke-19, zaman Kebangkitan Nasional, zaman Pendudukan Jepang, dan zaman Kemerdekaan. Masing-masing periode diuraikan tentang kehidupan pemerintahan dan kenegaraan, penyelenggaraan hidup dalam masyarakat, kehidupan seni budaya, alam pikiran dan kepercayaan serta hubungan luar negeri.

Berkaitan dengan kandungan isi buku tersebut, masyarakat luas terutama masyarakat "butuh baca" sangat berminat untuk memilikinya. Sementara itu persediaan buku cetakan pertama telah habis disebarluaskan secara instansional.

Untuk memenuhi permintaan tersebut pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional memberikan kepercayaan pada Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional untuk melakukan penyempurnaan, perbanyakan, dan penyebaran buku ini kepada masyarakat dengan jangkauan lebih luas.

Terbitan ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Jakarta, Desember 1991

Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional



Dra. Sri Sutnatningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar Cetakan Kedua	v
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Zaman Prasejarah	6
2.1 Asal-usul Penghuni yang Pertama	6
2.2 Manusia di Indonesia	11
2.3 Teknologi	14
2.4 Organisasi Masyarakat	20
2.5 Kehidupan Sosial Ekonomi	20
2.6 Kepercayaan	23
2.7 Sosial Budaya	26
Bab III Zaman Kuna (Abad Ke-1 -- 1500 M)	31
3.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan (Politik)	31
3.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat (Sosial Ekonomi)	50
3.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni Budaya	55
3.4 Hubungan dengan Negeri-negeri Asing	61

Bab IV Zaman Baru ($\pm$ 1500 — 1800)	70
4.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	70
4.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	80
4.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni Budaya	87
4.4 Hubungan ke Luar	90
Bab V Abad Ke-19 ($\pm$ 1800 — 1900)	106
5.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	106
5.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	123
5.3 Kehidupan Seni Budaya	129
5.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	133
5.5 Hubungan dengan Luar	137
Bab VI Zaman Kebangkitan Nasional	152
6.1 Perang Melawan Belanda dan Keadaan Pemerin- tahan	152
6.2 Kehidupan Seni Budaya	157
6.3 Kaum Pergerakan di Daerah	162
6.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	165
6.5 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	167
Bab VII Zaman Pendudukan Jepang (1942 — 1945)	174
7.1 Keadaan Pemerintahan	174
7.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	182
7.3 Kehidupan Seni Budaya	186
7.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	192
Bab VIII Zaman Kemerdekaan (1945 — 1977)	209
8.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	209
8.2 Kehidupan sosial ekonomi masyarakat	225
8.3 Kehidupan Pendidikan dan Seni budaya	228
8.4 Alam pikiran dan kepercayaan masyarakat	235
Daftar Pustaka	241
Lampiran	257

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	iii
Pengantar Cetakan Kedua	v
Daftar Isi	vii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Zaman Prasejarah	6
2.1 Asal-usul Penghuni yang Pertama	6
2.2 Manusia di Indonesia	11
2.3 Teknologi	14
2.4 Organisasi Masyarakat	20
2.5 Kehidupan Sosial Ekonomi	20
2.6 Kepercayaan	23
2.7 Sosial Budaya	26
Bab III Zaman Kuna (Abad Ke-1 — 1500 M)	31
3.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan (Politik)	31
3.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat (Sosial Ekonomi)	50
3.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni Budaya	55
3.4 Hubungan dengan Negeri-negeri Asing	61

Bab IV Zaman Baru ($\pm$ 1500 — 1800)	70
4.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	70
4.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	80
4.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni Budaya	87
4.4 Hubungan ke Luar	90
Bab V Abad Ke-19 ($\pm$ 1800 — 1900)	106
5.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	106
5.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	123
5.3 Kehidupan Seni Budaya	129
5.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	133
5.5 Hubungan dengan Luar	137
Bab VI Zaman Kebangkitan Nasional	152
6.1 Perang Melawan Belanda dan Keadaan Pemerintahan	152
6.2 Kehidupan Seni Budaya	157
6.3 Kaum Pergerakan di Daerah	162
6.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	165
6.5 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	167
Bab VII Zaman Pendudukan Jepang (1942 — 1945)	174
7.1 Keadaan Pemerintahan	174
7.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	182
7.3 Kehidupan Seni Budaya	186
7.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan	192
Bab VIII Zaman Kemerdekaan (1945 — 1977)	209
8.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	209
8.2 Kehidupan sosial ekonomi masyarakat	225
8.3 Kehidupan Pendidikan dan Seni budaya	228
8.4 Alam pikiran dan kepercayaan masyarakat	235
Daftar Pustaka	241
Lampiran	257

BAB I PENDAHULUAN

Sejarah daerah-daerah di Indonesia yang direkonstruksikan dengan pandangan "Indonesia sentris", akan menempatkan bangsa Indonesia sebagai *dramatic personea* dengan peranannya dalam kerangka Indonesia.¹ Hal ini dimaksudkan juga sebagai *antithese* terhadap sejarah Indonesia yang diwariskan oleh penulis-penulis kolonial yang bersifat "Eropa-sentris" pada umumnya dan "Neerlandosentris" khususnya.

Selanjutnya dari pencatatan ini tentu juga diharapkan akan diperoleh tidak hanya fakta-fakta, tetapi juga pengertian-pengertian serta ciri-ciri pokok dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau di negara kita yang bersifat Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan ini kita akan saling mengenal melalui "kelampauan"² kita masing-masing dan ini berhubungan pula dengan usaha bangsa kita ke arah tercapainya integrasi nasional dan pembangunan masyarakat.³

Selain itu pencatatan ini juga diharapkan akan berguna dalam rangka mewujudkan penulisan Sejarah Nasional.⁴ Sejarahwan Sartono Kartodirdjo telah menyebutkan bahwa, "... pe-

nulisan sejarah lokal merupakan langkah yang strategis untuk menuju ke penulisan sejarah Nasional".⁵

Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang merupakan suatu kompleks historis,⁶ telah menunjukkan perannya di dalam sejarah yang telah banyak mengundang minat penulis-penulis asing dan penulis-penulis Indonesia.⁷ Tetapi karya-karya mereka masih merupakan uraian yang terpisah-pisah dan terutama karya penulis-penulis asing masih bersifat fragmentaris dan *discontinue*. Hal-hal seperti tersebut di atas di antaranya menjadi alasan dan tujuan dari pencatatan sejarah daerah-daerah di Indonesia yang sedang direalisasikan sekarang ini.

Lebih jelas dengan pencatatan ini hendak dicapai tujuan:

1. menyelamatkan sumber-sumber sejarah Daerah Aceh,
2. membina dan menyuburkan penulisan sejarah Daerah Istimewa Aceh, sebagai bagian dari keseluruhan sejarah nasional, dan
3. memperkenalkan rakyat Aceh melalui sejarahnya dalam rangka pembinaan kesatuan dan memperkuat kepribadian bangsa.

Meskipun Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah telah menetapkan suatu kerangka konseptual sebagai dasar pelaksanaan pencatatan, tetapi mengingat struktur sejarah Aceh berbeda dengan struktur sejarah daerah lain di Indonesia, maka kerangka konseptual yang diberikan oleh proyek telah mengalami beberapa penyesuaian seiring dengan keunikan peristiwa-peristiwa sejarah yang terdapat di daerah ini.

Mengingat terbatasnya waktu penelitian, mungkin pencatatan yang dilakukan ini masih jauh dari memadai. Hal ini juga disebabkan sifat pencatatan yang lebih deskriptif daripada analitis. Setelah itu perlu dikemukakan di sini bahwa tidak semua peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau dapat dipaparkan dalam pencatatan ini, tetapi dengan menyeleksi fakta yang relevan dengan kerangka konseptual yang telah ditentukan.

Pencatatan ini diharapkan akan bermanfaat juga bagi peminat-peminat sejarah Indonesia pada umumnya, peminat sejarah daerah, Propinsi Daerah Istimewa Aceh pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Teuku Ibrahim Alfian, seorang sejarawan Indonesia asal Aceh, menyatakan bahwa:

Masyarakat Aceh hendaknya melalui sejarahnya dapat mengambil butir-butir yang dapat memberikan inspirasi untuk membangun daerah Aceh sebagai bagian daripada Republik Indonesia dan bersamaan dengan itu, bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sejarah Aceh sebagaimana juga sejarah daerah lainnya, hendaknya dapat memberikan sumbangan sebagai sejarah perjalanan bersama daripada bangsa Indonesia yang dapat dijadikan cermin perbandingan menghadapi tantangan masa kini dan mengatur langkah untuk masa depan yang cerah bagi kepentingan bersama.⁸

Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan catatan ini menggunakan metode sejarah sebagai alatnya yang meliputi empat tahap, yaitu:

1. Tahap pencarian dan penentuan sumber data yang dipergunakan,
2. Tahap penelitian sumber/data (kritik sumber),
3. Tahap menginterpretasi atau mengambil kesimpulan dan perumusan fakta, dan
4. Tahap penulisan kejadian atau penulisan kesimpulan itu menjadi historiografi.⁹

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam menyusun pencatatan ini sebahagian besar adalah sumber sekunder yang terdiri atas buku-buku sejarah, khususnya yang berhubungan dengan sejarah Aceh, baik yang ditulis oleh orang-orang asing maupun yang ditulis oleh orang-orang Indonesia sendiri. Meskipun demikian sejauh mungkin telah diusahakan juga untuk menggunakan sumber-sumber primer pada periode-periode tersebut.

Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa naskah ini sebelum merupakan hasil akhir sudah mengalami proses penyempurnaan

dan penyuntingan seperlunya. Naskah ini mula-mula disusun oleh suatu tim di daerah menurut suatu kerangka ataupun *Terms of Reference* yang terlebih dahulu dibuat oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah di pusat. Kemudian, melalui suatu lokakarya telah mengalami proses penyempurnaan yang dilakukan oleh tim daerah bersama tim pusat dan tenaga-tenaga ahli. Sesudah itu dilakukan pekerjaan penyuntingan dengan menitikberatkan segi-segi, penyajian dan bahasa, terutama ejaan.

Naskah ini hendaknya dianggap sebagai usaha rintisan guna mendorong kegiatan kesejarahan di masa yang akan datang.

CATATAN

- 1) Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sejarah Indonesia*, (Jogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1967), hal. 3.
- 2) Mengenai konsep "kelampauan", lihat Taufik Abdullah "Aspek Historis Kulturil Perjuangan Bangsa". *Bulletin ya-perna* No. 5, (Jakarta : Yayasan Perpustakaan Nasional, Pebruari 1975), hal. 3.
- 3) *Ibbid.*
- 4) Buku standard Sejarah Nasional telah diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1975, dan karya ini merupakan langkah pertama yang perlu disempurnakan lagi.
- 5) Sartono Kartodirdjo, "Metode dan Didaktik Sejarah". *Lembaran Sejarah* 9, (seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, Juni 1974), hal. 17. Mengenai konsep Sejarah Nasional dan konsep Sejarah Lokal, dapat dilihat misalnya dalam *ibid.*, "Sekali lagi pemikiran sekitar Sejarah Nasional", dan *Appendix A*. F. A. Sutjipto, "Beberapa Tinjauan tentang sejarah Lokal", *Appendix B*. Teuku Ibrahim Alfian, "Tjataan singkat tentang konsep sejarah Lokal", *Appendix C*. Soeri Soeroto, "Penulisan sedjarah Lokal, "Pemikiran tentang kemungkinan Pelaksanaannya", *Lembaran Sejarah* 6, (1970) hal. 23 - 57.
- 6) Mengenai konsep kompleks historis, dapat dilihat dalam, *Ibid.*, hal. 16 - 17.
- 7) Salah seorang penulis Indonesia yang menulis Sejarah Aceh secara komprehensif ialah Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad* dijilid I, (Medan : diterbitkan oleh pengarang sendiri, 1961).
- 8) T. Ibrahim Alfian, "Wajah Rakyat Aceh dalam lintasan sejarah", *Dewan Bahasa* jilid XVI Bil. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972) hal. 497.
- 9) Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), terjemahan Nugroho Notosusanto, hal. 18. Lihat juga Nugroho Notosusanto. *Sejarah dan Hankam*, (Djakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Lembaga Sedjarah Hankam, 1968) hal. 145.

BAB II ZAMAN PRASEJARAH

2.1 Asal-usul Penghuni yang Pertama

Membicarakan asal-usul penghuni yang pertama yang mendi-ami apa yang kini masuk wilayah Daerah Istimewa Aceh tentunya tidak semudah menentukan data demografi untuk sensus, karena batas wilayah "Daerah Istimewa Aceh" sekarang ini merupakan provinsi yang paling utama dari wilayah Republik Indonesia yang pada masa dahulu hanya setitik noktah dalam wilayah besar Asia Tenggara pada masa awal adanya makhluk yang pertama yang menghuni daerah Asia Tenggara ini.

Namun demikian data dan peninggalan purbakala memberikan bukti akan adanya penghunian manusia dari daerah Aceh yang terhitung dalam kurun masa prasejarah. Manusia yang pertama yang ada di muka bumi ini muncul pertama kali pada masa pleistosen dan terjadi tiga juta tahun yang lalu.¹ Dalam sejarah bumi, masa pleistosen merupakan masa yang paling muda dan singkat, tetapi dalam sejarah umat manusia merupakan bagian yang tertua. Masa pelistosen berlangsung kira-kira antara tiga juta sampai 10.000 tahun sebelum sekarang (*BP = Before Present*).² Kejadian alam masa pleistosen ialah terjadinya penurunan

suhu bumi, di mana daerah-daerah yang berdekatan dengan kutub terkena oleh hanyutan es. Daerah-daerah yang terkena oleh penutupan daratan-daratan es ialah Benua Amerika, Eropa, dan Asia. Masa ini disebut masa "glasial". Masa es atau glasial, terjadi beberapa kali diselingi meningginya suhu bumi yakni interglasial yang menyebabkan es-es mencair. Tidak semua permukaan bumi terkena oleh aliran atau endapan glasial, sebab di daerah tropis mungkin sekali terjadi musim kering di mana suhu di daerah tropis naik dan berudara lembab.

Daerah Indonesia pada masa itu belum diketahui dengan jelas apakah termasuk daerah tropis atau daerah yang terkena glasial.

Hal ini dikarenakan penelitian tentang endapan pleistosen belum dilaksanakan secara giat.³ Pada masa pleistosen alam telah memberikan cukup banyak bahan makanan untuk kebutuhan manusia. Makanan itu terdiri atas hewan, tumbuh-tumbuhan, dan air. Untuk itu manusia masih memerlukan alat-alat untuk mendapatkan makanan tersebut. Alat-alat yang terbuat dari batu atau kayu telah digunakan oleh manusia untuk membunuh atau memburu hewan dan menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan untuk makanan sehari-hari.

Cara hidup dengan memburu hewan dan mencari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam ini merupakan ciri utama kehidupan manusia masa pleistosen. Masa berikutnya yang merupakan masa *post pleistosen (holosin)* yang terjadi kira-kira 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang terdapat kemajuan-kemajuan serta bertambahnya kecerdasan manusia. Kata *post pleistosen* pada masa prasejarah ditandai oleh corak kehidupan masyarakat yang sudah menetap di gua. Mereka juga telah menjinakkan beberapa macam hewan, dipelihara, dan telah mengenal bercocok tanam.

Ciri semacam ini menunjukkan keinginan manusia untuk mulai hidup menetap. Mereka sudah mengembangkan cara membuat alat-alat untuk keperluan sehari-hari atau fisik manusia pun sudah berkembang. Kejadian alam pun banyak meng-

ubah akal budi manusia. Peristiwa terjadinya letusan gunung api misalnya menyebabkan tanah menjadi subur dan manusia akan berhasil baik dalam bercocok tanam. Kesuburan tanah karena peristiwa letusan gunung api merupakan suburnya tumbuh-tumbuhan yang ditanam yang menyebabkan manusia memperoleh sumber pokok untuk makanan sehari-hari. Daerah yang subur akan menarik manusia untuk menetap di tempat tersebut. Iklim sangat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan meluasnya permukaan es pada pleistosen menyebabkan berubahnya corak kehidupan. Akibat lain karena meluasnya permukaan es pada masa pleistosen ialah turunnya permukaan laut sehingga terjadi kebekuan pada bumi. Air laut turun 100 – 150 m dari permukaan laut sehingga lautan yang dangkal berubah menjadi daratan. Daratan-daratan yang baru terjadi karena susutnya permukaan laut itu kemudian menjadi jembatan darat bagi berpindahnya manusia dan hewan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari makan atau untuk menghindari diri dari bencana alam. Peristiwa alam yang lain pada masa pleistosen ialah perubahan bentuk muka bumi. Dalam lapisan bumi terjadi kegiatan gunung berapi sehingga menimbulkan gerakan-gerakan dan pengangkatan permukaan bumi. Gerakan gunung berapi menimbulkan perubahan bentuk alam yang tadinya datar menjadi bukit lereng dan sebagainya. Demikian juga terjadinya hujan, timbulnya aliran sungai, membawa perubahan alam dengan hanyutnya benda-benda alam seperti batu, lumpur, pasir dan terbentuknya daratan-daratan rendah karena aliran-aliran sungai atau hujan dengan membawa benda-benda tadi ke tanah yang landai. Gerakan-gerakan bumi (endogen) ini menyebabkan terjadinya bentuk bumi seperti sekarang ini. Sebagai contoh lain ialah terjadinya pegunungan Himalaya. Pegunungan ini dulunya ada pada endapan laut yang kemudian terangkat ke atas sehingga sekarang sudah berada 8.000 meter di atas permukaan laut.⁴

Peristiwa penting tentang proses terbentuknya bumi masa pleistosen ialah bagian barat kepulauan Indonesia yang pada masa sekarang sudah mulai stabil. Sebelum turunnya permukaan air laut bagian barat Indonesia bersatu dengan daratan Asia

Tenggara. Daratan yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan daratan Asia Tenggara ialah Paparan Sunda (*Sunda Shelf*). Secara geologis Indonesia termasuk kompleks untai Kepulauan Indonesia yang heterogin merupakan geosinklinal yang dibagi dua bagian besar. Yang pertama Indonesia bagian barat yang sudah mulai stabil sejak zaman pleistosen. Bagian ini terdiri atas dua paparan kontinental yang merupakan perluasan dari pantai yang semula berasal dari kawah permukaan laut yang terbentuk karena denudasi dan sedimentasi. Paparan Sunda meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Semenanjung Malaka, dan Paparan Sahul yang menggabungkan Australia, Irian Jaya, dan Kepulauan Aru dalam satu jalur daratan. Daerah kedua ialah bagian Kepulauan Sulawesi, Maluku dan pulau-pulau di Nusa Tenggara.⁵ Sejauh ini hanya di Pulau Jawa dari semua pleistosen yang ditemukan fosil homonid.⁶

Manusia adalah makhluk hidup di alam. Makhluk hidup sudah ada di bumi sejak 600.000.000 tahun yang lalu.⁷ Segolongan makhluk hidup termasuk ke dalam alam hewan. Hewan mengalami pertumbuhan pada bagian tubuhnya dan berhenti pertumbuhannya sesudah dewasa. Sebagian besar golongan hewan termasuk kelompok *phylum cordata* yang muncul di muka bumi sejak 500 juta tahun yang lalu.

Di dalam evolusi manusia terdapat tahun-tahun yang merupakan proses penting yang terjadi yakni dalam hal sikap tubuh dan cara bergerak. Sikap tegak merupakan proses aktivitas manusia yang paling penting karena mempunyai rentetan dalam evolusi manusia selanjutnya. Sikap tegak dimulai dengan duduk tegak, kemudian berubah menjadi lari tegak, berjalan tegak dan berdiri tegak. Dalam proses ini terjadi perubahan fisik pada tulang belakang, yakni berpindahnya titikberat tubuh mendekati anggota badan bagian bawah dan spesialisasi anggota bawah untuk menampung berat tubuh seluruhnya. Anggota tubuh bagian atas dibebaskan dari beban menampung berat tubuh. Letak tubuh dengan sendirinya juga berubah dari horisontal ke vertikal. Salah satu akibat berdiri tegak ialah pembebasan tangan dari menunjang tubuh. Dengan dapat bergerak leluasa dari pada

tungkai. Lengan atas dapat berputar untuk memudahkan menggunakan tangan, baik untuk menggenggam atau pun untuk pekerjaan lain sehingga lengan bawah lebih pendek daripada lengan atas. Sebagai contoh ialah *Australopithecus* yang memiliki tulang belikat di mana hal ini menunjukkan bahwa ia hidup di pohon yang kadang-kadang berayun selain tentu saja hidup di atas tanah.⁶

Evolusi tangan sangat berpengaruh bagi evolusi budaya. Dalam hal menggunakan alat dilakukan dengan pembebasan dan perkembangan tangan. Terjadinya sebelah tangan yang lebih dominan dari tangan yang lain yang berfungsi sebagai tangan pembantu sangat penting dalam evolusi manusia karena tidak pernah terjadi pada hewan menyusui. Hal lain yang lebih penting lagi ialah evolusi kepala. Evolusi kepala berhubungan erat dengan evolusi muka sebagai bagian teratas dari sistem pencernaan yakni alat mengunyah dan perkembangan otak. Perubahan makanan dan cara mengolahnya mempengaruhi alat pengunyah. Mulut pada primat bukan merupakan alat penangkap makanan oleh karena makanan dibawa dengan tangan ke mulut. Pada primat mulut berfungsi juga sebagai alat pengunyah dan sekaligus sebagai alat pencernaan.

Penemuan dan pembuatan api di zaman pleistosen tengah dan kemajuan dalam hal mengerjakan alat-alat batu telah membuat kemajuan pula dalam pengolahan makanan. Pekerjaan mengunyah menjadi berkurang dan hal ini menimbulkan reduksi alat-alat pengunyah. Gigi-gigi pipi menjadi mengecil, demikian juga halnya dengan rahang dan otot-otot pun turut menciut. Bagian yang tidak menyusut pada rahang bawah tinggal sebagai dagu. Moncong mulut surut ke belakang sehingga bentuk muka menjadi lebih datar.

Evolusi otak sangat mencolok pada manusia. Dari *Australopithecus* ke *Pithecantropus* dalam hal ini isi tengkorak komposisinya menjadi dua kali lipat. Dari *Pithecantropus* ke *homo* perkembangan otak menjadi besar rata-rata $1\frac{1}{2}$ kali. Pembebasan otak ini tentu saja mengubah bentuk tengkorak. Bentuknya kemudian menjadi lebih tinggi dan membulat di bagian muka,

samping dan belakang. Pembebasan ke arah muka menyebabkan dahi maju ke depan ke atas mata sehingga tonjolan kening tidak diperlukan lagi.

Dengan demikian sampailah kita pada perkembangan bio-social manusia. Aspek-aspek dalam perkembangan ini adalah pembuatan alat, organisasi sosial dan komunikasi. Dalam hal pembuatan alat manusia sudah dapat memanfaatkan alat-alat dari kayu, batu dan sebagainya.

Kemungkinan berburu menangkap binatang besar mulai ada sehingga terbentuklah kelompok yang memerlukan isyarat-isyarat tertentu untuk berkomunikasi. Komunikasi menjadi penting dalam hal membagi makanan, makan bersama dan menentukan waktu bekerja atau istirahat.

2.2 Manusia di Indonesia

Hubungan darat antara Indonesia dengan daratan Asia terjadi antara Kalimantan atau Sumatra dengan semenanjung Melayu sekarang ataupun antara Kalimantan dengan Pilipina dan Formosa dengan daratan Cina Selatan. Pada waktu glasiasi surut, permukaan laut menjadi lebih tinggi lagi dan kedua daratan itu terjadi kepulauan lagi. Akibatnya manusia yang mendiaminya jadi berpisah-pisah dalam berbagai pulau yang berlainan. Terpisahnya kelompok manusia yang terisolasi cukup lama dalam lingkungan yang berubah-ubah, sehingga menimbulkan perubahan secara evolusi dalam kelompok tersebut. Ketika terjadi zaman es lagi (interglasial) yang dapat mempersatukan kelompok-kelompok tadi dalam satu daratan terjadi hibridasi (percampuran) antara kelompok yang semula terpisah itu. Migrasi terjadi lagi dengan timbulnya paparan Sunda. Peristiwa terjadinya es yang berkali-kali memungkinkan terjadinya faktor evolusi di daerah Indonesia. Pulau-pulau kecil yang tidak cukup memiliki bahan makanan bagi manusia untuk satu populasi besar dan tumbuhnya hutan lebat merupakan faktor seleksi yang khusus. Terjadilah faktor pengataian (pigmisasi) di daerah yang terisolasi tersebut. Hal ini bukan terjadi pada manusia saja tapi juga pada hewan misalnya gajah katai, kuda sungai

katai dan sebagainya. Manusia katai terbentuk karena reduksi dalam tubuh yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terbatas.⁹

Fosil manusia dari jenis homo dari kala pleistosen di Indonesia hanyalah kerangka Wajak. Homo memiliki tubuh yang lebih progresif daripada *pithecanthropus*. Homo Wajak termasuk *Homo Sapiens*. Berasal dari ras manakah kiranya Homo Wajak ini?. Kiranya untuk mencari jawaban pertanyaan ini tidak dapat dilakukan dengan pasti karena sudah sukar untuk diperbandingkan dengan ras yang masih hidup. Ia memiliki ciri ras Mongoloid maupun Australomelonosoid. Kemungkinan sekali pada masa itu ras *Homo Sapiens* tidak bersamaan keadaannya dengan ras sekarang. Dapat juga terjadi bahwa Homo Wajak ini merupakan asal dari Subras Melayu dan turut pula berevolusi ke arah ras Australomelonosoid sekarang. Ras Wajak ini mungkin meliputi juga manusia yang hidup antara 40.000 – 25.000 tahun yang lalu di Asia Tenggara seperti halnya manusia Niah di Serawak (Malaysia Timur) dan manusia Tabon di Pulau Palawan (Pilipina). Temuan Wajak menunjukkan bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di Indonesia sudah dihuni oleh *Homo Sapiens* yang rasnya sangat sukar dicocokkan dengan ras-ras pokok yang terdapat sekarang, sehingga Wajak dapat dianggap satu ras tersendiri. Manusia Wajak juga merupakan evolusi langsung dari *Pithecanthropus Erectus*. Melihat ciri-ciri Mongoloidnya cukup banyak maka ia lebih dekat dengan sub ras Melayu Indonesia sedangkan hubungannya dengan sub ras Australoid dan Melanosoid agak jauh.¹⁰

Sejak 10.000 tahun yang lalu ras-ras manusia seperti kita kenal sekarang sudah mulai hidup di Indonesia. Di Indonesia sejauh ini sejak kala Holosen hanya ada dua ras yang mendiami daerah Indonesia yakni ras Austramelonosoid dan Mongoloid. Ras Austramelonosoid tubuhnya lebih besar tetapi tengkoraknya relatif lebih kecil. Dahinya agak miring dan tidak terlalu membulat. Tengkoraknya lonjong atau sedang dan rongga matanya tinggi serta persegi. Mukanya lebar dan datar dengan hidung sedang. Temuan kerangka dari kala posplestosen di Indonesia dapat dibagi dalam tiga golongan yakni:

- (1) Rangka-rangka dari bukti kerang di sepanjang pantai timur Sumatra (Mulai sekitar Medan hingga daerah Aceh Utara),
- (2) Rangka-rangka dari gua-gua di Jawa Timur, dan
- (3) Rangka-rangka dari gua-gua di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara.

Sisa-sisa manusia dari bukit karang berasal dari daerah Aceh Timur (Langsa dan Tamiang) dan Sumatra Utara (Binjai dan sekitarnya). Rangka-rangka yang ditemukan di Tamiang dan Binjai menunjukkan bahwa tinggi tubuhnya sedang dan tengkoraknya lonjong.¹¹ Sebuah rangka yang ditemukan di Bukit Hitam (Tamiang) kepunyaan seorang perempuan, berusia kira-kira 40 tahun, tengkoraknya lonjong dan tinggi tubuhnya kira-kira 153 cm. Akar hidungnya lebar tetapi rahang bawahnya dan gigi kecil-kecil. Kedua rangka itu menunjukkan ciri-ciri Austromelanosoid.

Bukit-bukit kerang ini selain terdapat di sepanjang pantai Timur Sumatra yang membentang mulai daerah Binjai hingga Langsa juga bersebelahan adalah bukit karang di sepanjang pantai barat Malaysia di daerah Kepah, Paya Keladi, Lahar Tuan Said, Toksoh, Lahar Ikan mati dan Pematang Tiga Ringgit. Tempat tersebut bersebelahan dengan pantai timur Sumatra dan hanya terpisah dengan lautan oleh selat Malaka. Rakyat yang ditemukan di sepanjang barat pantai Malaysia ini didapatkan dari Gua Kepah. Dari 33 buah individu dapat diketahui dengan jelas manusianya. Mereka rata-rata berusia 33 tahun (jarak antara 16 – 60 tahun). Mereka meninggal rata-rata pada usia 21–30 tahun (hanya tiga orang yang berumur lebih dari 50 tahun). Perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 38: 62. Tinggi tubuh rata-rata 163 – 169 cm. Untuk golongan laki-laki, sedangkan perempuan 153 cm. Penduduk di bukit karang pantai Malaka ini baik yang dipantai timur Sumatra atau di Malaysia Barat hidup dari binatang laut. Mereka adalah terutama nelayan-nelayan dengan makanan pokok berbagai jenis kerang terutama remis. Oleh karena itu tidak mengherankan aus giginya. Penduduk sudah pandai membuat api serta menguburkan mayat de-

ngan upacara-upacara tertentu. Mereka diduga tidak melakukan kanibalisme karena mereka hanya terdiri dari kelompok kecil saja. Penguburan mungkin dilakukan dengan sederhana di sekitar tempat tinggalnya. Beberapa rangka keluarga agaknya telah digunakan untuk pemujaan. Rangka yang dipergunakan untuk pemujaan di antaranya terdiri dari rangka rahang bawah. Pada rangka ini juga digunakan hematit (zat pewarna merah).¹²

Pada masa yang hampir bersamaan di Jawa Timur hidup kelompok manusia yang tinggal di gua-gua. Dari beberapa gua di Jawa Timur dapat diketahui beberapa rangka dengan alat-alat keperluan sehari-hari. Dapat diketahui bahwa mereka hidup pada masa berburu tingkat lanjut. Rangka-rangka ini telah ditemukan di gua-gua Lawa dekat Sampung, Kabupaten Ponorogo.

2.3 Teknologi

Usaha-usaha pokok yang dilakukan manusia dari sejak dahulu hingga saat sekarang ialah bagaimana caranya ia dapat mempertahankan kehidupan secara ekonomis. Dalam mendapatkan bahan makanan untuk kehidupan manusia memerlukan alat untuk mencari bahan makanan. Makanan sampai masa sejarah masih tetap yakni daging binatang dan umbi-umbian tumbuh-tumbuhan.

Sisa-sisa kehidupan pleistosen menunjukkan bahwa manusia sudah memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk memanfaatkan bahan-bahan yang disediakan oleh alam sekitarnya. Alat-alat untuk keperluan hidup dibuat dari batu, kayu, tulang, yang dibuatnya dengan cara yang sangat sederhana cukup sekedar untuk memenuhi tujuan penggunaannya saja. Pada tahap permulaan manusia menggunakan teknologi secara praktis. Alat-alat yang dipergunakan kemudian secara bertahap disempurnakan sesuai dengan keperluan hidup sehari-hari. Pada tahap pleistosen awal tahap hidup manusia ialah hidup berburu pada tingkat sederhana (teknologi paleolitik). Benda-benda peninggalan manusia khususnya alat-alat dari batu dapat kita pelajari sejak masa pembuatannya dari tingkat awal hingga berkembang menjadi bentuk yang lebih sempurna.

Di Indonesia pembuatan alat-alat dari batu terdapat dua macam teknik yakni tradisi kapak perimbas dan tradisi serpih. Pada tahap pleistosen akhir ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk. Yang dimaksud dengan kapak perimbas (*chopper*), ialah sejenis kapak yang digenggam dan masih berbentuk masif. Teknik pembuatannya masih kasar. Perkembangannya berlangsung sejak pleistosen tengah hingga kala Holosen. Di Indonesia jenis kapak perimbas ditemukan di Pacitan. Movius menggolongkan jenis kapak perimbas sebagai berikut.¹³

a. Kapak Perimbas (*chopper*)

Tajamannya berbetuk cembung atau kadang-kadang lurus yang pembentukan dikerjakan dengan pemangkasan salah satu penggir batu. Kulit batu masih melekat pada sebagian besar permukaan batu.

b. Kapak penetak (*chopping-tool*)

Dibuat dari segumpal batu yang tajamnya dibentuk berliku dengan penyerpihan secara selang seling pada dua sisi pinggir.

c. Pahat genggam (*hand axe*)

Bentuknya persegi empat atau persegi panjang. Tajamannya dikerjakan dengan penyerpihan terjal pada permukaan menuju pinggir batu.

d. Proto kapak genggam (*proto hand axe*)

Pemangkasannya dikerjakan pada satu sisi batu untuk memperoleh tajam. Bentuknya runcing dan kulit batu masih melekat pada pangkal yang dipergunakan untuk alat pemegang. Alat ini disiapkan dari sebuah serpihan besar.¹⁴

Hanya di Jawa yang dapat dipastikan bahwa tempat ini sudah dihuni manusia permulaan pleistosen awal. Fosil yang ditemukan di Jawa seperti *Megantropus* dan *Homo Erectus* dan alat yang ditemukan dari masa pleistosen didapat di Pacitan.¹⁵

Di tempat-tempat lain di luar Jawa dari masa pleistosen terdapat beberapa temuan alat batu seperti di Sumatra di temukan seben-

tuk alat batu oleh Houbolt. Alat ini berasal dari *fossil wood* dan kurang volkanik di lembah sungai Mangrup dekat Tabang Sawah kira-kira 75 km sebelah Utara Bengkulu. Alat ini diklasifikasikan sebagai alat batu yang *monofacial* (dikerjakan hanya pada satu bagian permukaan saja). Edbrink telah menemukan dari *fossil wood* di Kedaton dekat Tanjung Karang.

Masa pos-glasial di Indonesia merupakan masa berburu tingkat lanjut yang dalam tingkat kebudayaan termasuk masa mosolitik. Pada masa ini terjadi migrasi besar manusia ke daratan Nusantara. Mereka berdatangan ke tanah air kita melalui laut atau sungai. Ras atau sub ras baru mulai menghuni kepulauan kita. Ras tersebut adalah palaeomelanosoid, negrito dan mongoloid.¹⁶

Klasifikasi dari industri mesolitik di Indonesia menurut Van Heekeren dibagi dalam beberapa golongan yaitu: Alat-alat *pebble* dari Hoabinh dan tukang-tukang dari gua Sampung. Pada masa pos-pleistosen berkembang tiga tradisi pokok dalam pembuatan alat-alat yakni serpih bilah (*pebble tool*), alat tukang dan kapak genggam Sumatra.

Tradisi serpih bilah berkembang di Asia Tenggara dan menonjol di Indonesia pada kala pos-pleistosen. Di Asia Tenggara nama budaya untuk serpih bilah ini disebut bacson-hoabinh. Nama tersebut merupakan gabungan nama dari benda masih bahan batu kapur (*lime stone*) yang ditemukan di Bacson, sebelah utara Tonkin dan Hoabinh yang letaknya 60 km sebelah tenggara Hanoi. Nama *bacson hoabinh* diterima dalam kongres prahistori di Paris tahun 1932.

Sebenarnya teknik pembuatan alat-alatnya melanjutkan teknik pembuatan sebelumnya hanya saja bentuk alatnya nampak lebih maju dalam berbagai corak untuk bermacam-macam kegunaan. Untuk bentuk yang sangat kecil diperlukan pekerjaan yang sangat rumit umpamanya alat-alat mikrolit yang umumnya berbentuk geometris. Pemangkas sekunder yakni pekerjaan setelah serpih tersebut lepas dari intinya diutamakan untuk bentuk alat-alat yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Batu-batuan yang dipergunakan ialah kalsedon, batu gamping, andesit dan sebagainya. Tradisi serpih bilah terutama ditunjukkan dari temuan-temuan di gua-gua di Sulawesi Selatan dan pulau-pulau Nusa Tenggara Timur.

Alat-alat tukang ditemukan di beberapa tempat di Asia Tenggara di antaranya di Hoabinh dan ditemukan juga pada bukit kerang di Dabut (Annam Utara). Alat tulang yang ditemukan di Jawa yang terkenal ialah yang ditemukan di Gua Sampung.

Kapak genggam Sumatra berasal dari tanah daratan Asia Tenggara dan diketemukan di Cina Selatan, Vietnam, Kamboja, Muangthai dan Semenanjung Melayu. Pada mulanya istilah untuk kapak genggam tidak dipakai lagi oleh karena jenis kapak semacam itu juga ditemukan di daratan Asia Tenggara.¹⁷

Di Indonesia kapak genggam Sumatra ditemukan di sepanjang pantai Timur Sumatra yang membentang mulai dari Binjai (Sumatra Utara). Tamiang, Langsa hingga Lho 'seumawe. Penelitian terbatu yang dilaksanakan oleh Dr. T. Jacob menemukan situs baru bukit kerang yang cukup berarti yakni di sungai Iyu, Kecamatan Keujruen Muda (Kabupaten Aceh Timur), Jambu Labu, Kecamatan Langsa. Temuan yang terpenting dari bukit karang ialah kapak genggam Sumatra. Tentang kapak genggam Sumatra sejarah penelitiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

J.H. Neicuman pada tahun 1924 melaporkan tentang penemuan kapak genggam Sumatra pada permukaan tanah di batu kenong. Alat ini dibuat dari bahan batu andesit, pada kedua sisinya dibuat tajam dan kelihatan bergelombang. Ukuran panjang 155 mm, lebar 95 mm, dan tebal 70 mm.¹⁸

L.S. Heyting telah mengumpulkan kapak genggam Sumatra di Daerah Serdang Ilir. Alat yang dikumpulkan Heyting ini ternyata dikerjakan pada satu sisi saja. Schurmann menemukan alat kapak genggam Sumatra, beberapa alu dan lesung batu, gigi gajah, tulang badak, tulang beruang dan rusa. Ditemukan juga

sisa-sisa tulang kepiting, kura-kura dan ikan. Selain itu juga ditemukan tulang-tulang manusia. Selanjutnya dari ekskavasi yang dilaksanakan Schurmann dihasilkan artefak-artefak dan laporan sebagai berikut ;

Bagian tengah sebelah timur Situs Tamiang

- 30 cm : kerang (hampir semuanya dari jenis merotrix)
- 30 cm : tanah abu, butir-butir warna merah, kerakal kapak genggam Sumatra serta tulang-tulang binatang
- 20 cm : kerang
- 20 cm : abu dengan cat merah dan tulang
- 10 cm : abu dengan cat merah, kapak, kerakal, kapak genggam Sumatra serta tulang
- 60 cm : pasir bercampur kerakal, kerang dan beberapa potong tulang
- 50 cm : pasir biru-kelabu dan kuning bercampur tanah liat

Bagian barat daya

- 20 cm : Lapisan yang mengandung abu dan cat merah kapak genggam Sumatra dan tulang
- 50 cm : lapisan perna (sejenis kerang)
- 50 cm : abu, cat merah (banyak), kapak genggam Sumatra, tulang
- 30 cm : pasir dengan kerang-kerangan, beberapa potong tulang
- 120 cm : pasir kuning kelabu bercampur tanah liat

Bagian tengah

- 70 cm : kerang, cat merah, lapisan abu kapak genggam Sumatra, tulang
- 90 cm : Pasir kuning kelabu dengan kerang, kerakal, beberapa potong tulang
- 50 cm : pasir kuning kelabu dengan lapisan tanah liat 19

Laporan tentang penemuan bukit kerang di muara Sungai Tamiang dekat Seruway sudah diketahui sejak 1907. Di Seruway,

bukit kerang tersebut ternyata membujur sepanjang pantai Timur Sumatra yang kini meliputi wilayah Provinsi Sumatra Utara hingga Provinsi daerah Istimewa Aceh (wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara) yang seluruhnya sekitar 130 km panjangnya. Situs tersebut umumnya sekarang terletak sekitar 10 km sampai 15 km dari garis pantai bahkan banyak bagian bukit kerang sudah terendam dalam endapan lumpur dekat muara atau tepi pantai.

Pada tahun 1925 dan 1926 Van Stein Callenfels mengadakan ekskavasi di daerah perkebunan tembakau milik *Saentis Tobacco Estate*. Pada penggalian itu ditemukan kapak genggam, temuan karang, alu dan lesung batu dan sejumlah hematite. Walaupun laporan secara lengkap tidak disampaikan oleh Callenfels tapi hasil penggalian itu dilaporkan dalam suatu artikel singkat dalam *Illustrated London News* yang juga disertai gambar-gambar hasil penggalian tersebut.

Meer Mohr pada tahun 1932 menerbitkan artikel tentang penelitian bukit kerang. Menurut Mohr, bukit kerang tersebut mengandung 93 persen *meretrix* dan 6,5 persen *Ostrea sheel*. Ditemukan juga kapak genggam yang bentuknya bulat telur. Di antara kerang-kerang tersebut ada juga yang dipergunakan untuk alat tiup (seruling), gayung air, dan tempat minum. Masyarakat pada masa itu nampaknya juga mempergunakan beberapa jenis kerang untuk perhiasan. Keterangan lebih lanjut tentang bukit kerang diperoleh pula dari H.M.E. Schurmann yang telah mengadakan penelitian sepanjang sungai Tamiang dan dekat Binjai yang letaknya kira-kira 100 km sebelah selatan Sungai Tamiang. Ternyata hanya terpaut 15 km dari tepi pantai. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa bukit kerang ini terdapat di laut yang dangkal. Lapisan bukit kerang bagian bawah merupakan endapan di bawah permukaan laut yang lama. Dari alat-alat serta kerang yang berlapis lumut diperoleh indikasi bahwa pernah terjadi penurunan permukaan air laut.

H. Krupper selanjutnya melaporkan bahwa telah ditemukan situs bukit kerang di daerah Langsa. Situs ini ternyata sangat penting karena letaknya 60 m di atas permukaan air laut.

Do Lho 'seumawe kemudian ditemukan sejumlah kepak genggam Sumatra. Kepak genggam yang ditemukan ini *bentuknya* beraneka ragam. Bentuk yang umum adalah lonjong, bulat dan meruncing. Alat tersebut dipangkas pada satu sisi saja (monofacial), tapi ada juga beberapa kapak genggam juga dari Lho 'seumawe yang dipangkas pada kedua sisinya (*bifacial*).

Temuan bukit kerang di daerah Langsa dan Lho 'seumawe serta temuan-temuan kapak genggam Sumatra (*Sumatralith*), memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan masa itu sudah ada dalam taraf berburu dan mengumpulkan makanan dan pencarian bahan makanan dari laut.²⁰

2.4 Organisasi Masyarakat

Dari uraian terdahulu telah dikemukakan tentang manusia dan artefak dari masa palaeolitik yang termasuk kurun pleistosen serta manusia dan artefak dari kurun waktu mesolitik yakni dari kala pos-pleistosen dan temuan artefak dari masa paleolitik tidak ditemukan, sejauh ini memang kala pleistosen ditemukan hanya di Jawa sesuai dengan temuan fosil-fosil artefaknya. Sebaliknya dari kala pos-pleistosen atau masa mesolitik di wilayah Aceh ditemukan indikasi tradisi mesolitik terbukti dengan ditemukannya artefak-artefak dan fosil tulang manusia dan binatang pada tumpukan bukit kerang yang membujur dari Tamiang hingga Lho 'seumawe. Dalam tata kehidupan sosialnya baik dari masa pleistosen ataupun pos-pleistosen manusia baru sampai tingkat berburu dan mengumpulkan makanan.

2.5 Kehidupan Sosial Ekonomi

Manusia yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat terpengaruh oleh lingkungan alamnya, Faktor-faktor alam seperti keadaan iklim, kesuburan tanah, jenis-jenis hewan sekeliling lingkungan hidup manusia sangat berpengaruh terhadap cara hidup mereka sehari-hari. Mereka berburu binatang di hutan menangkap ikan laut dan sungai serta mengumpulkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan di sekitarnya

yang dapat dimakan manusia, seperti umbi-umbian (misalnya keladi), buah-buahan, biji-bijian serta daun-daunan.

Alat-alat yang dipergunakan untuk keperluan hidup mereka juga disesuaikan dengan kemampuan teknologi masa itu. Mereka membuat alat-alat dari batu, tulang dan mungkin juga kayu dan bambu (alat-alat dari kayu dan bambu tidak ditemukan dalam penggalian karena sangat rapuh dan hancur dalam tanah), semuanya dibuat sekedar untuk memenuhi keperluan dan tuntutan hidupnya.

Cara bertani secara sederhana agaknya telah juga dikenal yang dilaksanakan dengan cara berpindah-pindah sesuai dengan kesuburan tanahnya. Mereka tidak mengolah kesuburan tanah sesuai dengan tingkat pertanian yang sudah maju, tetapi hanya memanfaatkan tanah sejauh tanah tersebut masih subur kemudian ditinggalkan dan berpindah tempat jika tanah yang ditanami sebelumnya tidak subur lagi kemudian mereka mencari tanah baru, yang masih subur.

Sebahagian dari tata cara hidup dengan berburu dan mengumpulkan makan terpancar pada lukisan-lukisan yang terdapat di dinding-dinding gua yang dihuni pada masa pos-pleistosen. Lukisan pada dinding gua tersebut ditemukan di gua-gua di Sulawesi Selatan, Pulau Seram, Kei dan Irian Jaya. Pada lukisan di gua-gua tersebut terpancar juga alam kepercayaan pada masa itu. Gua-gua yang dipilih untuk tempat tinggal juga disesuaikan dengan keperluan hidup sehari-hari, misalnya gua tersebut letaknya dekat ke sumber mata air atau sungai karena mata air atau sungai memberikan bahan kehidupan sehari-hari yakni air dan makanan (ikan dan sebagainya).

Mereka tidak tetap pada suatu gua tertentu saja melainkan berpindah dari satu gua ke lain gua jika alam sekelilingnya sudah tidak lagi menunjang keperluan pokok sehari-hari. Tingkat teknologinya baru terbatas pada membuat alat-alat dari batu dan tulang. Di daerah Aceh umpamanya dari kala pos-pleistosen ditemukan alat batu yang disebut kapak genggam Sumatra sedangkan alat serpih bilah dan tulang dipergunakan

sebagai alat pembantu keperluan sehari-hari. Pada kebudayaan Toala di Sulawesi Selatan yang juga masuk pula pos-pleistosen terdapat alat-alat serpih bilah dari alat-alat mikrolit yang berupa mata panah bersayap dan bergigi, serta serpih bilah bergigi. Alat tersebut dipergunakan untuk memburu hewan kecil.

Lukisan pada gua memberikan sedikit gambaran kepada kita corak kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa itu. Caranya ialah mereka membuat goresan-goresan pada dinding gua yang disempurnakan dengan memberi cat pewarna berwarna merah, hitam atau putih. Lukisan tersebut kadang-kadang menggambarkan pengalaman hidup mereka, jenis binatang yang diburu atau kadang-kadang hanya berupa cap tangan dibuat dengan merentangkan jari-jari tangan mereka. Lukisan orang naik perahu menggambarkan corak kehidupan nelayan, sedangkan lukisan orang membunuh binatang buruan dengan tombak yang ujungnya memakai mata panah menunjukkan tingkat kehidupan mereka yang masih pada taraf berburu.

Manusia pada masa itu yang tinggal di gua-gua agaknya sudah mulai berkelompok dan jumlah kelompok mereka disesuaikan dengan tingkat hidup pada masa berburu. Pada gua-gua kecil mereka hidup hanya dengan satu atau dua keluarga saja. Binatang buruannya pun hanya binatang kecil yang ditangkap dengan menggunakan tombak bermata panah. Pekerjaan ini dapat dikerjakan secara berkelompok maupun perseorangan.

Beberapa bukti tentang tingkat hidup masyarakat yang hidup di gua-gua telah ditemukan pada gua-gua di Jawa Timur (Sampung), Sulawesi Selatan (Toala) dan Nusa Tenggara Timur (Flores) serta Irian Jaya. Lukisan dinding pada gua Pata'E (Sulawesi Selatan) menggambarkan babi rusa yang terkena panah pada bagian jantungnya memberikan gambaran tentang tingkat berburu masa itu. Lukisan tentang orang naik perahu menggambarkan masa itu orang sudah menangkap ikan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Salah satu alat keperluan sehari-hari yang dibuat dari kayu atau bambu mungkin telah dibuat oleh mereka sebagai alat

bantu dari alat-alat dari batu. Alat dari kayu atau bambu dipergunakan untuk mengorek, mengikat benda bahkan untuk mengelupas kerang. Dari hasil penggalian sejauh ini tidak ditemukan alat atau sisa alat dari kayu (bambu) oleh karena jika alat itu pun ditinggalkan manusia pada satu situs permukiman akan hancur dimakan tanah dalam waktu singkat.

Tetapi di Thailand pada salah satu penggalian telah ditemukan sisa alat kayu (bambu) yang telah menjadi arang yang menunjukkan alat-alat untuk keperluan manusia sehari-hari. Pada masa mesolitik nampaknya sudah ada usaha manusia untuk menjinakkan binatang dan dijadikan binatang peliharaan. Temuan berupa gigi anjing pada gua Cakando merupakan indikasi adanya binatang yang telah dijinakkan. Diketahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari pun pada masa sekarang anjing dapat membantu manusia dalam berburu dan menjaga tempat tinggal.²¹

2.6 Kepercayaan

Lukisan pada dinding gua memberikan kepada kita aspek lain untuk diteliti selain aspek-aspek sosial ekonomi tapi juga aspek magis religius. Aspek magis religius bertalian erat dengan tradisi totem dan upacara-upacara tradisional. Cap-cap tangan latar belakang warna merah mungkin mempunyai makna magis sebagai tanda kekuasaan pelindung atau untuk mencegah roh jahat. Lukisan cap tangan dengan jari tidak lengkap juga mungkin sebagai pertanda berkabung.²²

Roder dan Gallis telah mengadakan penelitian khusus tentang lukisan pada gua-gua di Irian Jaya. Menurut penelitiannya terdapat pertanda bahwa lukisan di gua-gua di Irian Jaya terdapat petunjuk tentang upacara-upacara penghormatan terhadap arwah nenek moyang, upacara kesuburan, inisiasi, upacara untuk meminta hujan atau untuk memperingati kejadian-kejadian penting.²³

Lukisan binatang melata seperti kadal yang banyak ditemukan di Irian Jaya dan Seram adalah satu perkembangan baru

yang mungkin oleh mereka dimaksudkan sebagai lambang arwah nenek moyang. Tradisi berkembang terus hingga masa mengalit yakni pada batu-batu besar dilukiskan gambar binatang bersamaan dengan lukisan manusia yang maksudnya mungkin lambang arwah nenek moyang. Roh nenek moyang dilambangkan dalam bentuk binatang tertentu. Lukisan tentang arwah nenek moyang serta perlambangannya berkembang kemudian pada sarkofagus (peti kubur batu) dan gambar semacam ini banyak didapatkan pada sarkofagus di Warunga (Sulawesi Utara), Bali, Sumatra Timur, Jawa Timur dan lain-lain. Tingkat lebih lanjut dari masa berburu pada masa pra-sejarah ialah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam merupakan tingkat perkembangan sangat penting dalam tata kehidupan masyarakat pada kala pleistosen yang merupakan masa yang paling panjang dalam kehidupan manusia tetapi perkembangan tingkat hidupnya demikian lambat, maka memasuki masa bercocok tanam merupakan satu tingkat lanjut dalam peradaban manusia.

Masa ini merupakan masa penemuan baru bagi kehidupan manusia yakni mulainya manusia menguasai sumber-sumber alam. Berbagai tumbuh-tumbuhan untuk keperluan pokok sehari-hari mulai ditanam secara tetap. Beberapa jenis hewan sudah dijinakkan untuk dipelihara. Cara penguasaan hutan mulai dilaksanakan yakni dengan menebas hutan dan pohon untuk keperluan hidup baik untuk rumah tangga (kayu bakar, perumahan). Mereka mulai membuat rumah dalam ukuran kecil yang dengan sendirinya sudah mulai adanya indikasi hidup menetap dalam satu perkampungan.

Populasi penduduk mulai meningkat dan teknologi sudah ada pada tingkat yang lebih maju misalnya selain membuat benda untuk alat kerja mereka sudah juga membuat pakaian, membuat gerabah. Unsur kepercayaan dalam kehidupan masyarakat sudah mulai memegang peranan penting.

Agaknya manusia Indonesia yang tinggal di Indonesia bagian barat seperti Sumatra adalah termasuk ras Mongoloid. Hal ini terbukti dengan kerangka manusia dari Gua Cha (Malaysia Barat).²⁴ Pada masa bercocok tanam dengan adanya

peternakan jumlah penduduk sudah mulai bertambah besar. Kepadatan penduduk meningkat menjadi 2 orang per kilometer persegi,²⁵ Tingkat kematian sudah meningkat pada umur yang agak lanjut yakni rata-rata 35 tahun, dengan kematian terbanyak pada 20—40 tahun. Kematian kanak-kanak sudah berkurang walaupun sudah tentu lebih tinggi dari statistik sekarang. Gizi makanan juga meningkat karena sudah banyak mengandung unsur zat tepung, sedangkan sebelumnya hanya zat putih telur.²⁶ Daerah yang didiami di Indonesia sudah lebih luas dengan populasi terbesar di daerah yang lebih subur. Perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain sudah mulai berkurang. Terjadi hibridasi di daerah perbatasan. Teknologi sudah meningkat dengan pembuatan gerabah serta sudah mengasah alat-alat batu menjadi lebih sempurna.

Alat-alat batu yang paling menonjol pada masa ini adalah beliung persegi dari batu. Alat ini berbentuk persegi panjang serta berpenampang lintang persegi. Seluruh bagiannya sudah diupam (diasah), secara halus kecuali pada bagian pangkalnya yang dipakai untuk tangkai pengikat. Bagian yang tajam dibuat dengan cara mengasah bagian ujung permukaan bawah yang landai ke arah tepi permukaan atas. Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh tajam yang miring.²⁷ Walaupun demikian secara garis besar pengetahuan kita tentang masa bercocok tanam masih sangat terbatas dikarenakan data-data arkeologis belum terungkap secara lengkap. Ekskavasi telah dilaksanakan di Jawa dan di Sulawesi untuk menunjang data-data arkeologi masa bercocok tanam. Selain beliung persegi, pada masa bercocok tanam juga terdapat alat batu lain yakni kapak lonjong. Sebenarnya secara teknomorfologis (teknologi tentang bentuk) maupun stratigrafis (susunan lapisan tanah) kapak lonjong ada pada posisi yang lebih tua dari beliung persegi. Penelitian secara mendalam tentang umur serta stratigrafi kapak lonjong yang dilaksanakan oleh Tom Harrison di Niah Caves (Serawak) yang menunjukkan bahwa hasil penelitian C.14 kapak lonjong ada pada lapisan tanah berusia lebih 8.000 tahun.²⁸

Alat-alat Obsidian

Alat-alat ini khusus dibuat dari batu kecubung (obsidian) yang perkembangannya di Indonesia sangat terbatas pada daerah Jambi (dekat) dari Kerinci, dekat bekas danau Bandung (daerah Dago). Danau Leles (Cangkuang Garut). Minahasa, (Danau Tondano). Penyelidikan di tempat lain belum dilaksanakan secara intensif yang mungkin sekali alat semacam ini akan ditemukan pada beberapa tempat di Indonesia yang memiliki danau-danau bekas permukiman lama.

Alat sisa obsidian ditemukan di gua-gua Ulu Tiangko (Jambi), Rundung (Flores Barat). Di Sumatera alat obsidian ditemukan di Palembang dan Lampung.

Alat Pemukul Kulit Kayu

Alat ini dibuat dari batu dan ditemukan di Kalimantan (Ampah) serta di Sulawesi Selatan (Palumpung). Bentuknya persegi (panjangnya sekitar 20 cm) yang terdiri dari gagang dan bahagian pemukul. Pada masa bercocok tanam dikenal perhiasan berupa gelang dari batu, kerang serta manik-manik dari kaca.

2.7 Sosial Budaya

Ciri-ciri gotong-royong sudah ditunjukkan pada masyarakat yang ada pada tingkat hidup bercocok tanam. Gotong-royong merupakan suatu kewajiban bersama yang sangat diperlukan setiap anggota masyarakat. Dalam hal menebang hutan, menanam padi, membakar semak belukar, mendirikan rumah dan sebagainya diperlukan usaha saling tolong menolong dan bantu membantu, pembagian kerja pokok antara laki-laki dan wanita pada masa itu sudah ada. Pekerjaan berburu yang memerlukan tenaga kuat dilaksanakan oleh orang laki-laki, tetapi membuat gerabah dilaksanakan oleh wanita yang dibantu oleh anak-anak. Laki-laki menebang hutan dan membakar alang-alang kemudian wanita yang menyebarkan benih yang kelak ia pula yang menuainya. Lelaki membangun rumah dan wanita yang memelihara kebersihannya. Pada masa itu kepentingan bersama lebih di-

pentingkan dari kepentingan individu. Di antara kelompok masyarakat yang mempunyai kelebihan dan kepemimpinan terus dengan suara bulat dipilih menjadi kepala suku.

Pemujaan Arwah Nenek Moyang

Masyarakat bercocok tanam percaya bahwa tanah adalah sumber hidup mereka. Hal ini membangkitkan semangat mereka untuk memanfaatkan kegunaan dan penguasaan alam. Mereka merasa bahwa hidupnya sangat tergantung kepada alam. Karena sudah terbentuk masyarakat secara komunal mereka mulai berpikir tentang hidup sesudah mati. Mereka percaya bahwa roh manusia tidak bisa lenyap tetapi harus terus hidup di alam lain. Timbullah kemudian upacara ritual yang paling penting dalam kehidupan masyarakat yakni upacara penguburan atau upacara menghormati si mati. Cara penguburan yang ada yang dilaksanakan secara langsung (dikubur dalam tanah) atau tidak langsung. Si mati dibekali bermacam-macam benda karena anggapan yang sudah merupakan kepercayaan bahwa roh tetap hidup di alam lain hingga memerlukan bermacam-macam alat. Dalam pelaksanaan penguburan maka di samping mayat juga disertakan alat-alat seperti perhiasan, periuk, dengan maksud dalam perjalanan hidup roh tetap terjamin. Arwah tersebut kemudian "berkumpul di suatu tempat" hingga timbul kepercayaan berupa pemujaan kepada roh nenek moyang. Mereka yang masih hidup kemudian membuat tempat khusus untuk pemujaan kepada arwah nenek moyang. Timbullah kemudian batu-batu besar seperti menhir (batu berdiri) yang disediakan untuk sesajian pada arwah nenek moyang. Batu tersebut kemudian ada yang diukir yang melambangkan bentuk roh nenek moyang. Tahap inilah yang kemudian disebut tradisi megalit, yakni tradisi mendirikan bangunan megalit (*mega* = besar; *lithos* = batu). Bangunan megalit tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Penulisan tentang masa prasejarah yang mencakup kurun waktu yang sangat panjang yang terjadi di daerah Aceh sekarang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masa pra-sejarah di daerah Indonesia lainnya. Bukti-bukti tentang hasil budaya

masa pra-sejarah di daerah Aceh karena masih sangat sedikitnya penelitian arkeologi pra-sejarah masih sangat langka.

Penelitian paling mutakhir pun masih merupakan lanjutan penelitian terdahulu seperti halnya penelitian oleh T. Jacob pada tahun 1973 – 1974 di daerah Langsa merupakan pencocokan kembali hasil penelitian terdahulu. Situs-situs pra-sejarah selain yang sudah disebutkan pada masa sebelum perang belum dilaporkan. Sejauh ini dalam suatu survai kepurbakalaan pada tahun 1975 di daerah Pidie telah ditemukan beberapa indikasi adanya artefak yang menunjukkan tradisi megalit. Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Tenggara dan Selatan sangat besar sekali kemungkinannya memiliki situs-situs pra-sejarah yang perlu disurvei. Tahapan pertama pra-sejarah yakni masa paleolitik dari kala pleistosen di Indonesia hanya ada di Jawa (Pacitan). Tahap selanjutnya yakni dari masa mesolitik dari kala pleistosen terdapat di Aceh Timur dan Aceh Utara yang serangkai dengan temuan-temuan dari kurun waktu yang sama di Sampung (Jawa Timur) dan Toala (Sulawesi Selatan).

Tahapan masa bercocok tanam dan tradisi megalit sejauh ini hanya terdapat indikasi temuan artefak megalit di daerah Pidie dan Aceh Utara tapi sangat mungkin akan banyak ditemukan di pedalaman daerah Aceh Tengah, Selatan dan Tenggara.

Kekosongan-kekosongan bahan dari kurun pra-sejarah di Aceh adalah bersumber dari sangat sedikitnya data baru tentang masa ini. Babakan-babakan yang masih kosong yakni *kala pleistosen*, masa bercocok tanam (neolit) dan perundagian *Bronze/Iron Age* masih perlu dikaji lagi di masa datang.

CATATAN

- 1) Butzer K.W, *Environment and Archaeology : An Introduction to pleistocene Geography*, (Chicago : Aldine Publishing Company, 1971), hal. 28.
- 2) Soejono, *Sejarah Nasional Indonesia I*, (jakarta: Departemen P dan K, 1975). hal. 1.
- 3) Oakley K. R, *Framework for dating fosil Man*, (Chicago: Aldine Publishing Company, 1964), hal. 81 - 90.
- 4) W.A. Fairservis, *The origins of Oriental Civilization*, diterjemahkan oleh Anwar dengan judul : Asal-usul peradaban Timur, (Jakarta : P.T. Kinta, tanpa tahun), hal. 23 - 30.
- 5) R.W. van Bemmelen, *The Geology of Indonesia*, (The Hague: 1949), hal. 49.
- 6) H.R. van Heekeren, *The Stone Age of Indonesia*, Second Rev. Ed. Verhand, van het Ken. Inst. voor Taal, Land en Volkenkunde, 1972, hal. 5.
- 7) R.P. Soejono, *Ibid*, halaman 5.
- 8) *Ibid*, halaman 13; lihat juga T. Jacobo, Diagnosis Phitecanthropus, *Berita Ilmu Kedokteran Gajah Mada* 3, 1971, halaman 191 - 200.
- 9) Soejono, *op. cit*, halaman 19
- 10) *Ibid.*; halaman 74 selanjutnya periksa tabel pada halaman 75 - 76.
- 11) T. Jacob, *Studi tentang variasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta, 1973.
- 12) T. Jacob, *Some problems pertaining to the Racial History of the Indonesia Region*, Utrecht, 1967.
- 13) H.L. Jr. Movious, *The Lower Palaedithic Cultures of Southeren and Easteren Asia*, 1948.
- 14) R.P. Soejono, *op. cit.*, halaman 60.
- 15) H.R. Van. Heekeren. *op. cit*, halaman 79.

- 16) *Ibid*, halaman 82.
- 17) H.R. Van, Heekeren, *op. cit*, halaman 86.
- 18) Heekeren, *Ibid* halaman 87.
- 19) H.R. Van Heekeren, *op, cit.* halaman 89.
- 20) R.P. Soejono, *op. cit*, halaman 142
- 21) J. Hawkes. "History of Mankind, Cultural and Scientific Development" dalam *Prehistory*, 1965, vol. I Part, I halaman 299 - 210.
- 22) H.R. Van, Heekeren, "Rock Painting and Other Discoveries near Maros", laporan Tahunan Dinas Purbakala R.I. 1959 kl 1952, halaman 32 - 33.
23. R.P. Soejono, "Prehistori Irian Barat" *MISI*, 131 1963, halaman 7.
- 24) J.C. Trevor & D.R. Brothwell, "The human remains of mesolithic and neolithic date from Gua Cha", Kelantan, *FMJ*. 1962, 7. halaman 6 - 22.
- 25) J.S. Harrison, Weiner, Tanner, Barmicot, *Human Biology*, Oxford, 1964.
- 26) T. Jacob, Some pertaining , *op. cit.*, 1967.
- 27) R.P. Soejono, *op. cit*, halaman, 157.
- 28) Tom. Harison, *Prehistory man*, 1967, halaman 151 - 166.

BAB III ZAMAN KUNA (ABAD KE-1 (1-1500 M))

3.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan (Politik)

Letak geografis Daerah Istimewa Aceh sangat strategis, sehingga merupakan pintu gerbang sebelah barat kepulauan Indonesia dan karena letaknya di tepi Selat Malaka, maka daerah ini penting pula dilihat dari sudut lalu-lintas internasional. Sejak zaman neolitikum, Selat Malaka merupakan terusan penting dalam gerak migrasi bangsa di Asia, dalam gerak ekspansi kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia Selat Malaka adalah jalan penghubung utama antara dua pusat kebudayaan Cina dan India. Semestinyalah apabila wilayah sekitar Selat Malaka selalu mempunyai peranan penting sepanjang gerak sejarah Indonesia. Muncul dan berkembangnya negara-negara sekitar wilayah ini tak mungkin kita pisahkan dari letak geografisnya yang sangat penting itu.

Karena keadaan geografinya yang sangat penting itulah maka Daerah Istimewa Aceh sejak zaman permulaan terbentuknya jaring-jaring lalu-lintas internasional ($\pm$ abad ke-1 Masehi), agaknya sudah dikenal.¹ Berita tertua dari Dinasti Han (abad Ke-1 -- Ke-6 M) di mana di dalam tambo dinasti itu disebutkan negeri yang bernama Huang-Tche. Menurut isi catatan Cina tersebut

penduduk negeri itu sama dengan penduduk Hainan, hidup dari berdagang dan perampokan. Kaisar Wang-Mang dari Dinasti Han telah meminta kepada penguasa negeri ini untuk mengirim seekor badak. Tempat ini identik dengan Aceh baik berdasarkan hadiah maupun letaknya.² Dalam buku *Geographike Hypogesis* karangan Claudius Ptolomaeus, seorang ahli ilmu bumi, guru di Iskandariah, yang ditulis dalam tahun 65 M, menyebutkan satu-persatu nama-nama negeri yang terletak pada jalan perdagangan India Cina. Di antara negeri-negeri yang dicantumkan dalam buku itu disebutkan Barousai yang mungkin letaknya di Aceh dan identik dengan Barus sekarang.³ Disebutkan juga bahwa hasil utama negeri itu sejenis kapur yang hingga sekarang di negeri kita sendiri dikenal dengan nama kapur barus.

Berita tentang Poli kita jumpai dalam catatan Cina. Berita pertama tercantum dalam catatan Dinasti Loang (502 – 556), kemudian dari Dinasti Sui (581 – 617 M) dan berita terakhir mengenai negeri negeri ini berasal dari catatan Dinasti Tang (618 -- 906 M).⁴ Mengenai letak negeri ini belum ada kata sepakat para ahli tetapi ada para ahli yang condong untuk menempatkan negeri ini di Aceh seperti yang dikemukakan oleh Groeneveldt, Cowan dan ahli-ahli ilmu bumi Cina. Sejalan dengan pendapat terakhir ini De Casparis mengatakan bahwa nama Poli tidak kurang pentingnya dan menggemparkan. Ada yang menyamakannya dengan Bali Brunai (Kalimantan Utara) dan dengan Sumatera Utara. De Casparis mengatakan bahwa Poli dapat disamakan dengan puri, lengkapnya Dalam-Puri yang disebut Lamiri oleh orang-orang Arab dan Lumbiri oleh Marco Polo (Nama Daerah Aceh di kemudian hari). Selanjutnya De Casparis mengatakan bahwa jika penetapan ini benar (kemungkinan benar menurut pendapat De Casparis adalah besar: hanya ada satu berita Cina yang menyebut-nyebut sebuah pulau yang lebar dan panjangnya sama yang bertentangan dengan kesimpulan Cowan, tetapi ini mungkin kekeliruan berita Cina itu), kita mempunyai suatu pegangan yang penting.⁵

Sejauh mana Poli itu identik dengan Lamuri seperti yang dikemukakan oleh de Casparis, barang kali masih memerlukan

serangkaian penelitian yang sungguh-sungguh pada masa yang akan datang. Penelitian naskah-naskah yang mungkin masih tersisa dan belum dikenal oleh dunia ilmu pengetahuan yang harus dicari di daerah Aceh sendiri dan tempat-tempat lain mungkin akan banyak membantu pemecahan masalah tersebut. Begitu juga penelitian arkeologi baik terhadap peninggalan yang sudah dikenal atau belum maupun ekskavasi-ekskavasi di daerah ini akan memegang peranan penting untuk memecahkan teka-teki Poli yang sudah lama tak terjawab oleh para ahli. Sementara itu penelitian mengenai Lamuri yang banyak diberitakan oleh sumber-sumber dalam dan luar negeri, hingga saat ini belum memuaskan pula.

Dalam naskah-naskah Aceh sendiri seperti Hikayat Aceh disebutkan Kerajaan Lamuri yang dieja dengan l.m.ri. Antara m. dan r. tidak terdapat tanda vokal, sehingga jika kita menuruti cara mengeja di dalam naskah itu, maka tidak akan mungkin sama sekali bahwa nama itu akan dibaca Lumuri atau Lamiri.⁶ Di dalam naskah Negara kertagama dicantumkan nama Lamuri sebagai salah sebuah negeri yang takluk kepada Maharaja Majapahit.⁷ Di dalam buku Sejarah Melayu negeri ini disebut dengan nama Lamiri L. m.y.r.y. sebagai salah sebuah negeri yang di-Islamkan sesudah Samudera sebelum tiba di Pase.⁸

Berita tertua mengenai Lamiri berasal dari Ibnu Khordadbeh (844 -- 848), Sulaiman (955), Mas'udi (943) dan Buzurg bin Shahriar (955) semuanya penulis-penulis Arab. Mereka telah menyebut negeri ini dengan nama Ramni dan Lamuri, sebuah daerah yang menghasilkan kapur barus hasil bumi penting lainnya. Mas'udi menyebutkan pula bahwa Ramni takluk di bawah Maharaja Sriwijaya.⁹

Berita Cina yang paling tua berasal dari tahun 960, di mana di dalamnya sudah disebut nama Lanli, sebuah tempat yang dapat disinggahi oleh utusan-utusan Parsi yang kembali dari Cina sesudah berlayar 40 hari lamanya di sana mereka itu menanti musim teduh untuk seterusnya berlayar lagi ke negeri asal mereka.¹⁰ Ilamuri decam yang tercantum dalam prasati Tanjore

(1030) yang memuat laporan ekspedisi Rajendracola Dewa I, menyebutkan bahwa salah sebuah daerah yang ditaklukkan pada tahun 1025 itu merupakan daerah takluk Sriwijaya. Menurut N.J. Krom daerah ini dapat diidentikkan dengan Lamri.¹¹

Seterusnya Chau-Yu-Kwa dalam bukunya Chay Fan-chi yang terbit dalam tahun 1225 menyebutkan bahwa di antara jajahan-jajahan San-fo-ts'i (Sriwijaya) termasuk juga Lan-wu-li yang tak dapat diragukan tentulah Lamri.¹² Raja Lan-wu-li disebutkan belum beragama Islam, memiliki dua buah ruang penerima tamu di istananya. Jika ia bepergian ia diusung atau mengendarai seekor gajah. Jika dari negeri ini seorang bertolak di musim timur laut, maka ia akan tiba di Ceylon di dalam waktu 20 hari. Dalam tahun 1286 Lan-wu-li bersama-sama Su-wen-ta-la mengirim utusan ke negeri Cina dan berdiam di sana sambil menunggu berakhirnya hadir ekspedisi Kubilai Khan ke Jawa.¹³

Ketika Marco Polo pada tahun 1292 tiba di Jawa Minor (Sumatera) ia mendapatkan di sana delapan buah kerajaan di antaranya Lamri. Kerajaan ini katanya tunduk pada kaisar Cina dan mereka diwajibkan membayar upeti.¹⁴ Dalam tahun 1310 seorang penulis Parsi bernama Rashiduddin menyebut untuk pertama kalinya, bahwa tempat-tempat penting "di pulau Lumari yang besar itu", selain Peureulak dan Jawa (yang dimaksud Samudera) adalah Aru dan Tamiang.¹⁵ Fra Odorigo dari Pordenone yang singgah juga di Lamri (ia menyebutnya dengan Lamori) mengatakan bahwa negeri ini banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang yang datang dari negeri-negeri jauh dan dikatakannya pula bahwa Lamori sering berperang dengan Sumoltra (Samudera) yang terletak di bagian Selatan.¹⁶

Seperti sudah dijelaskan di atas, sejak tahun 1286 Lamri telah mengirim utusan-utusannya ke Cina. Di dalam buku tahunan Dinasti Ming dijelaskan pada tahun 1405 telah dikirim ke Lam-bu-li sebuah cap dan sebuah surat dan pada tahun 1411 negeri ini mengirimkan utusan ke Cina untuk membawa upeti. Perutusan tiba bersama dengan kunjungan perutusan Kelantan dan Cail, kemudian kembali bersama-sama ekspedisi Cheng-

ho.¹⁷ Tahun 1412 Raja Maha-ma-shah (Muhammad Syah) dari Lam-bu-li bersama-sama Samudera mengutus sebuah delegasi ke Cina untuk membawa upeti. Di antara utusan-utusan Lam-bu-li ke Cina yang secara teratur dikirim saban tahun terdapat nama Sha-che-han (Syah Johan?) putera Mu-ha-ma-sha.¹⁸ Sewaktu Cheng-ho dalam tahun 1430 membawa hadiah-hadiah ke seluruh negeri, Lamri pun memperoleh bahagiannya pula. Besar kemungkinan, bahwa pengiriman hadiah-hadiah ini bukanlah untuk pertama kali, karena lonceng besar yang bernama Cakra-donya yang dulunya tergantung di istana Sultan Aceh dan sekarang disimpan di Museum Aceh dengan tulisan Cina dan Arab padanya dibubuhi angka tahun 1409.¹⁹ Menurut dugaan Tichelman bahwa lonceng ini dibawa dari Pase ke Aceh sesudah kerajaan itu dapat ditaklukkan. Ali Mughayat Syah. Menurut anggapan Tichelman Aceh tidak mempunyai hubungan dengan Cina.²⁰ Kalau kita ingat bahwa sejak tahun 1286 Lamri telah mempunyai hubungan dengan Cina, bukanlah tidak mungkin lonceng tersebut bukan dari Pase, tapi dari Lamri.

Kemudian dapatlah disimpulkan di sini bahwa dalam kata Rami, Ramni dan Lamuri yang disebut-sebut oleh penulis-penulis Arab dan Parsi, Ila-muridecan yang disebut dalam prasasti Tanjore, Lan-li, Lan-bu-li, Lan-wu-li dan Nan-poli yang dicatat oleh penulis-penulis Cina, Lambri dan Lamori yang berasal dari berita-berita Eropa dan Lamiri yang tertera dalam naskah sejarah Melayu dapat diserupakan dengan Lamri dalam berita yang berasal dari Aceh sendiri sebagaimana tersebut dalam Hikayat Aceh. Yang menjadi masalah sekarang di manakah letak lokasi kerajaan itu yang tepat.

Untuk itu marilah kita ikuti apa yang dikemukakan oleh T. Iskandar dalam bukunya "*De Hikayat Aceh*".²¹ Mula-mula adalah Valentijn (1725) yang mengatakan di dalam karangannya yang berjudul "*Beschrijvinge van het eiland Sumatera*" bahwa Lamri tidak lain dari Jambi. Pendapat yang serupa dikemukakan pula oleh Werndly dan Marsden (1725 dan 1818). Sebaliknya Yule mengatakan bahwa Lamri lain daripada tempat pertama di Sumatera yang disinggahi pelaut-pelaut Arab dan India. Tempat

tersebut tentu ujung utara pulau Sumatera yaitu daerah Aceh atau lebih tepat Aceh Besar sekarang.

Menurut catatan yang tercantum dalam buku *Ying-Yai-Shenglan* oleh Ma-Huan disebutkan bahwa Lamri terletak tiga hari berlayar dari Samudera pada waktu angin baik. Negeri ini bersebelahan pada sisi timur dengan Litai, bahagian utara dan barat berbatas dengan laut yang dinamakan juga Laut Lamri (Lautan Hindia) dan ke sebelah selatan terbatas dengan pegunungan. Berdasarkan berita Cina ini Groenevelt mengambil kesimpulan pula bahwa letak Lamri mestilah di Sumatera bahagian utara, tepatnya di Aceh Besar. Berita Cina ini sendiri mengatakan pula Lamri terletak di tepi laut.²² Cowan, de Casparis dan T. Iskandar turut memperkuat pendapat-pendapat sebelumnya, bahwa Lamri mestilah terletak di Aceh, tepatnya di Aceh Besar sekarang.

Kalau kita dapat menetapkan pendapat bahwa Lamri sebagai sebuah kerajaan terletak di Aceh Besar, maka timbul pula pertanyaan di mana letak pusat kerajaan itu dahulunya?. Penelitian arkeologi yang masih terlalu sedikit mengenai Lamri tidak banyak membantu pemecahan masalah ini. Walaupun demikian usaha untuk memberi jawaban tersebut di atas telah dilakukan oleh beberapa orang peneliti. M.J.C. Lucardie di dalam karangannya "Meveilles de L'indie", penerbitan van der Lith (1836) menyebutkan, bahwa Lamreh yang terletak dekat Tungkop besar kemungkinan adalah peninggalan dari kerajaan Lamri.²³ Pendapat ini kemudian diambil oleh Cordier di dalam karangannya yang berjudul "*Les Voyages en Asie aux XIV e siècle du Biennhcureux Frere Ordoric de Pardenone*" (1891) dan kemudian pula di dalam karangannya mengenai Marco Polo dan "*Cathay and the Way Thither II*" oleh Yule.²⁴ Akan tetapi semua penulis itu tidak ada yang membedakan penggunaan nama Aceh, adakah sesudah Lamri lenyap dari panggung sejarah maka muncul kerajaan Aceh sebagai penggantinya.

Berita yang ditulis oleh Thome Pires di dalam karangannya mengenai pulau Sumatera menyebutkan bahwa di pantai utara Daerah Aceh sekarang terdapat enam *reinos* dan dua *terras*,

yaitu *Reino de Achey e Lambry, terrade Biar, reino de Pedir, terre de Aeilabu, reino de Lide, reino de Pirada, reino de Pasee*.²⁶ Nama-nama tersebut dengan mudah dapat dikenal karena masih dipakai sampai sekarang, yaitu Aceh, Lamri, Biheue, Pidie, le Leubeue, Peudada dan Pasee. Hanya Lide yang tidak kita kenal menurut Tome Pires, Lamri terletak di utara Aceh dan Biheue. Di dalam naskah "Hikayat Aceh" disebut teluk Lamri dan di dalam buku Ying-Yai-Sheng-Lan (1416) disebut Laut Lamri yang membuktikan bahwa Lamri ini terletak di tepi pantai/teluk. T. Iskandar mengatakan bahwa Lamri terletak dekat Krueng Raya sekarang yang teluknya sekarang dinamakan dengan nama yang sama. Desa Lamreh pun terletak tiada berapa jauh dari Krueng Raya. Bukti-bukti yang dikemukakan oleh T. Iskandar antara lain ialah sisa-sisa bangunan peninggalan zaman dahulu yang terdapat di sekitar daerah ini yang diduga berasal dari zaman Lamri. Kira-kira 500 meter dari Krueng Raya terdapat sebuah runtuh bangunan dan kira-kira enam km dari tempat tersebut terdapat pula bangunan yang sampai sekarang dikenal dengan nama Benteng Indrapatra. Tidak kurang enam buah runtuh bangunan kuno kita jumpai di sekitar tempat tersebut yang sampai sekarang belum pernah dilakukan penelitian. Ada yang mengatakan bahwa di antara runtuh bangunan itu ada yang dibangun oleh Portugis sebagai benteng, tapi hal ini tidak mungkin, karena tidak ada satu berita pun dari pihak Portugis atau Aceh yang menyebutkan tentang adanya garnizun-garnizun Portugis di Aceh Besar.²⁷

Berita-berita Cina yang mengatakan bahwa penduduk Nanwu-li sebagian berdiam di bukit-bukit dan jumlah mereka sedikit, menunjukkan bahwa Lamri tidaklah terletak di lembah Aceh, tetapi terletak pada sejalar pantai kecil yaitu di daerah Krueng Raya. Meskipun pusat kerajaan terletak di jalur yang sempit, tapi sebagai sebuah kerajaan daerahnya meluas sampai ke sebagian lembah Aceh. Hal ini dikatakan juga oleh Tome Pires, bahwa kerajaan Lamri daerahnya meluas jauh ke pedalaman. Meskipun Krueng Raya sesudah abad ke-18 menjadi sepi hal ini adalah lumrah. Bukankah di bekas kerajaan Samudera-Pase

dahulu, sekarang ini pun tak lebih dari sebuah desa kecil yang tak berarti.²⁸

Pada akhir abad ke-15 pusat Kerajaan Lamri dipindahkan ke Makota Alam (sekarang Kuta Alam) yang terletak pada sisi utara Krueng Aceh di Lembah Aceh. Pemindahan ini disebabkan karena adanya serangan dari Pidie dan pendangkalan muara sungai yang mengalir melalui pusat Kerajaan Lamri sehingga tidak begitu baik lagi untuk kepentingan pelayaran. Sejak itu Lamri lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makota Alam.²⁹

Kalau kita ikuti uraian yang ada di dalam buku *Bustanus Salatin* yang disusun oleh Nuruddin Ar Raniri, maka dalam Pelayaran urutan raja-raja Aceh yang tercantum dalam buku tersebut dimulai dari Sultan Ali Mughayat Syah. Sebab itulah sebahagian ahli berpendapat bahwa kerajaan Aceh dimulai sejak raja tersebut memerintah atau lebih kurang pada tahun 1516.³⁰ Pendapat lain mengemukakan bahwa nama Aceh itu sudah tua sekali, walaupun tidak sama tuanya dengan Lamri, tetapi setidaknya kerajaan Aceh telah tumbuh dan berkembang berbarengan. Raja-raja yang pertama di Aceh berkedudukan di *Kandang Aceh* (tidak begitu jauh dari kota Banda Aceh sekarang). Di dalam Hikayat Aceh disebutkan bahwa Sultan Mahmud Syah telah memindahkan istananya ke Daruddunia sesudah memerintah di Kandang Aceh selama 43 tahun. Aceh belum dikenal sebelum tahun 1500 oleh orang-orang asing, karena ia terletak lebih dari satu mil ke pedalaman sehingga tidak banyak disinggahi oleh orang-orang asing yang melakukan perjalanan/pelayaran antara India dan Cina. Sebuah catatan Aceh yang dipelajari oleh Hoesein Djajadiningrat mengatakan bahwa Sultan Johan Syah yang memerintah pada tahun 601 H. (1205 M) dan berkedudukan di Kandang Aceh. Sebuah karangan yang diterbitkan di Konstantinopel berjudul *Djawaib*, menjelaskan bahwa sultan Aceh yang pertama yang beragama Islam adalah Gazi Djohansyah yang mulai memangku jabatannya pada 19 Januari 1215.³¹ Jadi kalau kita ikuti pendapat yang terakhir ini jelaslah bahwa Kerajaan Lamuri dan Aceh telah tumbuh dan berkembang berbarengan sampai penghujung abad ke-15.

Seperti sudah dijelaskan di atas Lamri sesudah pusat kerajannya dipindahkan, lebih dikenal dengan nama Makota Alam, sedangkan Aceh sesudah pusat kerajaannya dipindahkan ke Daruddunia, dipindahkan lagi ke Darul Kamal (lebih kurang sepuluh km dari pantai). Sebab-sebab pemindahan itu tidak diketahui. Sejak itu kerajaan Aceh dikenal dengan nama kerajaan Darul Kalam atau Aceh Darul Kamal.³² Dengan demikian pada penghujung abad ke-15 di lembah Aceh terdapat dua buah kerajaan, yaitu Makota Alam dan kerajaan Darul Kamal yang daerahnya masing-masing dipisahkan oleh Krueng Aceh (sungai Aceh). Kedua belah pihak tak pernah dapat hidup rukun, dan selalu bermusuhan. Peperangan sering terjadi tapi tak satu pun di antaranya berhasil menghancurkan lawannya walaupun kerajaan Makota Alam memperkuat persenjataannya dengan mendatangkan meriam dari luar negeri melalui teluk Lamri. Pertentangan kedua kerajaan itu berakhir setelah Makota Alam yang pada waktu itu diperintah oleh Sultan Saymsu Syah putera Munawar Syah melakukan suatu siasat yang licik. Di dalam Hikayat Aceh diceritakan bahwa Syamsu Syah pura-pura mengakhiri permusuhan yang berlarut-larut itu dengan cara menjodohkan puteranya Ali Muhayat Syah dengan putri kerajaan Darul Kamal. Peminangan ini dapat diterima oleh Sultan Muzaffar Syah putera Inayat Syah yang pada waktu itu memerintah di Darul Kamal. Dalam arakan mengantarkan mas kawin ke Darul Kamal, maka di dalam arak-arakan itu disembunyikan senjata-senjata alat perang. Sesampainya di Darul Kamal pasukan Makota Alam mengadakan serangan tiba-tiba terhadap Darul Kamal. Banyak pembesar-pembesar Darul Kamal dan Sultan Muzaffar Syah sendiri terbunuh. Maka sejak peristiwa itu Sultan Syamsu Syah dari Makota Alam memerintah kedua kerajaan itu. Putera Inayat Syah yang bernama Alauddin Riayat Syah yang pada waktu peristiwa di atas terjadi berada di daerah Daya, tidak kembali lagi ke Darul Kamal dan kemudian mendirikan kerajaan Daya, pada tahun 1516 Ali Mughayat Syah dinobatkan menjadi raja, menggantikan ayahnya Sultan Syamsu Syah.³³ Pusat kerajaan dipindahkan lagi ke Daruddunia (Banda Aceh seka-

rang) dan sejak itu kedua kerajaan yang sudah dipersatukan itu diberi nama kerajaan Aceh Darussalam dengan pusat kerajaannya disebutkan juga dengan nama Bandar Aceh Darussalam.

Selain kerajaan-kerajaan tersebut di atas, di daerah yang sekarang bernama Daerah Istimewa Aceh dalam kurun zaman kuno itu masih kita jumpai beberapa kerajaan lagi, dalam urutan nama-nama negeri yang takluk kepada Majapahit yang tercantum dalam buku Negara Kertagama (1365) di antaranya disebutkan Tamiang, Perlak, Samudera, Lamuri dan Barat, yang letaknya di Daerah Istimewa Aceh sekarang.³⁴ Di dalam catatan Cina (1416 dan 1436) disebutkan negeri yang bernama Nakur dan Litai.³⁵ Tamiang terletak di Aceh Timur yang sampai sekarang masih kita jumpai nama tempat dengan nama yang sama dan sebuah kecamatan masih terus bernama Mojopahit (Manyakpahit). Nama yang terakhir ini mengingatkan kita akan adanya suatu hubungan dengan masa lampau dan cerita rakyat mengenai ekspedisi Mojopahit terus pula hidup di tengah rakyat di sana. Barat terletak di sebelah barat Daerah Istimewa Aceh yang pada pertengahan abad ke-15 dikenal dengan kerajaan Daya.³⁶

Nakur seperti diberitahukan dalam catatan Cina terletak bersisian dengan Samudera pada sisi sebelah timur dan Litai terletak di sebelah barat Nakur. Lokasinya yang tepat barangkali terletak antara Kabupaten Aceh Utara dan Pidie sekarang. Bahasa, adat istiadat dan pakaian penduduk di kedua negeri ini dikatakan sama dengan Lamri dan Samudera.

Perlak terletak di Aceh Timur dan sampai sekarang lokasi bekas kerajaan tersebut masih tetap bernama Peureulak. Dalam perjalanannya kembali ke Venesia dalam tahun 1292 Marco Polo setelah bekerja pada Kubilai Khan di Cina, singgah di Perlak. Menurut Marco Polo penduduk Perlak ketika itu telah di Islamkan oleh pedagang-pedagang yang diberikan sebutan olehnya kaum *Saracen*. Menurut pemberitaannya wilayah-wilayah pangeran di sekitar Perlak didiami oleh penyembah berhala yang belum beradab.³⁷ Di Pelabuhan Perlak waktu itu banyak ber-

diam pedagang-pedagang Islam, dari berbagai negeri misalnya Parsi, Arab dan India,³⁸ Perlak pada waktu itu sudah merupakan pelabuhan utama untuk ekspor lada di Sumatera bahagian utara. Oleh karena ekspor lada mendatangkan keuntungan yang banyak, maka pedagang-pedagang asing dari Mesir, Parsi, Gujarat yang datang di pelabuhan Perlak dan kemudian menetap di situ ingin menguasai seluruhnya hasil lada yang sejak semula dikuasai oleh raja Perlak. Salah seorang pedagang Arab berhasil kawin dengan Puteri Marah Perlak. Dari perkawinan itu lahirlah Said Abdul Aziz. Dengan bantuan dan sokongan para pedagang-asing yang menganut agama Islam, Said Abdul Aziz berhasil merebut kekuasaan raja Perlak dan kemudian mendirikan kesultanan Perlak. Said Abdul Aziz dinobatkan menjadi Sultan Perlak dengan gelar Sultan Alaidin Syah.³⁹ Peranan Perlak kemudian makin berkurang sesudah kerajaan Samudera berkembang dengan pesat.

Berita tertua tentang kerajaan Samudera kita jumpai dalam catatan Cina yang menyebutkan bahwa pada tahun 1286 Law-wu-li (Lamri) dan Suwentala (Samudera) bersama-sama telah mengirinkan utusan ke negeri Cina.⁴⁰ Marco Polo yang pada tahun 1292 tiba di Jawa Minor (Samudera) di sana didapatinnya delapan buah kerajaan di antaranya Ferleo, Basma, Samara, Bagroian, Lambri dan Jansur.⁴¹

Bila kerajaan Samudera didirikan? Dari awal dinasti Yuan (1280 -- 1367) kita mengetahui bahwa Malikussalah sudah sejak tahun 1282 yakni sepuluh tahun sebelum Marco Polo mengunjungi Samara telah mengirinkan utusan ke Quilon, yang terletak di pantai barat India dan bertemu dengan duta-duta negeri Cina.⁴² Kalau berita ini kita anggap benar, maka dapat diketahui bahwa Samudera telah ada sekurang-kurangnya pada tahun 1282. Hoesien Djadiningrat mengatakan bahwa kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1270 dan 1275. Di Malaya pun ada suatu riwayat bahwa raja Samudera yang pertama itu seorang penyembah berhala yang telah masuk Islam antara tahun 669 dan 675 H. (1270 dan 1275) dan bergelar Malik Al Salih⁴³ Makam raja Samudera yang pertama itu ditemukan di Kampung Bringen,

kecamatan Samudera, kabupaten Aceh Utara. Moquette berhasil membaca nama-nama Sultan Malik al Salih yang wafat pada tahun 696 H. (1297) dan puteranya yang bernama Sultan Muhammad Malik Al Zahir yang wafat pada tahun 726 H. (1326). Berdasarkan perbandingan cerita sejarah yang terdapat dalam Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu dan berita-berita asing, J.P. Moquette sampai pada kesimpulan bahwa Sultan Malik Al Salih itu merupakan sultan pertama atau pendiri kerajaan Samudera. Tidak berbeda dengan pendapat Hoesein Djajadiningrat, Moquette mengatakan bahwa kerajaan Samudera didirikan antara tahun 1270 dan 1275 bersamaan dengan masuknya agama Islam ke negeri ini.⁴⁴ Dengan demikian jelaslah bahwa Samara yang dikunjungi oleh Marco Polo pada tahun 1292 itu bukanlah Samudera oleh karena menurut Marko Polo di Samara hanya ada orang-orang kafir. Dr. H.K.J. Cowan berdasarkan keberatan geografis dan fonetis tertentu menyangsikan bahwa Basman yang dikunjungi Marco Polo adalah Pasei dan Samara adalah Samudera seperti yang sampai kini masih juga menjadi keyakinan orang dan ia memberi sugesti bahwa Basman adalah Peusangan dan Samara adalah Sama (r) langa. Apa yang dikemukakan oleh Dr. Cowan ini jelas lebih dapat diterima.⁴⁵

Oleh karena Samudera sering juga disebut Pasei atau kadang-kadang digabungkan menjadi Samudera Pasei, maka kapankah didirikan kerajaan Pasei tidak menjadi persoalan andaikata Samudera itu sama dengan Pasei, tetapi di dalam *Hikayat Raja-Raja Pasei* jelas disebutkan bahwa Samudera tidaklah sama dengan Pasei, walaupun kedua negeri itu didirikan oleh Malikussaleh. Di dalam *Hikayat Raja-Raja Pasei* dikatakan bahwa Pasei sengaja didirikan oleh Sultan Malikussaleh untuk puteranya, Malikul Zahir, yang lahir dari perkawinannya dengan Puteri Ganggang dari Perlak. Sultan Malikussaleh menamakan negeri itu Pasei menurut nama anjing perburuan yang disayanginya yang mati di tempat itu setelah istana selesai dibangun. Sultan Malikul Zahir memerintah di Pasei dan Malikussaleh tetap di Samudera Darussalam. G.P. Rouffer mengemukakan bahwa Pasei mula-mula terletak di sebelah kanan Sungai Pasei sedang-

kan Samudera di sebelah kirinya, tetapi lama-kelamaan Samudera dan Pasei ini menjadi satu dan disebut Samudera Pasei. Dewasa ini yang disebut dengan Pasei adalah daerah antara sungai Peusangan dengan sungai Jambo Ae.⁴⁶

Tentang asal usul nama Samudera di dalam Hikayat Raja-Raja Pasei diceritakan bahwa Meurah Silu yaitu nama Sultan Malik Al Salih sebelum memeluk agama Islam pergi berburu dan membawa seekor anjing bernama si Pasei. Anjing itu menjalak setelah melihat seekor semut yang besar seperti kucing. Oleh Meurah Silu ditangkapnya semut itu lalu dimakannya dan di tempat itu dibuatnyalah istana dan dinamainya negeri itu Samudera, artinya semut yang besar.⁴⁷ Dari nama samudera inilah kepulauan Sumatera memperoleh namanya yang dipakai hingga sekarang ini. Berbagai pengunjung yang pernah menyinggahi pulau Sumatera atau kerajaan Samudera baik dari Arab, Persia, Eropa dan lain-lain mengucapkan dengan sebutan-sebutan yang tidak jauh berbeda dari nama asalnya antara lain: *Samo-terra, Samotra, Syamatra, Zamatra, Zamara, Sumatora, Somatra, Samatra, dan yang terus berlaku sekarang ialah Sumatera*.⁴⁸ Odorico de Perdenone yang pernah mengunjungi negeri ini menamakan *Symoltra* dan dalam berita Cina yang tertua dinamakan *Su-wen-ta-la*.

Bagaimana perkembangan Kerajaan Samudera sesudah Malikussaleh dan Malikul Zahir yang memerintah di Pasei hal ini dapat kita ketahui dari catatan yang dibuat oleh Ibnu Battutah yang mengunjungi negeri ini pada tahun 1345 dan berdiam di sini selama 15 hari. Dikatakan bahwa raja yang memerintah waktu itu ialah Malikul Zahir yang menurut Hoesein Djajadiningrat adalah cucu dari pendiri kerajaan Samudera,⁴⁹ Sultan ini jelas bukanlah Malikul Zahir putera Malikussaleh, karena sultan tersebut sudah meninggal pada tahun 1326, tapi sultan Samudera yang lain yang memakai gelar yang sama. Ibnu Battutah mengatakan juga bahwa sultan ini beberapa kali menyerang orang kafir dan memperluas daerahnya ke pedalaman.

Selanjutnya Ibnu Battutah meriwayatkan tentang kesalahan, kerendahan hati dan semangat keagamaan yang tinggi dari sul-

tan tersebut. Upacara perkawinan dari putera sultan ini yang dihadiri juga oleh Ibnu Battutah memberi kesan kebesaran dan kemegahan luar biasa di istana Samudera. Kota Samudera pada waktu itu adalah kota besar dan indah yang dikelilingi oleh tembok-tembok kayu dan menara-menara dari kayu.⁵⁰

Samudera dalam Abad ke-15 dapatlah dikatakan telah berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah kerajaan yang penting di Selat Malaka dan memegang hegemoni di selat tersebut. Dalam Hikayat Raja-raja Pasei dikatakan bahwa kerajaan Siam berusaha menjadikan Pasei sebagai wilayah kerajaannya, tapi tak berhasil. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Lamri umpamanya tidaklah selalu baik. Hal ini diceritakan juga oleh Odorico de Pardenone, bahwa antara Lamri sering berperang dengan Sumoltra (Samudera).

Di dalam Negara kertagama seperti sudah dijelaskan Samudera termasuk dalam daftar wilayah-wilayah yang tunduk kepada Mojopahit. Tantangan penyerangan Mojopahit itu ke Pasei tidak dijumpai sumber lain yang tertulis selain Negara kertagama. Menurut T. Ibrahim Alfian ada keterangan-keterangan yang barangkali dapat digunakan untuk memperkuat pendirian bahwa Mojopahit memang pernah menyerang ke Pasei. Di dekat Samudera ada sebuah anak sungai yang mengalir ke sungai Pasei. Anak sungai ini oleh rakyat di sana disebut *Krung* Jawa atau sungai Jawa dan menurut mereka dinamai demikian oleh karena di sanalah dimakamkan Laskar Jawa yang tewas dalam pertempuran dengan Pasei. Di samping itu di pantai Aceh Timur terdapat sebuah tempat yang sampai sekarang ini dinamakan Mojopahit ini berasal dari nama kerajaan Mojopahit dahulu dan tempat ini barangkali digunakan untuk sementara sebagai basis pertahanan dalam menyusun strategi melawan Samudera.⁵¹

Sementara itu di desa Minje Tujoh Matangkuli, Aceh Utara ditemukan sebuah makam. Tulisan yang termuat pada nisan tersebut menurut Dr. F.D.K. Bosch menyerupai tulisan corak Jawa Kuno akhir di Jawa Timur (?). Meskipun bunyi kalimat-kalimat yang termuat pada nisan bagian kaki sukar dibaca, na-

mun kiranya nisan bagian kepala yang bertulisan huruf Melayu Arab dapat dibaca oleh Dr. W.F. Stutterheim.⁵² Prasasti di makam tersebut ditulis dalam bentuk sya'ir yang kira-kira berbunyi :

*Hijrat nabi meungstapa yang parasida,
tujuh ratus asta puluh sa warsa,
haji catur dan dasa wara sukra,
raja iman warda rahmatullah*

*Gutra baru basa mpu hak kadah pase ma,
taruk tasik tanah samuha,
ilahi ya rabbi tuhan samula,
taruh dalam swarga tuhan tetuha.*

Maksud Sya'ir tersebut kira-kira: Yang mangkat pada hari Jum'at 14 Zulhijjah, tahun hijrah nabi besar 781, raja yang beriman Warda rahmatullah, keturunan Barubasa (Barygaza) yang menguasai kedah dan Pasei meluas ke segala laut dan darat.⁵³

Berdasarkan bunyi prasasti Minje Tujoh ini Stutterheim berkesimpulan bahwa Pasei dan Kedah pada masa itu merupakan satu kesatuan. Yang dimaksud di situ ialah Werda Rahmatullah, meninggal 14 Zulhijjah 781 H. (1380 M.) hari Jum'at. Di samping itu amat menarik pula bahwa nisan tersebut memberi bukti tentang sya'ir bahasa Indonesia kuno campur bahasa Sangskerta dan Arab.⁵⁴

Menjelang berakhirnya abad ke-15 peranan Mojopahit di Nusantara sudah jauh berkurang, apa-lagi terhadap daerah yang jauh letaknya dari pusat kerajaan tersebut seperti Samudera-Pasei dan lain-lain. Sementara itu pengaruh Cina terhadap negeri-negeri di Asia Tenggara terutama daerah-daerah yang terletak di tepi lalu-lintas perdagangan mulai berkembang lagi. Seperti sudah diketahui bahwa perhatian Cina terhadap negeri-negeri luar sangat bergantung kepada keadaan dalam negerinya sendiri. Akibat kegagalan Dinasti Mogol dalam pengiriman ekspedisi-ekspedisi ke Jawa dan Jepang mengakibatkan lumpuhnya armada Laut Cina dan peranannya di lautan sangat berkurang. Ke-

adaan ini baru pulih kembali sesudah Dinasti Ming menguasai Cina (1368 -- 1644). Dinasti Ming berusaha membangun kembali armada laut Cina dan perhatian terhadap daerah-daerah di selatan dimulai lagi. Hal ini disebabkan pula pada permulaan Dinasti Ming berkuasa, perdagangan di daratan Asia sangat terganggu oleh negara tetangga Cina sendiri yaitu Turkestan yang berhasil merampas Tamerlane tempat yang penting sekali pada jalur lalu-lintas darat di Asia. Kegiatan Cina di bahagian selatan Asia ini dapat kita lihat pada pengiriman ekspedisi-ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Cheng-Ho pada permulaan abad ke-15.

Samudera-Pasei yang sudah berdiri lebih dari satu abad menyadari akan kedudukannya sebagai negara yang memiliki kemampuan terbatas tapi mempunyai peranan penting pada jalur-jalur lalu-lintas perdagangan di Selat Malaka. Pengalamannya menghadapi kerajaan-kerajaan tetangga, serangan kerajaan Siam dan Mojopahit memberi pelajaran, bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup Samudera-Pasei haruslah diusahakan suatu hubungan yang baik dengan negara-negara yang kuat. Oleh karena itulah kita lihat bahwa pada tahun 1383 Samudera mengirimkan utusan lagi ke negeri Cina.⁵⁵ Sejak itu Samudera Pasei tak keberatan menerima perlindungan Cina. Ekspedisi Cheng-Ho selama tumbuh kali ke selatan sampai ke Arab dan Afrika Timur antara tahun 1405 sampai 1433 telah menambah eratnya hubungan kerja sama Samudera-Pasei dengan Cina. Beberapa kali pemberontakan dan kerusakan dalam negeri Samudera-Pasei menurut catatan Cina telah berhasil diatasi berkat bantuan Cheng-Ho.⁵⁶

Lebih kurang pada tahun 1403 Parameswara membangun Malaka dan menerima juga perlindungan dari Cina untuk menghindari ekspansi Siam dan negeri-negeri tetangga lainnya. Malaka cepat berkembang dan menggantikan peranan kerajaan Samudera-Pasei. Perkawinan putri Samudera-Pasei dengan sultan Malaka menyebabkan Malaka menjadi kerajaan Islam dan sultannya memeluk agama Islam. Antara Samudera-Pasei dan Malaka tidak terjadi persaingan yang merugikan kedua belah

pihak disebabkan bukan saja karena adanya hubungan kekeluargaan, tetapi juga disebabkan karena Samudera-Pasei yang tidak memiliki armada dengan sangat bergantung kepada Malaka. Sebaliknya Malaka sangat membutuhkan suplai bahan makanan dari Samudera-Pasei. Dengan kedatangan Portugis peranan negeri ini sebagai kerajaan Islam, dan sebagai kerajaan yang menguasai jalan perdagangan di Selat Malaka sudah berakhir. Malaka diduduki Portugis pada tahun 1511 dan Samudera-Pasei tahun 1521. Pada tahun 1524/1526 Samudera-Pasei diduduki oleh kerajaan Aceh Darussalam dan selanjutnya menjadi bagian dari kerajaan tersebut.

Demikianlah proses pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Daerah Istimewa Aceh dalam kurun zaman kuno. Pada kurun zaman tersebut belum terjadi proses penyatuan tetapi gejala-gejala ke arah itu mulai tampak. Proses penyatuan mulai terjadi secara cepat dan nyata pada abad ke-15, waktu lahir dan berkembangnya Kerajaan Aceh Darussalam.

Bagaimana bentuk teritorial dan pemerintahan serta struktur birokrasi dari masing-masing kerajaan itu sukar kita rekonstruksikan secara lengkap dan tepat, karena sedikitnya sumber-sumber sejarah yang dapat kita pergunakan untuk itu. Bentuk teritorial *gampong* (desa) sebagai bentuk teritorial yang sudah tua sekali.

Bentuk teritorial ini tentu juga sudah ada pada masa itu. Sesudah *gampong*, maka wilayah teritorial yang lebih luas adalah kerajaan. Bentuk kerajaan baru dikenal sesudah adanya pengaruh dari luar yaitu India, Cina dan Arab. Sebelum munculnya wilayah yang dinamakan kerajaan, barangkali sudah ada juga suatu bentuk teritorial yang lebih luas yang dikepalai oleh *meurah-meurah* yang menguasai beberapa *gampong*. Hal ini dapat kita ketahui dari Hikayat Raja-raja Pasei di mana disebutkan bahwa Malikussaleh sebelum menjadi Sultan Kerajaan Samudera dan memeluk agama Islam ia adalah seorang *Meurah* dengan gelar lengkap Meurah Silu. Orang tuanya, yang cacal bakalnya juga memakai gelar Meurah. Bentuk-bentuk teritorial lain yang

kita jumpai pada masa kerajaan Aceh Darussalam, di kemudian hari seperti bentuk teritorial *Mukim*, *Nanggroe* dan *Sagi* barangkali belum dikenal. Bentuk teritorial *Mukim* dan *Sagi* baru ada pada masa kerajaan Aceh Darussalam yaitu pada abad ke-16 dan 17. Bentuk *Nanggroe* adalah bentuk yang muncul dari proses perkembangan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh meuroh-meuroh yang sebagian menjadi kerajaan dan sebagian lagi menjadi bagian dari suatu kerajaan, tetapi apakah nama bentuk wilayah yang demikian pada masa itu tidak diketahui secara pasti ?

Di dalam berita Cina mengenai Poli disebutkan bahwa kerajaan itu terdiri atas 60 desa.⁵⁸ Jadi pada masa itu sebuah wilayah yang besar dibagi atas wilayah yang kecil yang dapat disamakan dengan desa. Apa istilah untuk nama bentuk teritorial yang serupa itu tidak disebutkan dalam berita Cina itu. Bagaimana Struktur desa pada masa itu tidak jelas, hal ini tentu sangat bergantung pada perkembangan sejarahnya. Desa sebagai pendukung hukum asli tentu mempunyai ciri yang sama untuk seluruh Indonesia. Sebuah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang di daerah Istimewa Aceh hingga sekarang ini disebut *Geucik* atau *Keucik*. Di dalam Hikayat Raja-raja Pasei dikatakan bahwa kepala desa disebut dengan istilah *pendikar* atau *penghulu*.⁵⁹ Di beberapa tempat di daerah Tamiang, dan di daerah Sumatra Timur istilah *penghulu* untuk sebutan kepala Desa masih terus dipakai hingga sekarang. Sesudah penduduk di daerah Istimewa Aceh memeluk Agama Islam, maka mulailah terbentuk lembaga *Meunasah* yang dikepalai oleh *Teungku Meunasah* yang fungsinya sebagai pembantu kepala desa terutama dalam bidang agama. Di beberapa tempat beberapa pengusaha kecil memerintah beberapa desa di sekitarnya dikepalai oleh *meurah-meurah*. Wilayah yang serupa ini kemudian bertumbuh menjadi *Nanggroe* yang dikepalai oleh *Ullebalang*.

Sejalan dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Daerah Istimewa Aceh dan meningkatnya arus lalu lintas perhubungan dan perdagangan internasional yang menghubungkan bagian barat, tenggara dan timur Asia melalui Selat Malaka, maka tumbuh pulalah kota-kota di sepanjang pantai utara Aceh,

seperti Perlak, Samudera Pasei Pidie, Lamri dan Bandar Aceh Darussalam. Jika didasarkan kepada sumber-sumber sejarah terutama pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, tempat-tempat tersebut di atas sudah boleh disebut kota.⁶⁰ Wilayah teritorial kota di antaranya ada yang berfungsi sebagai pusat kerajaan, ada yang berfungsi sebagai kota kabupaten dan ada pula sebagai kota pelabuhan. Wilayah teritorial kota ini dibagi atas bagian-bagian sesuai dengan fungsinya, ada bagian untuk Keraton, Pasar tempat kediaman saudagar-saudagar, orang-orang asing dan lain-lain. Yang mengepalai kota biasanya disebut *Syahbandar* atau *Kejuruan*.

Kepala pemerintahan kerajaan adalah sultan atau Raja yang berkedudukan di kota Pusat Kerajaan. Bagaimana bentuk dan susunan dari struktur birokrasi pemerintahan pusat hanya sedikit yang dapat diketahui. Hal ini disebabkan karena sedikitnya sumber yang dapat dipergunakan. Di samping itu pada masa Kerajaan Aceh Darussalam terutama pada abad ke-16 dan ke-17 telah terjadi suatu perombakan bentuk dan struktur pemerintahan baik pada pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah sehingga bentuk-bentuk yang sebelum itu, banyak yang lenyap sehingga sukar untuk diketahui kembali. Dari catatan Cina mengenai Poli disebutkan bahwa raja dalam memimpin pemerintahan dibantu oleh pejabat-pejabat yang disebut *Tu-Ka-Ya-Na* dan pembantunya disebut *Tu-Ka-Si-Na*. Dari Hikayat Raja-raja Pasei A.H. HILL, menyebutkan beberapa pejabat kerajaan dan pejabat militer dari masa pemerintahan sultan Malikussaleh hingga sultan-sultan berikutnya. Sebutan pejabat-pejabat ini diuraikan berdasarkan perbandingan dengan Sejarah Melayu, ada pun pejabat-pejabat kerajaan tersebut adalah; *mentri*, *ulee-balang*, *sida-sida embuai*, *pendita* dan beberapa pembesar istana lainnya.⁶²

Adapun nama-nama pejabat militer dalam kerajaan Samudera Pasei ialah *Panglima* dan kemudian di bawahnya *Pahlawan* dan *panggawa* sedang kerajaan disebut *Lasykar*. Untuk membantu para ratu dan putri-putri raja terdapat jabatan-jabatan seperti *inang*, *dayang-dayang*, *pengasuh* dan *beti-beti*. Para peng-

usaha atau pemegang pemerintahan tertinggi bergelar *Tun Beraim Bapa*. Untuk raja yang memegang pemerintahan sering juga diberi gelar *Syah Alam* dan kadang-kadang ditambah pula gelar *Zlluhifil alam* atau *daulat dirgahayu*. Ada pula gelar-gelar yang dicatat oleh HILL merupakan pengaruh gelar-gelar di Jawa seperti: *penggawa, angebai, lurah, aria, bebekol, tertinggi* dan sebagainya.

Pada bagian lain dari Hikayat itu dijumpai pula gelar tertinggi pejabat kerajaan yaitu Perdana Mentri Contohnya pada masa pemerintahan Malikul Mahmud yang menjadi Perdana Mentri ialah Sayid Chiatuddin yang pada mulanya bergelar *Tun Sri Kaya* (gelar orang besar dalam negeri) dan pada pemerintahan Sultan Malikul Mansur yang menjadi Perdana Mentri-nya adalah Sayid Amayuddin yang semula bernama *Tun Baba Kaya*. Jabatan yang berhubungan dengan pelayanan, perdagangan dan pertahanan laut dikenal pula pada masa itu dengan istilah *Laksamana*.⁶³

3.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat (Sosial ekonomi)

Membicarakan masalah kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh pada zaman kuno, tidak terlepas dari masalah sosial dan ekonomi masyarakat Asia secara keseluruhannya. Sumber-sumber yang dapat kita pergunakan untuk menyusun prikehidupan ekonomi masyarakat Aceh pada zaman itu berasal dari pusat-pusat kebudayaan Asia pada masa itu yaitu: Cina, India dan Arab. Sedikit sekali dapat kita menjumpai sumber-sumber yang berasal dari negeri yang kita bicarakan itu sendiri.

Sejak zaman purbakala di Asia terdapat dua jalur perniagaan internasional yaitu melalui darat dan melalui laut. Jalan yang melalui darat disebut jalan sutra dan jalan ini dimulai dari Cina terus ke Asia Tengah, Turkestan sampai ke Laut Tengah. Jalur jalan ini di Asia Tengah bertemu dengan jalur jalan daerah India yang melewati Selat Kaibar. Jalan lalu lintas Cina India dan Eropa melalui jalan darat ini sudah berlangsung sekurang-kurangnya sejak tahun 500 SM. dan merupakan jalan perhubungan yang paling tua antar bangsa dan ras di dunia. Jalan

yang melalui laut ialah dari Cina terus ke Indonesia melalui Selat Malaka selanjutnya ke India. Dari India ada jalur yang ke teluk Persia melalui Siria dan selanjutnya ke Laut Tengah. Jalur yang lain melalui Laut Merah, Mesir dan sampai juga ke Laut Tengah.

Perhubungan laut yang disebut di atas barangkali sudah lazim dilalui sejak abad I sesudah Masehi.⁶⁴ Jaring-jaring lalu lintas internasional melalui laut ini tidak saja memperhubungkan Asia dan Eropa, tetapi juga Afrika Timur sampai ke Mozambiq.⁶⁵ Sehingga dapatlah kita katakan bahwa jalan yang betul-betul ditemui oleh *Vasco da Gama* adalah dari Lisboa sampai Mozambiq saja. Jalan lalu lintas antara Indonesia yang dimulai di Maluku seterusnya ke Makasar, Kepulauan Nusa Tenggara Pantai utara Jawa, Sumatra, bersatu dengan lalu lintas perniagaan internasional di Selat Malaka. Jalan perdagangan antar Indonesia ini sudah lazim dilakukan sejak bangsa Indonesia menetap di Kepulauan Indonesia dan bertambah ramai dengan adanya perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan oleh kepulauan Maluku dan Sumatra yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Cina, India dan Eropa. Dapatlah dipahami bahwa Selat Malaka demikian pentingnya sebagai tempat bertemunya jaring-jaring lalu lintas dari barat timur dan Indonesia.

Dalam posisi yang demikian penting itulah maka daerah Aceh sejak zaman permulaan terbentuknya jaring-jaring lalu lintas perniagaan internasional itu agaknya sudah dikenal. Hal ini dapat dibuktikan dari berita dinasti Han sebagai telah disebutkan pada bagian yang lalu, di mana raja Wang Man meminta kepada raja Wan Che (Aceh) seekor badak yang memang banyak dihasilkan di daerah ini. Begitu juga Coudius Ptolomeus mencantumkan sebuah negeri di Aceh yang terutama Barosai dalam hubungan perniagaan yang sudah terjalin, antara negeri ini dengan negeri-negeri luar dalam hubungan perdagangan kapur barus yang hanya dihasilkan di negeri ini saja.

Kedaaan yang terperinci mengenai kehidupan orang-orang Aceh pada kurun zaman kuno, agak lebih jelas pada masa per-

kembangan kerajaan Poli, sebagian penghidupan rakyat adalah bertani dan panen dilakukan dua kali setahun. Disebutkan juga bahwa negeri ini subur sekali dibuktikan dengan pohon-pohon kayu yang tumbuh menghijau. Di negeri ini dihasilkan pula sejenis batu permata yang oleh orang Cina dicatat dengan istilah kampara. Laut di sekitar negeri Poli banyak menghasilkan jenis-jenis kerang dan ikan. Hasil yang paling istimewa yang pernah dikirim ke negeri Cina sebagai upeti ialah sejenis burung beo yang dinamakan burung Siri (*gracula religiosa*). Pasar-pasar dibuka sampai malam hari dan jalan-jalan di negeri ini lebar dan bersih. Agaknya usaha tenun maju pula. Hal ini dapat dilihat pada pakaian penduduknya yang dibuat dari kupa (kapas?) dan bentuk pakaian yang bagus disebut *t'iek*. Dari jenis-jenis upeti yang dikirim ke negeri Cina oleh raja Poli yang bernama Pin-ka pada tahun 523 diketahui pula hasil-hasil yang lain dari Poli seperti burung kakaktua putih, perabot-perabot rumah tangga dari gelas, pakaian dari katun, cangkir-cangkir yang dibuat dari karang laut, bermacam-macam parfum, obat-obatan dan lain-lain.⁶⁶

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian terdahulu Lambri sudah berdiri sejak abad ke-10 dan merupakan tempat yang paling strategis pada jalan perdagangan Cina, India dan Persi, serta merupakan tempat perhentian para pedagang dari berbagai bangsa sambil menunggu angin yang baik untuk meneruskan perjalanan mereka. Karena posisi yang baik itu maka pada masa kejayaan Sriwijaya negeri ini dikuasai oleh kerajaan tersebut dan dijadikan pos terdepan dari wilayah kerajaan Sriwijaya di sebelah barat. Hal ini tentulah dimaksudkan sebagai suatu strategi dalam penguasaan jalan perdagangan internasional di Selat Malaka. Dalam perkembangan sejarah Lambri sudah tumbuh menjadi pelabuhan transito yang ekspor yang penting. Penyerangan Raja Cola ke daerah-daerah Sriwijaya termasuk di antaranya Lambri tidak terlepas dari perebutan penguasaan Selat daerah-daerah Malaka antara Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan di India. Sesudah kerajaan Sriwijaya, Lambri menjadikan Cina sebagai pelindung dan secara teratur mengirim upeti ke negeri ter-

sebut. Dari catatan Cina dapat kita ketahui beberapa hal tentang kehidupan sosial ekonomi kerajaan Lambri. Pada umumnya penduduk beragama Islam. Rumah-rumah mereka dibangun dengan tiang yang tinggi dari kayu berbentuk pilar. Panjang rumah mereka lebih kurang 40 kali. Gambaran berita Cina mengenai rumah penduduk ini tidaklah berada dengan apa yang kita jumpai sekarang. Di bawah kolong rumah mereka yang tinggi itu dipelihara lembu, kambing dan binatang ternak lainnya. Kebiasaan ini tidak kita jumpai lagi di daerah Aceh Besar, tetapi di beberapa tempat di Aceh Tenggara masih kita jumpai sampai sekarang. Hasil-hasil utama negeri ini ialah lembu, kerbau, kambing, ayam, itik dan sayur-sayuran. Beras dihasilkan juga oleh negeri ini, tetapi tidak mencukupi, sedangkan ikan dan hasil-hasil laut lainnya cukup banyak. Hasil-hasil hutan yang terpenting adalah kayu cendana dan badak. Hasil ini sering merupakan upeti yang penting sering dikirimkan ke negeri Cina.⁶⁷

Tome Pires yang pernah mengunjungi negeri ini menceritakan bahwa negeri ini menghasilkan daging, beras, bermacam-macam minuman dan bermacam-macam bahan makanan lainnya, lada tidak begitu banyak dihasilkan di negeri ini dibandingkan dengan negeri-negeri sekitarnya. Hubungan negeri ini dengan negeri-negeri sekitarnya. Hubungan negeri ini dengan tetangganya Pidie tidak begitu baik dan selalu terjadi peperangan.

Munculnya kerajaan Samudera-Pasei sejalan dengan lenyapnya kekuasaan Sriwijaya di Selat Malaka. Mula-mula kedudukan Sriwijaya diganti oleh kerajaan Melayu di Jambi yang juga berkuasa di Malaka, tetapi kemudian pusat kerajaan ini dipindahkan ke pedalaman yaitu Minangkabau, sehingga pengawasan terhadap Selat Malaka berkurang.⁶⁸ Samudera-Pasei mencoba menggantikan kedudukan Melayu. Samudera-Pasei cepat berkembang dan setengah abad sesudah didirikan oleh Malikussaleh kerajaan ini sudah menjadi negeri yang makmur dan maju. Pertelaan yang dibuat oleh pengunjung asing yang pernah mengunjungi negeri itu pada masa kerajaannya seperti Odorico de Pardenone, Ibnu Bututtah dan lain memberi gambaran tentang kehidupan dan kemakmuran negeri Samudera-Pasei.

Menurut Prasasti Minje Tujoh tahun 1380 seperti sudah kita jelaskan, Stuterheim menyatakan bahwa Samudera-Pasei dan Kedah di Malaysia merupakan satu kesatuan. Arab perkembangan Samudera-Pasei pada pertengahan abad ke-14 itu dapat dilihat menuju ke arah penguasaan Selat Malaka dan ingin menjadikan Samudera-Pasei sebagai pusat perdagangan internasional di Selat Malaka seperti yang pernah dialami oleh Sriwijaya pada masa jayanya. Kedudukan geografisnya cukup memberi kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita yang semacam itu. Mojopahit yang muncul hampir bersamaan dengan waktunya berkembang dengan pesat sekali dan melebarkan sayapnya dengan cepat, sehingga kira-kira tahun 1365 telah berada di puncak kemegahannya. Seperti kita jelaskan juga Samudera-Pasei dan beberapa negeri lainnya pada masa itu sudah menjadi vazal kerajaan Mojopahit. Perkembangan Samudera-Pasei terhenti dan perwujudan cita-cita sebagai penguasa tunggal Selat Malaka belum sempat mencapai bentuk yang pasti. Pengawasan Selat Malaka oleh Mojopahit dilakukan melalui Tumasik (Singapura sekarang). Tumasik dijadikan pelabuhan internasional pada waktu Mojopahit kehilangan pengawas terhadap negeri-negeri di Selat Malaka, kesempatan ini pun tidak banyak memberi kemungkinan, karena munculnya Malaka sebagai pusat dagang dan penyiaran Islam di Asia Tenggara, meskipun demikian Samudera-Pasei tetap bertumbuh sebagai negeri yang makmur dan kaya. Antara Malaka dan Samudera-Pasei terjadi satu ikatan ketergantungan satu sama lain sehingga saling membutuhkan.

Dari berita-berita Cina dengan jelas diceritakan tentang kehidupan rakyat Samudera-Pasei pada masa itu. Di antaranya disebutkan tentang udara yang panas dan banyak orang yang dihindangi oleh penyakit malaria. Mata pencaharian penduduk sebagian bertani dan menanam padi, karena makanan mereka adalah beras. Di pegunungan banyak dihasilkan kapur barus. Pertanian lada terdapat di kaki-kaki pegunungan. Di samping itu terdapat pula bermacam-macam buah-buahan seperti manggis, jeruk dan durian. Disebutkan juga tentang harga lada sekitar permulaan abad ke-15 itu yaitu tiap 100 *koli* (62,5 kg) 80 ungas (80 *dirham*) atau 1 tail uang perak.⁶⁹

Ibnu Batuttah menceritakan pula bahwa ketika mereka tiba di pelabuhan Samudera datanglah wakil Laksamana ke kapal yang ditumpanginya dan setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pedagang-pedagang dalam kapal itu barulah diizinkan naik ke darat. Ia mencatat beberapa hal mengenai alat pembayaran berupa uang mas (kepingan mas yang tidak dilebur).⁷⁰ Tome Pires dan orang Cina pun mencatat alat pembayaran mata uang mas tersebut, yang dinamakan Dirham. Tome Pires mengatakan kota Samudera-Pasei mempunyai penduduk 20.000 orang dan sejumlah kota besar lainnya di pedalaman yang didiami oleh pembesar-pembesar dan orang-orang berpendidikan. Di kota pelabuhan banyak dijumpai orang-orang asing yang berasal dari Rumes, Turki, Arab, Persi, Benggala, Gujarat, Kling, Malaya, Jawa, Siam dan Cina. Orang Benggala memegang peranan penting di ibu kota dan sebagian besar penduduk kota terdiri dari orang-orang Benggala.

Mengenai situasi perdagangan di kota pelabuhan Samudera-Pasei Tome Pires mengatakan, bahwa saudagar-saudagar banyak berdatangan dari seluruh negeri dan bangsa-bangsa yang tersebut di atas. Saban tahun 8.000 bahar lada diperjual-belikan, mutu dari lada Samudera-Pasei tidak sebaik lada dari Cochine. Di samping itu diperjual-belikan pula kapur barus, sutera dan lain-lain.⁷¹ Beberapa peraturan di lapangan perdagangan disebut pula.

Para pedagang yang baru saja tiba di Samudera-Pasei harus membayar bea cukai lebih dahulu barulah diizinkan menjual dagangannya. Jumlah yang harus dibayar tergantung pada ukuran dari timbangannya, ada tarif untuk bermacam-macam jenis barang dan jumlah yang harus dibayar berbeda-beda menurut negerinya. Bagi pedagang-pedagang yang datang dari barat 6% (persen), kalau yang dibawa itu berupa bahan makanan tidak dipungut bea cukai, cukup dengan memberi persembahan.⁷²

3.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni budaya

Sebelum masuknya agama Islam ke Aceh, maka kebudayaan daerah ini berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kebudayaan

Hindu dan Budha, terutama di daerah-daerah pantai yang terletak di tepi lalu-lintas internasional, sedangkan di pedalaman pengaruh animisme dan dinamisme masih kuat. Sisa-sisa dari kepercayaan yang lama itu masih dapat kita lihat dalam kehidupan rakyat Aceh sampai sekarang, walaupun mereka telah berabad-abad memeluk agama Islam.

Pada masa perkembangan kerajaan Poli dan Sriwijaya agama Budha berkembang pesat di Aceh di samping agama Hindu. Peninggalan kedua agama tersebut yang berupa bangunan agama berupa candi dan lain-lain seperti kita lihat di Jawa, sampai sekarang belum dijumpai. Hal ini mungkin disebabkan karena pernah terjadi semacam revolusi kepercayaan akibat berkembangnya agama Islam, sehingga bangunan-bangunan yang berbau kepercayaan lama dihancurkan, kejadian yang semacam itu pernah pula kita lihat di kemudian hari pada zaman kerajaan Aceh Darussalam, di mana buku-buku yang berisi ajaran Hamzah Fansuri dan pengikut-pengikutnya dimusnahkan oleh lawannya yang berhasil mempengaruhi para penguasa bahwa ajaran Hamzah Fansuri tersebut adalah ajaran yang sesat. Kitab-kitab Hamzah Fansuri dan pengikutnya yang sekarang masih bersisa, kebanyakan dijumpai di luar Aceh yaitu di Malaysia dan Banten.

Beberapa peninggalan purbakala seperti benteng Indra-patra dan Indrapuri serta banyak yang lain-lain lagi memiliki beberapa indikasi sebagai peninggalan zaman Hindu-Budha. Hal ini masih memerlukan penelitian purbakala lebih lanjut. Penemuan guci-guci berisi abu jenazah di Lamno Daya (Aceh Barat) serta cerita rakyat mengenai Pahlawan Syah yang terus hidup di negeri itu, sebagai seorang penguasa Hindu yang gigih menentang orang-orang Islam, akan banyak memberi keterangan-keterangan baru tentang pengaruh agama Hindu dan Budha di Aceh.

Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidak bersamaan. Demikian pula di kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya

yang berlain-lainan. Berdasarkan berita Cina zaman Tang pada abad-abad VII dan VIII diduga masyarakat Islam telah ada baik di Kanfu (Kanton) maupun di daerah Samudera sendiri. Van Leur mengatakan bahwa koloni-koloni pedagang Arab telah didirikan di Kanton sebelum abad ke-4. Pemukiman-pemukiman pedagang Arab itu sudah disebut-sebut lagi dalam berita Cina tahun 618 dan 626. Tahun-tahun selanjutnya koloni-koloni pedagang Arab sudah membawa praktek-praktek ajaran Islam. Sudah barang tentu koloni-koloni orang-orang Islam didapati juga di sepanjang jalan perdagangan Asia Tenggara terutama negeri-negeri di sekitar Selat Malaka. Ada dugaan bahwa pada tahun 674 telah ada koloni-koloni orang-orang Islam di pantai Barat Samudera.⁷³

Sekitar abad ke-XI dan XII kondisi kerajaan Sriwijaya sebagai penguasa di daerah-daerah sekitar Selat Malaka, mulai melemah dan peranannya sebagai negara Budha pun sudah agak berkurang. Kondisi politik dan sosial yang semacam itu sangat menentukan dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pantai utara Aceh. Sultan Johan Syah yang memerintah di sebuah kerajaan di Aceh pada tahun (1205) seperti yang sudah dijelaskan pada bagian yang lalu adalah seorang raja yang beragama Islam. Kegiatan penyebaran Islam di sekitar lembah sungai Aceh agaknya sejak abad ke-12 sudah dilakukan, hal ini dibuktikan dengan adanya berita tentang seorang muballigh Arab yang bernama Sjekh Abullah Arief yang meninggal pada tahun 506 H (1112).⁷⁴

Keterangan Marco Polo yang singgah di Perlak pada tahun 1292 menyatakan bahwa negeri itu sudah menganut agama Islam. Begitu juga Samudera Pasei berdasarkan makam yang diketemukan di bekas kerajaan tersebut dan berita sumber-seumber yang ada seperti sudah kita jelaskan bahwa kerajaan ini sudah menjadi kerajaan Islam sekitar 1270.

Tentang sejarah perkembangan agama Islam di daerah Aceh pada zaman-zaman permulaan itu, petunjuk yang ada selain

yang telah kita sebutkan pada bagian-bagian yang lalu, maka naskah-naskah yang berasal dari dalam negeri sendiri banyak memberi petunjuk mengenai itu, misalnya kitab *Sejarah Melayu*, dan *Hikayat Raja-raja Pasei*. Menurut kedua Kitab ini seorang mubaligh yang bernama Syeh Ismail telah datang dari Mekkah sengaja menuju ke Samudera, untuk mengislamkan penduduk di sana. Sesudah mengembangkan Islam seperlunya Syeh Ismail pun pulang ke Mekkah kembali. Perlu juga disebutkan di sini bahwa dalam kedua kitab ini disebutkan pula negeri-negeri lain di Aceh yang turut diislamkan ialah: Perlak, Lamuri, Barus dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan kedua sumber itu dapatlah dikira-kira bahwa sebagian tempat-tempat di Aceh terutama tempat-tempat di tepi pantai telah memeluk agama Islam. Berita-berita Cina ada juga menyebutkan bahwa raja dan semua rakyat negeri Aru yang kemudian hari termasuk bagian dari Aceh adalah penganut-penganut agama Islam. Begitu pula Malaka yang pada awal abad ke-15 terus menjadi ramai akhirnya menjadi kerajaan Islam pula, bahkan di kemudian hari menjadi pusat propaganda Islam keseluruhan Asia Tenggara. Melalui Malaka pula agama Islam kemudian berkembang ke seluruh Indonesia, sehingga pada awal abad ke-16 hampir tiap tempat di kepulauan Indonesia sudah terbentuk masyarakat-masyarakat Islam. Agama Islam yang masuk ke Aceh khususnya dari Indonesia pada umumnya pada mulanya mengikuti jalan-jalan dagang dan kota-kota dagang di pantai, kemudian menyebar ke pedalaman. Pedagang dan, mubaligh-mubaligh telah memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam.

Dari uraian di atas kita telah menyinggung saluran Islamisasi di daerah ini, namun demikian agar kita dapat mengetahui lebih luas baiklah kita singgung sedikit beberapa teori tentang proses Islamisasi ke Asia Tenggara. Tentang masalah, bilamana agama Islam itu untuk pertama kali dianut oleh orang-orang Indonesia, khususnya Aceh tidak ada bukti yang jelas dan tidak ada pendapat yang seragam mengenai itu. Pendapat dari sarjana-sarjana Barat pada mulanya mengatakan bahwa masuknya Islam ke In-

Indonesia pada abad ke-13, dengan bukti-bukti yaitu berita-berita Marco Polo dan makam Malikussaleh. Ada juga yang berpendapat bahwa abad ke-7 dapat dipandang sebagai abad permulaan terjadinya proses Islamisasi di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sebagai bukti dikemukakan bahwa tentang permukiman orang-orang Islam di Kanton dan di beberapa tempat di Sumatra. Tetapi hal ini belum dapat dibuktikan apakah orang-orang Indonesia sudah memeluk agama Islam. Sebab apabila sejak abad tersebut proses Islamisasi telah meluas, maka baru lima atau enam abad kemudian kita ketahui munculnya masyarakat Islam Indonesia dalam bentuk kerajaan yakni kerajaan Samudera-Pasei, Perlak dan Lamuri.

Seperti kita ketahui setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan itulah penyebaran Islam secara intensif dilakukan ke seluruh daerah Aceh dan ke tempat-tempat lain di Asia Tenggara. Tentang siapa yang menyebarkan Islam di Aceh dan Indonesia pada umumnya tidaklah menjadi masalah, karena menurut agama Islam semua penganutnya dapat menjadi pendakwah/mubaligh. Hal ini berlainan dengan agama-agama yang lain, oleh karena, itulah tidak heran kalau kita lihat dalam proses Islamisasi di kawasan ini, berbagai jenis lapisan masyarakat telah turut serta dalam proses ini.

Bentuk agama Islam itu sendiri mempercepat penyebaran agama ini, apalagi sebelum masuk ke Indonesia telah tersebar terlebih dahulu di daerah-daerah Persia dan India di mana di dalam sejarah bahwa kedua daerah ini banyak memberi pengaruh kepada perkembangan kebudayaan Indonesia. Dalam perkembangan agama Islam di daerah Aceh, peranan mubaligh-mubaligh memang sangat besar. Di dalam kedua hikayat yang telah kita singgung di atas diceritakan mengenai hal ini. Mubaligh-mubaligh ini tidak saja berasal dari Arab, Persia dan India, tentu juga anak negeri telah ikut serta pula menjadi mubaligh.

Pada waktu Pasei telah diduduki Portugis kita dengar seorang mubaligh yang berasal dari Samudera Pasei meninggalkan negerinya pergi ke Jawa (Demak), ia bernama Fathaillah (Fa-

letehan) yang di kemudian hari dikenal sebagai pendiri kota Jakarta.⁷⁵

Di dalam kehidupan keagamaan ummat Islam sejak dahulu sampai sekarang banyak sekali terdapat aliran-aliran agama. Aliran-aliran yang terkenal sekali ialah aliran yang disebut *mazhab*, yaitu aliran yang didasarkan pada penafsiran fikih. Ada empat buah mazhab yang terkenal dalam Islam ialah mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Pada umumnya di Indonesia umat Islam menganut mazhab Syafi'i. Hal ini dapat kita lihat pada catatan yang dibuat oleh Ibnu Battutah di mana dikatakan bahwa Islam sudah hampir satu abad lamanya berkembang di Samudera Pasei. Diriwayatkannya tentang kesalehan, kerendahan hati dan semangat keagamaan dari raja yang seperti rakyatnya mengikuti mazhab Syafi'i.⁷⁶

Selain daripada itu pengaruh Syi'ah berbekas pula pada kehidupan keagamaan rakyat Aceh. Hal ini terbukti pada pemakaian nama bulan Muharram dengan nama *buleun Asan Usen* (Bulan Hasan Husin). Aliran Syi'ah ini seperti diketahui banyak dianut oleh orang-orang Parsi. Pemakaian nama Syah pada nama-nama sebagian besar sultan Aceh di kemudian hari menunjukkan pengaruh Persia dan Syiah.⁷⁷ Syair yang tercantum pada makam pualam Naina Hasanuddin di Samudera-Pasei yang *berbentuk gazal* membuktikan juga adanya pengaruh aliran tersebut.⁷⁸ Sepuluh Muharram, yaitu hari wafatnya Saidina Hasan dan Husin, cucu Nabi Muhammad yang sangat dimuliakan oleh orang Syi'ah masih terus dirayakan oleh penduduk daerah Aceh sejak dahulu hingga sekarang.⁷⁹

Mengenai perkembangan aliran tasauf di Aceh diduga baru ada pada abad ke-16 dan 17 di mana pada waktu itu terkenal tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As Sumath-rani, Nuruddin Ar-Raniri dan Abdurrauf bin Ali Singkeli.⁸⁰ Apakah pengaruh aliran tasauf sudah berkembang sebelum abad ke-16, tidak kita peroleh keterangan.

Pada zaman kerajaan Samudera-Pasei mencapai kejayaannya pada abad ke-14 maka pendidikan juga tentu mendapat

tempat tersendiri. Hal ini diketahui dari keterangan Tome Pires yang menyatakan bahwa di Samudera-Pasei banyak terdapat kota-kota besar di mana antara warga kota itu terdapat pula orang-orang yang berpendidikan.⁸¹ Pasei sekitar abad ke-14 menurut Ibnu Battutah sudah merupakan pusat dari studi Islam di Asia Tenggara dan di sini banyak berkumpul ulama-ulama dari negeri-negeri Islam. Sebelum Malaka berkembang dari Samudera-Pasei yang menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh Indonesia dan Malaka. Ibnu Battutah mengatakan juga bahwa Sultan Malikul Zahir adalah orang yang cinta kepada para ulama dan ilmu pengetahuan. Bila hari Jum'at Sultan bersembahyang di mesjid dan menggunakan pakaian ulama dan setelah sembahyang mengadakan diskusi dengan para ahli ilmu pengetahuan agama. Ulama-ulama terkenal pada waktu itu antara lain: Amir Abdullah dari Delhi (Amir Abdullah) yang makamnya sudah kita jelaskan di bagian lain. Kadhi Amir Said dari Shiraz, Tajuddin dari Ispahan, Tengku Cot Geureudong. Makam-makam dari Ulama ini sebagian telah berhasil diketemukan. Bagaimana bentuk pendidikan masa itu, barangkali tidak jauh berbeda bentuk yang sekarang dinamakan pesantren atau *dayah*. Di samping itu mesjid dan surau (*meunasah*) tentu memegang peranan penting sebagai pusat pendidikan untuk rakyat umum dan anak-anak seperti halnya di kemudian hari pada masa kerajaan Aceh Darussalam.

3.4 Hubungan dengan negeri-negeri Asing

Hubungan dengan negeri-negeri Asing dalam uraian ini dimaksudkan hubungan antara kerajaan-kerajaan atau negeri-negeri di Daerah Istimewa Aceh dahulu dengan negeri-negeri di luar Indonesia dan Malaysia umpamanya Arab, Persia, Mesir, India, Birma, Siam, Cina dan lain-lain. Untuk meninjau bentuk hubungan dengan negeri-negeri asing dan latar belakang dari hubungan itu tentu tidak mudah karena banyak sangkut-pautnya dengan kepentingan ekonomi, sosial, agama dan politik. Adanya hubungan antara kerajaan-kerajaan di Aceh pada kurun zaman kuno dengan negeri-negeri luar tentu sudah jelas ada, apalagi

daerah Aceh terletak di tepi lalu-lintas internasional yang sejak abad I Masehi sudah ramai dilalui.

Tercantumnya nama Barosai pada peta yang disusun oleh Ptolemaeus sebagai negeri penghasil kapur barus, menunjukkan adanya hubungan dengan luar. Hubungan dengan negeri-negeri Cina yang terus dapat kita ketahui dari catatan dinasti Han di mana Kaisar Wang Mang minta dikirim seekor badak kepada Kerajaan Muangtche (1 – 6 M).

Pada umumnya hubungan antara negeri-negeri dan kerajaan Aceh sedikit sekali diketahui melalui sumber-sumber yang berasal dari Aceh sendiri dan kebanyakan melalui sumber-sumber dan catatan dari luar, misal dari orang-orang Arab, India, Persia, Portugis dan yang penting banyak dari Cina. Dari Catatan Cina diketahui bahwa kerajaan Poli untuk pertama kali telah mengirimkan utusan ke negeri Cina tahun 518 dan mempersembahkan sepucuk surat serta barang-barang persembahan lainnya yang dihasilkan oleh negeri tersebut.⁸² Pengiriman utusan itu lebih dititik-beratkan pada perkembangan persahabatan dan sambutan Kaisar Cina dikatakan baik sekali dan ketika orang-orang Cina mengunjungi pula negeri Poli pada tahun 675, dikatakan pula bahwa negeri itu beragama Budha. Hubungan antara Poli dengan Cina ini meskipun sepintas lalu kita lihat adalah persahabatan biasa tetapi seringkali kaisar-kaisar Cina menganggap semua utusan yang datang menghadap kaisar dan memberi persembahan upeti sebagai negeri yang berada di bawah perlindungan Cina. Seperti sudah kita jelaskan bahwa Lamuri mengirim utusan ke negeri Cina untuk pertama kali pada tahun 1286. Di dalam buku tahunan kerajaan Ming diterangkan, bahwa pada tahun 1405 telah dikirim ke Lan-bu-li sebuah cap dan sebuah surat, sedangkan pada tahun 1411 Lamri mengirim utusannya ke Cina untuk membawa upeti. Perutusan tersebut tiba bersamaan dengan utusan Kelantan dan Cail, dan berlayar kembali bersama-sama Cheng Ho. Dalam tahun 1412 raja Mahama Sha (Muhammad Syah) dari *Lam-bu-li* bersama-sama Samudera mengutus sebuah perutusan ke Cina untuk membawa upeti. Juga putranya yang bernama Sha-Che-han (Syah Johan) mengirim pula utusan-utusan

annya ke Cina. Di dalam Hikayat Aceh, raja Indra Syah telah menerima harta-harta peninggalan raja Iskandar dari raja Cina.⁸³ Dari catatan di atas jelas hubungan Cina dengan Lamri, Samudera-Pasei dan negeri-negeri lain di Malaysia sebagai hubungan kerajaan vazal dari negeri-negeri kecil yang menghadap dan mengirim upeti ke Cina tidak terlalu menganggapnya demikian keinginan lain-lain barang berharga dan tenaga-tenaga ahli/tukang-tukang mendorong kerajaan-kerajaan tersebut mengirimkan utusan ke Cina. di samping itu sering pula pengiriman utusan itu bertujuan politik hal ini dapat kita lihat pada peristiwa pengiriman utusan Lamri pada tahun 1413 dan pengiriman utusan Samudera-Pasei pada tahun 1409. Raja Lamri telah meminta Kaisar Yung-Lo untuk membantu sultan Lamri memadamkan pemberontakan yang terjadi dalam negerinya.⁸⁴ Demikian pula Samudera-Pasai telah meminta bantuan Cina untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi dalam negeri Samudera-Pasai. Cheng-Ho yang dikirim ke negeri itu pada tahun 1415 telah berhasil menentramkan pemberontakan tersebut dan raja Samudera-Pasai dapat memerintah dengan aman. Pemimpin pemberontak dibawa ke negeri Cina dan di sana dikubur mati.⁸⁵ Dari peristiwa tersebut di atas jelas dapat kita lihat, kebutuhan dan pertimbangan untuk mendapatkan perlindungan dari Cina terhadap ancaman pemberontakan atau serangan negeri lain, mendorong mereka untuk mengirimkan utusan dan persembahan ke negeri Cina, jadi politik luar negeri untuk mencari sekutu semacam itu masih ada.

Kunjungan orang-orang asing sebagai utusan berjalan kurang lancar, sering-sering rasa curiga tercermin dalam tata cara penerimaan utusan. Sebelum Ibnu Batuttah diterima menghadap sultan seorang Laksamana dikirim ke kapal yang ditumpanginya dan setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan barulah mereka diizinkan mendarat. Peristiwa yang semacam itu juga kita lihat pada peristiwa pengirim utusan kerajaan Samudera pada tahun 1496⁸⁶) Utusan itu dapat menunjukkan surat-surat kepercayaan yang memakai cap, sehingga utusan tersebut tak dapat diakui dan kaisar menyuruh pulang begitu saja.

Demikianlah beberapa tatacara hubungan dengan luar negeri yang lazim terjadi pada masa itu. Masih ada lagi bentuk-bentuk lain seperti bentuk-bentuk hubungan yang bersifat keagamaan, solidaritas keyakinan, promosi dagang dan lain-lain yang sering juga dilakukan pada masa itu, misalnya seorang utusan membawa segala macam jenis hasil negerinya yang terkenal untuk dipersembahkan kepada sebuah negeri dan negeri yang bersangkutan mengirimkan pula balasannya. Jadi saling memperkenalan hasil untuk kepentingan hubungan perdagangan.

CATATAN :

- 1) D.H. Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologi Indonesia* (Jakarta : Pradnya Pramita, 1962), hal. 14.
- 2) N.J. Krom, *Zaman Hindu*, terjemahan Arif Effendi, (Jakarta : P.T. Pembangunan, 1956), hal. 9 dan 10; lihat juga B.H.M. VLEKKE, *Nusantara , A. History of Indonesia*, Let Editions A. Mantean S.A., Bruzalles, 1961 hal. 17 dan D.G.E. Hall, *A History of South East Asia*, (London : Macmilan & CO Ltd, 1960), hal. 15. N.J. Krom, *op. cit.*
- 3) N.J. Krom *op. cit.*
- 4) W.P. Groeneveldt, *Historical Notes on Indonesia, Malaya Conplied From Chines Sounces*. (Djakarta : C.V. Faratara, 1960), hal 82 – 84.
- 5) J.G.De Casparis, *Perkembangan pengetahuan Sejarah Indonesia Lama*, terjemahan Said Raksakusumah, Bandung: Teratai, 1961) hal. 32.
- 6) T. Iskandar, *de Hikayat Aceh*, hal. 24, selanjutnya tentang nama Lamuri bandingkan dengan pendapat Cowan, *B.K.I*, 90, 1933, hal. 421 – 424.
- 7) Mohd. Yamin, *Gadjah Mada*, (Djakaarta : Balai Pustaka, 1956), hal 50 – 51.
- 8) T. Iskandar *op. cit.*, hal. 25.
- 9) *Ibid*, hal. 24 – 25.
- 10) A.K. Dasgupta, "Aceh in Indonesia Trade and Politic : 1600 – 1641", unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, 1962., hal. 6.
- 11) N.J. Krom. *op. cit.*, hal 130, 131, dan A.K Dasgupta, *op. cit.* hal. 5.
- 12) R.O. Winstedt, *A History of Malaya*, (London : Luzak & co, 1935), hal.28.
- 13) T. Iskandar, *op. cit.*, hal. 25.
- 14) *Ibid*, hal.25.
- 15) *Ibid*.
- 16) *Ibid*.
- 17) *Ibid*. hal. 26.
- 18) *Ibid*. hal. 27

- 19) *Ibid.*
- 20) Tichelman, *De Indische Gids*, 61, 1939, hal. 23 – 27.
- 21) *Ibid.*
- 22) Groevenelt, *op. cit.*, hal 98 – 100.
- 23) T. Iskandar, *op. cit.*, hal. 27-28. Desa Lamreh sekarang terletak kira-kira 750 meter dari Krueng Raya dan persis dekat kampung tersebut telah selesai dibangun pelabuhan Malahayati.
- 24) *Ibid.*, hal. 28.
- 25) Pengertian Aceh secara umum adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam pengertian yang sempit Aceh Besar disebut dengan Aceh saja. Akan tetapi Aceh dipergunakan juga untuk menyebut Banda Aceh atau dahulu lengkapnya Banda Aceh Darussalam.
- 26) Tome Pires, *The Suma oriental of Tome Pires* Vol. I. translated and edited by Armando Cortesao, (London : Printed for the Hakluyt, Society ; 1944), hal. 138 – 145.
- 27) T. Iskandar, *op. cit.*, hal: 28 – 30.
- 28) Di teluk Krueng Raya atau dahulu mungkin dinamakan teluk Lamri seperti yang tercantum dalam Hikayat Aceh, sekarang sudah selesai dibangun pelabuhan baru dan mulai ramai kembali. Kapal-kapal mulai mampir lagi di pelabuhan ini dan kapal haji selama dua tahun terakhir ini berlabuh juga di pelabuhan ini, tidak lagi di Sabang.
- 30) *Ibid.*
- 31) Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hal 142 – 143 dan 146.
- 32) T. Iskandar, *op. cit.*, hal. 32.
- 33) *Ibid.*, hal. 35. T. Iskandar mengambil tahun 1516 sebagai tahun penobatan Sultan Ali Munghayat Syah dengan alasan bahwa pada batu nisan Sultan tersebut yang terletak di Kandang XII Banda Aceh tertulis tahun meninggalnya 12 Zulhijjah 936 H. atau dan di dalam buku Bustanussalatin disebutkan bahwa sultan tersebut memerintah selama 14 tahun. Jadi tanggal penobatannya tentulah 14 tahun sebelum ia meninggal. Selanjutnya lihat : G.K. Niemann, Bloemlezing Uit Maleische Geschriften, tweede Stuk,

- (1892), hal. 120. Hoesein Djajadiningrat mengatakan bahwa tahun penobatan Ali Mughayat Syah ialah tahun 1514, lihat : Hoesein Djajadinigrat, *op. cit.* hal. 213.
- 34) Mohd. Yamin, *op. cit.*, hal 48 – 51.
- 35) Groeneveldt, *op. cit.*, hl. 96 dan 98.
- 36) J. Paulus., "Acheh", *Encyclopaedia van Nederlandsch Cost Indie I*, (1917), hal. 73
- 37) Kenneth W. Morgan, (ed), *Islam Djalan Mutlak*, (Djakarta : P.T. Pembangunan 1963), hal. 119.
- 38) D.G.E. Hall, *A. History of South East Asia*, (London : Macmillan & Co Ltd, 196), hal. 176.
- 39) Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu Djawa dan munculnya negara-negara Islam di Nusantara*, (Djakarta : Bhratara, 1968), hal 134.
- 40) T. Iskandar, *op. cit.*, hal. 25.
- 41) *Ibid*, hal 25.
- 42) Kenneth W. Morgan (ed.), *op. cit.*, hal. 119
- 43) T. Ibrahim Alfian, *Kronika Pasai*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1973, hal. 20.
- 44) J.P. Moquette *De oudste vorsten van Samudera Pase*, *R.O.C. 19. hal, 1 - 12.*
- 45) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal. 20.
- 46) *Ibid*, hal. 24
- 47) *Ibid*, hal. 20.
- 48) N.Y. Krom, "De Naam Sumatera", *B.K.I. Deel 100*, 1941, hal. 6.
- 49) Kenneth W. Mogan, *op. cit.*, hal. 120.
- 50) *Ibid*, hal. 22.
- 51) Uka Thandrasasmita, "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia", *50 tahun lembaga purbakala dan peninggalan nasional* (1913 - 1963), (Jakarta : 1977), halaman 109.

- 52). *Loc. cit.*
- 53) Mohd. Said. *Aceh sepanjang Abad*, (Medan : Penerbit, Pengarang sendiri, 1961). halaman 58.
- 54). Uka Tjandrasasmita, *op. cit.*, halaman 109.
- 55) W.P. Groeneveldt, *op. cit.*, halaman 85 - 92.
- 56) Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerjaan Aceh* (Medan : Monora, 1972), halam 30 - 31
- 58) W.P. Groeneveldt, *op. cit.*, halaman 80.
- 59) Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, halaman 265.
- 60) Sartono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia*, I (Jakarta : Balai Pustaka, 1977). halaman 148.
- 61) *Ibid.*
- 62) *Ibid.*, halaman 264 Dan T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, halaman 35 - 107.
- 63) *Loc cit.*
- 64) D.H. Burger dan Prayudi, *op. cit.*, halaman 14.
- 65) J.A.E. Morley The Arabs and the Eastern Trade, *J.M.B.R.A.S.* Vol. XXII Pt. I, 1949. halaman 143.
- 66) W.P. Groeneveld, *op. cit.* halanan 80-85.
- 67) *Ibid.*, halaman 100.
- 68) D.H. Burger, *op. cit.*, halaman 32.
- 69) W.P. Groeneveldt, *op. cit.* halaman 86.
- 70) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, halaman 22.
- 71) Tome Pires, *op. cit.*, halaman 143 - 145.
- 72) *Ibid.*, halamna 145 dan Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, 143 - 145.
- 73) Van Leur, *Indonesia Trade And Society*, (Gravenhage : A. Mantrau, W. Van Hoove, 1955), halaman 111.
- 74) Sajed Naguib Al Attas, *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesia Archipelago*, (Kualalumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969), halaman 11.
- 75) Kenneth W. Morgan, *op. cit.* halaman 121.
- 76) Kennerth W. Morgan, *op. cit.*, halaman 120.

- 77) Zakaria Ahmad, *op. cit.*, halaman 104.
- 78) Uka Candrasasmita, *Loc. cit.*
- 79) Zakaria Ahamad, *op. cit.*, halaman 104.
- 80) Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, III., halaman 137.
- 81) Tome Pires, *op. cit.*, halaman 143.
- 82) W.P. Groeneveltdt, *op. cit.*, halaman 81.
- 83) T. Iskandar, *op. cit.*, halaman 27.
- 84) *Ibid.*, halaman 24.
- 85) W.P. Groeneveltdt, *op. cit.*, halaman 86.
- 86) W.P. Groeneveltdt, *op. cit.*, halaman 90.

BAB IV ZAMAN BARU ± 1500 – 1800

4.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

Menurut catatan R.A. Hoessein Djajadiningrat, pendiri Kerajaan Aceh ialah Sultan Ali Mughayat Syah pada sekitar tahun 1514.¹ Begitu pula Nuruddin ar Raniri dalam karyanya *Bustanus Salatin* juga menyebutkan bahwa sultan yang pertama memerintah Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah.²

Pada mula pertumbuhan Kerajaan Aceh, lokasinya di ujung sebelah utara Pulau Sumatera atau yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar, yang dalam bahasa Aceh disebut *Aceh Rayeuk*, *Aceh Lhee Sago* (Aceh tiga segi), *Aceh Inti*³ (*Aceh proper*). Disebut demikian karena daerah itulah pada mulanya yang menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibukota kerajaannya,⁴ yang bernama Bandar Aceh, atau secara lengkapnya *Bandar Aceh Dar-as Salam*.⁵ Di ibukota kerajaan ini mengalir sebuah sungai yang bernama *Krueng Aceh* (Kali Aceh), sungai ini menghubungkan ibukota dengan pelabuhan yang terletak di muara sejauh lebih kurang 3 Km.

Kapal-kapal dengan ukuran 60 – 70 ton dapat berlayar melalui muara sungai itu menuju ke ibukota.⁶ Di depan muara sungai terdapat beberapa pulau, sehingga antara muara sungai dengan pulau-pulau itu membentuk sebuah teluk luas yang dapat digunakan untuk berlabuh beratus-ratus kapal pada saat yang bersamaan.

Pertumbuhan Kerajaan Aceh mulai tampak sesudah bangsa Portugis berhasil merebut Malaka dari Sultan Malaka pada tahun 1515. Orang-orang Portugis pada mulanya ingin menghancurkan perdagangan saudagar-saudagar Islam yang berdagang di Malaka, sehingga menimbulkan kegoncangan dalam jaringan perdagangan di kawasan Selat Malaka, terutama di kalangan pedagang-pedagang Islam.⁷ Salah satu akibatnya, pedagang-pedagang Islam yang biasa berdagang di Malaka pindah dari sana ke tempat-tempat lain. Kebanyakan dari mereka datang ke Aceh. Dengan datangnya pedagang-pedagang Islam ini, Aceh menjadi ramai dan mulai berkembang sebagai pusat perdagangan. Karena sebelumnya Aceh masih merupakan sebuah kerajaan kecil yang tunduk kepada kerajaan tetangganya Pedir.⁸

Di bawah Sultan yang pertama (Ali Mughayat Syah), Aceh berhasil membeberkan dari kekuasaan Pedir dan kemudian menyatukan kerajaan-kerajaan pantai di sekitarnya. Hal ini dilakukan, untuk menyatukan kegiatan perdagangan dengan memusatkan di pelabuhan Aceh saja. Karena sebelumnya, kegiatan perdagangan di kawasan itu berada di pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya,⁹ yaitu Daya, Pedir, dan Samudra (Pase). Dengan demikian di bawah sultannya yang pertama, Kerajaan Aceh telah mendapatkan seorang pimpinan tangguh yang berhasil meletakkan dasar bagi perkembangan Kerajaan Aceh untuk pertama kali.¹⁰

Sultan lain yang besar jasanya dalam membina Kerajaan Aceh ialah Alaudin Riayat Syah atau lebih terkenal setelah ia meninggal dengan sebutan Al-Kahhar. Ia memerintah sejak tahun 1553 – 1571. Di bawah Sultan ini Kerajaan Aceh mulai melakukan perluasan kekuasaan yang ditujukan ke kota-kota

pelabuhan di pantai barat Sumatera, dengan tujuan agar dapat memonopoli perdagangan di sana, terutama perdagangan lada. Beberapa kota pelabuhan seperti Singkil, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang dapat dikuasainya. Dan perdagangan yang berlangsung di kota-kota itu, berada di bawah pengawasan Sultan Aceh yang diwakili oleh pembantu-pembantunya seperti Syahbandar dan Panglima.¹¹ Selain ke pantai barat, pantai bagian timur Sumatera juga menjadi sasaran ekspansi Aceh. Kerajaan Aru yang sering berhubungan dengan Portugis di Malaka ditaklukkannya pada tahun 1539. Anak Sultan Al-Kahhar yang bernama Abdullah diangkat sebagai sultan di sana.¹²

Ketika melakukan ekspansi ke Kerajaan Aru, Kerajaan Aceh "berhadapan" dengan pihak Portugis yang rupa-rupanya juga menginginkan hal yang serupa dengan Aceh, yaitu ingin mendapatkan monopoli perdagangan di sana.¹³ Sejak itu Sultan Al-Kahhar menyadari bahwa kedudukan Portugis di Malaka dianggap sebagai penghalang untuk mencapai tujuannya. Karenanya ia bermaksud untuk mengusir Portugis dari Malaka. Serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka, berulang-kali dilakukan, yang pertama pada tahun 1537 dan yang terakhir pada tahun 1568. Pada serangan yang terakhir itu, Aceh telah menggunakan kekuatan yang terdiri atas 15.000 orang Aceh, 400 orang Turki, disertai pula dengan dua ratus buah meriam besar dan kecil.¹⁴

Suatu kemajuan yang perlu disebutkan pada masa Sultan Al-Kahhar Kerajaan Aceh telah dapat mengeluarkan susunan mata uang sendiri. Mata uang ini dibuat dari emas,¹⁵ dan dari timah. Yang dari emas disebut Derham,¹⁶ dan yang dari timah disebut *Keuh*. John Davis yang datang ke Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil (1588 – 1604), menyebutkan ada dua jenis mata uang utama yang beredar di kerajaan Aceh, yaitu uang emas yang bentuknya sebesar uang sen di Inggris dan mata uang dari timah yang disebut *Casches (Keuh)*. Selain dua jenis mata uang utama tersebut di atas, pula jenis-jenis lain yang disebut *kupang*,

pardu, dan tahlil. Nilai 1600 *casches* sama dengan 1 uang emas, 400 *chasches* adalah 4 *kupang*, 4 *Kupang* = 1 uang emas, 5 uang emas sama dengan 4 *schelling* (*sic.*) Inggeris, 4 uang emas sama dengan 1 *pardu* dan 4 *pardu* sama dengan 1 *tahlil*.¹⁷⁾

Puncak perkembangan kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607 -- 1637). Masa pemerintahan Sultan ini merupakan masa kejayaan kerajaan Aceh, baik politis maupun ekonomis. Ekspansi-ekspansi teritorial ke daerah-daerah tetangganya seperti yang pernah dilakukan pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Kahhar diulangi kembali. Tetapi apa yang dilakukan Iskandar Muda lebih banyak dan lebih luas. Dari tahun 1612 -- 1621, ia telah berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan pantai di sekitar Selat Malaka dan di pantai bagian barat Pulau Sumatera. Dalam hal ini Nuruddin ar-Raniri, telah memberikan daftar nama-nama daerah yang telah berhasil ditaklukkan oleh Sultan ini.¹⁸ Dalam tahun 1612, Kerajaan Aru (Deli) yang telah melepaskan diri dari pengaruh Aceh sejak Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil memerintah, oleh Iskandar Muda dimasukkan kembali ke dalam pengaruh kerajaan Aceh. Kerajaan Johor di Semenanjung Melayu ditaklukkannya dalam tahun 1613. Kemudian berturut-turut ditaklukkan Kerajaan Pahang pada tahun 1618, Kedah dalam tahun 1619, Perak dalam tahun 1620 dan Nias dalam tahun 1624. Augustin de Beaulieu seorang pedagang bangsa Perancis yang datang ke Aceh pada masa Iskandar Muda (1621) juga telah menyebutkan sejumlah daerah di pantai bagian Barat dan bagian tengah Pulau Sumatera yang berada di bawah pengaruh kerajaan Aceh. Daerah-daerah itu antara lain ialah Labo, Singkil, Barus, Batanghari, Pasaman, Tiku, Pariaman, Padang dan Sileda.¹⁹

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kerajaan Aceh dalam perkembangannya meluas sepanjang jalur pantai pada kota-kota pelabuhan, baik sebelah timur maupun sebelah barat Pulau Sumatera. Di kota-kota pelabuhan itu, Aceh hanya menguasai perdagangannya saja yang diwakili oleh pembantu-pembantu Sultan Aceh seperti syahbandar dan panglima. Sedangkan penguasaan kota-kota itu sepenuhnya (dalam arti

politik), tetap dipegang oleh penguasa-penguasa tradisional setempat.

Di bawah Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh juga melakukan peperangan kembali terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Pada tahun 1615 kerajaan Aceh mencoba melakukan suatu serangan terhadap Portugis di Malaka, namun karena sebelumnya Aceh telah terlebih dahulu menyerang kerajaan Johor dengan armada yang seharusnya untuk menyerang Malaka, maka rahasia penyerangan terhadap Malaka telah bocor di kalangan Portugis,²⁰ sehingga Aceh terpaksa membatalkan maksudnya. Suatu penyerangan secara besar-besaran terhadap Portugis di Malaka yang dilakukan oleh sebuah armada Aceh yang cukup besar menurut ukuran masa itu terjadi pada tahun 1629, tetapi pada penyerangan ini pihak Aceh mengalami kegagalan sehingga maksud untuk mengusir Portugis di Malaka tidak berhasil.²¹

Pada masa kejayaannya kerajaan Aceh mempunyai angkatan perang yang kuat. Kekuatan terpenting berupa kapal-kapal *Galley* yang dimiliki oleh armada lautnya dan pasukan gajah yang dipunyai oleh pasukan daratnya. Jumlah kapal yang dimiliki armada laut Aceh pada waktu itu 600 buah. Terdiri dari 500 buah kapal layar dan 100 buah kapal *Galley* yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Aceh sendiri, Daya dan Pedir. Seratus kapal yang tersebut terakhir adalah kapal-kapal yang berukuran besar yang dapat mengangkut 600 hingga 800 orang penumpang. Augustin de Beaulieu yang telah menyaksikan sendiri kapal-kapal *Galley* itu, menyatakan bahwa kapal-kapal itu besarnya tiga kali lebih besar daripada kapal-kapal yang dibangun di Eropa pada masa itu.²²

Selain besarnya, kapal-kapal *Galley* itu juga mempunyai suatu tempat menembak di haluan depan yang dilapisi dengan kepingan-kepingan emas murni.²³ Salah sebuah di antaranya diberi nama *Tjakra Donja*.²⁴

Gajah-gajah milik kerajaan Aceh merupakan kekuatan inti pasukan daratnya yang jumlahnya 900 ekor. Binatang ini telah

dilatih sedemikian rupa, sehingga tidak takut kepada api dan suara-suara tembakan.²⁵ Mengenai persenjataan, kerajaan Aceh pada masa itu mempunyai 2000 pucuk meriam, yang terdiri dari 800 meriam besar dan 1200 meriam biasa. Selain itu juga memiliki senjata-senjata ringan lain yang sederhana, yang dibuat dari batu, alat-alat pembakar dan jaring-jaring yang banyak jumlahnya.²⁶ Satu hal yang sangat menguntungkan angkatan perang Aceh pada masa itu adalah didapatnya sedemikian banyak belerang di pulau Weh yang terletak beberapa kolometer sebelah utara pantai Aceh dan di sebuah gunung dekat Pedir. Dengan adanya belerang ini memudahkan tentara Aceh untuk membuat bahan-bahan peledak atau mesiu-mesiu bagi meriam-meriamnya.²⁷ Selain itu juga diketemukan sumber-sumber minyak di dekat Deli, yang minyaknya dapat juga digunakan oleh tentara Aceh untuk membakar kapal-kapal musuhnya.²⁸

Bentuk teritorial yang terkecil dari susunan pemerintahan kerajaan Aceh adalah *gampong* (kampung) yang dikepalai oleh seorang *keucik* dan *waki* (wakil) dari *keucik* itu. Sebuah *gampong* terdiri atas beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut *meunasah*. Dalam memerintah *gampong*, *keucik*, dibantu pula oleh pejabat keagamaan yang disebut *teungku meunasah* dan para orang tua kampung yang disebut *ureung tuha*.

Gampong-gampong yang letaknya berdekatan dan yang penduduknya melakukan ibadah bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, merupakan suatu kekuasaan wilayah pula yang diberi nama *mukim*.²⁹ yang memegang pimpinan *mukim* disebut *imeum mukim*. Dialah yang bertindak sebagai *imeum* (imam) sembahyang pada setiap hari Jum'at yang diikuti sekurang-kurangnya oleh 40 orang laki-laki dewasa. Pada mulanya tiap-tiap *mukim*, ditetapkan harus berpenduduk 1.000 orang laki-laki yang dapat memegang senjata.³⁰ Hal ini tentunya dimaksud untuk kepentingan politis, sehingga *mukim* ini selain bersifat teokratis juga politis. Dalam perkembangannya, fungsi dari *imeum mukim* berubah menjadi kepala pemerintahan di sebuah *mukim* yang mengkoordinasi kepala-kepala *gampong*

atau *keucik-keucik*. Dengan berubahnya fungsi *imeum mukim*, berubah pula nama panggilannya yakni *kepala mukim*. Untuk pengganti sebagai imam sambahyang pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut *imeum mesjid* (imam mesjid).

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar dari *mukim* adalah yang disebut *nanggroe* (negeri). Di *Aceh Inti* (*Aceh Proper*), *nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah *mukim* yang dikepalai oleh seorang *uleebalang*.³¹ Di luar daerah *Aceh Inti*, yaitu di daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaan kerajaan Aceh, statusnya juga disamakan dengan *nanggroe* seperti di *Aceh Inti*.³² Para *uleebalang* menerima kekuasaan langsung dari sultan Aceh. Di daerah kekuasaannya mereka memerintah secara turun-temurun. Namun sewaktu akan memangku jabatan sebagai pimpinan di daerahnya, maka mereka harus disahkan pengangkatannya oleh sultan Aceh.³³ Di dalam surat pengangkatan itu harus dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh, yang disebut *cap sikureung*³⁴ (cap sembilan) atau disebut juga cap *ha'ilintar*.

Tugas *uleebalang* adalah memimpin *nanggroe*-nya dan mengkoordinasi tenaga-tenaga tempur dari daerah kekuasaannya bila ada peperangan.³⁵ Selain itu juga menjalankan instruksi-instruksi dari Sultan, menyediakan tentara dan perbekalan perang bila dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan membayar upeti kepada sultan Aceh. Meskipun demikian mereka masih merupakan pemimpin-pemimpin yang sangat berkuasa di daerah mereka sendiri.³⁶ Mereka masih tetap sebagai pemimpin-pemimpin yang merdeka di daerahnya dan bebas melakukan apa saja terhadap kawula di daerahnya. Misalnya dalam hal pengadilan dan menjatuhkan hukuman.³⁷

Menurut tradisi, ketika kerajaan Aceh berada di bawah Sultan Nurul Alam Nakiatuddin Syah (1675 – 1678), *Aceh Inti* dibagi menjadi *Lhee Sagoe* (tiga-sagi). Tiap sagi terdiri dari sejumlah *mukim*. Berdasarkan jumlah *mukim-mukim* yang disatukan, maka ketiga Sagi ini adalah Sagi XXII *Mukim*, Sagi XXV *Mukim*

dan sagi XXVI Mukim. Pimpinan sagi ini juga disebut *uleebalang*.³⁸⁾

Tingkat tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah pemerintahan pusat, yang berkedudukan di ibu-kota kerajaan. Kepala Pemerintahan pusat adalah sultan. Dalam mengendalikan pemerintahannya, sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidang masing-masing. Ketika datangnya pedagang-pedagang Belanda dan Inggris pertama kali ke Aceh, sultan dalam pemerintah kerajaannya dibantu oleh lima orang yang terkemuka, yaitu seorang yang disebut bendahara dan empat orang sahbandar.³⁹⁾ Bendahara berfungsi sebagai penulis atau sekretaris kerajaan. John Davis dalam laporan perjalanannya menyebutkan Bendahara sebagai "Penulis rahasia" dari kerajaan Aceh.⁴⁰⁾ Para Sahbandar berfungsi sebagai pembantu sultan dalam mengurus dan mengepalai perdagangan di kota-kota pelabuhan.

Berdasarkan sebuah manuskrip,⁴¹⁾ yang isinya mengenai susunan pemerintahan kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda, menyebutkan bahwa susunan pemerintahan pusat kerajaan Aceh terdiri atas 24 lembaga atau jabatan, yaitu: *Kerekun Katibul Muluk* atau Sekretaris Raja, *Rais Wazirat Addaulah* atau Perdana Menteri, *Wazirat Addaulah* atau Menteri Negara, *Wazirat Al Akdham* atau Menteri Agung, *Wazirat Al Harbiyyah* atau Menteri Peperangan, *Wazirat Al Haqqamiyah* atau Menteri Kehakiman, *Wazirat Al Daraham* atau Menteri Keuangan, *Wazirat Al Mizan* atau Menteri Keadilan, *Wazirat Al Maarif* atau Menteri Pendidikan, *Wazirat Alkharijiyah* atau Menteri Luar Negeri, *Wazirat Addakhiliyyah* atau Menteri Dalam Negeri, *Wazirat Al Augaf* atau Menteri Urusan Waqaf, *Wazirat Azziraah* atau Menteri Pertanian, *Wazirat Al Maliyyah* atau Menteri Urusan Harta, *Wazirat Al Muwashalat* atau Menteri Perhubungan, *Wazirat Al Aisyighal* atau Menteri Urusan Kerja, *Syikh Al Islam Mufti* atau empat Syikh Kaabah, *Qadhi Malikul Adil* atau Kadhi Raja yang Adil, *Wazir Tahakkum Muharrijlailan* atau Ketua Pengurus Korps Kesenian, *Qadhi Muallidlam* atau Kadhi/Jaksa Agung,

Imam Bandar Darul Makmur Darussalam, *Keucik Muluk* atau *Keucik Raja*, *Imam Muluk* atau *Imam Raja*, dan *Panglima Khanduri Muluk* atau *Ketua Penyelenggara Kenduri Raja*.⁴²

Kedua puluh empat lembaga atau jabatan yang ada di Kerajaan Aceh seperti tersebut di atas, dibawah oleh orang-orang tertentu yang diangkat oleh sultan. Ada beberapa pimpinan yang membawahi lembaga masing-masing yang amat dekat dan amat besar pengaruhnya kepada sultan. Di antara mereka itu adalah perdana menteri, biasanya bergelar *Orangkaya Maharaja Sri Maharaja*; ialah orang yang membawahi *wazir-wazir* atau menteri-menteri di kerajaan Aceh. Kemudian *Kadhi Malikul Adil* ialah orang yang mengurus pengadilan agama di kerajaan Aceh. Jabatan *kadhi* ini diadakan pertama kali pada masa Sultan Iskandar Muda,⁴³ namanya *Tjut Sandang* atau *Dja Bangka*. Dinamakan demikian karena ia berasal dari *Kawom Dja Sandang*.⁴⁴ Dalam panggilan sehari-hari *kadhi* di kerajaan Aceh dipanggil sesuai dengan jabatannya, yaitu *Kadhi Malikul Adil*.

Pemimpin selanjutnya yang amat dekat dan besar pengaruhnya kepada sultan, adalah *Wazir al Harbiyyah* atau materi peperangan. Dia lebih terkenal dengan sebutan *Laksamana* atau orang kaya *Laksamana*.⁴⁵ Pada waktu kerajaan Aceh di bawah Sultan Alaudin Riayat Syah Al Mukammil (1588 – 1604), *Laksamananya* adalah seorang wanita.⁴⁶ Kepada *Laksamana* oleh Sultan Aceh dipercayakan untuk memimpin angkatan perang Aceh, baik angkatan darat maupun armada lautnya. Pada masa Sultan Iskandar Muda, *Laksamana* inilah yang selalu memimpin penaklukan-penaklukan yang dilakukan Kerajaan Aceh dan berkat kemenangan-kemenangan yang diperolehnya membuat kekuasaan Sultan Iskandar Muda menjadi lebih besar.⁴⁷ Oleh H.K.J. Cowan, *Laksamana Aceh* pada masa Sultan Iskandar Muda diidentikkan dengan tokoh *Malem Dagang* dalam epos *De Hikayat Malem Dagang*.⁴⁸ Hikayat ini menceritakan kehebatan Sultan Iskandar Muda dan *Laksamananya* dalam melakukan penaklukan ke salah sebuah kerajaan di Semenanjung Melayu. Mengenai kehebatan *Laksamana Aceh* pada masa Sultan Iskandar Muda, P.J. Veth dalam sebuah karyanya mengenai

sejarah Aceh, memberikan pujian dengan menyebutkan Laksamana Aceh itu merupakan seorang pemimpin perang yang terbesar yang pernah memimpin suatu ketentaraan di kepulauan Indonesia pada masa itu.⁴⁹

Pemimpin lain yang merupakan pembantu terdekat sultan ialah yang disebut *Kerukun Katibul Muluk*. Dia berkedudukan sebagai juru tulis sultan. Dialah yang menulis surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan kerajaan, seperti surat-menyurat dengan kerajaan lain, membuat surat lisensi dan surat-surat pengangkatan⁵⁰ *uleebalang*.

Selain keduapuluhempat jabatan yang ada di Kerajaan Aceh seperti telah disebut di atas, terdapat pula beberapa buah badan atau lembaga yang turut mendampingi sultan Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Di antara lembaga itu adalah, (1) *Balai rung sari*, yaitu tempat bermufakat empat orang *uleebalang* (hulubalang empat) dan tujuh orang alim ulama, serta menteri-menteri Kerajaan Aceh. (2) *Balai Gading* yaitu tempat mufakat dari delapan orang *uleebalang* dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri Kerajaan Aceh. (3) *Balai Majlis Mahkamah Rakyat*, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak tujuhpuluhtiga orang yang datang dari tujuhpuluhtiga *mukim*.⁵¹ Jadi tiap-tiap *mukim* diwakili satu orang.

Selain ketiga lembaga di atas, dalam sebuah naskah yang bernama *Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda*⁵², disebut pula ada *Balai Laksamana*, yaitu semacam markas angkatan perang, yang dikepalai oleh seorang yang disebut laksamana, yang tunduk atau berada di bawah sultan.⁵³ Selanjutnya ada pula yang disebut *Balai Fardah*, yang tugasnya memungut atau mengumpulkan *wasil* (bia cukai). Balai ini tunduk kepada perintah perdana menteri dan menteri-menteri.⁵⁴ Disebutkan pula dalam memerintah kerajaan, sultan tunduk kepada *kanun*.⁵⁵ Sedangkan Kadhi Malaikul Adil Mufti empat Besar, *Kerukun Katibul Muluk* dan Perdana Menteri serta sekalian menteri-menteri Kerajaan Aceh, tunduk kepada sultan dan juga kepada *kanun*.⁵⁶

Penggantian sultan di Aceh biasanya dilakukan apabila sultan yang memerintah sudah meninggal dunia. Lazimnya sultan diganti oleh putera sulung dari isteri yang pertama, tetapi hal ini tidak selalu demikian. Dari beberapa fakta yang disebutkan di bawah ini dapat diketahui bahwa sistem penggantian sultan di Aceh tidak selalu harus diganti oleh putera sulungnya dari isteri yang pertama. Sewaktu Sultan Ali Riayat Syah (1604 – 1607) meninggal, ia tidak digantikan oleh anaknya, tetapi oleh kemenakannya yang bernama Mahajaraja Darma Wangsa Tun Pangkat, dengan gelar Sultan Iskandar Muda.⁵⁷ Ketika Sultan Iskandar Muda meninggal, yang menggantikannya juga bukan puteranya, tetapi putera Sultan Pahang (sesudah menjadi sultan di Aceh bergelar Sultan Iskandar Thani) yang dibawa ke Aceh ketika Kerajaan Pahang ditakulukkan oleh Aceh pada tahun 1618⁵⁸. Begitu pula yang menggantikan Iskandar Thani (1636 – 1641), ialah isterinya yang bergelar Tajul Alam Syafiatuddin Syah (1641 – 1675). Kemudian berturut-turut kerajaan Aceh diperintah oleh para sultan yaitu Nuris Alam Nakiatuddin Syah (1675 – 1677), Inayat Zakiatuddin Syah (1677 – 1688) dan Kamalat Syah (1688 – 1699). Sewaktu meninggalnya Sultan Alaudin Muhammad Syah atau Tuanku Muhammad (1781 – 1795), ia diganti oleh puteranya yang masih kecil. Sebelum ia dewasa pemerintahan kerajaan dipegang oleh ibu dan pamannya dari pihak ibu.⁵⁹

Dari fakta-fakta di atas, jelas bahwa sistem pergantian sultan di Aceh agak longgar, tetapi ada juga syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat sebagai sultan. Misalnya harus berbadan sehat, artinya tidak buta, tidak tuli, tidak pincang berpikiran sehat dan yang terpenting harus beragama Islam.⁶⁰

4.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat

Sebagian besar mata pencaharian rakyat Aceh pada periode itu ($\pm$ 1500 M – 1800 M) adalah berdagang dan bercocok tanam. Selain itu ada juga rakyat yang bekerja sebagai ahli-ahli pertukangan, seperti tukang mas, tukang periok, tukang

meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun dan pembuat berbagai rupa minuman keras dari beras.⁶¹ Hasil-hasil Kerajaan Aceh yang utama adalah beras, daging, ikan, buah-buahan dan binatang ternak, tetapi hasil-hasil ini sama sekali tidak menarik perhatian pedagang-pedagang asing yang datang ke sana. Yang menarik mereka ialah lada, timah, emas, sutera, minyak, kapur barus, kemenyan, daging, pinang dan gajah. Selain itu di Aceh juga didapatkan barang-barang yang didatangkan dari luar negeri seperti rempah-rempah, pakaian dari India dan porselin dari Cina. Dari segala hasil seperti yang telah disebutkan di atas, lada yang merupakan barang dagangan utama kerajaan Aceh. Pohon-pohon lada di Aceh tumbuh sedemikian banyaknya, sehingga tiap tahunnya Kerajaan Aceh mampu untuk memuat hasil lada ini pada 20 buah kapal dagang menurut ukuran masa itu.⁶²

Semua kegiatan perdagangan di Kerajaan Aceh dipusatkan di ibukota kerajaan,⁶³ sehingga kota *Bandar Aceh Dar as salam* menjadi ramai melebihi semua kota pelabuhan lainnya di pantai bagian timur dan barat Pulau Sumatera. Di sini terdapat sejumlah pedagang-pedagang asing yang terdiri dari bermacam-macam bangsa, di antaranya terdapat pedagang-pedagang Cina, Gujarat, Portugis, Arab, Benggala dan Pegu.⁶⁴

Pedagang-pedagang ini mendiami tempat-tempat tertentu yang letaknya terpisah-pisah di dalam kota. Mereka tinggal berkelompok-kelompok, sesuai dengan negeri asal mereka. Para pedagang ini mendapat sambutan baik di Aceh, baik dari sultan sendiri maupun dari pejabat-pejabat Kerajaan Aceh lainnya. Mereka pada umumnya senang berdagang di ibukota Kerajaan Aceh, karena pajak-pajak atau bea-bea yang harus mereka bayar masih terlalu murah bila dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang pernah mereka datang pada waktu itu.⁶⁵

Di ibukota kerajaan maupun di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh Kerajaan Aceh, perdagangan lada berada di bawah pengawasan sultan Aceh. Pedagang-pedagang asing yang ingin berdagang di daerah takluk Aceh harus memperoleh

izin dari sultan Aceh. Lada milik kerajaan dijual oleh sultan atau para pejabatnya, seperti *orang kaya* dan sahbandar kepada pedagang-pedagang asing. Setelah lada milik kerajaan, ada juga lada yang diperdagangkan oleh pedagang-pedagang asing seperti pedagang dari Gujarat, Arab dan Cina. Rakyat biasa ada juga yang ikut ambil bagian dalam perdagangan lada, tetapi kebanyakan lada-lada yang mereka perdagangkan itu adalah kepunyaan majikan mereka.⁶⁶

Mengenai harga lada di Kerajaan Aceh jika sebelum kedatangan pedagang-pedagang bangsa Barat, sekitar 8 *rial* per bahar (1 bahar $\pm$ 375 *lbs.*), maka setelah kedatangan bangsa Belanda dan Inggris harganya naik menjadi 20 *rial* per bahar. Dengan datangnya pedagang-pedagang bangsa Perancis, harga lada naik lagi sampai mencapai 48 *rial* per bahar, ini baru harga di daerah pantai barat Sumatera.⁶⁷ Sedangkan di ibukota Kerajaan Aceh pada saat yang sama, harga lada bisa mencapai 64 *rial* per bahar.⁶⁸

Untuk mengumpulkan lada sebanyak mungkin di ibukota kerajaan sultan Aceh menyuruh para wakilnya yang berada di pantai barat Sumatera untuk mengumpulkan lada di sana dan kemudian mengangkutnya ke Aceh melalui jalan laut. Jumlah lada yang dihasilkan tiap-tiap tahun di pantai barat Sumatera sebanyak 50.000 karung.⁶⁹ Menurut perkiraan sultan Aceh mengangkutnya ke Aceh sebanyak 16.000 karung (tiap-tiap karung 60 *lbs.*), jadi jumlah total 960.000 *lbs*⁷⁰, atau 43.584 kg.

Sumber penghasilan yang utama bagi kerajaan adalah hasil perniagaan yang dilakukan di Pelabuhan Aceh dan di daerah-daerah takluknya. Selain itu juga dari bia cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di Pelabuhan Aceh. Setiap kapal asing yang memasukkan barang-barang ke Kerajaan Aceh, dipungut pajak pemasukan sebesar 5% dari harga barang-barang itu.⁷¹ Sumber pemasukan lainnya adalah berupa hadiah-hadiah berharga yang diberikan oleh tamu-tamu dan pedagang-pedagang asing, yang berkunjung ke Kerajaan Aceh. Para pedagang

asing, hampir tidak dapat melakukan urusannya di Kerajaan Aceh tanpa memberikan hadiah-hadiah kepada sultan Aceh. Pemberian hadiah itu berlaku bagi setiap pedagang asing yang berdagang di Aceh. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam sebuah ketentuan yang telah dituangkan dalam *Adat Meukuta Alam*, yakni:

Adapoen orang loewaran jang Islam lain dari pada bangsa Atjeh seperti orang Arab, Benggali, Melajoe dan Djawa atau seoempamanja, masuk ke dalam negeri Atjeh Bandar Darus Salam pekerdjaannja berniaga tetapi koetika dia baroe berdagang ada menghantarkan persembahan kepada radja soepaja boleh kenal dengan radja.⁷²

Selain dari hadiah-hadiah, sultan Aceh juga menerima warisan-warisan dari "hamba"-nya yang meninggal, bila hamba tersebut tidak mempunyai pewaris dari harta bendanya.⁷³

Harta benda orang-orang asing yang meninggal di Aceh juga hanya sultan yang berhak memilikinya.⁷⁴ Menurut suatu kebiasaan yang lama sultan Aceh mempunyai hak pula untuk menyita segala-galanya, bilamana sebuah kapal asing terkandas di pantai kerajaannya.⁷⁵

Seperti telah disebutkan bahwa daerah-daerah takluk Kerajaan Aceh di Pulau Sumatera, sebagian besar terdiri atas kota-kota pelabuhan. Tiap-tiap kota pelabuhan ini terkenal dengan hasil-hasil buminya.

Daerah Pedir terkenal dengan kesuburan tanahnya. Di sana banyak ditanam padi, sehingga Pedir pada waktu itu terkenal sebagai lumbung beras bagi kerajaan Aceh.⁷⁶ Selain hasil padi, Pedir juga terkenal dengan ulat-ulat sutera yang memberikan hasil sutera bagi Kerajaan Aceh. Di daerah Pase sampai ke Deli juga didapatkan daerah yang amat subur dan sangat cocok untuk pertanian. Deli terkenal dengan hasil minyaknya. Daerah Daya juga amat subur, di sini terdapat banyak beras dan amat kaya dengan binatang ternak. Kota pelabuhan Singkil menghasilkan banyak kapur barus. Barus adalah sebuah kota yang indah dan di sana banyak didapatkan kapur barus dan kemenyan yang banyak menghasilkan uang bagi penduduknya.

Pasaman terletak di kaki sebuah gunung yang tinggi dan banyak menghasilkan lebih banyak lada dari Pasaman. Pariaman berpenduduk cukup banyak. Kota pelabuhan ini letaknya lebih baik dari pada Tiku dan hawanya juga lebih sehat. Di sana didapatkan cukup banyak bahan makanan, tetapi pohon-pohon lada di sini tidak begitu subur. Kota Padang juga menghasilkan lada, tetapi hasil lada ini tidak begitu terkenal bila dibandingkan dengan hasil emasnya yang diperdagangkan secara besar-besaran.⁷⁷ Emas ini banyak yang dibawa ke ibukota Kerajaan Aceh dan merupakan daya tarik pula bagi pedagang-pedagang asing untuk datang ke sana. Pada awal abad ke-17, menurut berita-berita dari Barat, tidak ada tempat lain di Asia kecuali Jepang yang dapat menghasilkan begitu banyak emas seperti yang dimiliki Kerajaan Aceh.⁷⁸

Di atas telah disebutkan bahwa Kerajaan Aceh pada masa puncak perkembangannya telah melakukan ekspansi-ekspansi ke kerajaan sekitarnya. Dalam ekspansi ini meskipun di dalamnya terkandung suatu kekuatan militer yang bertujuan politis, tetapi sebenarnya menjurus untuk kepentingan ekonomis, yaitu untuk mendapatkan monopoli perdagangan di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkannya. Hal ini dapat dilihat apabila suatu daerah telah berhasil ditaklukkan, sultan Aceh menempatkan wakilnya di sana yang ditugaskan hanya untuk mengawasi perdagangan saja, sedangkan penguasaan yang bersifat tradisional tetap diserahkan kepada penguasa semula dari daerah-daerah itu. Begitu pula terhadap kerajaan-kerajaan Melayu di Semenanjung Melayu, di sana Aceh hanya ingin mendapatkan kerajaan-kerajaan Melayu itu berada di bawah pengaruh kekuasaannya.⁷⁹

Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani (1637 - - 1641), beberapa kerajaan di Semenanjung tanah Melayu sudah tidak lagi berada di bawah pengaruh Kerajaan Aceh. Seperti Kerajaan Johor sudah memisahkan diri dari pengawasan Aceh dan telah mengadakan suatu perjanjian persekutuan dengan pihak Belanda. Kerajaan Pahang juga sudah bebas dari pengontrolan pihak Aceh, tetapi antara kerajaan ini dengan Kerajaan Aceh

masih terjalin suatu hubungan baik, karena Sultan Iskandar Thani yang menjadi sultan Aceh adalah bekas putra mahkota kerajaan Pahang.⁸⁰ Satu-satunya kerajaan yang masih berada di bawah pengawasan Aceh adalah Kerajaan Perak. Aceh di sana masih memiliki tambang-tambang timah dan menguasai hampir semua perdagangannya.⁸¹ Pedagang-pedagang asing yang ingin membeli timah di sana harus seizin sultan Aceh. Hal ini berlangsung sampai pada pertengahan abad ke-17, ketika Aceh berada di bawah Tajul Alam Syafiatuddin Syah (1641 -- 1675).

Menurut cerita-cerita lama di Aceh, salah satu peninggalan yang berasal dari zaman Sultan Alaudin Riayat Syah al Kahhar ialah penggolongan rakyat Aceh dalam *soeke-soeke* (suku-suku) yang di Aceh disebut juga dengan nama *Kawom*.⁸² Pembagian ini didasarkan atas keturunan dari nenek moyang pihak laki-laki dan adat-istiadat yang bersamaan dari suku-suku yang tinggal di Aceh.⁸³ Ada empat suku atau *kawom* yang terdapat dalam masyarakat Aceh pada waktu itu, ialah: (1) *Kawom (soeke) Lhereutoih* (suku tiga ratus), suku ini berasal dari orang-orang Mantir dan orang-orang Batak, (2) *Kawom Imeum Peut* (kaum imam empat), mereka berasal dari orang-orang Hindu yang telah memeluk agama Islam, (3) *Kawom Tok Batee*, yaitu mereka yang terdiri atas orang-orang asing seperti Arab, Parsi dan Turki, dan (4) *Kawom Dja Sandang*, yaitu orang-orang Hindu yang mengabdikan kepada majikan mereka, termasuk sultan Aceh.⁸⁴ Keempat *kawom* tersebut di atas mempunyai pemimpin masing-masing yang disebut *panglima kawom*,⁸⁵ yang dipilih oleh *kawomnya* sendiri. Kewajiban *panglima kawom* adalah menjunjung tinggi kepentingan-kepentingan *kawomnya*. Kedudukan mereka sifatnya turun-temurun dan setiap *panglima kawom* yang diangkat oleh *kawomnya* harus mendapatkan pengesahan resmi dari *uleebalang*, yang berkuasa di daerah di mana *panglima kawom* itu bertempat tinggal.

Masing-masing anggota *kawom* mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap *kawomnya*. Mereka mempunyai adat kebiasaan yang berlainan menurut negeri asal mereka. Oleh karena itu di antara *kawom* ini oleh sultan diatur sebagai suatu kesatuan dan

dijadikan dasar dalam mengatur tata cara kehidupan dalam kerajaannya misalnya pengaturan mengenai adat, langsung diatur dan dilaksanakan oleh sultan sendiri dengan dibantu oleh penasihat-penasihatnya. Urusan-urusan yang berhubungan dengan *hukum* (syariat Agama Islam) diserahkan kepada *kadhi malikul adil* dan para ulama. Urusan *reusam*⁸⁶ diserahkan kepada *para panglima kawom* dan *para uleebalang*, di masing-masing tempat. Urusan *kanun* yang berhubungan dengan sopan-santun dan tata-tertib dalam perkawinan diserahkan kepada kebijaksanaan para isteri sultan.

Dalam memerintah kerajaan, sultan Aceh membuat ketetapan-ketetapan yang sesuai dengan situasi pada zamannya. Pada masa Sultan Iskandar Muda, ia membuat hak-hak istimewa yang hanya dia yang berhak melakukan. Misalnya hak-hak dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang bersalah, hak membunyikan meriam pada saat matahari terbenam, hak untuk dipanggil dengan nama *daulat* dan hak untuk membuat mata uang.⁸⁷ Selain membuat hak-hak istimewa, Sultan Iskandar Muda juga menciptakan sebuah peraturan tentang tata cara yang berlaku di Kerajaan Aceh, yaitu yang dikenal dengan nama *Adat Meukuta Alam*.⁸⁸ Oleh sultan-sultan yang memerintah sesudahnya menyesuaikan atau menyempurnakan *Adat Meukuta Alam* ini dijumpai berbagai ketentuan mengenai tata dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Aceh, misalnya tata cara dalam perdagangan, tata cara yang berlaku di istana Aceh, mengenai pemerintahan dan penggunaan cap stempel kerajaan.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa pimpinan sebuah *gampong* (kampung) di Aceh disebut *keucik*. Dalam memerintah *gampong*-nya, *keucik* ini dibantu oleh wakilnya dan orang-orang tua dari *gampong* itu. Misalkan memutuskan sesuatu persoalan penting yang berhubungan dengan kepengan *gampong* itu, *keucik* terlebih dahulu mengadakan suatu permufakatan dengan orang-orang tua dari *gampong* itu. Malahan kadang-kadang kalau dianggap perlu memanggil seluruh penduduk laki-laki dalam *gampong* itu untuk ikut serta bermufakat. Sesuatu keputusan diambil berdasarkan hasil-hasil permufakatan itu,

atau apa yang telah ditentukan oleh penduduk *gampong* itu.⁸⁹ Dalam kehidupan *gampong* berlaku adat, yang muda harus menghormati yang tua.

4.3 Kepercayaan dan Kehidupan Seni Budaya

Seperti telah disebutkan sesudah orang-orang Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, banyak pedagang Islam yang datang ke Aceh. Dan Aceh mereka jadikan selain sebagai tempat berdagang juga sebagai tempat menyebarkan agama Islam. Ketika Kerajaan Aceh telah dapat menggantikan kedudukan Malaka, baik sebagai pusat perdagangan maupun pusat penyebaran Agama Islam, Kerajaan Aceh telah menjalin suatu hubungan persahabatan dengan Kerajaan Islam terkemuka di Timur Tengah pada waktu itu, yaitu Kerajaan Turki. Pada masa itu pula banyak ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam yang datang ke Aceh. Para ulama dan pujangga ini di Aceh mengajarkan ilmu Agama Islam (*Theologie Islam*) dan berbagai ilmu pengetahuan, selain itu juga menulis bermacam-macam kitab, khususnya mengenai ajaran agama. Karenanya pengajaran Agama Islam di Aceh menjadi penting dan Aceh berkembang menjadi kerajaan Islam yang kuat di nusantara ini.

Di antara para ulama dan pujangga yang pernah datang ke Aceh, terdapatlah nama Muhammad Azhari yang mengajar ilmu Metafisika,⁹⁰ Syeh Abdul Khair ibn Syeh ibn Hajar ahli dalam bidang pognatic dan mistik, Muhammad Yamani ahli dalam ilmu usul, Syeh Muhammad Jailani ibn Hasan ibn Muhammad Hamid dari Gujarat, yang mengajar logika. Kemudian berada pula di Aceh, Syeh Bokhari al Jauhari yang mengarang kitab *Tajus Salatin* atau mahkota raja-raja.

Kitab ini mempunyai nilai-nilai keagamaan dan merupakan pedoman untuk raja-raja yang memerintah kerajaan. Pada masa itu, kitab ini sangat besar pengaruhnya di Kepulauan Nusantara, sampai abad ke-19 di kalangan keraton-keraton di Jawa Tengah dan di Semenanjung Melayu masih digunakan.⁹¹

Tokoh pendidikan agama lainnya yang berada di Kerajaan Aceh ialah Hamzah Fansuri. Ia merupakan seorang pujangga dan

guru agama yang terkenal dengan ajaran *Tasawuf* yang beraliran *Wujudiyah*.⁹² Di antara karya-karya Hamzah Fansuri ialah *Asrar al Aufin*, *Syarab al Asyikin* dan *Zuiat al Nuwahidin*. Sebagai seorang pujangga, Hamzah Fansuri juga menulis syair-syair, di antaranya yang terkenal ialah *Syair si Burung Pungguk*, *Syair si Burung Pungai*, *Syair si Dang Fakir* dan *Syair Perahu*. Ulama penting lainnya yang berada di Aceh ialah Syamsuddin as Samathrani atau lebih terkenal dengan nama Syamsuddin Pasai. Ia adalah murid dari Hamzah Fansuri dan yang memperkembangkan paham *Wujudiyah* di Aceh.⁹³ Kitab-kitab yang ditulis Syamsuddin Pase adalah *Durrat al Fara'id* *Hidayat al Habib*, *Miratul Mukmin*, *Miratul Muhakikin*, *Miratul al Qulub*, *Tabyan fi Makrifat al adyan* dan beberapa karya mengenai sifat dua puluh dan martabat tujuh.⁹⁴

Ulama dan pujangga Islam yang pernah pula datang ke Kerajaan Aceh ialah Syeh Nuruddin ar Raniri. Ia di Aceh menentang ajaran *Wujudiyah* yang diajarkan Hamzah Fansuri dan yang dikembangkan Syamsuddin Pase, karena ajaran itu dianggap menyesatkan ajaran Islam. Dengan bantuan sultan Aceh pada masanya (Iskandar Thani 1637 - - 1641), Nuruddin ar Raniri berhasil memberantas ajaran *Wujudiyah* dengan membakar kitab-kitab ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Pase di muka Mesjid Baiturrahman,⁹⁵ *Bandar Aceh Dar as Salam* dan juga dengan membunuh beberapa pengikut ajaran itu.⁹⁶ Selama di Aceh Nuruddin ar Raniri banyak menulis kitab-kitab mengenai Agama Islam, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu klasik. Di antaranya ialah *Siratul Mustakim* mengenai ilmu fiqh *Nubhafida azzillmaasah ibihi*, *Akbar al akhira fi ahwal qiamatisy syafaalqulub Hujjatan siddiq li-dafa'az Zindiq*, *Fath al mubin ala'l mulhidin kifayashalalat* dan *Bus-tanus Salatin*. Tersebut terakhir adalah karya Sastra Nuruddin ar Raniri yang terbesar dan paling tinggi mutunya dalam ke-susastraan Melayu klasik.⁹⁷ Kitab ini selain mengandung nilai-nilai keagamaan, juga mempunyai nilai-nilai sejarah, khususnya mengenai sejarah Kerajaan Aceh. Ulama lainnya yang pernah tinggal di Aceh, ialah Syeh Abdur Rauf Singkil (Teungku

Syiah Kuala). Ia menjadi pujangga istana Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Tajul Alam Syafiatuddin (1641 -- 1675). Di antara karya-karya ulama ini adalah *Miratul al Tullab*, *Umdatal Muhtajin*, *Kifaya al Muhajin*, *Hujal ala Jum'at al Mukhasanah*.⁹⁸

Dengan melihat banyak para ulama dan pujangga yang datang ke Aceh, maka dapat dipastikan bahwa Kerajaan Aceh menjadi pusat studi Islam pada masa itu. Karena faktor agama (Islam) ini merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh pada periode-periode berikutnya. Sehubungan dengan hal ini tidaklah salah seperti yang dikatakan oleh B.J. Boland, bahwa seorang Aceh adalah seorang Islam.⁹⁹

Pada masa kejayaan Kerajaan Aceh, oleh sultannya banyak didirikan mesjid sebagai tempat beribadah umat Islam.. Di antaranya ialah yang bernama mesjid *Baitul-Rahman*¹⁰⁰ dan Baitul Musyahadah.¹⁰¹ Selain itu juga di ibukota Kerajaan Aceh dibangun sebuah taman yang sangat indah, yang dinamakan "taman gairah".¹⁰² Mengenai keindahan taman itu *Bustanus Salatin* antara lain menggambarkan:

..... ia itu kebon indah, kira-kira sa-ribu depa luasnya, maka ditanaminya pelbagai bunga-bunga dan aneka-aneka buah-buahan. Di gelar Baginda Bustan itu Taman Ghairah, dan ada pada sama tengah taman itu sungai bernama Darul-Iski berturap dengan batu, terlalu jerneh ayer-nva, lagi amat sejok, barang siap meminom dia sehatlah tubohnya.¹⁰³

Di dalam taman itu dibangun dua buah monumen yang disebut *Pinto Khob* dan *Goenongan*.¹⁰⁴ Kedua monumen itu sampai sekarang masih terdapat di Banda Aceh.

Di dalam laporan perjalanan Augustin de Beaulieu mengatakan bahwa di ibukota Kerajaan Aceh seni kerajinan yang berhubungan dengan pertukangan sangat dihargai, di sana banyak terdapat tukang-tukang kayu yang ahli membuat kapal-kapal dan perahu-perahu dari kayu dan juga tukang-tukang penuang tembaga yang mahir.¹⁰⁵ Kapal-kapal *galley* orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar.

Layar-layar pada kapal itu berbentuk segi empat sama dengan layar pada kapal milik Perancis. Papan-papan pada sisi kapal, tebalnya enam jempol jari, karenanya sebuah kapal milik Kerajaan Aceh tidak kalah dengan sepuluh kapal *galley* milik orang Portugis.¹⁰⁶

Stempel Kerajaan Aceh, yang dinamakan *cap sikureung* (cap sembilan), merupakan suatu karya seni yang indah, yang juga diciptakan pada masa kejayaan Kerajaan Aceh. Di dalam stempel itu dicantumkan nama-nama sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh sebanyak sembilan orang. Sultan yang sedang memerintah namanya ditempatkan di tengah-tengah, sedang delapan orang sultan lainnya nama-namanya ditempatkan di sekelilingnya.¹⁰⁷ Sultan-sultan yang mendampingi sultan yang nama-namanya dicantumkan di dalam stempel itu dipilih berdasarkan kemasyurannya ataupun karena hendak dijadikan sebagai kenang-kenangan.¹⁰⁸ Penggunaan stempel atau *cap sikureung* ini dilakukan sejak Sultan Iskandar Muda sampai sultan yang terakhir memerintah di Kerajaan Aceh.

4.4. Hubungan ke Luar

Pada pertengahan abad ke-16 atau tepatnya pada tahun 1563, Kerajaan Aceh mengirim suatu utusan ke Kerajaan Turki, yang merupakan sebuah kerajaan Islam terkemuka pada waktu itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan militer dalam rangka melawan orang-orang kafir (Portugis) di Malaka.¹⁰⁹ Bersama utusan tersebut dikirim pula hadiah-hadiah yang berharga yaitu berupa emas, rempah-rempah dan lada untuk penguasa Kerajaan Turki.

Selama di Turki para utusan Aceh telah meyakinkan penguasa Turki mengenai keuntungan yang akan didapat dari hasil perdagangan rempah-rempah dan lada, baik untuk Turki maupun untuk Aceh, bilamana Portugis telah dapat diusir dari Malaka oleh Aceh dengan bantuan Turki.¹¹⁰ Perutusan Aceh ini boleh dikatakan berhasil, karena pihak Turki telah bersedia mengirimkan bantuan kepada Aceh berupa dua buah kapal dan 500 orang Turki. Di antara 500 orang ini terdapat ahli-ahli mi-

liter yang dapat membuat kapal-kapal dan meriam-meriam besar. Selain itu pihak Turki juga memberikan sejumlah meriam berat dan perlengkapan-perengkapan militer lainnya kepada Kerajaan Aceh. Semuanya itu tiba di Pelabuhan Aceh pada tahun 1566 -- 1567.¹¹¹

Selain dengan Kerajaan Turki, Kerajaan Aceh juga mengadakan hubungan dengan beberapa pemimpin kerajaan di nusantara dan India, dengan maksud juga untuk mendapatkan bantuan militer. Sebagai imbalannya, Kerajaan Aceh juga mendapatkan bantuan yang terbatas dari pemimpin Calicut dan Jepara.¹¹²

Di bawah pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil (1588 - - 1604), Kerajaan Aceh mencoba mengadakan suatu hubungan dengan Portugis di Malaka. Hal ini rupa-rupanya mendapat sambutan baik pula dari pihak Portugis di Malaka. Sehingga pada masa itu terciptalah situasi damai antara pihak Aceh dengan Portugis, yang tidak pernah terjadi dengan sultan-sultan Aceh lain sebelumnya.

Mengenai sebab-sebab mengapa Kerajaan Aceh dan Portugis pada waktu itu mau menjalin suatu hubungan yang baik, ialah karena adanya kejenuhan pada kedua belah pihak yang terus-menerus melibatkan diri dalam peperangan-peperangan.¹¹³

Portugis ingin memanfaatkan masa damai itu untuk beristirahat, dan untuk menyiapkan suatu serangan secara besar-besaran terhadap Kerajaan Aceh, tetapi dari perkembangan situasi selanjutnya pihak Portugis telah mengubah maksudnya itu. Mereka rupa-rupanya tetap ingin memelihara suatu persahabatan dengan Kerajaan Aceh.¹¹⁴ Hal ini disebabkan ada maksud lain dari pihak Portugis, yakni keinginan untuk mengadakan suatu hubungan dagang dengan Kerajaan Aceh, untuk memperoleh keuntungan bagi pihaknya.

Hubungan baik antara Kerajaan Aceh dengan Portugis di Malaka dirintis ketika Sultan Aceh Sayid al Mukammil mengirim seorang utusan ke Malaka. Utusan Aceh itu membawa serta hadiah-hadiah berharga untuk diberikan kepada penguasa

Malaka yang pada waktu itu dipegang oleh D. Poulo de Lima.¹¹⁵ Tujuan utusan Aceh yang sebenarnya ialah untuk mengucapkan selamat kepada Portugis yang telah berhasil mengadakan penghancuran atas Kerajaan Johor yang rupa-rupanya bermusuhan dengan Kerajaan Aceh pada waktu itu.

Selain itu Aceh juga meminta kepada Portugis agar seorang wanita Aceh berpangkat yang ditahan oleh Portugis pada sebuah kapal yang sedang menuju ke Malaka supaya dibebaskan. D. Poulo de Lima mengabulkan permintaan utusan Aceh itu dan kemudian mengadakan suatu perjanjian damai dengan Kerajaan Aceh.¹¹⁶

Sekalipun adanya perdamaian tersebut, pihak Aceh tidak lagi menyerang kapal-kapal Portugis yang lewat perairan Aceh dan Selat Malaka. Orang-orang Portugis diberi kebebasan untuk datang dan berdagang di ibukota Kerajaan Aceh. Hal ini merupakan suatu keuntungan pula bagi Kerajaan Aceh, karena perdagangan hasil-hasil bumi terutama lada dapat ditingkatkan. Pada waktu itu menurut taksiran orang-orang Portugis yang berada di sana, Kerajaan Aceh telah mengekspor lada sebanyak 1500 *bares* tiap tahunnya.¹¹⁷

Menjelang tahun 1602, para pedagang bangsa Belanda di bawah pimpinan Gerard de Roy dan Laurens Bicker dengan beberapa kapal tiba di Pelabuhan Aceh. Mereka datang ke Kerajaan Aceh atas perintah Pangeran Mauritz dari Negeri Belanda dengan tujuan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Aceh. Bersama mereka dikirim pula hadiah-hadiah dan sepucuk surat untuk sultan Aceh.¹¹⁸ Isi surat tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut.

Pangeran Mauritz mengakui betapa baik sambutan yang telah diberikan sultan Aceh kepada para pedagang bangsa Belanda ketika mereka pertama kali tiba di Pelabuhan Aceh. Adanya hasutan-hasutan pihak Portugis telah menyebabkan sultan bertindak yang dirasa oleh para pedagang Belanda merugikan mereka. Selanjutnya dalam surat itu Pangeran Mauritz juga memohon kepada sultan Aceh untuk tidak mempercayai lagi hasut-

an-hasutan Portugis terhadap para pedagang Belanda di Aceh dan memohon agar sultan membebaskan kembali orang-orang Belanda yang sedang ditawan di Aceh.¹¹⁹ Selanjutnya pihak Belanda menginginkan suatu persahabatan dengan Kerajaan Aceh.

Sultan Aceh menyambut baik ajakan persahabatan dari pihak Belanda, dengan memberikan izin kepada mereka untuk dapat berdagang di Aceh, dan orang-orang Belanda yang sebelumnya ditawan di Aceh dibebaskan kembali. Bersama dengan kembalinya kapal Lourens Bicker dan Gerard de Roy ke Negeri Belanda,, sultan Aceh telah mengirim dua orang utusannya untuk menghadap Pangeran Maurisz dan wakil rakyat Negeri Belanda. Mereka ini merupakan wakil resmi yang pertama kali dari sebuah kerajaan di Asia yang mengunjungi Negeri Belanda. Pihak Belanda yang pada waktu itu sedang berperang melawan Spanyol (Perang 80 tahun), menerima utusan Aceh itu dalam suatu upacara kenegaraan yang diikuti pula oleh tamu-tamu terhormat dari beberapa negara Eropa lainnya.¹²⁰ Salah seorang dari utusan tersebut Abdul Zamat meninggal di kota Middelburg, dan atas biaya dari penguasa "Kompeni Hindia Timur", ia telah dimakamkan di sana.¹²¹ Utusan yang satu lagi, yang bernama Sri Mohammad pulang kembali ke Aceh.

Pada 6 Juni 1602, James Lancaster, seorang perwira dari angkatan laut Inggris beserta rombongan dengan membawa sepucuk surat dari ratunya untuk sultan Aceh, tiba di Pelabuhan Aceh.¹²² Mereka diterima di Kesultanan Aceh dalam sebuah resepsi yang diadakan oleh sultan Aceh untuk menyambut dan menghormati mereka secara kebesaran.

Sebelum melakukan suatu perundingan resmi dengan sultan, terlebih dahulu James Lancaster telah mengadakan perundingan pendahuluan dengan bawahan sultan Aceh. Pembicaraan dalam perundingan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Lancaster dapat mengerti, karena ia membawa serta seorang Yahudi dari Inggris sebagai penterjemah yang dapat berbahasa Arab dan berbahasa Inggris dengan baik.¹²³ Dalam perundingan itu Lancaster mengemukakan betapa pentingnya perdagang-

an antara kedua kerajaan itu, yakni kerajaan Inggris dan kerajaan Aceh. Ia menyinggung pula tentang keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan, dan mengatakan bahwa sultan Aceh tentu sudah maklum bahwa banyak negeri yang maju sebagai akibat dari perdagangan.

Kekayaan suatu negeri akan bertambah menurut pertambahan kekayaan rakyatnya dan makin ramah penerimaan dan perlakuan terhadap pedagang-pedagang asing, sehingga makin baik bagi perkembangan perdagangan.¹²⁴

Selanjutnya James Lancaster memohon, sebaiknya sultan Aceh melarang perdagangan orang-orang Portugis di Aceh, dan juga agar sultan mengeluarkan peraturan supaya rakyatnya tidak memperlakukan hal yang tidak baik terhadap orang-orang Inggris yang berada di Aceh. Orang-orang Aceh hendaknya mau membantu urusan-urusan mereka di Aceh. Setelah perundingan selesai, wakil sultan Aceh meminta kepada Lancaster agar semua alasan dan keinginan yang dimintakan itu atas nama Ratu Inggris, supaya dibuat secara tertulis untuk disampaikan kepada sultannya. Setelah surat itu selesai dibuat, Lancaster menghadap sultan Aceh dan sultan bersedia berunding langsung dengannya sebagai wakil ratu Inggris. Hasil dari perundingan itu dituangkan dalam beberapa ketetapan, yakni: (1) orang-orang Inggris diperkenankan masuk ke Aceh dan dapat berdagang di sana, (2) barang-barang yang mereka perdagangkan di Aceh dibebaskan dari bea masuk dan bia ke luar, (3) jika kapal barang dan orang-orang Inggris mendapat kecelakaan di perairan Aceh, akan mendapat pertolongan dari orang Aceh, (4) kepada orang-orang Inggris diberi kebebasan untuk menentukan dan menyerahkan barang-barang mereka kepada yang menjadi pilihannya, (5) segala perjanjian jual-beli yang telah ditutup harus diselesaikan pembayarannya, (6) mereka berhak menghukum bangsanya sendiri di Aceh, (7) mereka berhak mengadili siapa yang memberi malu mereka, (8) barang-barang mereka tidak boleh ditahan maupun disita dengan paksaan, dan (9) mereka diperbolehkan bebas pergi ke segala tempat di Aceh.¹²⁵

Setelah perjanjian selesai, sultan Aceh memberikan sepucuk surat kepada James Lancaster untuk disampaikan kepada ratu Inggris sebagai balasan dari suratnya.¹²⁶ Sebelum pulang ke Inggris Lancaster meminta kepada sultan Aceh agar dia diberi lisensi dagang untuk dibawa oleh anak buahnya yang bernama Harry Middleton dan beberapa pedagang Inggris lainnya dengan kapal yang bernama "Susanne" ke Pariaman.¹²⁷

Rupanya sultan Aceh juga mengabulkannya.¹²⁸ Pada 26 November 1602 kapal "Susanne" yang telah berada di pantai barat Sumatra telah mendapatkan lada sebanyak 600 *bahar* dan cengkih 66 *bahar*. Setelah rombongan yang dipimpin Middleton bergabung kembali dengan James Lancaster, mereka pulang menuju Inggris.

Pengganti Sultan Alaudin Riayat Syah al Mukammil ialah Sultan Ali Riayat Syah (1604 -- 1607). Pada tahun terakhir pemerintahannya atau tepatnya pada 17 Januari 1607, ia membuat suatu perjanjian mengenai perdagangan dan hal-hal lain dengan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (Persekutuan Dagang Hindia Timur). Kompeni Belanda diwakili oleh Laksamana Muda Olivier van de Vivere. Ada sebelas ketentuan yang telah dirumuskan dalam perjanjian itu.¹²⁹ Isinya sangat menguntungkan pihak Kompeni Belanda dan tidak pernah dijumpai di tempat-tempat lain di nusantara pada waktu itu. Perjanjian ini tidak terlaksana karena sultan yang menggantikan Ali Riayat Syah membatalkan perjanjian tersebut dengan pihak Kompeni Belanda. Jika perjanjian itu benar-benar terlaksana, pusat kedudukan Belanda di Hindia Timur (Indonesia) mungkin tidak pernah didirikan di Batavia.¹³⁰

Dalam bulan April 1613, pedagang-pedagang berbangsa Inggris di bawah pimpinan Thomas Best kembali mengunjungi Kerajaan Aceh. Mereka datang ke Kerajaan Aceh dengan menggunakan dua buah kapal yang bernama "Dragon" dan "Hosian-der".¹³¹ Thomas Best membawa serta hadiah-hadiah dan sebuah surat dari James I untuk sultan Aceh. Surat itu berisi permintaan agar sultan Aceh mau memberi izin kepada pedagang-pedagang Inggris untuk dapat berdagang di Pelabuhan-pelabuhan

an Aceh. Kedatangan rombongan pedagang Inggris ini disambut dengan suatu resepsi yang megah, serupa dengan resepsi yang telah diberikan kepada James Lancaster, pedagang bangsa Inggris yang pertama datang ke Aceh.¹³²

Kepada mereka juga diberikan lisensi dagang untuk digunakan di Pariaman dan Tiku. Selain itu sultan Aceh juga memperkenankan pedagang-pedagang Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang mereka di ibukota Kerajaan Aceh. Kepada Thomas Best pribadi diberikan pula suatu kehormatan dari Kerajaan Aceh, yakni diangkat menjadi bangsawan Aceh dengan gelar "*Oereung Kaja Puteh*". Ini merupakan suatu anugerah yang di kemudian hari masih dilanjutkan oleh sultan-sultan Aceh kepada orang-orang asing berkulit putih lainnya.¹³³ Pemberian gelar kepada Thomas Best ini didasarkan atas jasanya yang telah merebut sebuah kapal Portugis di perairan Aceh dan kapal yang direbut itu diberikan kepada sultan Aceh.¹³⁴

Bangsa Barat lainnya yang datang dan mengadakan hubungan dagang dengan Kerajaan Aceh ialah bangsa Perancis yang dipimpin oleh Augustin de Beaulieu. Mereka datang ke Aceh dengan menggunakan tiga buah kapal, masing-masing bernama "*de Montmorence*", "*de Esperance*", dan "*de Hermitage*".¹³⁵ Augustin de Beaulieu membawa hadiah-hadiah yang menarik dan sebuah surat yang berasal dari raja Perancis untuk sultan Aceh.¹³⁶ Kepada Augustin de Beaulieu diberikan penghormatan yang semestinya dan izin-izin istimewa untuk dengan bebas melihat situasi Kesultanan Aceh pada waktu itu.

Ketika Kerajaan Aceh berada di bawah para sultan, perhubungan-perhubungan luar terus berlangsung, terutama dengan para pedagang bangsa Barat yang datang ke Aceh, dan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah.¹³⁷

CATATAN :

- 1) Lihat R.A. Hoesien Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervate Gegeven over de Geschiedenis van het Sultanaat van Aceh", *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie*, selanjutnya disingkat *BKI* 65 (1911), halaman 213.
- 2) Lihat Nuruddin ar Raniri, Bustanus Salatin, disusun oleh T. Iskandar (Kualalumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966), halaman 22.
- 3) Istilah ini dikemukakan oleh T. Ibrahim Alfian dalam karyanya, "Emas Kafir dan Maut." *Nusantara* Nomor 2 (Kualalumpur, Juli 1972), halaman 270.
- 4) G.P. Tolson, "Acheh Commonly Called Acheen" *Journal of the Royal Asiatic Society Straits Branch*, selanjutnya disingkat *JSBRS V* (Singapore, 1880), halaman 12.
- 5) Teuku Iskandar, "De Hikayat Atjeh", *Venhandeling van het Koninklijk Instituut Voor Taal, Land en Volkenkunde*, (selanjutnya disingkat *VKI* 26, s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1958), halaman 28.
- 6) Das. Gupta, A K, "Acheh in Indonesian Trade and Politics 1600-1641", Unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, 1967, halaman 108.
- 7) Mengenai faktor apa yang mendorong bangsa Portugis merebut Malaka dan memusuhi pedagang-pedagang Islam, lihat misalnya : Sartono Kartodiridjo, "Religious and Economic Aspects of Portugeuse -Indonesian relation" dalam *Seperata de Studia-Revista Quadrimestral* 29 (Lisboa : April 1970).
- 8) T.J. Veltman "Note Over de Geschiedenis van Het Landschap Pidie", *Tijdschrift Bataviaasch Genootshap*, selanjutnya disingkat *TBG*, 58 halaman 5.
- 9) T. Branddel "On the History of Acheen", *The Journal of India Archipelago and Eastern Asia*, selanjutnya disingkat *JIAEA*, Volume V, Singapura : 1851, halaman 16.

- 10) J. Kreemer, *Atjeh I* (Leiden : N.V. Boekhandel en Drukkerij voor heen, E.J. Brill, 1923), halaman 4.
- 11) Yang dimaksud dengan *Panglima* di sini, ialah yang mewakili kerajaan Sultan Aceh di daerah takluknya, lihat. J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society*, (Bandung: "Sumur Bandung", 1960), halaman 368.
- 12) Tengku Luckman Sinar, *Sari Sedjarah Serdang* (Medan : tanpa penerbit dan angka tahun), halaman 22.
- 13) B.J.O. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, volume I* (Bandung : Sumur Bandung 1960), halaman 43.
- 14) R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, halaman 153.
- 15) Dengan dapat mengeluarkan mata uang sendiri ini, merupakan suatu tanda adanya kemakmuran dan perdagangan penting di kerajaan Aceh pada masa itu, lihat H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I (Jakarta : PN. Pradnja Paramita, 1960), halaman 15 (Saduran Prajudi Atmosidirdjo).
- 16) Nama ini ditiru oleh orang-orang Aceh dari mana mata uang Arab. Lihat K.F.H. van Lagen, "De Inrichting van Het Atjehsche Staatsbestuur Onder Het Sultanaat", *BKI* 37(1888), halaman 429.
- 17) Lihat laporan perjalanan dari John Davis sebagai nakhoda pada sebuah kapal Belanda ke "India Timur" pada tahun 1598, dalam Julius Jacobs, *Het Familie en Kampong Leven op Groot Atjeh* (II), Leiden : E. J. Brill, 1894, hal. 187.
- 18) Lihat Nuruddin ar-Raniri, *op. cit.*, hal. 35.
- 19) Lihat kisah perjalanan Agustin de Beaulieu ke Aceh, dalam Julius Jacobs *op. cit.*, hal. 238.
- 20) P.A. Tiele, "De Europeers in de Malaische Archipel", *BKI* 35 (1886), hal. 306 – 307.
- 21) Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kekuatan armada Aceh dalam peperangan itu dan bagaimana jalannya peperangan, lihat misalnya, T. Iskandar, *op. cit.*, hal.

- 47 – 48, R.A. Hoesein Djajadiningrat., *Op. cit.* hal. 180 – 181, Nuruddin ar Raniri, *Loc. cit.*
- 22) Lihat kisah perjalanan Augustin de Beaulieu ke Aceh, *Op. cit.*, hal. 250.
- 23) Richard Wrinstedt, "Note on the History of Kedah", *Journal of Malayan Branch of Royal Asiatic Society*, Selanjutnya disingkat *JMBRAS* Vol. XIV Part 14 (Singapore, December 1936), hal. 157.
- 24) Mengenai asal nama Tjakra Donya, lihat G.L. Tichelman, "Jakra Donya" *De Indische Gids* 61. (Amsterdam : N.V. Drukkerij, 1939), hal. 23 – 27.
- 25) Laporan perjalanan Augustin de Beaulieu, *Op. cit.* hal 251.
- 26) *Ibid*, hal. 252.
- 27) A.J.A. Gerlach, *Atjeh en de Atjinezen*, (Arnhem, 1873) hal. 40. Lihat pula laporan Augustin de Beaulieu, *op. cit.*, hal. 241.
- 28) *Ibid*, Ini mungkin merupakan penggunaan minyak tanah yang pertama kali di Indonesia dalam peperangan.
- 29) *Mukim* ini adalah kreasi daripada Sultan Iskandar Muda, lihat K.F.H. van Langen, *Op. cit.*, hal. 390.
- 30) *Ibid*, hal. 391.
- 31) *Uleebalang* berarti selain sebagai pimpinan ketenteraan, juga sebagai pemimpin dalam suatu daerah yang ditunjuk oleh Sultan Aceh. Menurut C. Snouck Hurgronje, asal mula *Ullebalang* di Aceh adalah ketika salah seorang Sultan Aceh memberikan gelar tersebut kepada seorang penguasa di suatu tempat, karena ingin membalas jasa atas pengabdian-nya kepada Sultan Aceh. Kepada penguasa itu diberi kepercayaan sebagai pimpinan ketenteraan di daerahnya. Tapi kemudian penguasa itu berusaha memonopoli kekuasaan di daerahnya itu. Lihat C.Snoeck Hurgaronje. *De Atjehars* (Leiden E.J. Brill, 1893), hal. 4;
- 32) Zakaria Ahmad, *Sekitar kerajaan Atjeh dalam tahun 1550 – 1675*, (Medan : Monora, 1972), hal. 89.
- 33) Mengenai contoh surat pengangkatan yang dibuat oleh Sultan Aceh, lihat G.L. Tichelman "Een Atjehsche Sara-

- kata" (Afschrift van een besluit van Sultan Iskandar Muda), *T.B.G.* 73. (1933), hal. 368 – 373, lihat Lampiran No.
- 34) Mengenai asal usul cap stempel kerajaan Aceh, lihat G.P. Rouf faer, "De Hindoestanchhe Oorsprong van Het Negenvanding Sultan Zegel van Atjeh", *BKI* 59, (1906), hal 349 – 384.
 - 35) K.F.H. Van Langen, *Loc. cit.*
 - 36) Das Gupta A.K., *op cit.*, hal 95.
 - 37) A. Mukti Ali, *An Introduction to the Government of Ache's Sultanate* (Jogjakarta : Nida, 1970), hal. 16.
 - 38) Mengenai fungsi dan latar belakang pembentukan sagi, lihat, misalnya : Mohammad Said, *Atjeh Sepandjang Abad* (Medan : Diterbitkan pengarang sendiri, 1961), hal. 209 – 211.
 - 39) Laporan perjalanan John Davis, *op. cit.*, hal. 185.
 - 40) *Ibid.*
 - 41) Manuskrip (selanjutnya disingkat M.S.) ini terdapat di University Kebangsaan Malaysia Kualalumpur yang belum dikatalogkan. Ditulis dengan huruf Arab, berbahasa Arab dan Melayu dan berangka tahun 1706.
 - 42) Ditranskripkan dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia oleh Faisal M. Hasan, Mahasiswa I.A.I.N. ar Raniri Darusaalam Banda Aceh.
 - 43) K.F.H. Van Langen, *op. cit.*, hal. 420
 - 44) *Ibid.*, hal 422.
 - 45) Nuruddin ar-Raniri, *op. cit.*, hal. 185
 - 46) Laporan perjalanan John Davis, *loc.cit.*, Menurut tradisi nama Laksamana wanita ini adalah keumalahayati (Lakseu-mana Keumalahayati).
 - 47) T. Iskandar, *op.cit.*, 46.
 - 48) Lihat H.K.J. Cowan, *De Hikayat Malem Dagang* (s-Gravenhage : unit gegeven door Hed Koninklijke Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie 1937)
 - 49) P.J. Veth, *Atchin an Zijne Betrekkingen tot Nederland*, (Leiden : Geraeth, Kolff, 1887), hal. 74.
 - 50) G.h. Tichelman. *op.cit.*, hal. 368

- 51) M.S., loc. cit.
- 52) Naskah ini tanpa nama pengarang dan angka tahun. Dimiliki oleh Teungku Mouhd Junus Djamil, kampung Alue, Banda Aceh.
- 53) Ibid.
- 54) Ibid.
- 55) Yang dimaksud dengan kanun ialah segala peraturan yang berhubungan dengan adat lihat R.A. Hoesein Djajadiningrat, *Atjehsch Nederlandsch woordenboek met Nederlandsch Register door C.W.J. Drewes deel II (Baavia : Landsdrukkerij, 1934), hal. 662.*
- 56) Naskah "Kanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda", loc. cit.
- 57) R.A. Hoesein Djajadiningrat, "Critich . . . op. cit., hal 175.
- 58) W.Linehan, "History of Pahang", *JMBRS*, (Mei, 1936), hal. 36.
- 59) R.A. Hoesein Djajadiningrat, *op. cit.*, hal. 215.
- 60) C. Snouck Hurgronje, *op.cit.*, deel II (1949, hal. 364)
- 61) Laporan perjalanan John Davis, *op. cit.*, hal. 186.
- 62) Ibid. hal. 180
- 63) P.A. Tiele *op. cit.*, hal. 304.
- 64) Laporan perjalanan John Davis., loc cit.
- 65) Laporan perjalanan John Davis. loc. cit.,
- 66) Das Gupta, A.K., *op. cit.*, hal. 103.
- 67) Pieter van Dam, *Beschrijvingen van de Oost Indische Compagnie, I, ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931), hal. 261.*
- 68) A.J.A. Gerlach, *op. cit.*, hal. 39.
- 69) J.C. van Leur, *op. cit.*, hal. 171.
- 70) Das Gupta, A.K. loc. cit.
- 71) P.J. veth. *op. cit.*, hal. 55.
- 72) Lihat Adat Meukuta Alam dalam K.F.H. van Langen. *op. cit.*, hal. 439.
- 73) Laporan Perjalanan Augustin de Beaulieu, loc. cit.
- 74) Adat Meukuta Alam, loc. cit.

- 75) Laporan perjalanan Augustin de Beaulieu, *op. cit.*, hal. 254
- 76) *Ibid.*, halaman 252.
- 77) *Ibid.*, halaman 252.
- 78) A.J.A. Gerlach, Leestafel", H. Yule "On Northern Sumatra and specially Achin", *BKI*, VIII (1873), halaman 72.
- 79) Brian Harrison, *South East Asia A Short History*, (London: Macmillan & Co. Ltd.), halaman.
- 80) W. Linehan, *op. cit.*, halaman 37.
- 81) N.J. Ryan, *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1966). halaman 63.
- 82) K.F.H. Van Langen, *op. cit.*, halaman 387.
- 83) A. Mukti Ali, *op. cit.*, halaman 9.
- 84) Uraian mengenai asal-usul *Kawom* di Aceh dapat dilihat misalnya dalam K.F.H. van Langen, *op. cit.*, halaman 387-389.
- 85) A. Mukti Ali, *loc. cit.*
- 86) *Reusam* di sini maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat.
- 87) R.A. Hoesein Djadiningrat, *op. cit.*, halaman 177.
- 88) *Adat Meukuta Alam* ini telah diterbitkan oleh K.F.H. van Langen dengan nama "Peraturan di dalam Negeri Atjeh Bandar dar as Salam", lihat K.F.H. van Langen, *op. cit.*, halaman 436-442.
- 89) J. Jongejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, (Hollandia: Drukkerij, N.V. Baarn, 1939), halaman 279.
- 90) T. Ibrahim Alfian, "Wadjah Rakjat Atjeh Dalam Lintasan Sedjarah", *Dewan Bahasa*, jilid XVI (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972), halaman 496, lihat juga R.A. Hoesein Djadiningrat, *op. cit.*, halaman 157.
- 91) T. Iskandar, "Atjeh Dalam Lintasan Sedjarah", Suatu Tinjauan Kebudayaan, *Prasaran* dalam rangka PKA-II dan Diesh Natalis Ke-XI Universitas Syiar Kula, Banda Aceh, Panitia PKA-II, 1972), halaman 9.

- 92) Mengenai aliran *Wujudiyah* ini, lihat misalnya, Syed Muhammad Naquib Al Attas, "Raniri and the Wujudiyah of 17th Century Aceh, *Mono graphs of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society* 111, (Singapore, Malaysia Printed Limited 1966).
- 93) *Ibid.*, halaman 11.
- 94) T. Iskandar "Atjeh Dalam, *op. cit.*, halaman 9.
- 95) A.J.A. Gerlach, *op. cit.*, halaman 42.
- 96) *Ibid.*
- 97) T. Iskandar, Atjeh Dalam, *loc. cit.*
- 98) *Ibid.*, halaman 11.
- 99) B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), halaman 175.
- 100) Nuruddin ar-Raniri, *op. cit.*, halaman 36.
- 101) *Ibid.*
- 102) *Ibid.*
- 103) *Ibid.*
- 104) Mengenai pendirian monumen ini, lihat R.A. Hoesein Djajadiningrat, "De Stichting van het "Goenongan" Geheeten Monument te Koetaradja, *TBG* 57, (1916), halaman 561-576.
- 105) Laporan Agustin de Beaulieu, *op. cit.*, halaman 242.
- 106) *Ibid.*, halaman 250.
- 107) Bentuk (contoh) Stempel Cap Sembilan), lihat Lampiran
- 108) No. halaman 350.
- 109) Lihat Nuruddin ar Raniri, *op. cit.*, halaman 31.
- 110) C.R. Boxer, "A Note on Portuguese Reactions To The Revival of The Red Sea Spice Trade And The Rise of Aceh, 1540-1600", *International Conference on Asian History*, Paper No. 2 (Kuala Lumpur: Department of History, University of Malaya, 5-10th August, 1968), halaman 9.
- 111) *Ibid.*
- 112) *Ibid.*
- 113) *Ibid.*, halaman 17-18.
- 114) *Ibid.*

- 115) P.A. Tiele, "De Europeers in de Maleische Archipel", *op. cit.*, BKI, 37 (1888), halaman 177.
- 116) *Ibid.*
- 117) Tiap *Bares* sama dengan 3½ kuintal atau 350 kg., lihat C.R. Boxer, *op. cit.*, halaman 18.
- 118) Surat Pangeran Mauritz ini ditulis dalam bahasa Spanyol. Teks lengkap surat tersebut dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, lihat Lampiran.
- 119) Di antara para tawanan ini ada yang bernama Frederick de Houtman, ia sudah 2 tahun menjadi tawanan kerajaan Aceh. Selama dalam masa itu ia telah sempat menyusun sebuah Kamus Melayu – Belanda. Lihat P.A. Tiele, "Frederick de Houtman in Atjeh", *Indische Gids*, (1881), halaman 146–152.
- 120) Uraian mengenai utusan Aceh ke Negeri Belanda ini, lihat misalnya, Wap *Het Gezantschap van den Sultan van Achin A^o 1602 aan Prins Mouritz van Nassao en de oud Nederlandsche Republiek*, (Rotterdam: H. Nijgh, 1862), halaman 10–31.
- 121) Piter van Dam, *op. cit.*, halaman 260.
- 122) Lihat laporan perjalanan James Lancaster ke Aceh, dalam Julius Jacob, *op. cit.*, halaman 198–199.
- 123) *Ibid.*, halaman 202.
- 124) *Ibid.*, halaman 204.
- 125) *Ibid.*
- 126) Mengenai isi surat Sultan ini, lihat laporan perjalanan James Lancaster ke Aceh, *Ibid.*, halaman 218–220.
- 127) *Ibid.*, halaman 205.
- 128) Mengenai bentuk dan isi lisensi yang diberikan sultan Aceh kepada Harry Middleton ini, lihat Mohammad Said, *op. cit.*, halaman 158.
- 129) Isi perjanjian ini, lihat J.K.J. De Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie, III* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1865, halaman 223–225 Lihat juga P.A. Tiele, *De Europeers BKI*, (1884), halaman 66.
- 130) *Ibid.*, halaman 51.

- 131) C.A. Gibson Hill. "On the Alleged Death of Sultan Alaudin of Johor at Aceh in 1613", *JMBRAS* vo. XXIX part I, (Mey, 1956), halaman 127.
- 132) Das Gupta, A.K., *op. cit.*, halaman 130.
- 133) T. Iskandar, De Hikayat, *op. cit.*, halaman 43.
- 134) G.A. Gibson Hill, "Raffles, Aceh and the Golden Sword", *op. cit.*, halaman 6.
- 135) Lihat perjalanan Augustin de Beaulieu ke Aceh, *op. cit.*, halaman 221.
- 136) *Ibid.*, halaman 223.
- 137) Mengenai hubungan-hubungan Kerajaan Aceh dengan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, lihat misalnya, Mohammad Said, *op. cit.*, halaman 214-215.

BAB V ABAD KE-9 ($\pm$ 1800 -- 1990)

5.1 Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan

Dalam bab IV telah dikemukakan bahwa pada tahun 1745 Sultan Ala'addin Muhammad Syah meninggal dunia. Dengan persetujuan ketiga Panglima Sagi, puteranya yang masih di bawah umur, Tuanku Husein diangkat sebagai penggantinya. Sementara menunggu Husein dewasa ditunjuk pula Ibunya Pocut Meureh Awan dan pamannya Tuanku Raja Cut Zainal Abidin sebagai pemangku sultan. Pemangkuan ini berakhir pada tahun 1802 ketika Tuanku Husein diresmikan penobatannya sebagai sultan Aceh dengan gelar Sultan Ala'addin Jauhar Alam Syah (1802 -- 1823). Pada saat peresmian itu ternyata Tuanku Raja Cut Zainal Abidin memperlihatkan ketidaksetujuannya, dia tidak mau menyerahtherimakan pemerintahan yang selama ini dipangkunya.

Tugas sultan yang baru adalah memperkuat wibawa pemerintah pusat dan membendung infiltrasi asing, yaitu Inggris dan Belanda yang sedang giat berusaha mengacaukan wilayah kerajaan Aceh. Sebagaimana diketahui, bahwa Aceh sejak akhir abad ke-18 selalu diliputi oleh suasana perebutan kekuasaan di antara keluarga sultan (lihat lampiran). Akibatnya hubungan dengan daerah-daerah *uleebalang* menjadi renggang, bahkan

ada daerah-daerah yang enggan membayar pajak (*wasee*) kepada pemerintah pusat di Bandar Aceh Dar as Salam. Suasana ini juga memberi kesempatan kepada kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda untuk mencoba-coba campur tangan urusan dalam negeri Kerajaan Aceh.

Dalam tahun peresmian pengangkatan itu juga (1802) sultan bertindak menyingkirkan Tuanku Raja Cut serta membersihkan aparat pemerintah dari semua pengikut pamannya yang membangkang itu. Sejak tahun 1812 sultan menuju ke daerah-daerah *uleebalang* di pantai barat dan selatan guna memulihkan kekuasaannya di sana, terutama di daerah Manggeng dan Singkel. Kedua daerah ini ternyata telah ingkar membayar *wasee* kepada pemerintah pusat.

Kepergian sultan ke daerah-daerah memberi kesempatan kepada lawan politiknya untuk menjatuhkannya.

Salah satu kelemahan pribadi Sultan Jauhar Alam Syah, menurut penilaian para pemimpin Aceh pada waktu itu ialah pergaulannya yang terlampau akrab dengan orang-orang Barat, yaitu dengan orang-orang Inggris, Belanda, Portugis dan Perancis yang selalu dicurigai itikat baiknya, termasuk pembantu pribadi sultan, seorang warga Negara Inggris bernama Fenwick yang kelakuannya sehari-hari dinilai oleh para pemimpin Aceh, terutama oleh panglima sagi yang turut menentukan setiap pengangkatan sultan baru, banyak melanggar adat-istiadat Aceh; jadi tidak karena asal-usul bangsanya. Faktor ini dijadikan alat dan selalu dibesar-besarkan oleh lawan politik sultan, sehingga mereka berhasil menjatuhkannya. Di samping itu faktor infiltrasi asing, dalam hal ini terutama Inggris juga turut menentukan keberhasilan mereka.

Tindakan pengambilalihan kekuasaan digerakkan oleh panglima sagi dan mendapat dukungan dari Uleebalang Pidie Teuku Pakeh Dalam dan uleebalang keumangan (daerah Kabupaten Pidie sekarang). Karena itu konsentrasi kekuasaan pemberontakan dipusatkan di Pidie. Sementara itu dari Pulau Pinang Gubernur Inggris Petrie dan Said Husein turut memberikan bantuan,

bahkan *panglima* sagi baru berani menggerakkan pemberontakan setelah mereka menghubungi Said Husein yang berambisi untuk menjadi sultan dan ingin membalas sakit hatinya kepada Jauhar Alam Syah¹. Tetapi dalam hubungan ini panglima sagi menasihatkan lain, yaitu agar puteranya, Syaiful Alam, diangkat menjadi sultan. Hal ini disetujui oleh Said Husein. Pada bulan Juni 1815 dengan lima kapal yang berbendera Inggris, rombongan Said Husein Syaiful Alam berangkat dari Penang menuju ke Pidie. Dari sana dengan tentara yang diperlengkapi senjata bantuan Inggris (di sini tampak intervensi Inggris secara terang-terangan), mereka bergerak menuju ke Banda Aceh Darussalam. Dengan kejadian ini Jauhar Alam Syah terpaksa menyingkir ke Lhok Seumawe, salah satu daerah yang masih menyokong kepemimpinanannya, dan Syaiful Alam dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Sultan Syaiful Alam Syah (1815 -- 1819).

Sementara itu Stamford Raffles yang pada waktu itu menjabat sebagai letnan gubernur Pulau Jawa (1811 - 1816) melihat keadaan Aceh dengan penuh kekhawatiran. Kebijaksanaan yang ditempuh gubernur Penang dinilai oleh Raffles kurang tepat. Ia dianggap terlampau menitikberatkan keuntungan jangka pendek (perdagangan), sedang Raffles meninjau jauh ke depan, yaitu perlakuan Aceh secara baik sehingga tidak akan mendekati Belanda. Menurut Raffles, Syaiful Alam, bagaimana pun kurang berpengaruh di Aceh dibandingkan dengan Jauhar Alam. Kekuatannya hanya tergantung kepada *panglima sagi*. Karena itu Raffles segera berangkat ke Kalkutta menghadap gubernur jenderal untuk mengemukakan pandangannya itu, tetapi karena dia bukan pejabat resmi di Penang, saran-sarannya tidak mendapat dukungan. Para pembesar Inggris lebih memperhatikan laporan resmi yang disampaikan oleh Canning atas nama gubernur Penang.²

Walaupun Raffles tidak mendapat sambutan di Kalkutta, tetapi dia tidak pernah putus asa. Semenjak dia harus melepaskan kedudukannya di Pulau Jawa tahun 1816 (berdasarkan *Convention London* 1814), perhatiannya terhadap Aceh makin bertambah, terutama setelah dia menjabat letnan gubernur

Bengkulen (1818). Pada waktu itu Raffles sekali lagi berusaha meyakinkan gubernur jenderal mengenai kekeliruan tindakan gubernur Penang. Untuk mengatasi hal ini, gubernur jenderal memerintahkan wakil gubernur Penang, Coombs supaya dapat bekerjasama dengan Raffles dalam menyelesaikan masalah Aceh. Sementara itu pada bulan April 1819 Raffles sudah berada pula di Pidie untuk menemui Jauhar Alam Syah (pada waktu itu Jauhar telah mendapat dukungan kembali di Pidie).³ Sebagai hasil dari kegiatan Raffles adalah lahirnya (22 April 1819) perjanjian 9 pasal antara Aceh – Inggris yang disebut dengan traktat Pidie.⁴ Pokok isinya adalah kerjasama yang erat antara kedua negara di bidang politik dan ekonomi. Dengan traktat ini masalah Aceh dapat selesai dan makin jelas, bahwa Inggris turut menentukan kedudukan Sultan Aceh pada waktu itu. Dalam tahun itu pula Sultan Jauhar Alam Syah dapat kembali ke Bandar Aceh setelah Syaiful Alam disingkirkan. Tugas Sultan Jauhar Alam Syah sekarang adalah menyelesaikan masalah keamanan. Wibawa pemerintah pusat yang dipimpinnya itu perlu ditegakkan kembali mengingat selama empat tahun berada dalam tangan kaum pemberontak dan apalagi sampai saat itu Panglima Sagi XXII Mukim tetap bertahan tidak menyetujui kembalinya Jauhar ke istana. Setelah itu baru perhatian bisa dipusatkan pada masalah pembangunan, terutama pembangunan ekonomi yang tampaknya makin merosot selama ditinggalkannya (lihat bagian kedua bab ini). Masalah ini memerlukan waktu yang lama; Jauhar tidak dapat menyelesaikan seluruhnya, sebab pada 1 Desember 1923 dia meninggal dunia.⁵

Pengganti Jauhar Alam Syah ialah Sultan Ala'addin Muhammad Daud Syah (1823 -- 1838) sering disebut dengan nama Sultan Muhammad Syah. Seharusnya yang berhak menjadi sultan ialah Tuanku Ibrahim anak dari permaisuri, tetapi karena para panglima sagi menjatuhkan pilihannya pada yang pertama, sedang Ibrahim masih di bawah umur (mungkin sekitar 8 -- 10 tahun), maka ia tidak bisa berbuat banyak. Kemungkinan pula setelah Ibrahim dewasa akan membawa akibat buruk bagi pemerintahan Muhammad Daud Syah. Untuk menjaga keutuhan

pemerintahan, sultan mengambil Tuanku Ibrahim sebagai pembantu pribadinya di istana di samping tugasnya yang lain, yaitu mengontrol atau mengawasi daerah-daerah uleebalang di pantai barat dan selatan Aceh (mengambil *wasee*).

Suatu peristiwa penting yang terjadi tidak lama setelah Muhammad Daud Syah naik takhta ialah ditandatanganinya Traktat London pada 17 Maret 1824. Isi perjanjian tersebut pada prinsipnya mengenai pembagian jajahan antara Inggris dan Belanda di wilayah Indonesia dan Semenanjung Melayu.

Walaupun Traktat London dibuat tanpa ikut sertanya Aceh beserta ketujuhbelas pasal isinya tidak pernah menyinggung nama Aceh, tetapi perjanjian itu turut menentukan kelanjutan eksistensi Kerajaan Aceh. Dalam nota Pemerintah Belanda yang mengiringi traktat itu ditegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kemerdekaan Aceh. Di pihak lain Inggris melalui notanya juga menyatakan bahwa Traktat Pidie tahun 1819 segera akan ditinjau kembali karena bertentangan isinya dengan Pasal 3 Traktat London.⁶

Bagaimana pun pada hakekatnya Traktat London telah menjadikan Aceh terisolasi dari percaturan politik "tiga segi" (Aceh, Inggris, dan Belanda), terutama di perairan Selat Malaka. Jaminan kemerdekaan atas Aceh melalui nota mereka, sebagaimana ternyata dari tindakan-tindakan mereka kemudian, tampaknya lebih bersifat politis: sementara menunggu kesempatan untuk pada suatu waktu Aceh akan dipertaruhkan di antara mereka.

Sebagai realisasi lanjutan Traktat London pada tahun 1825 Inggris menyerahtherimakan juga Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan ini Belanda sudah berhadapan muka langsung dengan Kerajaan Aceh, yaitu di daerah perbatasan pantai barat dan pantai timur. Kesempatan ini dipergunakan Belanda untuk mengacau Aceh melalui taktik adu domba antara sultan dengan para uleebalang dan penguasa di daerah taklukan di sana. Sejak tahun 1830-an Belanda secara aktif mengadakan gangguan dengan menganeksasi wilayah Kerajaan Aceh, apalagi setelah

ternyata bahwa Inggris tidak pernah menghubungi sultan Aceh guna membicarakan masalah Traktat Pidie sebagai tindak-lanjut dari penandatanganan Traktat London. Karena itu daerah-daerah Singkil, Barus, Trumon di pantai barat dan daerah-daerah Teukiang, Deli Serdang dan Asahan di pantai timur menjadi korban permainan politik mereka.⁷

Pengganti Sultan Mohammad Daud Syah ialah anaknya Sultan Sulaiman Ali Iskandar Syah. Tetapi yang sebenarnya mengendalikan pemerintahan sejak tahun 1838 ialah paman-nya, Tuanku Ibrahim, sebagai pemangku sultan (1838 -- 1850) dengan gelar Sultan Ala'addin Ibrahim Mansyur Syah (1850 -- 1870).⁸

Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim Mansyur Syah kegiatan Belanda dalam mengacau wilayah Aceh lebih ditingkatkan, juga termasuk kegiatan spionase. Misi Courier dit Dubekart yang dikirim Gubernur Padang van Zwieten pada tanggal 8 Pebruari 1855 sebenarnya lebih diletakkan pada tugas untuk menyelidiki suasana pemerintahan Kerajaan Aceh daripada misi-misi persahabatan. Berdasarkan laporan Courier dit Dubekart, yaitu meningkatnya kemarahan sultan terhadap tindakan Belanda selama ini, gubernur jenderal di Batavia mengirim pula misi Van Zwieten ke Aceh dengan tugas untuk meredakan ketegangan antara kedua negara. Sebagai hasil yang dibawa Van Zwieten ialah ditandatanganinya perjanjian persahabatan Aceh-Belanda pada 30 Maret 1857 (disahkan gubernur jenderal dengan Besluit Nomor 7, 9 Mei 1857).⁹ Tetapi ternyata belum sampai satu tahun perjanjian itu ditandatangani, Belanda telah melanggar-nya. Pada 1 Pebruari 1858 Belanda menyodorkan pula Perjanjian Siak kepada Sultan Ismail dari Kerajaan Siak. Isinya antara lain menyebutkan, bahwa Sultan Ismail sejak waktu itu meletakkan kerajaannya di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda dan ditegaskan lagi bahwa daerah Sumatera Timur yang terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil, seperti Asahan, Deli, dan lain-lain. Termasuk kerajaan-kerajaan yang mengakui kedaulatan Siak; yang berarti juga dengan sendirinya menjadi daerah yang ber-

naung di bawah kedaulatan Belanda. Sebenarnya daerah tersebut adalah termasuk daerah takluk atau setidak-tidaknya mengakui bernaung di bawah Kerajaan Aceh.¹⁰ Dengan demikian hubungan Kerajaan Aceh dengan Belanda menjadi tegang kembali, bahkan sebagai akibat dari Perjanjian Siak itu timbul pula keretakan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Siak mengenai masalah daerah perbatasan.

Sultan Mansyur Syah menyadari apa yang sedang dikerjakan Belanda selama ini. Sudah dapat diduga bahwa pada akhirnya hanya menunggu waktu saja, Belanda akan melancarkan agresinya ke Aceh. Untuk menghadapi tindakan kesewenangan Belanda itu serta kemungkinan yang akan terjadi, sultan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (1) mengirim Panglima Teuku Husein (tahun 1854), Tuanku Hasyim (tahun 1860) dan Panglima Teuku Muda Cut Latif Meureudu ke daerah Sumatera Timur dengan tugas: mengamankan daerah-daerah Teumiang, Langkat, Deli, Serdang dan lain-lain dari gangguan Belanda serta membangun benteng-benteng pertahanan (bahasa Aceh: *Kuta*) di daerah perbatasan itu. (dalam hubungan ini mereka telah berhasil membangun dua buah *kuta* pertahanan yang kuat di Pulau Kampai dan Teumiang),
- (2) menggiatkan penarikan pajak (*wasee*) dari daerah-daerah uleebalang untuk mengisi kas negara. Sedang dalam usaha meningkatkan kemakmuran, sultan menyerukan pula agar rakyat menggiatkan usaha penanaman lada. Agaknya Sultan Ibrahim Mansyur Syah bercita-cita pada zaman Iskandar Muda dulu,
- (3) mengadakan pengawasan yang ketat pada semua pelabuhan Aceh baik di pantai barat maupun pantai timur untuk menutup kemungkinan masuknya Belanda ke daerah-daerah uleebalang, dan
- (4) meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik terutama dengan negara-negara Islam dan Perancis dalam rangka

mencari bantuan senjata dan dukungan luar negeri (akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian lima bab ini).

Dalam situasi konflik politik dengan Belanda yang tampaknya makin meningkat, pada tahun 1870 sultan meninggal dunia. Sebagai penggantinya dinobatkan Sultan Mahmud Syah II (anak Sultan Sulaiman Iskandar Syah), yang masih di bawah umur (sekitar 14 tahun). Karena itu, dengan persetujuan para pembesar kerajaan, ditunjuk pula Habib Abdurahman sebagai pemangku sultan merangkap menteri luar negeri.

Tugas sultan baru dalam hubungan dengan persiapan untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda adalah melanjutkan usaha-usaha yang telah dirintis pada masa yang lalu. Sebagai kelanjutan dari kegiatan diplomasi di luar negeri kali ini diutus Habib Abdurrahman dan Panglima Tibang, Sahbandar Pelabuhan Bandar Aceh (mengenai peranan kedua tokoh ini, akan diuraikan dalam bagian : Hubungan dengan Luar). Selain itu kegiatan untuk memperkuat pertahanan wilayah juga lebih ditingkatkan, terutama pada saat menjelang penyerangan Belanda pertama *Kuta* pertahanan di sepanjang pantai Aceh Besar seperti *Kuta Meugat*, *Kuta Pohama*, *Kuta Mosapi* diperkuat kembali. Demikian pula *kuta* Gunongan Istana (*Dalam*) dan Mesjid Raya Baiturrahman. Tegasnya semua tempat-tempat yang strategis telah disiapsiagakan. Dalam hubungan ini Sidi Tahul (juru bahasa, sebagai penghubung Belanda dengan sultan Aceh) melaporkan, bahwa menurut penilikannya pada 22 Maret 1873 (sewaktu ia membawa surat *Nieuwenhuijzen* kepada sultan Aceh) ada sekitar 3000 orang tentera yang bertugas menjaga pantai sejak dari Kuala Aceh sampai ke Tibang di ujung pantai utara. Dan Teuku Ne' Meuraksa (seorang uleebalang yang memihak kepada Belanda) menulis dalam suratnya yang ditujukan kepada komisararis Pemerintah Hindia Belanda *Nieuwenhuijzen* bahwa di sekitar istana (*dalam*) sudah disiapsiagakan tentara dengan kekuatan 400 orang).

Di pihak lain Belanda tampaknya makin bernaflu untuk menjadikan Aceh sebagai bagian dari daerah jajahannya, ter-

utama setelah pembukaan Terusan Suez tahun 1869 yang telah menempatkan Aceh pada posisi yang lebih strategis dibandingkan dengan asa yang lalu (sebagai pintu gerbang masuk ke Selat Malaka yang makin ramai dilayari semenjak pembukaan Terusan Suez). Tetapi, bagaimana pun dalam hubungan dengan perang terbuka, Belanda belum berani bertindak mengingat keterikatannya dengan Traktat London tahun 1824.

Keterbatasan bidang geraknya terhadap Aceh telah mendorong Belanda untuk memperbaharui perjanjuannya dengan Inggris. Pada tanggal 2 November 1871 kedua negara itu berhasil menandatangani perjanjian baru yang disebut dengan Traktat Sumater. Isinya yang penting, sehubungan dengan keinginan Belanda untuk meluaskan kekuasaannya di Pulau Sumatera, ialah pemberian kebebasan bertindak kepada Belanda di pulau itu¹². Dengan demikian bagi Belanda hanya tinggal pelaksanaan teknis saja untuk melakukan penyerangan terhadap Aceh.

Di atas telah dikemukakan mengenai adanya kegiatan Sultan Aceh di luar negeri dalam rangka mencari bantuan senjata dan dukungan politis sebagai persiapan guna menghadapi kemungkinan penyerangan Belanda. Ketika diketahui bahwa Aceh sedang mengadakan hubungan dengan konsul-konsul Amerika dan Italia (pada akhir tahun 1872; lihat bagian terakhir bab ini mengenai hubungan dengan luar), Belanda segera mengambil sikap. Suatu hal yang dikhawatirkan Belanda ialah mengenai kemungkinan jatuhnya Aceh kepada salah satu negara Barat lain.

Pada 18 Februari 1873, Menteri Jajahan Van De Putte atas nama Pemerintah Belanda di Nederland menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal Loudon di Batavia agar penyerangan ke Aceh dapat segera dimulai. Untuk memenuhi instruksi itu, Loudon mengadakan sidang khusus Dewan Hindia Belanda dalam rangka pengaturan teknis pelaksanaan penyerangan (2 Maret 1873). Keputusan sidang di beslitkan oleh Gubernur

Jenderal pada 4 Maret 1873. Ditetapkan Wakil Ketua Dewan Hindia Belanda F.N. Nieuwenhuijzeun sebagai komisaris pemerintah untuk Aceh dan diharapkan sudah dapat berangkat ke sana 7 Maret 1873. Kapal-kapal yang dipersiapkan untuk mengangkut rombongan, perbekalan, dan pasukan ialah *Citadel van Antwerpen*, *Siak*, *Coehorn* dan *Marnis*. Pelaksanaan penyerangan lebih dahulu harus diawali dengan surat menyurat, dan apabila Sultan menolak untuk menyerah baru diikuti dengan pernyataan perang¹³

Pada 22 Maret 1873 *Citadel van Antwerpen* yang membawa Komisaris Nieuwenhuijzeun telah berlabuh di perairan Bandar Aceh Darussalam. Sebuah surat yang berisi permintaan agar sultan mengakui kedaulatan Belanda disampaikan melalui juru bahasa Sidi Tahlil. Dinyatakan pula berbagai alasan pertim-bangan termasuk tuduhan bahwa Aceh telah melanggar pasal-pasal perjanjian 30 Maret 1857 Surat balasan dari sultan yang bertanggal 23 Maret 1873 ternyata tidak menyinggung apa yang diinginkan Belanda. Karena itu, surat Nieuwenhuijzen yang kedua menyusul pula untuk menegaskan lagi isi suratnya yang pertama. Tetapi jawaban sultan tetap pada pendirian yang pertama, yaitu tidak dapat memenuhi ajakan Belanda. Demikian juga dalam surat-menyurat berikutnya¹⁴

Sikap Sultan yang tegas dan pasti itu telah mendorong Belanda untuk menyatakan perang kepada sultan Aceh. Pada 1 April 1873 Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh mengirim ultimatum bertanggal 26 Maret 1873¹⁵. Beriringan dengan keluarnya ultimatum itu Pemerintah Hindia Belanda juga telah mempersiapkan pasukannya dengan kekuatan 3200 bawahan serta 168 perwira di bawah pimpinan Mayor J.H.R. Kohler¹⁶. Pada 5 April 1873 pasukan Belanda mulai mendarat di pantai Pantee Ceureumen (arah ke timur Ulee, lihat lampiran peta pendaratan Belanda).

Dengan demikian suatu perang kolonial resmi telah dimulai oleh pihak Belanda. Reperangan yang telah menghabiskan waktu lebih kurang 40 tahun itu, bahkan menurut Van't Veer dapat dibandingkan dengan perang 80 tahun (1568--1648) di negeri

Belanda sendiri "*In tijdsduurkanhij vergeleken worden met de tachtigjarige oorlog*"¹⁷ diperkenalkan oleh pihak Belanda dengan nama "Perang Aceh"; sedang rakyat Aceh lebih mengenalnya dengan nama "Perang Belanda" (istilah Aceh : *Prang Kaphee Ulanda*)¹⁸

Sebelum perang dimulai, Belanda telah memperhitungkan bahwa Aceh akan dapat ditaklukkan dalam waktu singkat. Tetap kenyataannya tidak demikian. Ketidaktepatan perhitungan itu disebabkan oleh cara penyelidikan Belanda yang dititikberatkan pada segi politik dan ekonomi saja, yang memang Aceh pada waktu itu dalam keadaan mundur. Misi Kraijenhoff yang sampai tiga kali datang ke Aceh (antara tahun 1871 -- 1872 atas nama misi persahabatan) hanya melihat pada situasi pemerintahan Kerjaan Aceh yang lemah dan perlengkapan militer yang jauh lebih kurang dibandingkan dengan Belanda. Mereka tidak mendalami pada waktu itu hakekat kehidupan rakyat dari segi sosial budaya dan agama yang mendasari aksi perlawanan rakyat Aceh.

Agresi pertama 5 April itu ternyata telah mengalami kegagalan total. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan laskar rakyat Aceh yang demikian sengit. Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Baiturrahman pada 14 April 1873, pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imam Lueng Bata berhasil menewaskan Jenderal Kohler. Tiga hari setelah itu tentara Belanda terpaksa mundur kembali ke pantai dan pada 29 April 1873, setelah memperoleh izin dari Batavia, seluruh pasukan kembali ke Pulau Jawa. Di pihak Belanda jatuh korban, 37 bawahan dan delapan perwira mati, 405 orang luka-luka (termasuk 32 orang perwira) dan kemudian 30 orang daripadanya juga meninggal. Di pihak Aceh diperkirakan telah jatuh korban sebanyak 900 orang tewas.¹⁹

Agresi kedua dilancarkan sejak 9 Desember 1873. Kali ini dengan kekuatan sekitar 8500 pasukan (termasuk 389 perwira.²⁰ , di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. Van Zwieten,

pensiunan panglima pasukan Hindia Belanda, tokoh yang pernah menyodorkan perjanjian damai kepada Aceh tahun 1857 (masa Ibrahim Mansyur Syah). Pendaratan pasukan dilakukan di Kuala Lheue (kira-kira 20 km arah ke timur ibukota, lihat lampiran peta Aceh Besar dan lokasi pendaratan Belanda).

Dalam menghadapi serangan Belanda kedua kalinya itu, tampaknya laskar Aceh lebih bersemangat. Hal ini di samping disebabkan oleh kemenangan yang diperoleh pada masa yang lalu, juga karena banyak bantuan laskar yang mengalir dari daerah-daerah uleebalang. Dari Uleebalang Meureudu dan Pidie masing-masing kira-kira 500 orang, demikian pula dari pantai barat, terutama dari daerah arah ke utara Meulaboh yang telah mendatangkan hampir setengah dari penduduknya ke ibukota. Tuanku Hasyim yang pada waktu yang lalu berada di Sumatera Timur sekarang telah kembali dengan lasyarnya sejumlah 900 orang turut bertempur mempertahankan istana (dalam) dan Mesjid Raya Baiturrahman. Dalam suasana sengitnya pertempuran juga Panglima Sagi XII Mukim pada 4 Januari 1874 telah mengerahkan pasukan tambahan sebanyak 500 orang.²¹

Pertempuran sengit terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman yang dipertahankan dengan gigih oleh lasyakar Aceh. Mesjid ini berhasil dikuasai pada 6 Januari 1874 setelah dihancurkan. Tujuan selanjutnya yang utama ialah istana (dalam) dan Belanda baru berhasil merebutnya pada 24 Januari 1874. Ini pun setelah dikosongkannya pada 15 Januari 1874. Sultan dan rombongan menuju ke Lueng Bata, untuk seterusnya ke Pagar Ayee (kira-kira) km dari ibukota). Di sana pada 28 Januari 1874. Sultan meninggal dunia akibat wabah kolera.

Dengan direbutnya istana (dalam), Belanda memperhitungkan bahwa Kerajaan Aceh telah berhasil ditaklukkan. Untuk itu pada 31 Januari 1874, Van Zwieten mengumumkan sebuah proklamasi dan dinyatakan pula bahwa Aceh Besar menjadi milik Belanda, tetapi kenyataannya proklamasi itu tidak mempunyai nilai politis yang menentukan. Seiring dengan prokla-

masi Van Zwieten, para pemimpin Aceh mengangkat Tuanku Muhammad Daud sebagai sultan baru (cucu Sultan Ibrahim Mansyur Syah). Berhubung masih belum dewasa, ditunjuk pula Tuanku Hasyim sebagai pemangku Sultan (1874 -- 1884); dan dalam rangka untuk lebih mudah menggerakkan rakyat, pusat pemerintahan dipindahkan ke Indrapuri (25 km arah tenggara ibukota lama, termasuk dalam wilayah Sagi XXII Mukim, masih dalam daerah Aceh Besar yang dinyatakan Belanda telah menjadi miliknya). Dengan ini sejak waktu itu di Aceh didapati dua pusat pemerintahan, yang satu lagi ialah pusat pemerintahan kolonial Belanda di Kutaraja (sebelumnya Bandar Aceh Darussalam). Keadaan ini baru berakhir 30 tahun, yaitu tahun 1903 ketika Sultan Muhammad Daud menyerah.

Pada 16 April 1874 Van Zwieten kembali ke Batavia. Sebagai penggantinya ditunjuk kolonial (kemudian Jenderal) J.L.J.H. Pel. untuk membendung serangan laskar Aceh, Pel membangun pos-pos pertahanan (36 buah) di sekeliling

Krueng Aceh dan Meuraksa (daerah Teuku Ne' Meuraksa sejak semula telah memihak kepada Belanda). Untuk menutup kemungkinan hubungan Aceh dengan luar Negeri, Pel dengan seizin gubernur jenderal Hindia Belanda juga telah merebut daerah Krueng Raba dan Krueng Raya di pantai Utara Sagi XVI Mukim.

Rancangan Belanda selanjutnya adalah menaklukkan daerah-daerah uleebalang di luar Aceh Besar. Belanda menyadari sepenuhnya arti dari pada daerah uleebalang sebagai sumber kekuatan perlawanan rakyat Aceh. Sejak tahun 1874 Belanda telah bergerak menuju ke daerah-daerah Pidie Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan²². Daerah-daerah yang telah mengakui takluk diharuskan menandatangani pernyataan sederhana yang terdiri atas enam pasal, kemudian setelah tahun 1876 dengan "pernyataan panjang" delapan belas pasal yang setelah tahun 1898 dengan sebuah "*Korte Verklaring*" (masa pemerintahan Van Heutz), karena disadari-

nya pernyataan yang telah lalu kurang membawa hasil bagi Belanda²³

Sementara itu semangat perlawanan rakyat Aceh tampaknya tidak semakin kurang, bahkan meningkat. Walaupun dari segi persenjataannya dapat dikatakan kurang bila dibandingkan dengan Belanda, tetapi rakyat Aceh mempunyai modal kekuatan lain, yang sukar dipatahkan oleh Belanda; yaitu ikut sertanya semua lapisan rakyat, para Tuanku (keluarga Sultan) Uleebalang, ulama, rakyat biasa laki-laki dan wanita, sehingga perang ini dapat dikatakan sebagai perang (*volks oorlog*) rakyat semesta. Para ulama menyerukan kewajiban "perang sabil" sehingga dapat menumbuhkan persatuan yang kuat atas kesadaran mereka sebagai umat Islam. Dalam kesiapsiagaan untuk berperang, mereka umumnya memusatkan kekuatannya dalam *kuta-kuta* pertahanan (Kuta Meugat, Kuta Pohama, Kuta Mosapi Kuta Aneuk Galing, Kuta Batee Iliek, Kuta Reh di Aceh Tengah dan lain-lain yang tersebar di seluruh Aceh). Kuta-kuta itu dipertahankannya dengan perlawanan yang sengit, kadang-kadang sampai habis terbakar atau mereka tewas semuanya (Kuta Aneuk Galong, tahun 1896 terbakar habis, Betee Iliek tahun 1901 semua gugur, Kuta Reh tahun 1904 gugur 561, diantaranya 189 wanita dan hanya satu anak kecil yang tinggal²⁴. Ini berarti kuta pertahanan juga termasuk salah satu unsur kekuatan pokok rakyat Aceh di bidang kemiliteran di samping unsur kekuatan pokok lain, yaitu : jiwa keislaman mereka dan struktur pemerintahan kerajaan Aceh (dimaksudkan di sini adalah daerah uleebalang yang harus ditaklukan satu per satu oleh Belanda).

Semenjak Jenderal Pel digantikan oleh Mayor Jenderal G.B.T. Van Kerchem (Pel meninggal pada 24 Februari 1876) tampaknya kedudukan Belanda bertambah sulit. Ia kurang mampu menghadapi laskar Aceh yang sering menembus pos-pos di sekeliling Kutaraja, dan bahkan menyerang daerah-daerah yang telah takluk kepada Belanda. Karena itu, belum satu tahun ia telah digantikan oleh Jenderal Mayor A.F.E. Diemont (6 November 1876). Tetapi dalam kenyataannya per-

lawan rakyat tidak dapat dibendung. Karena itu, daerah-daerah yang belum tunduk, seperti Simpang Ulim, Tanjong Seumantok, Samalanga, Meureudu diserahkan oleh Belanda dalam tahun 1876 dan 1877. Di saat-saat mereka tidak mampu lagi bertahan, mereka menyatakan tunduk kepada Belanda. tetapi di belakangnya sebahagian besar daerah-daerah tetap setia kepada perjuangan semula. Hal ini membuat Belanda cukup kewalahan, sedang biaya perang sampai awal tahun 1877 sudah mencapai angka 69 juta *gulden*.

Karena gencarnya serangan rakyat Aceh tahun 1877, pasukan telah ditambah menjadi 9420 orang dan tahun 1878 -- 1879 naik menjadi 10.000 orang lebih ²⁵. Dalam pada itu gubernur militernya silih berganti yang umumnya dalam batas-batas waktu dekat (lihat lampiran daftar penguasa Belanda di Aceh). Sedang biaya perang sampai tahun 1880 naik menjadi 115 juta *gulden* dan pada akhir tahun 1884 mencapai angka 150 juta *gulden*²⁶

Setelah sebelas tahun berperang, Belanda makin tampak tidak berdaya. Untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih besar lagi, sidang rahasia *Staten Generaal* pada 16 dan 17 Juni 1884 memutuskan akan melaksanakan "stelsel konsentrasi" di Aceh. Pada bulan Maret 1885 stelsel ini mulai dilaksanakan. Bentuknya ialah pada tanah seluas 50 km persegi di sekitar Kutaraja di bangun 16 pos penjagaan. Tiap-tiap pos dibatasi oleh lapangan kosong tanpa pohon dan rumah sejauh 1000 meter, dan semua pos-pos itu dihubungkan dengan telepon Kutaraja.

Di pihak Aceh sampai tahun 1884 masa pemangkuan sultan Aceh telah berlangsung selama 10 tahun. Berhubung Tuanku Muhammad Daud sudah cukup dewasa, pada akhir tahun 1884 Tuanku Hasyim menyerahkan kembali pemerintahan kepadanya. Dalam suatu upacara resmi di Mesjid Indrapuri, Tuanku Muhammad Daud dinobatkan menjadi sultan Aceh dengan gelar Sultan Ala'addin Muhammad Daud Syah. Bersamaan dengan itu

ibukota negara dipindahkan ke Keumala di Pidie (kira-kira 25 km arah ke selatan Kota Sigli).

Pada waktu upacara penobatan sultan di mesjid Indrapuri, juga para pemimpin Aceh. Tuanku Hasyim, Panglima Polim Ibrahim Muda Kuala, Tengku Chik Di Tiro dan lain-lain telah mencetuskan '*ikrar perang sabil*'. (pernyataan wajib perang di jalan Allah) melawan Belanda. Sebenarnya ikrar serupa ini esensinya sama saja dengan yang telah dicetuskan di istana (dalam) dulu, pada saat menjelang pendaratan Belanda yang pertama (surat-surat sultan yang tegas ditulis setelah musyawarah dengan staf kerjaan). Dan juga sama dengan yang dimusyawarahkan di Garot ($\pm$ 6 km dari Kota Sigli) pada bulan Januari 1807. Hanya waktu, tempat pemimpin, dan irama bahasa saja yang berlainan sesuai dengan suasana masa masing-masing. Tujuannya ialah untuk memperbaharui semangat berjuang. Dengan ikrar ini, selama perang berlangsung, telah melahirkan banyak pejuang yang umumnya mereka tewas di medan pertempuran. Di antaranya yang cukup dikenal ialah : Teuku Imeum Lueng Bata, Panglima Polem Mahmud Cut Banta (meninggal 1879), Tuanku Hasim (meninggal, 1891), Teuku Ibrahim Lam Nga (suami pertama Cut Nyak Dhien, tewas 1878) Tengku Chik Di Tiro Muhammad Saman syahid, 1891). Teungku Chik Muhammad Amin Tiro (tiwas dalam Kuta Aneuk Galing, 1896), Teuku Panglima Nyak Makam (dipotong kepalanya, 1896), Teuku Umar (tewas 1899) Cut Nyak Dhien (dibuang 1906) dan masih banyak lagi²⁷ -

Demikian pula, karena ikrar tersebut juga sejak tahun 1899 Belanda melancarkan serangan secara besar-besaran, sehingga masa 10 tahun sejak waktu itu (1899..1909) disebut oleh Van't Veer sebagai "masa 10 tahun berdarah" (*Tien Bloedige Jaren*) di Aceh yang telah merenggut 21.865 jiwa rakyat Aceh (kira-kira 4% dari jumlah penduduk pada waktu itu)²⁸ .

Di atas telah dikemukakan bahwa stelsel konsentrasi, yang dilaksanakan Belanda sejak Bulan Maret 1885, bertalian erat

dengan kenyataan makin meningkatnya perlawanan rakyat, sedang di pihak Belanda tidak berdaya untuk mengatasinya. Keadaan Belanda yang demikian, terutama disebabkan oleh karena pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan biaya operasi militer yang tampaknya semakin meningkat dan tenaga personal militer dalam jumlah yang lebih besar.

Kalau dilihat dari dua faktor tersebut di atas, stelsel konsentrasi bisa menguntungkan. Biaya dapat ditekan serendah mungkin dan pasukan dapat dikurangi berhubung mereka telah dipusatkan dalam lini konsentrasi. Tetapi apabila tetap dipertahankan dalam jangka waktu panjang, daerah seluas kira-kira 50 km persegi di sekeliling Kutaraja itu tidak akan mempunyai nilai politis dan ekonomis yang menentukan. Hal ini disadari oleh pemerintah Belanda.

Dalam rangka mencari jalan penyelesaian perang yang lebih efektif, pada tahun 1891 seorang Orientalis : Dr. Christiaan Snouck menyelesaikan laporannya yang berjudul : *Verslag Omtrent religius politieke toestan den ini Atjeh* (Laporan Keadaan Politik Agama di Aceh) yang kemudian menjadi dasar buku standarnya *De Atjehers* 9 jilid I dan II.

Menurut Snouck, dalam laporannya itu, rakyat Aceh yang taat beragama Islam tidak mungkin mau menyerah sebelum mereka ditundukkan dengan kekerasan; sikap menunggu dan kompromi tidak akan membawa hasil. Karena itu jalan yang tepat ialah menyerah mereka; Keumala hendaknya direbut dan kekuatannya dipatahkan.

Berpegang pada dasar rekomendasi Snouch Hugronjoe, pada tahun 1896 serangan ofensif ke daerah-daerah mulai digerakkan dan masa pemerintahan Van Heutzz (1898 – 1904) gerakan ini semakin ditingkatkan, terutama setelah pasukan militer pada tahun 1899 diperkuat dengan korps *Marechausee*²⁹ Dengan gerak cepat ini sampai akhir pemerintahan Van Heutzz sebagian besar daerah Aceh, sejak dari Aceh Besar, pantai barat sampai ke pantai timur dapat ditaklukkan.

Rencana lain Van Heutzz, yang utama adalah menangkap Sultan atau setidaknya tidaknya mau menyerah, pada bulan Mei 1898 pasukan dikerahkan ke Pidie dan pada akhir tahun 1898 Keumala berhasil direbut. Sultan menyingkir ke Tangse yang juga diikuti oleh Belanda, kemudian ke Sawang dan pada tahun 1900 Sultan bertahan di Kuta Batee Iliek (perbatasan Aceh Utara - Pidie). Pada bulan Februari 1901 kuta pertahanan ini juga diserang Belanda, sehingga Sultan Menyingkir lagi ke daerah Gayo. Pada tahun berikutnya Belanda menangkap isteri Sultan Pocut Murong. Akhirnya, karena tekanan Belanda yang terus menerus itu, pada bulan JANUARI 1903 Sultan Ala'ad-din Muhammad Daud Syah terpaksa menyerah. Dengan ini berakhir pula pemerintahan Kerajaan Aceh, walaupun perlawanan masih terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya.

5.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat

Sebelum pendudukan Belanda, pengaruh kekuasaan Eropa dalam penyelenggaraan hidup dalam masyarakat di Aceh hampir tidak terasa. Tidak ada suatu ketentuan, seperti: monopoli perdagangan, penyerahan wajib, penanaman wajib, pajak tanah dan sebagainya, yang dipaksakan mereka di sana. Hubungan kekuasaan Eropa dengan Kerajaan Aceh pada waktu itu sebagai hubungan antar dua negara merdeka yang mempunyai status yang sama. Hal ini dapat kita lihat dari pasal-pasal perjanjian bilateral yang pernah dibuat selama abad ke-19 (lihat di perjanjian Aceh - Inggris 1819, perjanjian Aceh - Belanda 1857; juga surat Louis Philippe dari Perancis tahun 1843).

Setelah tahun 1874 Pemerintah Kolonial Belanda, sebagaimana telah kita kemukakan di atas juga telah memaksa "pernyataan enam pasal" dan "pernyataan delapan belas pasal" kepada beberapa daerah "uleebalang di Aceh. Tetapi pernyataan itu rupanya belum berapa mendasar dalam masyarakat Aceh, terutama dalam masyarakat *Gampong* (desa). Pernyataan tersebut lebih ditekankan pada segi politisnya, yaitu agar uleebalang mengakui kedaulatan Belanda, dalam suasana perang waktu itu tidak seberapa ketat. Bahkan dengan pengakuan takluk itu telah

memberikan kelonggaran kepada daerah tersebut untuk dapat melakukan berbagai kegiatan secara lebih aman, sambil membantu gerakan perlawanan rakyat yang sedang berlangsung, terutama di Aceh Besar.

Suatu kegiatan yang tampak dilakukan oleh penguasa-penguasa Eropa sejak permulaan abad ke-19 ialah mengacau perdagangan kerajaan Aceh dalam bentuk sabotase perdagangan dan pelanggaran peraturan masuk Pelabuhan Aceh, terutama pelabuhan-pelabuhan yang ada di daerah-daerah. Kegiatan ini makin meningkat dilakukan, terutama oleh pihak Belanda semenjak bagian kedua abad ke-19, sehingga Sultan Ibrahim Mansyur Syah perlu mengambil tindakan memerintahkan pengawasan ketat tiap pelabuhan di daerah-daerah.

Walaupun kuatnya infiltrasi asing (Eropa) pada waktu itu ternyata sultan masih mampu mengendalikan keamanan dalam negeri. Para pedagang di kota-kota pelabuhan baik asing maupun orang-orang Aceh dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dengan aman. Umumnya orang-orang asing yang tinggal di sana, seperti yang terlihat di ibukota Bandar Aceh Darussalam sejak abad-abad sebelumnya, berasal dari Arab, India, Turki Cina, Abesinia, Persia dan Pegu³⁰. Kota-kota pelabuhan yang ramai dikunjungi sejak permulaan abad ke-19 selain dari Bandar Aceh Darussalam ialah di pantai utara - timur, Pedir, Meureudu Samalanga, Peudada, Peusangan, Lhok Seumawe, Pasai/Geudong, Cunda, dan lain-lain; di pantai barat - selatan: Lamno/Daya, Meulaboh, Susoh, Labuhan Haji, Tapak Tuan, Trumon, Singkel, Barus dan lain-lain.³¹

Hasil bumi Aceh yang menjadi sumber utama pendapatan penduduk selama abad ke-19 yang diekspor melalui pelabuhan di pantai barat--selatan, ialah lada, kapur barus dan getah rambung, sedang dari pantai utara - timur ialah pinang, padi dan lada. Barang-barang impor yang penting pada waktu itu antara lain: bahan pakaian, barang pecah belah, pisau, pacul yang umumnya berasal dari daratan Cina. Dalam hubungan ini Anderson telah menyusun suatu daftar yang berisi 33 jenis barang seharga 7.686,50 dollar (dollar Spanyol) yang pernah di-

angkutan oleh sebuah jung Cina ke Aceh.³² Di samping itu rakyat Aceh memproduksi sendiri bahan-bahan pakaian dari sutera dan katun melalui pabrik yang disebut *Teupeun*, tetapi rupa-rupanya hasil produksi mereka sendiri lebih mahal daripada yang diimpor, sehingga pakaian untuk sehari-hari umumnya berasal dari impor.³³

Lada, bagaimana pun merupakan lambang perdagangan Aceh sejak beberapa abad yang lampau hingga tahun 1920. Di Pasai perkebunan lada telah berproduksi sejak abad ke-14 dan di Pidie sejak abad ke-15. Selama abad ke-19 di pantai timur umumnya produksi lada menurun diganti kedudukannya oleh pinang dan padi. Dalam tahun 1835 - 1836, 1836 - 1837 dan 1837 - 1838, produksi pinang di sana meliputi 64 - 104 pikul, 81.267 pikul, 98.406 pikul, sedangkan lada hitam berkisar hanya 23.604 pikul, 39.100 dan 31.223 pikul.³⁴ Sepanjang sejarah Aceh, pantai barat yang merupakan penghasil utama lada. Ritter melaporkan bahwa sekitar 150.000 - 200.000 pikul setahun;³⁵ suatu jumlah yang tidak pernah dicapai oleh pantai timur-utara selama abad ini.

Daerah penghasil padi yang paling utama di seluruh Aceh ialah Pidie. Di daerah ini telah mempunyai sistem irigasi yang baik dan umumnya sudah termasuk tua; James Siegel memperkirakan sekitar 300 tahun.³⁶ Selama bagian pertama abad ke-19 padi termasuk barang ekspor yang penting juga dan daerah pelembarannya ke - luar negeri, seperti juga umumnya barang-barang ekspor lain ialah Penang, kota yang paling erat hubungan dagangnya dengan Aceh selama abad ke-19. Sehubungan dengae surplus beras yang diekspor ke luar menurut laporan Kapten Coombs tahun 1818 berkisar sekitar 1500 *kayan* dan padi 700 *kayan* (kalau dimaksudkan *kayan* Aceh, satu *kayan* = 10 *gunca*; 1 *gunca* = 10 *naleh*; 1 *naleh* = 20 *kg*). Dan menurut Kantor Pencatatan Impor-Ekspor di Penang, = beras yang dimasukkan ke sana tahun 1835 - 1836, 1836 - 1837, 1837 - 1838 berkisar antara 304 *kayan* 101 *kayan* dan 30 *kayan*.³⁷

Suatu hal yang sering berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan hidup dalam masyarakat ialah ketidakstabilan pemerintah pusat. Perebutan kekuasaan antara keluarga sultan, di samping berpengaruh dalam bidang politik, seperti lemahnya pemerintah pusat, renggangnya hubungan dengan daerah Uleebalang, timbulnya keberanian bangsa-bangsa asing (Eropa) untuk mengacau/mengadudomba daerah-daerah uleebalang, juga mempengaruhi sendi-sendi perekonomian negara. Perdagangan dengan luar negeri menjadi merosot. Para uleebalang bebas mengadakan hubungan dagang dengan luar negeri, sedang petugas-petugas sultan tidak mampu mengontrolnya, sehingga lalu lintas perdagangan menjadi kacau³⁸ dan bersamaan dengan itu kapal-kapal asing (Eropa) sering melanggar peraturan masuk Pelabuhan Aceh. Sebagai bukti, berikut ini diturunkan beberapa angka yang menunjukkan adanya kenyataan tersebut.

Selama masa kekacauan (1813 - - 1819) yang disebabkan oleh peristiwa pengambil-alihan kekuasaan dari Sultan Jauhar Alam Syah, volume perdagangan dengan Penang menurun jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya. Dari tahun 1810 - - 1811 sampai dengan 1812 - - 1813 (selama 3 tahun) nilai perdagangan 1205 148,00 dollar (dollar Spanyol), yang berarti tiap tahun rata-rata 401716.00 dollar (pada waktu itu atas usaha Sultan Jauhar, pemerintahan pusat cukup stabil). Tetapi dalam tahun 1813 - - 1814 nilai perdagangan turun menjadi 165579,00, dan selama enam tahun berikut (1814 - - 1815 sampai 1819 - - 1820), 847621,00 dollar, rata-rata pertahun 15736,83 dollar. Sesudah keadaan negara aman kembali, Jauhar Alam Syah kembali memerintah, nilai perdagangan dengan Penang selama tiga tahun (1820 - - 1821 sampai 1823 - - 1824) menjadi 972700,00 (rata-rata per tahun 324233,00) dan pada akhir pemerintahannya (Jauhar meninggal, Desember 1823 angka tersebut telah mencapai 445053,00 (dollar Spanyol)³⁹

Sampai tahun meninggalnya Sultan Jauhar lalu lintas perdagangan di perairan Aceh telah menjadi ramai kembali, Kapal-kapal Amerika, Inggeris, Perancis dan Belanda memegang pe-

ranan dalam mengangkut hasil bumi Aceh. Tetapi tahun-tahun berikutnya mereka kembali melakukan tindakan-tindakan pelanggaran. Pada tahun 1825 Belanda merampas tiga buah kapal Aceh dengan alasan melakukan perdagangan budak; tahun 1830 kapal dagang Amerika "*Friendship*" terpaksa ditahan di Pelabuhan dan pada tahun 1836 sebuah kapal Inggris ditenggelamkan di Pidie, karena di sekitar tahun itu kapal-kapal Inggris sering melakukann pengacauan di perairan pantai utara Aceh. Dan di bulan Desember 1870 sampai Januari 1871 kapal perang Belanda *Maas en Waal* melakukan kepungan ketat di pantai utara Aceh, yang menyebabkan pedagang Aceh di sana menjadi lumpuh, dengan alasan mengawasi perdagangan budak, padahal dalam tahun 1833 Belanda sendiri telah mengangkut tidak kurang 300 orang budak dari Pulau Nias. Puncak pengacauan Belanda di bidang perdagangan sebelum agresinya ke Aceh (1873) ialah pembajakan kapal Aceh *Gipsy* pada bulan September 1871 di Idi⁴⁰ Tindakan Belanda itu di samping untuk melemahkan perdagangan Aceh, juga bertujuan, untuk melumpuhkan kekuatan Aceh di laut.

Di atas telah disinggung, bahwa pendudukan Belanda di Aceh tidak seberapa membawa pengaruh pada masyarakat Aceh Pada bulan November 1883 Uleebalang Teunom Teuku Imeum Muda menahan sebuah kapal milik Inggris *Nisero* bersama awak kapalnya. Peristiwa ini telah menggemparkan pemerintah Belanda dan juga telah menimbulkan konflik politik dengan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris mengirim kapal *Pegasus* ke Teunom untuk mengadakan hubungan dengan Teuku Imeum Muda, sedang Belanda terpaksa membiarkan saja kejadian itu. Pada bulan September 1884 Pemerintah Belanda baru dapat menyelesaikannya dengan uang tebusan sebanyak 10.000,00 kepada Uleebalang Teunom yang telah mengakui takluk kepada Belanda sejak tahun 1877⁴¹

Sebelumnya yaitu pada bulan Maret 1880 juga di daerah Teunom telah terjadi peristiwa yang cukup mengejutkan. Dua orang penyelidik Perancis L. Wallon dan Guillaume yang hendak mengadakan penelitian mengenai kemungkinan didirikan tam-

bang bijih emas di hulu Sungai Teunom terbunuh di sana. Rakyat Aceh membunuh mereka bukan karena hendak merampoknya (semua harta mereka tidak diambil), melainkan ke dua penyelidik itu dianggap, seperti juga Belanda, musuh yang hendak menjajah negerinya.⁴²

Sejak tahun 1880-an Belanda juga telah mulai memperkenalkan kereta api di Aceh, tetapi pengadaan "*Atjeh-Tram*" yang sampai awal abad ke-20 lini-nya makin diperpanjang, tampaknya lebih diletakkan pada kepentingan di bidang kemiliteran daripada di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Rakyat Aceh dalam rangka melumpuhkan kekuatan Belanda, sering membongkar rel kereta api tersebut.

Sebenarnya pengaruh penjajahan Belanda baru tampak jelas di Aceh sejak Van Heuts berhasil menguasai Aceh Besar dan sebagian besar daerah uleebalang di seluruh Aceh, yaitu pada awal abad ke-20. Sejak itu administrasi pemerintahan sudah mulai teratur dan perusahaan-perusahaan swasta - terutama kepunyaan Belanda telah dapat menanamkan modalnya dengan lebih aman. Perusahaan dagang *Nederlandsche Handel Mij* (NHM) membuka cabangnya di Sabang, yaitu *N.V. Zeehaven en Kolenstation* Sabang dan perusahaan minyak *Bataafsche Petroleum Mij* (BPM) mulai menanamkan modalnya di Peureulak. Demikian juga di bidang perkebunan kopi dan karet⁴³

Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa masyarakat Aceh dalam abad ke-19 masih tetap tersusun dalam kelompok yang terdiri dari: Sultan beserta dengan para keluarganya (tuanku), uleebalang, ulama dan rakyat biasa. Rupanya Perang Belanda di Aceh telah menjalin persatuan ke empat kelompok masyarakat itu secara lebih utuh dalam rangka menghadapi musuh bersama. Pada akhir abad ke-19, memang ada kecenderungan timbulnya gejala, seperti yang diistilahkan oleh T. Ibrahim Alfian, "kericuhan sosial"⁴⁴ dalam masyarakat (misalnya: tuanku, uleebalang, ulama dan rakyat yang telah menghentikan perlawanan dengan sungguh-sungguh, di samping ada pula yang masih tetap meneruskan perjuangan), tetapi keadaan ini baru tampak jelas

pada awal abad ke-20, yaitu setelah Sultan Muhammad Daud Syah menyerah.

5.3 Kehidupan Seni Budaya

Sebagaimana dalam abad-abad sebelumnya, kehidupan seni budaya di Aceh selama abad ke-19 juga dilandasi oleh dasar-dasar seni budaya Islam atau setidaknya-tidaknya dasar-dasar seni budaya yang sejauh mungkin tidak bertentangan dengan pokok-pokok ketentuan Islam. Pengaruh seni budaya Barat meskipun ada unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan dasar ajaran Islam dalam berbagai aspek belum seberapa tampak, dalam hubungan ini, sejak awal pendudukannya, Belanda telah mulai memasukkannya, tetapi kenyataan tersebut baru nampak jelas sejak awal abad ke-20 (sistem pendidikan, alat pengangkutan, sistem pemerintahan sistem pengobatan modern, dan lain-lain).

Dalam perkembangannya selama abad ke-19, seni-budaya di Aceh (sistem pendidikan, seni sastra, seni tari dan sebagainya) juga masih tetap mengikuti pola-pola yang sudah lebih dahulu ada di sana. Tampaknya corak seni budaya Islam yang berkembang di Aceh, di samping terdapat pengaruh yang diterima dari negara-negara Islam, seperti dari Parsi, Turki dan lain-lain juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan yang mendahuluinya. Bentuk atap mesjid yang bertingkat (biasanya 2 atau 3 tingkat) jelas menunjukkan anasir Indonesia asli, sementara diketemukan juga mesjid yang atapnya berbentuk kubah melengkung, seperti mesjid raya Baiturrahman di Kutaraja yang dibangun oleh pemerintah Belanda pada bagian ke dua bad ke-19.

Mengenai perkembangan pendidikan di Aceh dalam abad ke-19 dapat dikatakan tidak menunjukkan perubahan yang berarti, selain daripada penambahan jumlah lembaga pendidikan saja. Sistem pendidikannya masih mengikuti sistem yang berlaku dalam abad ke-18 atau abad sebelumnya. Anak-anak yang telah mencapai usia sekolah pada tingkat dasar mereka belajar pada

orang tuanya atau dirumah seorang *alim* (orang yang sudah mengetahui beberapa cabang ilmu agama Islam) yang khusus mengajar anak-anak dalam suatu *gampong* (desa), biasanya pada waktu malam atau pagi hari. Di samping itu untuk tingkat sekolah dasar pada tiap *gampong* tersedia pula lembaga pendidikan yang dapat dikatakan formal, yaitu *meunasah* (lembaga ini juga berfungsi sebagai tempat sembahyang dan musyawarah).

Apabila seorang anak ingin melanjutkan pendidikannya untuk tingkat menengah ada pula lembaga pendidikan yang didirikan hampir pada tiap mesjid. Tingkat pendidikan ini biasanya disebut *rangrang*, sedang lembaga pendidikan yang lebih tinggi yang mencetak para alim dan ulama disebut *Dayah Teungku Chiek* yang biasanya juga membuka tingkat pendidikan *rangrang* dengan pengajarnya *Teungku di rangrang* (*murib* yang sedang belajar pada *teungku chiek*). Seorang pemuda yang pergi belajar pada *dayah teungku chiek* dikatakan: *jak meudagang* dan para pelajar di sana disebut: *murib* (*santri* di Jawa)⁴⁵

Bahan pengajaran yang disajikan dalam lembaga pendidikan itu, umumnya yang berhubungan dengan masalah tauhid, ibadat dan muamalah sebagaimana yang ditentukan oleh ajaran Islam; dan tampaknya di masa perang dengan belanda para pelajar (*murib*) lebih didorong untuk merelakan dirinya melakukan *prang sabil* sebagai kewajiban mempertahankan agama dan negara dari penjajahan *kaphee* (Belanda). Jadi, selama abad ke-19 kita tidak/belum menemukan lembaga-lembaga pendidikan kejuruan yang memberikan kepada anak didik beberapa ketrampilan khusus, seperti *deyah* pertanian, peternakan dan pertukangan. Biasanya ketrampilan itu diperoleh melalui pendidikan informal.

Mengenai jumlah *deyah* yang didirikan selama abad ke-19 belum diperoleh angka yang pasti. *Deyah-deyah* yang besar kemungkinan didirikan atau setidaknya-tidaknya telah berkembang pesat dengan jumlah *murib* yang besar selama abad ini, antara lain ialah: *Dayah Teungku Chiek Tanoh Abée*, *Dayah Teungku*

Chiek Kuta Karang (*Deyah Ulee Susu*), *Deyah lamnyong*, *Deyah Lambhuk*, *Deyah Krueng Kalee*, *Deyah Lam Krak*, *Deyah Lam Pucok*, *Deyah Lam U* di Aceh Besar; *Deyah Teungku Chiek Di Tiro*, *Dayah Teungku Chiek Pante Geulima* di Aceh Pidie, *Deyoh-deyoh* di sekitar Kuta Batee Iliek yang memegang peranan penting selama perang di sana, seperti *Dayah Cot Merurak Deyah Pulo Baroh di Aceh Utara*.

Data mengenai tahun didirikan, tokoh pendiri, jumlah murib (santri) dan lain-lain dari *dayah* tersebut di atas tidak/ belum diperoleh dengan lengkap. Snouck Hourgronje juga hanya membahas selintas mengenai beberapa *dayah* tersebut⁴⁶. *Dayah Teungku Chiek Tanoh Abee*, tampaknya termasuk *dayah* yang besar dan berpengaruh, di samping *dayah* Teungku Chiek Di Tiro dalam abad ke-19. Pada masa permulaan perang dengan Belanda pengasuhnya ialah Teungku Syeh Abdul Wahab Sebelumnya berturut-turut Syeh Muhammad Salib, Syeh Abdurrahim, Syeh Abdul Hafidh dan Syeh Idrus Bayan sebagai pendirinya yang lebih terkenal dengan nama Teungku Chiek Tanoh Abee⁴⁷. Melihat urutan nama itu agaknya *Dayah* ini telah didirikan sekitar akhir abad ke-18 atau permulaan abad ke-19.

Dayah Ulee Susu pada bagian ke dua abad ke-19 diasuh oleh Syeh Abbas Ibnu Muhammad yang lebih dikenal dengan nama Teungku Chiek Kuta Karang. Karena dalam masa asuhannya menjadi lebih berkembang, *dayah* ini dikenal juga dengan nama *Dayah Teungku Chiek Kuta Karang*. Dia termasuk salah seorang ulama Aceh terkenal pada waktu itu, pengarang kitab *Tadzkiratur Rakidin* yang bertahun Hijriah 1307 (1889 M). Kitab ini sampai sekarang masih tersimpan pada *Universiteitsbibliotheek, Leiden* (Mas. Cod. Or. 8038)⁴⁸.

Salah seorang wanita yang turut berperanan dalam perang Belanda di Aceh ialah Teungku Fakinah⁴⁹. Setelah menghentikan perjuangan pada tahun 1911, Fakinah membina sebuah *dayah* di Lam Diran (*Dayah Lam Diran*). *Dayah* ini sebenarnya sebagai kelanjutan dari *dayah* orang tuanya di Lam Krak dan Lam Pucok (Ayahnya Datu Mahmud dari *Dayah Lam Krak*

ibunya Fathimah anak dari Teungku Chiek Lam Pucok). Sebelum terjun dalam peperangan, Fakinah bersama suaminya Teungku Ahmad (tewas dalam agresi Belanda pertama 1873) sudah pernah mengajar di *Dayah* Lam Pucok pada tempat mana ia sendiri menerima pendidikan. Berdasarkan keterangan ini dapat disimpulkan bahwa *Dayah* Lam Pucok dan Lam Krak termasuk *dayah* yang didirikan atau setidaknya-tidaknya berkembang pada abad ke-19, hanya tahun yang pasti tidak/belum diketemukan.⁵⁰

Salah satu *dayah* yang cukup dikenal di Pidie ialah *Dayah* Teungku Chiek Di Tiro (Daerah IX Mukim Keumangan). *Dayah* ini mencapai kemajuan pesat di bawah pimpinan Teungku Chiek Di Tiro Muhammad Saman (1836 - - 1819) yang terkenal sebagai penggerak *Prang Sabil* melawan Belanda itu. Sebelum Muhammad Saman sebenarnya *dayah* ini terdiri dari dua *dayah*, yaitu: *Dayah* Tiro Keumangan (IX Mukim Keumangan) dipimpin oleh Teungku Chiek Muhammad Amin (Teungku Chiek Dayah Cut, guru Muhammad Saman) dan *Dayah* Tiro Cumbok bersebelahan dengan yang pertama hanya dibatasi oleh sungai, yang dipimpin oleh paman Muhammad Saman Teungku Ubet⁵¹

Dayah Teungku Chiek Pante Geulima didirikan oleh Teungku Pante Ya'kob, tetapi yang lebih dikenal sebagai Teungku Chiek Pante Geulima ialah anak Teungku Haji Ismail. Selama perang Ia turut aktif melawan Belanda, pada tahun 1895, untuk menguatkan kedudukan sultan di Keumala, ia bersama Habib Lhong (seorang pemimpin perlawanan juga), telah mengerahkan 500 orang pasukan ke sana⁵². Teungku Chiek Pante Geulima (Teungku Haji Ismail) tewas dalam bulan Februari 1901 dalam mempertahankan *Kuta Batee Iliék* bersama dengan para pemimpin lainnya (seluruh laskar rakyat diperkirakan ada 80 orang yang bertahan di atas *Kuta Glee Batee Iliék* semua gugur).

Di bidang kesenian tampaknya dalam abad ke-19 seni sastra lebih menonjol dibandingkan dengan cabang kesenian lain. Dalam hubungan ini dimaksudkan adalah syair-syair perang (*hikayat prang*) yang rupa-rupanya di ciptakan dalam rangka

untuk lebih menumbuhkan semangat berjuang. Di antaranya yang cukup dikenal dalam masyarakat Aceh khususnya ialah: Hikayat Prang Sabi, Hikayat *Pang Compeuni* dan Syair *Prang Atjeh*.

Hikayat *Prang Sabi* dikarang oleh Teungku Chiek Pante Kulu (Teungku Haji Muhammad) sekitar tahun 1880 M.⁵³ Isinya terdiri atas empat bagian, yaitu: Kisah Ainul Mardhiah, kisah pasukan gajah, kisah Sa'id Salmy, dan kisah seorang anak yang mati hidup kembali. Intisari buku itu ialah menunjukkan nilai hakiki hidup muslim dalam pandangan kekinian dan keabadian hidup serta hubungannya dengan beramal dan berjuang di jalan Allah. Digambarkan secara puitis mengenai tanggung jawab seorang muslim di bidang kenegaraan serta syurga sebagai imbalan dari mati syahid, dan jalan yang paling mudah untuk mencapainya adalah melalui peperangan dan membunuh *kaphee* (Belanda).

Hikayah *Prang Compeuni* di karang oleh Dokarim (Abdulkarim) dari Glumpang Dua (Daerah VI mukim dari XXV mukim)⁵⁴ Sebenarnya dikatakan "dikarang" kurang tepat, sebab dia tidak tahu membaca dan menulis. Tetapi syair itu dihafal kemudian dibukukan dan sekarang masih ada disimpan di *Universiteit bibliotheek, Leiden* (Ms. Cog. Or. 8728 a). Ringkasannya isinya menceritakan situasi kerajaan Aceh dalam menghadapi perang dengan Belanda dan pengkhianatan Panglima Tibang yang ditugaskan oleh sultan untuk membeli kapal di luar negeri. Isinya itu hampir sama dengan syair *Prang Atjeh* yang dikarang oleh Budak Jauhari (nama samaran, nama asli tidak diketahui).

5.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Sampai abad ke-19 selain dari Agama Islam tidak ada agama yang berkembang di Aceh. Misionaris Kristen yang dalam abad ini giat menyiarkan agama Kristen di daerah-daerah lain di Indonesia, seperti di Tapanuli, di Aceh tidak dapat bergerak secara leluasa. Dalam hubungan ini tidak berarti

peluk-peluk agama lain tidak dibenarkan tinggal di sana. Orang-orang Cina umpamanya yang bertempat tinggal di kota-kota pelabuhan (lihat bagian dua di atas) bebas melakukan ibadah menurut agama mereka. Agaknya latar belakang keadaan yang demikian terletak pada proses islamisasi yang telah berlangsung lama dan kuatnya pemerintah Kerajaan Aceh berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam.

Karena kuatnya pengaruh ajaran Islam pada rakyat Aceh, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda selama masa pendudukan nya tidak berniat untuk menyiarkan Agama Kristen di sana. Dalam hubungan ini Gubernur Aceh Van Sluys (1918 - 1923) pada 18 Maret 1922 telah mengirim surat rahasia kepada Gubernur Jenderal di Batavia yang menegaskan bahwa keadaan politik di Aceh akan terganggu apabila ada usaha penyebaran kepercayaan selain dari kepercayaan Islam⁵⁵. Yang mereka laksanakan dengan sangat hati-hati hanya terbatas pada usaha menghindari pendidikan Islam dari pengaruh ajaran perang sabil dan kalau mungkin, mengurangi pengaruh pendidikan Islam itu sendiri dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah Melayu⁵⁶.

Bahkan dalam rangka mengambil hati rakyat Aceh - meskipun seperti ternyata kemudian tidak membawa pengaruh apa-apa penguasa militer Belanda telah bersedia mendirikan mesjid baru di Kutaraja sebagai pengganti Mesjid Raya Baiturrahman yang telah hancur pada 6 Januari 1874, yaitu pada waktu agresi Belanda yang ke dua. Mesjid yang memang telah dijanjikan oleh Van Zwieten dulu (sebelum ia kembali ke Batavia bulan April 1874), dibangun dengan upacara peletakan batu pertama pada 9 Oktober 1879. Turun hadir dalam upacara itu gubernur sipil dan militer Aceh pada waktu itu Jenderal K. van der Heijden.

Perencanaan mesjid tersebut ialah arsitek Bruins dari Departemen Pekerjaan Umum (*Departement van Burgerlijke Openbare Werken*) dibantu oleh opsiter L.P. Luyks. Agar polanya tidak bertentangan dengan pokok-pokok ketentuan Islam diperbantukan juga seorang penasihat yaitu penghulu besar Garot. Pemborongnya ialah seorang Cina di Aceh yang bernama Lie

A Sie dengan biaya sebesar 203.000 *gulden*. Bahan bangunan umumnya didatangkan dari luar negeri, seperti kapur dari Penang, batu bata dari Negeri Belanda, batu pualam dari Cina, besi jendela dari Belgia dan lain-lain. Dan pekerja-pekerjanya ialah orang Cina, sedang orang Aceh yang diharapkan dapat bekerja di sana ternyata sangat mengecewakan penguasa Belanda.⁵⁷

Mesjid, yang pembangunannya dilatar-belakangi oleh faktor politik itu diserahkan-terimakan pada 27 Desember 1881. Upacaranya diawali dengan tembakan meriam tigabelas kali dan diikuti dengan penyerahan kunci kepada Teungku Kadhi Malikul Adil oleh Gubernur A. Prys van der Hoeven⁵⁸

Kehidupan intelektual di Aceh selama abad ke-19 ditandai oleh adanya karya-karya ilmiah dari pada cendekiawan Islam (ulama) pada waktu itu. Mereka umumnya ahli dalam cabang-cabang ilmu Islam tertentu seperti Tasawuf, Fiqh, Tafsir, dan lain-lain⁵⁹, sedangkan dalam ilmu-ilmu yang disebut "modern" seperti yang berkembang di negara-negara Barat waktu itu belum tampak.

Di antara karya tulis yang patut kita kemukakan, sehubungan dengan adanya kecenderungan perubahan alam pikiran (*ijtihad*) para cendekiawan Islam di Aceh ialah kitab *Tadzki-ratur Rakidin* (1307 H) karya Teungku Chiek Kuta Karang yang telah disebutkan di atas. Dalam kitabnya itu pengarang mengemukakan pandangannya mengenai berbagai masalah yang menyangkut dengan pemimpin-pemimpin pemerintah, ulama, hubungan agama dengan pemimpin pemerintah, tentang khutbah Jum'at, dan masalah-masalah keagamaan lainnya. Dalam hubungan dengan pemimpin ditegaskan ada tiga macam pemimpin, yaitu (terjemahan dalam bahasa Indonesia);

Wahai saudara yang budiman, raja dalam 'Alam ada tiga perkara, pangkat raja ada tiga macam, yang memegang lahir dalam negeri lahir saja yang memerintah atas rakyat hukum adat dan kebiasaan dunia itulah raja dalam alam yang memegang jabatan lahir saja; wajib kita ikut seperti yang diperintahkannya, jika

bersatu dengan agama; perihal tidak bersatu dengan syara', janganlah kita turut seperti yang dikatakannya. Seperti tersebut dalam Hadist Nabi yang lafadhnya di kemukakan bersama maknanya: "Janganlah kita menurut perbuatan maksiat, meskipun leher anda akan dikeratnya". Kedua, raja yang memegang hukum bathin; yang memerintah jalan agama; itulah ulama Ahlulsh-syari'ah, tempat yang memegang jalan agama, wajib kita ikuti apa yang disuruhnya, Siapa yang tidak patuh akan mendapat bala⁶⁰ Pemimpin yang ketiga ialah para rasul dan ambiya.

Mengenai hubungan adat dengan hukum, Teungku Chiek Kuta karang menulis: "*Adat ban adat hukom, ban hukom adat ngon hukom sama kembar; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggro seunang hana goga; maknanya: Adat menurut adat, menurut adat, hukum menurut hukum, adat dengan hukum sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum, negeri senang tiada huru-hara*"⁶¹ Sedang bagaimana seharusnya hubungan pemimpin pemerintah dengan agama ditegaskan:

Bermula agama Allah dan raja-raja (baca: pemimpin-pemimpin pemerintah) sama kembar ke duanya, yakni seperti tali berputar sama dua, maka tiadalah berkata salah satu dari pada keduanya jauh daripada satu yang lain . . . yakni hana (artinya: tiada) hasil senang raja-raja yang jauh dari pada agama Allah dan hana (artinya: tiada) hasil senang agama Allah yang jauh dari pada raja-raja (baca: pemimpin-pemimpin pemerintah)⁶²

Dalam hubungan dengan ketentuan pembacaan khutbah Jum'at, Teungku Chiek Kuta Karang menegaskan: . . . jika dibaca khutbah Jum'at dengan bahasa Arab pada kaum Aceh niscaya tiada sah khotbah atas qaul yang mu'tamad karena maksud dari khutbah itu mu'id ah, yakni pengajaran nasehat-nasehat maka tiada hasil mu'id ah atas orang-orang yang tiada tahu maksud khutbah. . . .⁶³ Kiranya menetapkan hukum "tiada sah khutbah" yang diucapkan dalam bahasa Arab bagi orang-orang yang tiada mengerti bahasa itu merupakan buah pikiran yang cukup berani pada waktu itu.

Selanjutnya mengenai kegiatan dalam lapangan Ilmu Tasauf selama abad ke-19 dapat juga dilihat dari beberapa karangan hasil karya para cendekiawan Islam dalam bidang tersebut.. antara lain: Kitab *Syifaul Qulub* berisi 400 buah hadist yang berhubungan dengan tasauf/akhlak, karya Syeh Abdullah Al Asyi (hidup sekitar masa Sultan Jauhar Alam Syah), kitab *I'lamul Muttaqin* oleh Syeh. Jamaluddin bin Syeh Abdullah Ali Asyi (anak Syeh Abdullah Al Asyi) dan kitab *Dawaul Qulub*, hasil karya Syeh Muhammad bin Ahamad Khatib Langien (Teungku di Simpang) yang hidup sekitar masa pemerintahan Ibrahim Mansyur Syah dan Mahmud Syah.⁶⁴

5.5 Hubungan dengan luar

Dalam bagian pertama bab ini telah disinggung mengenai adanya hubungan kerajaan Aceh dengan negara-negara luar, terutama dengan negara Islam, Turki, Inggris dan Belanda. Perjanjian bilateral dengan Inggris dan Belanda telah diadakan dalam rangka mengurangi ketegangan politik dan hubungan perdagangan di kawasan ini (Traktat Pidie dengan Inggris, 1819 dan perjanjian Aceh – Belanda tahun 1857).

Berbeda dengan abad-abad sebelumnya, tampaknya hubungan Kerajaan Aceh dengan luar negeri, setidak-tidaknya sejak bagian ke dua abad ke-19 lebih dititik-beratkan pada usaha mencari dukungan politik dan bantuan senjata walaupun perdagangan juga tidak diabaikan guna menghadapi kolonialisme Belanda yang pada waktu itu kelihatan makin jelas hendak meluaskan daerah jajahannya ke Aceh. Dan agaknya salah satu faktor yang mendorong Belanda mencari jalan untuk secepat mungkin dapat menyatakan perang terhadap Aceh adalah karena kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Ibrahim Mansyur Syah dan Sultan Mahmud Syah, (Traktat Sumatera 1871 untuk melepaskan diri dari ikatan Traktat London 1924 dan ketika Belanda mengetahui bahwa Aceh sedang mengadakan kontak dengan konsul Amerika dan Italia, Belanda cepat-cepat mengerahkan angkatan peranginya ke Aceh).

Sehubungan dengan usaha untuk mendapatkan dukungan luar negeri di antara negara yang menjadi perhatian utama ialah Negara Turki. Karena itu hubungan diplomatik yang memang telah ada sejak pertengahan abad ke-16 dipererat kembali, walaupun sebenarnya dari negara itu tidak banyak yang bisa diharapkan, berhubung Turki di abad ke-19 tidak lagi di pandang sebagai negara kuat yang disegani di Eropa. Hal ini akan ternyata nanti, di saat Aceh menghadapi agresi Belanda, sedang bantuan dari Turki tidak pernah diterima. Perhatian ditujukan ke sini kiranya didasarkan pada pertimbangan, bahwa antara kedua negara mempunyai persamaan asas yaitu sebagai negara Islam.

Pada tahun 1850 Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengirim utusan (Sidi Muhammad) ke Turki dan melalui sepucuk surat, Sultan meminta agar Turki bersedia melindungi Aceh dari rongrongan Inggris dan Belanda. Sebagai balasannya, Sultan Abdul Majid mengeluarkan dua buah pengumuman resmi kerajaan (*Firman*) yang berisi kesediaan Turki untuk memenuhi permintaan Sultan Ibrahim dan pengukuhannya sebagai Sultan Aceh. Untuk menguatkan firman itu, Sultan Majid menginstruksikan pula agar gubernur Yaman selalu memperhatikan dan mengawasi kepentingan Aceh⁶⁵

Tampaknya Sultan Ibrahim gembira sekali atas sambutan yang diberikan sultan Turki, terutama mengenai isi firman kedua yang memberikan dukungan politis kepada Ibrahim untuk tetap menjadi sultan Aceh (pada waktu itu ia sedang berusaha menggeser kedudukan Sultan Ali Iskandar Syah yang dipangkunya). Sebagai imbalannya pada tahun 1855 Sultan Ibrahim mengirim uang sebanyak 10.000 dollar guna membantu Turki yang sedang terlibat dalam Perang Krim (1854 -- 1856). Sebagai balas jasa, sultan Turki tidak lupa pula memberikan bintang kerajaan (*Majidi*) kepada Sultan Ibrahim Mansyur Syah⁶⁶

Salah satu negara Eropa yang mempunyai hubungan baik dengan Sultan Ibrahim Mansyur Syah ialah Perancis. Dari negara ini sultan telah menerima dua buah surat yang pokok isinya ialah Perancis menyatakan sikap bersahabat dengan Kerajaan Aceh, terutama dalam hubungan perdagangan. Surat

pertama bertanggal 2 Januari 1843, ditandatangani oleh Raja Louis Philippe serta Menteri Luar Negeri Guizot⁶⁷ Surat kedua berasal dari Napoléon III yang dibawa pulang oleh Sidi Muhammad pada tahun 1853. Bersama dengan surat itu Napoleon III mempersembahkan sebilah pedang kehormatan yang tampaknya diterima sultan dengan suka cita⁶⁸

Keberhasilan yang didapat di Eropa pada waktu itu erat pertaliannya dengan kecekatan Sidi Muhammad, yang di samping bertugas sebagai utusan ke Turki, juga telah bersedia menjadi duta keliling di Eropa (1851 - - 1853). Di kota-kota yang dikunjungi ia selalu mengemukakan tentang adanya praktek-praktek pelanggaran teritorial yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap Kerajaan Aceh. Apa yang dikemukakan oleh Sidi Muhammad, nanti dibenarkan juga oleh seorang Italia, Cesar Moreno, yang lama tinggal di Aceh (1859 - - 1862) dan kenal baik dengan Sultan Ibrahim. Di Eropa dan Amerika, Moreno banyak membela kepentingan Aceh⁶⁹

Hubungan ke luar yang selayaknya mendapat perhatian kita selama masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah (1870 -- 1874) ialah kegiatan Habib Abdurrahman az-Zahir dan Teuku Panglima Muhammad Tibang di luar negeri, terutama usaha-usahanya untuk mencari bantuan senjata dan kapal. Walaupun mereka tidak mendapat hasil seperti yang diharapkan, namun dengan pengiriman ke dua tokoh ini, yang dianggap cukup mampu untuk pekerjaan itu, menunjukkan bahwa Aceh sedang mengadakan persiapan dalam rangka menghadapi perang. Ketidakeberhasilan Habib dan Tibang, erat pertaliannya dengan watak pribadi mereka masing-masing. Kedua tokoh ini sebenarnya lebih merupakan avonturir politik daripada tanggung jawabnya kepada negara. Tindakan-tindakan mereka selama berada di Aceh, seperti perlombaan perebutan pengaruh antara keduanya di kalangan istana yang telah menimbulkan keretakan antara pemimpin Aceh (golongan Habib dan golongan Tibang), pengkhianatan Tibang sejak permulaan agresi Belanda (1873) dan penyerahan Habib tahun 1878, cukup membuktikan hal itu. Mereka ialah pendatang dari luar yang mendapat kedudukan baik di Aceh⁷⁰

Habib Abdurrahman az-Zahir meninggalkan Aceh pada awal bulan Januari 1873 dengan tujuan negara-negara: Turki, kota suci Mekah, dan Eropa. Kalau ditilik dari kecakapan dan identitas yang dimilikinya (*habis atau sajid*, keturunan Nabi Muhammad SAW) kiranya ia tidak akan banyak menemui kesukaran dalam mengadakan kontak dengan negara-negara Islam. Tetapi ternyata setelah satu tahun berkeliling di sana Habib telah berada di Pulau Penang pada awal bulan Maret 1874 - hasil yang dibawa dapat dikatakan tidak ada; dari segi politik dan militer misinya gagal (tidak ada senjata atau pun dukungan politik yang terutama dari negara Islam). Di Penang Habib tinggal selama dua tahun dan bersama dengan Dewan Delapan (lihat di bawah) ia turut bekerja bagi kepentingan perjuangan rakyat Aceh. Pada bulan Maret 1876 Habib kembali ke Aceh dan meneruskan perjuangan bersama-sama dengan para pejuang lain untuk selama dua tahun pula. Setelah itu ia menyerah kepada Belanda dan mengambil tempat tinggal baru Mekkah dengan menerima pensiun dari Pemerintah Belanda 1,000 dollar sebulan untuk selama hidupnya.⁷¹

Teuku Panglima Muhammad Tibang berangkat ke Singapura pada bulan September 1872 dengan tugas untuk membeli kapal. Seperti ternyata kemudian ia tidak ke sana, tetapi ke Riau karena terpengaruh dengan saran seorang Belanda Hendrik Christoffel van Akkere⁷². Dan agaknya dari sini pula pangkal mula timbulnya kecenderungan sikap Tibang untuk memihak kepada Belanda nanti. Dalam hubungan ini peranan Residen Riau Schiff, besar artinya. Dengan perantaraan Tibang, Schiff menyampaikan permohonan kepada sultan Aceh untuk sudi menerimanya di Bandar Aceh dalam rangka menyelesaikan masalah peristiwa kapal Gipsy yang telah menyebabkan makin meruncingnya hubungan Aceh - Belanda (lihat di atas bagian dua). Sebagai kehormatan, agaknya sambil membujuk, Tibang diantar pulang dengan kapal perang Belanda dan singgah di di Singapura. Di sini ia bertemu dengan Muhammad Arifin, seorang pembantu setia W.H.M. Read, konsul Belanda di Singapura. Arifin nantinya termasuk seorang yang besar jasanya

(bagi Belanda) dalam mengungkapkan rahasia diplomasi Aceh di kota tersebut⁷³

Panglima Tibang tiba kembali di Bandar Aceh pada bulan November 1872 tanpa membawa apa-apa, selain dari pesan Schiff. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis pada waktu itu, melalui suatu musyawarah, telah diputuskan untuk sementara menolak kunjungan Schiff ke Bandar Aceh. Untuk menyampaikan kepada Schiff, sekali lagi, Tibang diutus ke Riau dan pada 13 Desember 1872 rombongannya telah tiba di sana.⁷⁴

Pada bulan Januari 1873 Tibang meninggalkan Riau, juga dengan diantar oleh kapal perang Belanda *Marniz*, menuju Singapura. Di kota ini ia mengadakan pertemuan dengan konsul-konsul Amerika dan Italia, yang diikuti dengan cermat oleh kawan-dekatnya Muhammad Arifin (apakah Tibang tidak mengetahui gerak-gerik Arifin atau sengaja membiarkannya, bahkan kadang-kadang Tibang mengikuti petunjuk Arifin di sana).

Konsul Amerika, Mayor Studer, menyambut baik permohonan bantuan Sultan Aceh dalam rangka menghadapi agresi Belanda dan untuk itu ia telah mempersiapkan konsep perjanjian bilateral untuk ditanda tangani oleh ke dua pemerintah (Kerajaan Aceh dan Amerika Serikat). Sedang Konsul Italia telah menjanjikann dua buah kapal untuk diberangkatkan ke Aceh⁷⁵

Tetapi semua hasil perundingan itu segera dilaporkan oleh Muhammad Arifin kepada Konsul Belanda, W.H.M. Read, yang segera pula mengawatkannya ke Batavia. Berita ini dengan cepat disampaikan oleh Gubernur Jenderal James Loudon ke Den Haag; dan sebagai tindak lanjut, sebagaimana telah kita kemukakan pada bagian pertama di atas, pada tanggal 18 Februari 1873 Pemerintah Belanda menginstruksikan Loudon supaya segera memberangkatkan angkatan perangnya ke Aceh.

Suatu kegiatan diplomasi yang juga besar artinya dalam menghadapi agresi Belanda ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin Aceh yang tinggal di Penang. Mereka

itu antara lain ialah: Teuku Paya, Teuku Ibrahim dan Nyak Abbas. Teuku Paya salah seorang pemimpin pejuang yang gigih, pemilik kapal Gipsy yang dibajak Belanda tahun 1872, berasal dari Lam Bada (Sagi XXVI Mukim), kemudian menetap di Tanjong Seumantok. Teuku Ibrahim, kemenakan Teuku Pakeh Dalam Pidie dan tiba di Penang kira-kira satu tahun sebelum agresi Belanda, sedangkan Nyak Abbas, kemenakan Teuku Paya, ditunjuk sebagai anggota misi Habib Abdurrahman ke Turki, Mesir dan Eropa⁷⁶

Atas inisiatif mereka, sejak bulan Agustus 1872 telah berhasi dikirim ke Aceh sebanyak 1394 peti senapan bersama dengan 5000 peti pelurunya⁷⁷) Untuk lebih terkonsolidasi kegiatan mereka, sebuah organisasi didirikan di sana, yaitu: Organisasi Dewan Delapan. Anggota-anggotanya, pada waktu didirikan ialah: Teuku Paya (ketua), Teuku Ibrahim Syeh Ahmad, Nyak Abu, Panglima Prang Haji Yusuf, Gullahmeidin dan Umar keduanya orang India beragama Islam kelahiran Penang) dan Syeh Kassim (orang Arab kelahiran Penang)⁷⁸

Pada waktu itu Dewan Delapan mempunyai arti penting bagi kelanjutan perjuangan rakyat di Aceh, yaitu sebagai pos depan untuk hubungan Aceh ke luar negeri dan sebagai penyalur perbekalan perang ke Aceh. Antara agresi Belanda pertama dan ke dua kegiatan para anggotanya tampak sekali. Mereka telah menghubungi kembali konsul Amerika di Singapura. Mayor Studer, guan menegaskan sekali lagi perundingan yang telah disepakati bersama pada bulan Januari 1873 yang lalu. Bahkan, dalam hubungan dengan tindakan agresi Belanda itu, Teuku Ibrahim melalui Mayor Sutder, bulan Juli 1 Juli 1874 telah menyampaikan sepucuk surat kepada Presiden Grant⁷⁹ Teuku Paya dalam suatu pertemuan dengan Sultan Abubakar dari Johor, 30 Maret 1874, telah menolak dengan tegas ajakan sultan itu untuk berdamai dengan Belanda⁸⁰

Kegiatan Dewan Delapan dapat dikatakan berakhir setelah Teuku Paya dalam tahun 1876 kembali ke Aceh unntuk meneruskan perjuangan di sana, tetapi dua orang anggotanya yaitu Syeh Kassim dan Nyak Abbas sampai tahun 1889/1890 masih

mengadakan kontak dengan Sultan Muhammad Daud Syah di Keumala⁸¹ Tampaknya sultan yang terakhir ini juga termasuk orang yang aktif mengadakan hubungan dengan luar; bahkan, setelah ia menyerah, pada tahun 1905, melalui surat yang dikirim kepada konsul Jepang di Singapura,⁸² masih berusaha untuk memperoleh bantuan dari negara yang telah sanggup menaklukkan Rusia (1905) itu.

CATATAN :

- 1) Said Husein dilahirkan di Aceh, kemudian menetap di Penang sebagai saudagar. Ia mempunyai hubungan keluarga dengan Sultan Aceh melalui garis keturunan Ratu Keumalat Syah (1688 -- 1699), yaitu putri ratu ini kawin dengan nenek Said Husein. Karena itu ia memperoleh hak istimewa dalam berdagang di Aceh: Barang dagangannya bebas bia cukai masuk pelabuhan. Tetapi semenjak pemerintahan Jauhar Alam Syah, hak ini dicabut sehingga menimbulkan amarahnya. Uraian lebih lanjut mengenai pertentangan Said Husein dan Syaiful Alam Jauhar, lihat E.S. De Klerck, *De Atjeh - Oorlog* ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1912), hal. 83-91.
- 2) Mengenai kegiatan Raffles, Gubernur Penang dkk. selama waktu itu lihat Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra the Nether lands and Britain 1858- 1898* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hal. 8-14 dan juga E.S. de Klerck, *op. cit.*, hal. 83-90.
- 3) Teuku Pakeh Dalam dari Pidie mendukung kembali Jauhar, karena merasa dikhianati oleh Said Husein: janjinya mengenai bantuan keuangan tidak pernah ditepati. Di sini tampak pula bahwa latar belakang ekonomi sangat mempengaruhi

- ruhi hubungan sultan dengan uleebalang. Dan selama abad ke- 19 sultan hampir tidak dapat mengontrol kegiatan perdagangan *uleebalang* dengan luar negeri.
- 4) Isi pasal demi pasal, lihat E.S. de Klerck, *ibid*, hal. 89-90.
 - 5) *Ibid.*, hal. 91.
 - 6) Isi pasal demi pasal, salinan nota Inggris (dalam bahasa Inggris) dan nota Belanda (dalam bahasa Perancis), lihat Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*. (Medan: penerbit pengarang sendiri, 1961), hal. 253-257. Bahasa hubungan Traktat London dengan Aceh, lihat E.S. de Klerck, *op. cit.*, hal. 97-119.
 - 7) Tentang adanya pengacauan Belanda dan kegiatan-kegiatan mereka sejak tahun 1830 sampai menjelang agresinya ke Aceh (1873), lihat a.l. *Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch Oost - Indie*, hal. 21; E.S. de Klerck, *op. cit.*, hal. 205 dan seterusnya; Mohammad Said, *op. cit.*, hal. 266-267 Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 18-35.
 - 8) Masa pemerintahan Sultan Ibrahim dari tahun 1850-1857 adalah masa perselisihan dengan Sultan Sulaiman yang disingkirkan dari kedudukannya. Baru setelah kemenakannya itu meninggal (1857) Sultan Ibrahim dapat memerintah dengan tenang. Tetapi bagaimanapun sejak tahun 1850 Tuanku Ibrahim tidak mengakui lagi dirinya sebagai pemangku sultan.
 - 9) Perjanjian ini terdiri 9 pasal. Salinan isinya lihat, E.S. De Klerck, *op. cit.*, hal. 438-440 (Bijlage III).
 - 10) Masalah Perjanjian Siak, kegiatan Belanda di Sumatera Timur dan batas wilayah Kerajaan Aceh, lihat: Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 25-35 Muhammad Said, *op. cit.*, hal. 229-346.
 - 11) E.S. De Klerck, *op. cit.*, hal. 428; Mohammad Said, *op. cit.*, hal. 399. Angka yang resmi mengenai jumlah lasykar rakyat tidak diketemukan. Jumlah yang disebut di atas hanya berdasarkan penglihatan sepintas lalu tapi mengingat kuatnya perlawanan yang diberikan pada waktu pendaratan Belanda yang pertama kali, angka itu ada mengandung kebenaran.

- 12) Salinan isinya (4 pasal) dalam bahasa Belanda dan Inggris, lihat E.S. De Klerck, *op. cit.*, hal. 457-459 (Bijlage VII).
- 13) Salinan besluit gubernur jenderal berupa instruksi yang terdiri dari 9 pasal, lihat E.S. De Klerck, *op. cit.*, hal. 470-472 (Bijlage XIII).
- 14) Salinan surat-surat Nieuwenhuijzen dan Sultan Aceh, *Ibid.* hal. 475-480 (Bijlage XV, No. 1,2; XVI: XVII, No. 1; XVIII, No. 1,2; XIX; XX dan XXI).
- 15) Salinan Oorlogsverklaring, *Ibid.*, hal. 477 (Bijlage XVII, No. 2).
- 16) Jumlah pasukan tersebut tidak termasuk angkatan Laut dan lain-lain, Perincian secara mendetil, lihat Mohammad Said, *op. cit.*, hal. 401-402.
- 17) Paul Van't Veer, *De Atjeh-Oorlog* (Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1969) hal. 1. Dalam bukunya itu Van't Veer membagi perang Belanda di Aceh atas 4 periode, yaitu: De Eerste Atjeh Oorlog (1873) De Tweede Aceh Oorlog (1874-1880), De Derde Atjeh Oorlog (1884-1896), De Vierde Atjeh Oorlog (1898-1942).
- 18) Uraian secara menyeluruh, ringkas dan memadai (dalam bahasa Indonesia) mengenai Perang Belanda di Aceh, lihat Teuku Ibrahim Alfian, "Sejarah Singkat Perang di Aceh", dalam A Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme* (Jakarta: Departemen Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973).
- 19) Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 296; T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal. 141.
- 20) Mohammad Said, *op. cit.*, hal. 438; Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 110.
- 21) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal. 242. Anthony Reid, *op. cit.* hal. 109.
- 22) Mengenai daerah-daerah *Uleebalang* yang sejak Tahun 1874 telah menandatangani pernyataan takluk, lihat Mohammad Said, *op. cit.*, hal. 479.

- 23) Charles R. Beamer, *The Achnese Dutch War and its Effect on the Acehnese People: Their Land, Customs and Institution*”, dalam *Conference On Modern Indonesian History*, Juli 18-19, 1975 (Madison: Center for Southeast Asian Studies University of Wisconsin).
- 24) H.C. Zentgraaff, *Atjeh* (Batavia: Koninklijke Drukkerij De Unie, tanpa angka tahun), hal. 190.
- 25) Angka-angka secara terperinci mengenai jumlah pasukan Belanda, juga yang mati di Aceh sejak Tahun 1873–1914, lihat, Anthony Reid, *op. cit.*, hal. 296 (Appendix 4).
- 26) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.*, hal. 248–251 .
- 27) a. Dari 478 orang pejuang yang berhasil dikumpulkan oleh seminar Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 22 s/d 25 Maret 1976 di Medan, sebagian besar ialah para pejuang selama perang Belanda di Aceh.
- b. Khusus mengenai perjuangan Teungku Chik Di Tiro Muhammad Saman, lihat lebih luas, Ismail Jakub, *Teungku Tjihik Di Tiro (Muhammad Saman) Pahlawan Besar Dalam Perang Atjeh (1881–1891)*, Djakarta, Penerbit: Bulan Bintang, 1960.
- c. Mengenai Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien, Uraian yang memadai, lihat, Hazil, *Teuku Umar dan Tjut Nya'Din, Sepasang Pahlawan Perang Atjeh*, Djakarta, Penerbit Djambatan, 1955, Tjetakan Kedua.
- 28) Paul Van't Veer, *op. cit.*, hal. 260.
- 29) Mengenai peranan korps Maerechausee dalam penaklukan Aceh, lihat, Doup *Gedenkboek van het Korps Marechausee van Atjeh en Onderhoorigheden 1890 tot 1940*.
- 30) James T. Siegel, *The Rope of God*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1969, hal. 37.
- 31) Lengkapnya mengenai nama pelabuhan-pelabuhan waktu itu lihat John Anderson, *Acheen and The ports on The North*

- and East Coasts of Sumatera*, wiht an introduction by A.J.S. Reid, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1971, hal. 155.
- 32) *I b i d* hal. 230
- 33) James T. Siegel, *op. cit.* hal. 15
- 34) John Anderson, *op. cit.* hal. 166; angka-angka itu yang diekspor ke Penang; ekspor pinang ke Penang sejak tahun 1868 -- 1899, lihat Anthoony Reid *op. cit.* hal. 295 (Appendix. 3, tabel 2).
- 35) James Siegel, *op. cit.*, hal. 17; ekspor lada ke Penang sejak tahun 1968 - - 1899, lihat Anthony Reid, *op. cit.* hal. 295 (Sappendix 3, tabel 2).
- 36) James Siegel, *op.cit.* hal. 12
- 37) John Anderson, *op. cit.* hal. 162, 166.
- 38) James Siegel, *op. cit.* hal. 5
- 39) John Anderson, *op. cit.* hal. 164 - 165.
- 40) Mengenai kegiatan Belanda pada waktu itu, lihat lebih lanjut E.S. De Klerck, *op. cit.* hal. 156, 370 - 380.
- 41) Uraian lebih lanjut mengenai peristiwa ini, lihat Anthony Reid, *op. cit.* hal. 218 - 249.
- 42) Uraian secara terperinci mengenai peristiwa ini, lihat, T. Ibrahim Alfian, *Emas, Kafir dan Maut, Catatan Singkat mengenai pengalaman dua orang Perancis di Aceh Barat pada akhir abad ke XIX (Darussalam Banda Aceh, Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial Aceh). 1976.*
- 43) Mengenai keadaan perekonomian Aceh selama 50 tahun pendudukan Belanda (1873 - 1923), lihat. Joh. Langhout, *Viiftig Jaren Economische Staatkunde In Atjeh*, (Den Haag, N.V. Boekhandel v/h W.P. Van Stockun & Zoon, 1923)
- 44) T. Ibrahim Alfian, *op cit.*, dalam A. Sartono Kartodirdjo (ed), *op. cit.* hal 260

- 45) Uraian lebih lanjut mengenai hal ini, lihat Dr. C. Snouch Hugronje, *De Atjehers* Leiden: E.J. Brill, 1894, hal. 23 – 33; James Siegel, *op. cit.* hal. 48 – 60.
- 46) Snouch Hugronje, *op. cit.* hal. 27 – 29.
- 47) A. Hasjimy, "Pendidikan Islam Di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah", *Sinar Darussalam* no. 63, 1975, hal. 9.
- 48) T. Ibrahim Alfian, *Mengenal Masyarakat Aceh Yang Sedang Membangun (sebuah Catatan)* Darussalam-Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1976, hal. 5.
- 49) Mengenai Perjuangan Teungku Fakinah, lihat H.M. Zainuddin. *Srikandi Atjeh* (Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1966).
- 50) Lihat juga, A. Hasjimy, *op. cit.* hal. 11.
- 51) Mohammad Said, *op. cit.* hal. 548.
- 52) *Ibid*, hal. 583.
- 53) Anthony Reid, *op. cit.* hal. 204. Uraian lebih luas mengenai hikayat ini, lihat, A. Hasjimy, *Hikajat Prang Sabi Mendjiwail Perang Atjeh Lawan Belanda*, (Banda Atjeh, Firma Faraby, 1971).
- 54) Cr. C. Snouck Hugronje, *op. cit.* hal. 106
- 55) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hal. 4,
- 56) *Ibid*, hal. 5 Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch Oost Indie (E.J. Brill, Leiden: 1921), hal. 23.
- 57) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hal. 23.
- 58). *Ibid*.
- 59) Uraian lebih luas, liht Dr. C. Snouck Hugronje, *op. cit.* hal. 20 – 23.
- 60) T. Ibrahim Alfian, *op. cit.* hal. 6
- 61) *Ibid*.
- 62) *Ibid*, hal. 6 – 7.
- 63) *Ibid*, hal. 9.

- 64) A. Hasjmy, "Pendidikan Islam Di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah", *Sinar Darussalam*, no. 63, 1975, hal. 19 – 20.
- 65) Anthony Reid, *op. cit.* hal. 84.
- 66) *Ibid.*
- 67) Salinan surat tersebut, lihat
- 67) Salinan surat tersebut, lihat E.S. De Klerck, *op. cit.* hal. 435 (Bijlge I).
- 68) Anthony Reid, *op. cit.* hal. 21. 84.
- 69) *Ibid.* hal. 85 – 86
- 70) Habib Abdurrahman az-Zahir (1832 – 1896) dilahirkan di Hadra maut belajar di Mesir dan Kalikut. Kemudian mengembara ke Timur Tengah, Turki, Italia, Perancis, Jerman, India, Singapura dan akhirnya pada tahun 1864 tiba di Aceh. Keahliannya dalam cabang-cabang ilmu Islam menyebabkan ia mendapat kedudukan yang baik di tempat-tempat yang dikunjungi, termasuk di Aceh.
Teuku Panglima Muhammad Tibang berasal dari India dan pada mulanya beragama Hindu. Ia datang ke Aceh sejak kecil mengikuti rombongan kesenian. Kepandaianya dalam menari menyebabkan ia diambil oleh Sultan Ibrahim Mansyur Syah dan diislamkan. Karena pandai membujuk hati sultan sesudah dewasa ia diangkat menjadi Syahbandar pelabuhan Aceh. Anthony Reid. *Ibid*, hal. 81 – 83.
- 71) *Ibid*, hal. 185.
- 72) E.S. De Klerck, *op. cit.* hal. 377.
- 73) Siapa Muhammad Arifin, lihat. Anthony Reid. *op. cit.* hal. 379.
- 74) Mengenai anggota rombongan Tibang dan kegiatannya di Riau, lihat, E.S. De Klerck, *op. cit.* hal. 379.
- 75) Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan Tibang di Singapura lihat, *Ibid*, hal 387-390, Anthony Reid. *op. cit.* hal. 91 – 94
- 76) Anthony Reid, *op. cit.* hal. 130, 131, 167.

- 77) Muhammad Said, *op. cit.* hal. 373.
- 78) Anthony Reid, *op. cit.* hal. 131
- 79) Mengenai hubungan Aceh dengan Amerika, lebih lanjut, lihat James W. Gold, *Americans in Sumatera* (The Hague: Martinus Nijhodd, 1961), hal. 4 – 10.
- 80) Sebenarnya yang diundang oleh Sultan Johor ialah Habib Abdurrahman, dan Habib mengikut sertakan pula Anggota Dewan Delapan dalam pertemuan tersebut; lihat, Muhammad Said, *op. cit.* hal. 475; Anthony Reid, *op. cit.* hal. 267 268
- 81) Anthony Reid, *ibid.* halaman 256
- 82) *Ibid*, halaman 259.

BAB VI ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL

6.1 Perang Melawan Belanda dan Keadaan Pemerintahan

Sejarah Aceh pada periode awal abad ke-20 dapat dianggap menarik, oleh karena di samping masih berperang melawan penjajahan Belanda, masyarakat Aceh telah berkenalan dengan salah satu unsur kebudayaan Barat, yakni pendidikan modern yang telah mengakibatkan timbulnya pelbagai perubahan dalam masyarakat Aceh.

Pada awal Tahun 1900, yang masih terus memimpin perlawanan terhadap Belanda antara lain, adalah: Sultan Aceh Tuanku Muhammad Daud Syah, Teuku (T) Panglima Polem Raja Daud, Teungku (tgk.) di Mata Ie dan Tgk. di Barat di daerah Pasai (Aceh Utara), Tgk. Cot Plieng, Tgk. Alue Keutapang, Tgk. di Reube, Tgk. di Buereueh, Tgk. di Lam Gut (Pidie), T. Ben Peukan Mereudu, Tgk. di Krueng Cot Seunagan, T. Ben Blang Pidie, Habib Meulaboh dan Teungku-teungku dari Tiro, Tgk. Chik Mayet, dan Tgk. di Buket.¹

Meskipun sultan terpaksa menyerah pada bulan Januari 1903, peperangan berjalan terus. Tgk. Cot. Plieng masih terus memimpin penyerangan-penyerangan di daerah Pidie dan Aceh

Utara bergerak Tgk. di Barat dan Tgk. di Mata le bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin adat lainnya seperti Tgk. Chik Tunong, Pang Nanggroe, dan Cut Meutia.

Setelah memberikan perlawanan yang gigih, Panglima Polem terpaksa mengikuti langkah Sultan, menyerah pada September 1903 bersama lebih kurang seratus lima puluh orang pengikutnya. T. Ben Peukan yang merupakan tokoh terkemuka dalam perlawanan di Lembah Pidie bersama pengikut-pengikutnya menyerah pula kepada Belanda pada Februari 1904 dengan membawa empat ratus lima puluh pucuk senjata api.²

Adapun daerah Gayo-Alas belum lagi dapat dikuasai oleh Belanda, oleh karena itu Letnan Kolonel Van Daalen ditugaskan mengadakan hubungan politik dengan raja-raja di sana untuk menancapkan kekuasaan Belanda, yang dimulainya pada bulan Februari 1904. Di daerah Gayo Van Daalen mendapat perlawanan keras, tetapi setelah beberapa bulan dapat juga ia mematahkan perlawanan rakyat di daerah Gayo itu. Rakyat Gayo, lelaki perempuan bahkan kanak-kanak dari desa Kuto Reh, Likat dan Kuto Lengat dengan gagah mempertahankan setiap jengkal tanah pusaka mereka daripada penguasaan penjajah. Sebagai ilustrasi dapat dilihat betapa besar korban, hanya beberapa dari sekian banyak bertempuran, seperti dinukilkan berikut ini.³

Dengan keputusan Pemerintah Hindia Belanda bulan September 1904, Gubernur Belanda di Aceh Van Heutsz diangkat menjadi gubernur jendral Hindia Belanda, dan sebagai penggantinya ditetapkan Jendral Jhr. J.C. van der Wijck. Setelah yang terakhir ini diangkat menjadi panglima angkatan darat Hindia Belanda mulai Mei 1905, G.C.E. van Daalen ditetapkan sebagai gubernur Aceh. Van Daalen melaksanakan pemerintahan dengan kejam, sehingga menimbulkan kecaman hebat oleh penulis yang menamakan dirinya Wekker dalam suatu surat kabar *avondpost* di Den Haag. Akibatnya Van Daalen meminta berhenti. Ia menganggap dirinya tidak bersalah, karena menurut pendapatnya ia hanya menjalankan tugas yang telah digariskan oleh Van Heutzz.

Banyak ulama-ulama terkemuka sahid, antaranya tgg. di Alue Keutapang, Tgg. Kadli, Tgg. di Cot Cicem, Tgg. Leman. Sultan Muhammad Daud Syah yang waktu itu berkedudukan di Kutaraja dianggap oleh Belanda telah melanggar janji setianya kepada raja Belanda. Menurut Belanda, atas prakarsa Sultan telah diadakan suatu perundingan oleh pihak ulama di Hulu Pidie untuk memulai kembali penyerangan secara besar-besaran terhadap Belanda. Belanda menuduh, bahwa penembakan yang terjadi di Kutaraja pada 1907 dan penyerangan terhadap Peukan Bada diatur oleh Sultan. Pada bulan Desember 1907 sultan Aceh dibuang oleh Belanda ke Ambon. Bagaimana pun tujuan Belanda untuk membuat Aceh aman dan takluk tidak juga dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari *Koloniaal Verslag* Tahun 1908 yang menyatakan bertambahnya perlawanan pihak Aceh secara sistematis seperti di Lhok Seumawe, Lhok Sukon, di Idi dan Tapaktuan.

Sejak 10 Juni 1908, Van Daalen digantikan oleh Letnan Kolonel H.N.A. Swart yang sebelumnya menjadi Gubernur militer dan sipil di Sulawesi. Swart terus melakukan pengejaran-pengejaran terhadap para ulama dan pengikut-pengikut mereka. Pada bulan September 1909 syahid Tgg. di Buket dan Tgg. Chik Mayet, keduanya putra Tgg. Chik di Tiro Muhammad Saman. Beberapa di antara kekalahan lain di pihak Aceh ialah menyerahnya T. Banta dengan seratus orang pengikutnya (Juni 1908), T. Ben Blang Pidie dengan seratus enam puluh orang pengikutnya dengan membawa tujuh belas pucuk senapan (Juli 1908). Kecuali itu, setahun kemudian, banyak pula pemimpin agama yang gugur, yaitu antara lain, Tgg. di Kunat (November 1909), Tgg. di Reubee (Desember 1909), Habib Ahmad (Mei 1910), Tgg. Saleh, Tgg. Kalipah, Tgg. Ma'at (Maret 1911), Tgg. di Barat (Februari 1912). Selain daripada itu karena tekanan-tekanan senjata Belanda menyerah pula Tgg. Leman dari keluarga ulama Tiro (September 1910), Tgg. di Pidie di Aceh Barat, Keujruen Pameue (Maret 1911), Habib Musa dan Tgg. Mat Aceh (1913).⁴

Meskipun perang Belanda di Aceh ini dapat dianggap berakhir pada Tahun 1912 dan pejuang-pejuang Aceh berangsur-angsur ada yang menyerah, perlawanan terhadap Belanda di sana-sini masih terus berlangsung. Pada 1925 timbul gerakan perlawanan di Aceh Selatan, di bawah pimpinan Cut Ali yang dianggap oleh Belanda sebagai seorang pemimpin yang berinisiatif dan mempunyai otak yang tajam.⁵ Laporan polisi Belanda Tahun 1926 menyebutkan bahwa T. Raja Tampo' dan Pang Karim masih merupakan bahaya besar untuk ketenteraman dan ketertiban.⁶ Begitu pula pada 1928, muncul gerakan Tgk. Amin di Tapaktuan, pemberontakan Bidin Keubay di Lho' Pawoh Utara, dan serangan Khadem Ambong, di kenegerian Manggeng, Tapaktuan.⁷ Pada Tahun 1933 timbul pula perlawanan rakyat di Lhong dan pada Tahun 1937 di Leupung. Menjelang masuknya balatentara Jepang, telah terjadi pula perlawanan terhadap Belanda. Pemimpin-pemimpin Persatuan Utama Seluruh Aceh (PUSA) turut memimpin perlawanan terhadap Belanda. Di daerah Aceh Besar, di Sagi XXVI, pimpinan perlawanan berada di tangan T. Nyak Arif, sedangkan di Sagi XXII dipimpin oleh T. Panglima Polem Muhammad Ali. Pada 23 Februari 1942 telah tewas *Controleur* Seulimeum J.C. Tinggerman dan sehari setelah itu, terbunuh pula Graaf U. Bernsforff Von Sperling, kepala urusan kerea api Aceh.

Tidak ada perang kolonial lain di Indonesia yang sedahsyat peperangan Belanda Aceh ini, sehingga tiga jilid buku G.B. Hooyer yang membicarakan peperangan-peperangan di Hindia Belanda, satu jilid tebal khusus digunakannya untuk membicarakan perang Belanda Aceh ini. Ia menyatakan, bahwa perang melawan Aceh ini akan merupakan tempat belajar bagi tentara Belanda.⁸

Bagaimanakah keadaan pemerintahan bumiputera? Seratus lebih uleebalang, telah menandatangani perjanjian pendek dengan Belanda. Isi perjanjian ini secara singkat adalah sebagai berikut: (1) bahwa negeri yang dikepalai oleh Uleebalang itu merupakan bagian dari Hindia Belanda dan berada di bawah kekuasaan Nederland; uleebalang tetap setia pada ratu Belanda dan pada

wakilnya, gubernur jendral Hindia Belanda, (2) tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara asing, dan (3) tunduk pada perintah gubernur Aceh.⁹

Di Aceh Besar daerah uleebalang itu terbagi dalam sejumlah mukim yang dikepalai oleh seorang imum mukim. Di dalam setiap mukim terdapat sejumlah gampong atau menasah yang dikepalai oleh seorang keuchik (kepala kampung). Sejak beberapa yang lalu, daerah-daerah uleebalang itu tergabung dalam tiga buah federasi yang dinamakan *sagi*, yang dikepalai oleh seorang panglima *sagi* secara turun temurun. Di luar federasi ini terdapat pula mukim-mukim yang berpemerintahan sendiri, yang imum-imumnya tidak tunduk di bawah uleebalang tetapi sama derajatnya dengan seorang uleebalang.

Di Aceh Utara dan Aceh Timur terdapat daerah-daerah uleebalang semacam susunan yang disebut uleebalang cut, *uleebalang peuet*, *uleebalang lapan*, dan sebagainya, yang masing-masing terbagi pula dalam kesatuan yang lebih kecil lagi, *gampong*, yang dikepalai oleh keuchik atau peutua. Pembagian atas mukim tidak dikenal di wilayah-wilayah ini.

Di daerah Aceh, seperti halnya di daerah-daerah lain di kepulauan Nusantara, kebijaksanaan pemerintahan kolonial dijalankan dengan perantaraan aparat pemerintah adat dalam bentuk *swaparaja* yang dikepalai oleh uleebalang. Posisi politik para uleebalang ini diperkuat oleh dukungan Pemerintah Hindia Belanda. Mereka tidak lagi khawatir akan peperangan yang selalu terjadi di antara sesama mereka seperti dimasa-masa yang lalu. Untuk memperkuat kedudukan ekonominya, mereka memerlukan tunjangan pemerintah kolonial Belanda.¹⁰ Mereka merupakan raja kecil yang berkuasa atas negerinya. Keadaan mereka berlainan¹¹ ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah posisinya, ada yang mempunyai rakyat puluhan ribu dan ada yang hanya beberapa ratus. Ada pula di antaranya yang puluhan tahun menghabiskan umurnya dalam medan pertempuran melawan Belanda. Di antara mereka ada yang ta'at beribadat, ada yang tidak. Ada yang masih memben-

ci orang kulit putih, ada pula yang ingin mengambil pelajaran dari padanya. Selain itu, ada pula uleebalang yang ingin memperkuat posisi ekonominya dengan jalan menekan rakyatnya.¹² Di Pidie misalnya, ada uleebalang yang mengambil sebagian dari pada zakat yang dahulu diserahkan semuanya kepada pemimpin agama.¹³ Sulitnya, Belanda tidak dapat memilih uleebalang menurut kecakapan dan kejujurannya, oleh karena mereka diangkat berdasarkan kelahiran menurut adat.

6.2 Kehidupan Seni Budaya

Seperti telah disebut di muka, Belanda menjalankan pemerintahan kolonial melalui lembaga-lembaga adat. Untuk mengikuti sertakan lembaga-lembaga ini dalam struktur birokrasi yang modern, diperlukan uleebalang yang berpendidikan modern pula. Rakyat pun perlu ditingkatkan kecerdasannya melalui sekolah desa untuk dapat menulis, membaca huruf Latin dan berhitung; Dengan pendidikan ini Belanda yakin bahwa rakyat tidak akan mengikuti seruan sebagai pemimpin agama untuk melawan pemerinth kolonial Belanda.¹⁴

Sejak 1901 sudah ada beberapa anak-anak uleebalang yang dikirimkan bersekolah di Kutaraja. Mulai 1904 mereka mulai disekolahkan ke *Kweekschool* (Sekolah Guru) di Fort de Kock (Bukittinggi).¹⁵ Ada juga di antara mereka yang dikirim ke Bandung. Kalau sudah dianggap mahir berbahasa Belanda, ada di antaranya yang diizinkan meneruskan ke *Opleiding Scholl voor Indische Ambtenaren* (OSVIA = sekolah pamong praja bumi putra di Serang).

Ada diskriminasi dalam penerimaan murid-murid sekolah. Pada umumnya kesempatan diberikan kepada anak-anak golongan uleebalang untuk memasuki sekolah berbahasa Belanda dan menyambung ke sekolah yang lebih tinggi.¹⁶ Pada 1904 terdapat hanya sebagian kecil dari yang bukan golongan uleebalang yang memperoleh kesempatan untuk melanjutkan ke sekolah guru di Bukittinggi, yaitu Nyak Cut dan Abubakar.

Pada 1907 Gubernur Van Daalen memprakarsai pendirian sekolah-sekolah desa di Aceh, mula-mula di Aceh Besar dengan murid 38 orang. Sekolah untuk anak-anak perempuan didirikan pertama kali di Ulee lhee pada tanggal 1 Mei 1910.¹⁷ Di bawah pemerintah Gubernur Swat sekolah-sekolah desa bertambah berkembang. Kalau pada 1909 masih berjumlah 51 buah dengan 2009 murid, sepuluh tahun kemudian meningkat menjadi 258 buah dengan murid 15.476 murid, antaranya 20 sekolah perempuan dengan 1161 murid.¹⁸

Isteri pejabat-pejabat tinggi Belanda seperti Nyonya Swart (isteri Gubernur Swart) dan Ny. de Nijs (isteri ass-residen de Nijs) turut memberikan jasa-jasanya bagi kemajuan pendidikan kaum perempuan Aceh.¹⁹ Hal ini tidak lepas dari kepentingan politik Belanda untuk ketertiban dan keamanan, mengingat pada masa yang lalu wanita Aceh dan Gayo turut aktif mengadakan perlawanan bersenjata terhadap Belanda.²⁰

Untuk orang-orang kampung yang terpendang dan anak-anak pegawai rendah didirikan sekolah rendah lima tahun (*Inlandsche School*, Sekolah Melayu). Yang tamat sekolah desa tiga tahun dapat juga meneruskan ke sekolah ini. Pada mulanya guru-guru terdiri dari suku-suku bangsa Batak (termasuk Mandailing) dan Minangkabau. Kesulitannya mereka tidak dapat berbahasa Aceh, sedangkan rakyat di desa-desa tidak pula dapat berbahasa Melayu. Buku-buku bahasa Aceh huruf Lain belum ada waktu itu. Hal inilah yang menyebabkan Pemerintah Belanda mendirikan sekolah guru di Aceh melulu untuk orang Aceh.

Pada 1930 terdapat 1,1% penduduk Aceh yang telah bebas buta huruf Latin, sedangkan di Jawa waktu itu ada 5,5%.²¹ Ultimo 1939 sekolah-sekolah negeri yang ada di Aceh adalah sebagai berikut: satu sekolah menengah pertama, empat sekolah rendah Belanda, satu sekolah Ambon, delapan sekolah rendah berbahasa Belanda, 45 sekolah Melayu, 348 sekolah desa dan satu sekolah pertukangan.²² Sebelum Jepang menjajah Indonesia, Aceh baru mempunyai 2 orang lulusan universitas kedua-

duanya Jurist, masing-masing lulusan Jakarta dan Leiden, dan keduanya dari golongan uleebalang.

Golongan pemimpin adat lebih dahulu terkena pengaruh kehidupan orang-orang Barat daripada golongan lain. Melalui kontak hampir setiap hari dengan orang Barat, pembicaraan-pembicaraan, pengamatan akan gaya dan adat orang-orang Barat timbuh nilai-nilai baru pada golongan pemimpin-pemimpin adat. Sistem nilai dari masing-masing pribadi dari pemimpin-pemimpin adat ini menentukan cara penerimaan elemen-elemen baru dalam kebudayaan dan mempercepat proses Aceh pada umumnya telah membebaskan diri dari sebagian nilai-nilai tradisional dan mengambil langkah yang menentukan untuk menerima pendidikan Barat ini. Pemimpin-pemimpin adat tidak hanya menerima pendidikan Barat, tetapi sesuai dengan wewenangnya menyebarkannya kepada rakyat.²³

Letaknya yang jauh di ujung barat laut Indonesia serta tidak adanya sarana komunikasi menyebabkan Aceh terisolasi daripada suku-suku lainnya. Pemerintah Hindia Belanda menganggap, untuk kemajuan negeri, calon-calon uleebalang perlu memperluas horison mereka dengan mendapat pendidikan di luar Aceh.²⁴ Kesukarannya ialah bahwa uleebalang-uleebalang berat untuk mengirimkan anak-anaknya jauh dari rumah mereka. Kalau pun ada di antara calon-calon uleebalang yang dikirim ke Pulau Jawa, rupanya hasilnya tidaklah sebagaimana yang diharapkan Belanda.²⁵ Anak-anak yang masih muda itu tidak cukup mempunyai kekuatan moril untuk bertahan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan baru, karena tidak ada pengawasan yang cukup seperti di tempatnya sendiri.²⁶

Bagaimanakah sambutan para pemimpin agama pada mulanya? Pada garis besarnya golongan ini dapat dibagi dua, yaitu golongan yang fanatik dan golongan yang luwes. Golongan yang pertama pada mulanya kaku tidak luwes dalam menghadapi pendidikan Barat ini, karena mereka tidak dapat meramalkan hasil-hasilnya. Mereka menganggap lembaga-lembaga pendidikan agama yang tradisional yaitu *dayah* atau *deah*, yang mereka punyai telah sempurna, karena itu mereka menolak pendidikan

baru ini. Kepada rakyat ditimbulkan *issue* bahwa bila mereka mau masuk ke sekolah-sekolah bikinan Belanda mereka akan menjadi kafir. Di samping itu terdapat pula keseganan rakyat menyekolahkan anaknya, oleh karena percaya kepada pendapat bahwa orang yang pandai menyurat huruf latin akan dipotong tangannya di akhirat.²⁷ Sekolah desa mereka ejek dengan menyebutnya *sikula deesa*, yang berarti sekolah dosa,²⁸ Adapun golongan yang luwes sudah mengikuti langkah pemimpin-pemimpin adat dengan memasukkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah bikinan Belanda.

Pada 1919 A. Vogel, inspektur pendidikan bumiputera telah melakukan penyelidikan di Aceh. Dalam laporannya ia mengemukakan bahwa pengajaran rakyat tidak tumbuh dengan wajar, tetapi dipaksakan, karena rakyat pada umumnya belum menyukainya.²⁹ Orang tua yang tidak mengirim anaknya ke sekolah, atau anak-anaknya tidak secara teratur pergi ke sekolah, didenda atau kadang-kadang dihukum dengan kerja membikin jalan.³⁰ Denda yang dibayar dimasukkan ke dalam apa yang dinamakan "fonds denda" untuk menutupi biaya-biaya sekolah desa. Pihak uleebalang masih terus mengadakan tekanan terhadap rakyat, kalau tidak tentu sekolah-sekolah itu akan kosong, meskipun pejabat-pejabat sudah mengurangi paksaan mereka. Dalam banyak hal ketakutan kepada uleebalang menyebabkan rakyat mengirimkan anak-anaknya baik lelaki maupun perempuan ke sekolah.³¹ Di samping memajukan sekolah-sekolah desa sebagian uleebalang sangat berminat pula memajukan sekolah-sekolah agama, meskipun sebagai kepala agama di daerahnya mereka tidak dapat mengawasi dengan cukup sekolah-sekolah agama dan gerakan-gerakan keagamaan.³²

Setelah melampaui abad ini segenap lapisan masyarakat Aceh mulai memahami perlunya sekolah-sekolah bagi anak-anak mereka. Tepatlah apa yang dinyatakan oleh surat kabar *Sinar Atjeh*, sebagai berikut:

..... asal sekarang (1908) biarlah pemerintah membuat aturan yang lebih keras, buat tarik anak-anak itu masuk sekolah; hingga mereka sendiri akan memaksa sanak saudaranya bersekolah masa itu, aturan yang keras itu, tiada perlu dijalankan lagi.³³

Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan di Kutaradja pada bulan Juli 1932. Panitia pendirinya terdiri dari berbagai suku bangsa dengan susunan sebagai berikut: Ketua, T. Hasan Glumpang Pajong, Wakil Ketua, T. Nyak Arif, penulis, Pohan, anggota, A. Azis (Padang), Paman Ras Martin (Ambon), dan lain-lain. Sekolah Taman Siswa yang kedua didirikan di Sabang pada akhir Juli 1932 yang diprakarsai oleh dr. Latumenten, kepala rumah sakit jiwa Sabang dengan didukung oleh T. Abbas, Uleebalang Sabang. Kemudian didirikan pula Sekolah Taman Siswa di Meulaboh pada 1934 dengan usaha T. Abdurrahman dan T.M. Yusuf³⁴. Di sekolah-sekolah Taman Siswa ini semangat kebangsaan para pelajarnya dipupuk oleh para pamongnya.

Pada Tahun 1929 di Peureula berdiri *Perkumpulan Usaha Sama Akan Kemajuan Anak* (PUSAKA) untuk mendirikan sekolah rendah berbahasa Belanda. Pengurusnya tersusun sebagai berikut: Pelindung, T. Chik M. Thayeb, penasehat T. Tjut Ahmad, Ketua T.M. Nurdin, Penulis, H.M. Zainuddin, Bendahara M. Hasyim, serta komisar-komisaris T.M. Hasan, T. Itam Usman, T. Sabi dan Muhammad Syam.³⁵

Pemimpin-pemimpin agama pun akhirnya turut juga menyesuaikan diri dengan perkembangan dan mengambil bagian dalam sekolah-sekolah modern untuk menaikkan martabat mereka. Kecuali sebagian kecil, pada umumnya mereka tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki sekolah lanjutan kepunyaan pemerintah. Guna mengikuti kemajuan yang telah dicapai oleh pemimpin-pemimpin adat dalam dunia yang terus berubah-ubah itu, mereka mencari jalan keluar dengan mengirimkan anak-anaknya untuk memasuki Sekolah Normal Islam, Sekolah Thawalib di Minangkabau, oleh karena di daerah ini modernisme dalam lembaga pendidikan Islam telah berkembang. Adapaun yang kemudian mengirimkan anak-anaknya ke pulau Jawa untuk bersekolah di sekolah menengah umum Muhammadiyah, Sekolah Guru Muhammadiyah, dan sebagainya.

Para pemimpin agama akhirnya mengadakan penyesuaian atau adaptasi dengan mendirikan sekolah-sekolah agama modern,

misalnya Jami'atu'ddiniyah di Sigi, al-Muslim di Glumpangdua, Sekolah Normal Islam di Bireuen, dan lain-lain.

6.3 Kaum Pergerakan di Daerah

Selain perjuangan bersenjata menentang kolonialisme Belanda sebagaimana telah diuraikan, rakyat Aceh pun turut serta dalam perjuangan dengan melalui pergerakan nasional. Derap langkah pergerakan nasional di Pulau Jawa menggema pula sampai kebelahan barat Nusantara. Di Aceh telah terdapat organisasi-organisasi modern, antara lain sebagai berikut: Serikat Islam (didirikan, Juli 1916), Syarikat Aceh Muda Setia (Juli 1916), Syarikat Atjeh (Desember 1916), Boedi Oetomo (Januari 1918), *Volksonderwijzersbond Atjeh* (Desember 1918), Islam Menjadi Satu (1919), Insulinde (Februari, 1919), Kongsi Aceh Sumatera (Juli 1920).³⁶

Serikat Islam (S.I) yang pada mulanya muncul di Tapaktuan pada 1916, kemudian mendapat pengikut di tempat-tempat lain di Aceh T. Kejrueen Chik Muhammad/Alibasjah, uleebalang Samalanga, dan T. Abdulhamid Orang kaya Sri Maharaja, uleebalang Lhok Seumawe, bersama ratusan rakyatnya menjadi anggota S.I.³⁷ Pada 1919/1920, karena kegiatannya dalam S.I., tiga orang dari kalangan uleebalang dibuang Belanda, yaitu T. Chik Muhammad Sa'id dari Cunda, T. Abdullatif dari Geodong dan T. Rhi Bujang dari Nisam, masing-masing ke Sumatera Barat (kemudian ke Jawa), ke Timor dan ke Irian Barat.

Pada 1918 T. Chik M. Thayeb, seorang lulusan OSVIA dan uleebalang Pereulak duduk di dalam *Volksraad* dari 28 Februari 1918 sampai 19 Mei 1920 dan menjadi anggota *Nationale Indische Partij* (N.I.P). Mengenai tokoh ini berkata pegawai pemerintah Belanda dalam salah satu laporannya sebagai berikut:

*Hij had ook weinig op met het Nederlandsch gezag en droomde van een vrij en vereenigd Indonesie, welke mentaliteit hij niet onder stoelen of banken placht te steken, doch duidelijk in zijne handelingen tot uiting deed komen.*³⁸

Hari bulan	Nama tempat pertem- puran	KERUGIAN ACEH				KERUGIAN BELANDA	
		Gugur		Luka-luka		Gugur	Luka-luka
		Laki2	Pr/Anak2	Laki2	Pr/Anak2		
4-4-04	Badak	93	29	—	—	5	26
21-4-04	Raket						
	Goip	143	41	—	—	7	42
11-5-04	Penosan	191	95	3	16	5	29
18-5-04	Tampeng	125	51	2	5	1	33
14-6-04	Koto Reh	313	248	—	31	2	17
	(Alas)						
20-6-04	Likat	220	49	—	—	1	18
24-6-04	Koto						
	Lengat						
	Baru	338	316	1	48	3	23
Jumlah		423	829	6	100	24	188

yang artinya,

Ia sedikit sekali mengacuhkan kekuasaan Belanda dan bermimpi akan suatu Indonesia yang merdeka dan ber-satu, suatu mentalitas yang tidak disembunyikannya tetapi dengan nyata diperlihatkannya dalam peri lakunya.

Sebagai pengganti anggota *Volksraad* yang pertama dari Aceh, T. Chik M. Thayeb, telah diangkat T. Nyak Arif dari sagi XXVI Aceh Besar, lulusan sekolah Raja Bukittinggi dan OSVIA Serang. Di dalam *Volksraad* T. Nyak Arif dengan tajam mengritik politik kolonial Belanda. Bersama dengan delapan anggota *Volksraad* yang lain, yaitu Koesoemo Oeteyo, Dwidjosewojo, Datoek Kajo, Moechtar, Soangkoepon, Pangeran Ali, Soetadi dan Soeroso, T. Nyak Arif membentuk Fraksi Nasional pada bulan Januari 1930 dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka segera mungkin.³⁹ Lebih kurang empat bulan sebelum para pemuda dari berbagai daerah Nusantara menyatakan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dalam sidang *Volksraad* tanggal 18 Juni 1928, T. Nyak Arif telah mengumandangkan kata dan pengertian Indonesia dengan semangat yang berapi-api disertai keharuan dan kecintaan Tanah Air yang meluap-luap dan bahwa kesatuan nasional merupakan prasyarat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.⁴⁰ Selain memperjuangkan kepentingan rakyat dari daerah Aceh, T. Nyak Arif turut pula memperjuangkan dalam *Volksraad* pendidikan nasional yang mencakup usul-usul untuk memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk belajar ke perguruan-perguruan yang lebih tinggi, perbaikan gaji-gaji guru dan peningkatan mutu para guru Indonesia, penggunaan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah.⁴¹

Dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang datang-nya dari Jawa, Muhammadiyah, yang akan dibicarakan dalam bagian lain karangan ini, merupakan organisasi yang relatif dapat hidup subur di Aceh. Orang-orang Aceh menyalurkan aspirasi-aspirasi politik dan sosialnya melalui organisasi Muhammadiyah ini. Itulah sebabnya mengapa berlainan dengan Muham-

madyah di Jawa yang menitik beratkan pada bidang keagamaan dan sosial, Muhammadiyah di Aceh di samping yang tersebut di atas turut dalam gerakan politik. Karena itu, Pemerintah Hindia Belanda melarang Muhammadiyah membentuk cabang-cabangnya di wilayah Aceh Barat yang terkenal rawan itu.⁴²

6.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Pemuda-pemuda Aceh yang lulus dari sekolah-sekolah binaan Belanda menjadi pegawai negeri, mendapat pekerjaan di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor kenegerian (*land-schap*), dan lain-lain. Mereka yang lulus sekolah negeri yang berbahasa Belanda, yang sebagian besar terdiri dari keluarga pemimpin-pemimpin adat, mendapat posisi yang lebih baik daripada lulusan sekolah Melayu. Jawatan-jawatan di perguruan di kepolisian, di Perusahaan kereta api negara, dan lain-lain telah mulai terbuka untuk orang Aceh. Akibatnya timbullah diferensiasi sosial, mobilitas sosial, dan stratifikasi sosial. Adapun lulusan sekolah-sekolah agama modern dari Sumatera Barat dan dari Mesir terpaksa bekerja di perguruan tinggi swasta. Dengan dijiwai semangat pembaharuan mereka mendirikan sekolah-sekolah menengah agama inilah selalu terdapat propaganda anti-Belanda.

Dari pemuda-pemuda yang telah mendapat pendidikan modern ini timbullah nilai-nilai baru yang menyangkut pandangan mereka tentang sekolah, pikiran untuk *mengubah* adat yang telah usang dan keinginan menghimpun diri dalam organisasi sosial atau politik untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Sebagai reaksi terhadap nilai lama cobalah kita ikuti ucapan T. Teungoh, putera uleebalang Meuraksa, ketika mengunjungi Sekolah Raja di Bukittinggi pada awal 1908, sebagai berikut:

Saya menyesal sekali sebab ayah saya tiada mengirinkan saya kemari, tetapi yang terlebih salah yaitu perempuan bangsa Aceh. Ibu-ibu itu tiada suka bercerai dengan anaknya buat pergi ke lain negeri oleh sebab itu kami orang tinggal bodoh.⁴³

Sejak Tahun 1914 pemuda-pemuda lulusan Sekolah Guru Bukittinggi menginginkan adanya sebuah organisasi untuk memajukan masyarakat Aceh. Setelah dua tahun lamanya dalam persiapan diadakanlah pertemuan oleh beberapa uleebalang yang berpikiran maju dan para pegawai dari suku Dongo Aceh untuk mendirikan organisasi Syarikat Aceh (*Atjeh Vereeniging*) dengan dihadiri oleh pejabat Pemerintah Belanda. Dalam persidangan ini terdapat perbedaan faham antara kaum tua yang diwakili oleh T. Panglima Polem Muhammad Daud Sri Muda Perkasa, Tgk. Abdussalam cs. dengan golongan muda yang dipimpin oleh T. Chik Thayeb dan Nyak Tjut sebagai perancang anggaran dasar Syarikat Aceh. Golongan muda ini mendapat pula dukungan dari uleebalang dan pemimpin agama seperti: T. Bentara Keumangan Pocut Umar, T. Laksamana H. Ibrahim Njong, dan Tgk. Syeh Ibrahim Lambhuue'. Akhirnya terbentuklah organisasi tersebut di atas dengan susunan: T. Chik Muh. Thayeb dan T. Teungoh Meuraksa sebagai ketua dan wakil Ketua, Nyak Tjut dan Abu Bakar sebagai setia usaha I dan II, T. Husin Trumon sebagai bendahara, dan T. Hasan, T. Chik Johan Alamsyah Peusangan, T. Chik Ali Akbar Meulaboh sebagai komisaris. Adapun tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengubah adat lama yang mengekang perkembangan masyarakat, pemberian kesempatan kepada wanita untuk mendapat pendidikan yang sama dengan pria dan usaha beasiswa bagi anak-anak yang cerdas. Pemerintah Belanda dengan serta-merta mendukung organisasi ini dengan tujuan hendak membendung berkembangnya SI.⁴⁴

Muhammadiyah masuk ke Kutaraja pada Tahun 1923, dibawa oleh bekas sekretaris Muhammadiyah cabang Betawi, S. Djaja Soekarta, yang pindah ke Kutaraja dan bekerja pada *Atjeh Tram*. Dengan bimbingan A.R. Sutan Mansur, utusan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah berdirilah cabang Muhammadiyah di Kutaraja. Organisasi ini kemudian mendirikan cabang-cabangnya di Sigli, Langsa, Kualasimpang, dan lain-lain. Sebagai konsul pertama diangkat T. Muhammad Hasan dari Glumpang Payung dan kemudian digantikan oleh T. Tjut Hasan anggota keluarga uleebalang Meuraksa.

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan di Bireuen pada 1939 di bawah naungan T. Haji Chik Muhammad Johan Alamsyah, uleebalang Peusangan. Ketua pengurus besarnya adalah Tgk. Muhammad Amin dan Tengku Ismail Jakob. Organisasi ini segera berkembang dan mendapat banyak pengikut di seluruh Aceh. Pemuda-pemuda yang militan ditampung dalam organisasi pemuda Pusa. Terbentuk pula organisasi kepanduan bernama *Kasyafatul Islam*. Kongres Pusa yang diadakan di Sigli pada Tahun 1940 mencapai sukses yang besar.

6.5 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat

Jika dalam Tahun 1938 dan tahun-tahun sebelumnya daerah Aceh hanya mampu mencukupi keperluannya bahan beras saja, maka dalam Tahun 1939 terdapat kelebihan ekspor sebanyak 5.600 ton. Dalam tahun-tahun 1940 dan 1941 masing-masing menjadi (dibulatkan) 24.000 ton dan 36.000 ton, sedang untuk Tahun 1942 kelebihan ekspor itu ditaksir tidak kurang dari 45.000 ton. Ekspor beras untuk Sumatera Timur terutama sekali berasal dari daerah Aceh Utara dan wilayah Idi di Aceh Timur yang diekspor dengan kereta api, dari Gayo Luos dan Tanah Alas yang diangkut dengan oto barang. Aceh Barat mengekspor ke Sumatera Barat melalui laut. Yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sendiri adalah Aceh Besar, wilayah-wilayah Singkel, Simeulu, dan kenegerian-kenegerian di Aceh Selatan serta wilayah Tamiang, Aceh Timur. Sejak masa Gubernur van Aaken (1933–1936) telah diadakan usaha yang sekuat-kuatnya untuk mengintegrasikan produksi beras, baik dengan cara seleksi bibit dan pengadaan irigasi, maupun dengan cara memperluas areal persawahan, dengan bekerjasama dengan Dinas Pertanian Rakyat.⁴⁶

Di samping bersawah yang merupakan sumber penghasilan rakyat yang utama, dijalankan pula usaha perkebunan rakyat. Di Aceh Utara ditanam orang pinang dan dalam Tahun 1939 telah diekspor (dibulatkan) 25.000 ton dengan pukul rata f.5,-/100 kg. Di Aceh Timur terdapat usaha karet rakyat. Jumlah ekspor pada 1939 untuk seluruh daerah Aceh ditaksir kira-kira

1,3 juta kg dengan harga pukul rata f. 29,28/100 kg. Di Aceh Barat ditanam orang nilam. Pada 1939 jumlah ekspor minyak nilam 115 ton dengan harga pukul rata f. 950,—/100 kg. Pada 1939 12.150 ton kopra diekspor dari Aceh dengan harga pukul rata f. 3,50/100 kg.⁴⁷

Dalam hal hewan potong, daerah Sumatera Timur bergantung pada Aceh. Jumlah ekspor pada 1939 ke Sumatera Timur 8.786 ekor sapi dan 7.069 ekor kerbau. Di samping itu diekspor pula 10.000 ekor kambing ke Pulau Pinang. Telur asin dan ayam potong diangkut ke Sumatera Timur dengan gerbong-gerbong kereta api.⁴⁸

Akhir 1939 di seluruh Aceh terdapat 133 buah usaha budidaya dengan luas kurang dari 2.000 Ha dan 17 buah dengan luas 2.000 Ha atau lebih. Seluruh areal yang ditanami pada tahun tersebut di atas berjumlah 34.060 Ha getah, 11.325 Ha kelapa sawit, 2.745 Ha kopi, 1.620 Ha sisal dan 850 Ha teh. Jumlah areal pohon tusam (*Pinusmerkissi*) di Takengon (dibulatkan ada 70.000 Ha di antaranya 35.000 Ha sudah dapat disadap).⁴⁹

Kalau dapat diolah dengan baik, sumber-sumber perekonomian Aceh mempunyai prospek yang baik untuk kemakmuran seluruh rakyat.

CATATAN :

- 1) G.D.E. Hotz, *Beknopt Geschiedkundig Overzicht van de Atjeh Oorlog* (Breda: De Koninklijke Militaire Academie, 1924), halaman 57.
- 2) *Ibid.*, halaman 60-61.
- 3) *Ibid.*, halaman 63-64. Sir Frank Suatterham dalam bukunya *British Malaya* mengatakan sebagai berikut: "The last that has been heard of Dutch military operation in Achin was the slaughter of many hundreds of women and children, and the explanation given was that they were thrust to the front by the men who sheltered themselves behind them, and, in any case that the women were desperate fighters as the men. If the last state of feeling of the Achinese, that their women should join to ranks and die, with their children, in hundreds, under the bullets of an enemy. It would probably be difficult to find a parallel in all Malay History" *British Malaya*. 1907, halaman 109
- 4) Hotz, *op.cit.*, halaman 68
- 5) Verslag betreffende den politieken toestand in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden gedurende het eerste halfjaar 1927, *mailr.* 1142x/27.

- 6) Verslag betreffende den politieken toestand in het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden gedurende het eerste halfjaar 1928, *mailr.* 835x/28.
- 7) *Ibid.*
- 8) G.B. Hooyer, *De Krijksgechiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894*, jilid III, (Den Haag: De Gebroeders van Cleef, 1897), halaman 5.
- 9) Keputusan Majelis Rendah Belanda tahun sidang 1900 - 1, 169 No. 26, 27 dan no. 47, dalam *Tractaten Van Sumatra*, Algemene Rijks-archif, Den Haag.
- 10) A.G. van Sluijs, "Nota: Atjeh en Onderhoorigheden, September 1918 - October 1920, "Kernpapieren, H. 797/156, Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV) Leiden, halaman 27.
- 11) R.A. Kern, "Onderzoek Atjeh-modern", laporan kepada Gubernur Jendral, 16 December 1921, *Kernpapieren* H. 797/159, KITLV, halaman 33-4.
- 12) Salah satu caranya ialah dengan menaikkan biaya perkawinan menjadi F.5, *Ibid.* halaman 35.
- 13) Mobil T. Panglima Meugoe Dalam dari Bambi mendapat julukan "mobil jakat" dari rakyat, karena mereka merasa mobil tersebut dibeli dari uang zakat. *Ibid.*
- 14) Sebagai misal dapat dikemukakan hal berikut. Pada bulan April 1924 beberapa puluh orang penduduk Daya, setelah bersumpah di makam keramat Poteu Meureuhom Daya, bermaksud menyerang bivak militer Belanda di Lam No. setelah sebelumnya dibangkitkan semangat jihad dengan pembacaan hikayat perang sabil. Gerakan ini dapat digagalkan Belanda. Untuk mencegah supaya hal ini tidak terulang, Gubernur Aceh, Hens berusaha melenyapkan isolemen daerah Daya dengan dunia luar, dengan jalan pembuatan jalan raya melalui daerah ini. Juga diperlukan pendidikan agama yang menjauhi perang sabil, meskipun ini sulit dan harus

dilakukan dengan hati-hati sekali. Juga diusahakan mendirikan sebuah sekolah Melayu di Lam No, setelah terjadi gerakan yang berbahaya ini. Lihat surat Gubernur Hens pada Gubernur Jendral, No.192/Pz., Kutaraja 10 Agustus 1924, *Kernpapieren* H. 797/161, KITLV.

- 15) Sekolah ini dahulu disebut juga sekolah: raja; antara lain yang dikirim kemari adalah T. Tjut dan T. Banyak Bait.
- 16) A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, (Den Haag – Bandung: W. van Hoeve, 1949), halaman 30.
- 17) J. Kreemer. *Atjeh* Jilid II, (Leiden: E.J. Brill, 1922 – 3), jal. 165.
- 18) *Ibid.*, halaman 159.
- 19) C.L., "School en Huwelijk op Atjeh", *Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur (TBB)*, iv, hal. 307–9.
- 20) *Ibid.*
- 21) J. Jonggejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, Baarn: Hollandia Drukkerij, 1939), halaman 254. Jumlah penduduk bumi putera di Aceh tahun 1918 adalah 709.841 jiwa. Koloniaal Verslag, 1918, Lamp. A.
- 22) Pickaar, *op.cit.*, halaman 29.
- 23) *Uleebalang* Ulle Lheue misalnya, dengan sukarela menyumbang f. 150,— setahun untuk sekolah perempuan di negerinya yang didirikan pada 1910, kreemer, *Atjeh* Jilid II, (Leiden: E.J. Brill, 1925–3), halaman 165.
- 24) Kern, *op.cit.*, halaman 37.
- 25) Van Si uijs, "Nota", *op.cit.*, halaman 39. Lihat juga Hens, Politiek Overszicht over het Jaar 1924, Kutaraja 30 Maret 1925, *Kernpapieren* H. 737/161, KITLV, halaman 7.
- 26) Van Sluijs, "Nota", *loc.cit.*
- 27) J., "Sekolah desa" surat kabar *Sinar Atjeh*, Kutaradja, 13 Pebruari 1908, halaman 1.
- 28) Kreemer, *op.cit.*, jilid I, halaman 229.

- 29) *Ibid*, Jilid II, halaman 159.
- 30) *Ibid.*, halaman 160.
- 31) *Ibid*.
- 32) Piekaar, *op.cit.*, halaman 32.
- 33) J., "Sekolah Desa", *op cit*.
- 34) Nasruddin Sulaiman, *Perguruan Taman Siswa di Aceh*; tesis sarjana keguruan yang belum diterbitkan, 1976, halaman 48 – 50.
- 35) H.M. Zainuddin, *Bungong Rampoe*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1965), halaman 127 - 9.
- 36) Van Luijs, "Nota", *op.cit.*, Lampiran VII. Menurut J. Kree-mer, Islam menjadi Satu, didirikan 1920. *Kreemer*, *op.cit.*, Jilid I, halaman 238.
- 37) *Ibid.*, yalaman 15.
- 38) Beschrijving van het Zelfbesturend Landschap Peureula' der Onderafdeling Langsa, Afdeeling Oostkust van Atjeh mer Alaslanden, Gajo Loesos en Serbodjadi. Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, 10 Dec., 1935, *mailr.* 338 x/56
- 39) M. Husni Thamrin telah terpilih sebagai ketua Fraksi Nasional. Lihat pidato Thamrin pada 27 Januari 1930, sidang ke-48, *Handelingen Volksraad* halaman 1646.
- 40) *Ibid.*, sidang ke-8, 18 Juni 1928, halaman 166.
- 41) *Handelingen Volksraad*, 8 Dec. 1927, halaman 2455; 29 Juli 1929, halaman 493; 14 Agustus 1930, halaman 1019.
- 42) Piekaar, *op.cit.*, halaman 17.
- 43) Johanna Pengajaran kepala-kepala di "Tanah Aceh", surat kabar *Sinar Atjeh* (Kutaraja, 5 Maart 1908, I:2).
- 44) Nawawi dan J.L.O. Brien, "De Sumatranen", dalam *Gedenkboek voor Nederlandsch-Indie ter gelegenheid van het Regeeringsjubileum* van H.M. de Koningin 1898–1923. (Batavia: G. Kolff, 1923), halaman 30).

45) *Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Aceh ke-26 tahun 1962*, halaman 60 - 61.

46) *Piekaar, op.cit.*, halaman 24 -6.

47) *Ibid.*, 26.

48) *Ibid.*,

49) *Ibid.*, halaman 27.

BAB VII ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 -- 1945)

7.1 Keadaan Pemerintahan

Sebelum kita membahas keadaan pemerintah di Aceh, pada zaman pendudukan Jepang sejak Tahun 1942–1945, terlebih dahulu akan kita gambarkan situasi menjelang masuknya Jepang ke Aceh guna mendapat suatu gambaran yang umum sifatnya. Seperti telah diketahui bahwa sebelum tentera Jepang masuk ke Indonesia, terlebih dahulu mereka melancarkan propaganda yang sifatnya menambah kebencian rakyat Indonesia kepada Belanda. Selanjutnya bangsa Jepang akan datang ke Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia, gerakan propaganda Jepang ini lebih terkenal dengan "Gerakan Tiga A". Propaganda-propaganda yang dilancarkan ini terpengaruh bagi rakyat Indonesia, termasuk Aceh.

Di Aceh kedatangan tentara Jepang sudah di tunggu-tunggu atau dengan kata lain telah dipersiapkan oleh sekelompok masyarakat yang dipelopori oleh sebuah organisasi yang bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Hal ini jelas terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini dalam menciptakan suasana politik, sehingga rakyat akan dapat me-

nerima kehadiran Jepang serta turut memberikan bantuannya apabila Jepang tiba waktunya mendarat di Aceh.

Dalam bulan Desember 1942, baru-baru pecahnya Perang Fasifik, Tengku Muhammad Daud Beureueh (ketua Pengurus Besar PUSA), Tengku Abdul Wahab Seulimeum anggota Pengurus Besar PUSA/Kepala Cabang PUSA Aceh Besar, Teuku Nyak Arif Panglima Sagi XXVI Mukim, Teuku Muhammad Ali Panglima Polem Panglima Sagi XXXI Mukim dan Teuku Ahmad Uleebalang Jeunib (Samalanga) mereka mengadakan rapat (Pertemuan di rumah Teuku Nyak Arif Lamnyong). Mereka mengambil kesimpulan dengan bersumpah setia kepada agama Islam, bangsa dan tanah air akan bersedia dengan kerajaan *Dai Nippon* dan bekerja sama melawan Pemerintah Belanda, menyusun pemberontakan atas nama PUSA.¹ Di samping mengadakan rapat-rapat yang sifatnya rahasia seperti yang disebut di atas, mereka juga terus melancarkan kegiatan-kegiatan lain. Dalam bulan Januari 1942 Ketua Pemuda Pengurus Besar PUSA Tengku Amir Al Mujahid di Idie (Aceh Timur) pergi mengunjungi cabang-cabang Pemuda PUSA di Aceh (Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat). Kepada Pemuda PUSA dianjurkan supaya mereka berdaya upaya meluaskan peperangan terhadap Belanda serta setia kepada tentara Jepang dan memberikan pertolongan kepada mereka bila mendarat nanti.²

Selain kegiatan Pemuda PUSA, Pengurus besar PUSA yang merupakan induk organisasinya yang berpusat di Sigli juga melakukan kegiatan yang sama. Dalam bulan Januari 1942 mereka mengirimkan utusan-utusannya ke seluruh cabang-cabang di Aceh untuk menambah dan meluaskan propaganda supaya anggota-anggota PUSA bersedia dan teguh pendirian, setia kepada tentara *Dai Nippon* dan tidak berpihak kepada Belanda.³

Usaha yang dilakukan oleh PUSA tidak hanya tingkat propaganda kepada rakyat, bahkan turut mengirimkan utusan-utusannya ke Pulau Pinang guna membicarakan dengan pihak Jepang agar Jepang dengan segera mendapat ke Aceh. Pada 7 Januari 1942, tujuh orang Aceh di Blang Glumpang (Panton Labu-

Aceh Timur) dengan dikepalai oleh Teuku Ali Basyah berangkat ke Pulau Pinang atas nama PUSA. Seterusnya pada 20 Februari 1942, ketua Pengurus Besar PUSA mengutus lagi Tengku Abdul Hamid, anggota MS PUSA/guru agama di Jeumib, bersama tiga orang anggotanya yaitu: M. Ahmad Batee, Tgk. Abd. Samad di Seunebok Lambang Payong (Idie), dan Petua Musin berangkat ke Pulau Pinang.⁴

Di pihak Jepang yang berada di Pulau Pinang (Malaya) menyambut baik usaha-usaha yang dilakukan PUSA di Aceh. Mereka yang dikirim dari Aceh terus meneruskan melakukan kontak serta pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Jepang. Di pihak Jepang sendiri yang berada di Pulau Pinang (Malaya) telah mempersiapkan anak-anak Aceh yang bakal di kirim kembali ke Aceh guna mempersiapkan kedatangan Jepang ke Aceh, mereka yang dipersiapkan ini diorganisasi dalam suatu organisasi yang disebut dengan barisan "F".⁵

Pada 19 Februari 1942 satu rombongan anak-anak Aceh sejumlah 7 orang yang dikirim oleh S. Musabuti dari Pulau Pinang sebagai anggota Barisan "F" (*Fujiwara Kikam*), mendarat di Simpang Uliem Aceh Timur. Uleebalang Simpang Uliem yang bernama Teuku Husin melakukan penahanan terhadap semua mereka, karena dicurigai sebagai spion Jepang, serta mereka dikirim ke Idie untuk dipenjarakan dan pada 25 Februari 1942 di lepaskan. Mereka yang dikirim dari Pulau Pinang yaitu Nyak Neh Montasik, Tengku Raden Montasik, Nyak Hasan Sigli, Yahya Samalanga, Musa Sibreh dan M. Yatim.⁶

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak Jepang di Pulau Pinang tidak haanya sampai di situ saja. Dalam bulan Maret 1942 oleh S. Masubuti telah dikumpulkan lagi orang-orang Aceh yang ada di Malaya. Kepala mereka dianjurkan masuk barisan "F" untuk pulang ke Aceh bersama-sama tentara Jepang guna mengusir Belanda. Mereka semua berjumlah 24 orang bersama-sama dengan PUSA yang dikirim dari Aceh.⁷ Organisasi barisan "F" ini yang menjadi pemimpin untuk Aceh antara lain Said Abubakar dan Said Ali.

Telah dipersiapkan suatu suasana politik yang menguntungkan Jepang baik yang dipersiapkan di dalam daerah (Aceh), maupun di luar daerah/luar negeri yaitu Pulau Pinang/ Malaya seperti yang telah diutarakan di atas. Karena itu pendaratan tentara Jepang di Aceh pada 12 Maret 1942 dengan mudah dapat terlaksana serta mendapat bantuan dari anggota *Fujiwara* dan orang-orang PUSA. Pendaratan tentara Jepang ke Aceh pada 12 Maret 1942 dilakukan di tiga tempat yaitu: di Peureulak (Aceh Timur), Kureng Raya (Aceh Besar) dan Sabang.⁸

Setelah Jepang berhasil mendarat di Aceh, hubungan kerja sama antara rakyat Aceh dengan Jepang berlangsung baik. Hal ini sebagai mana digambarkan oleh S.P.T.B. Syozaburo lino gubernur Aceh bahwa rakyat Aceh telah bekerjasama dengan tentara Jepang untuk menghancurkan dan menghapuskan pengaruh Belanda, sehingga musuh dapat dikalahkan dalam tempo dua pekan saja.⁹ Dari ucapan ini dapat dimengerti bahwa hubungan kerja sama ini pada tingkat permulaan berlangsung dengan kedamaian." Pada waktu itu seluruh bangsa Aceh telah membangunkan diri bekerja bersama-sama menghadapi seluruh kesukaran menuju kemuliaan dan kebahagiaan di masa yang akan datang dan di samping itu bersama-sama membela tanah air, memperbesar hasil pekerjaan dan hasil negeri"¹⁰ Demikian antara lain ucapan-ucapan yang pernah diucapkan oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Aceh dalam hubungan kerjasama ini.

Setelah Jepang berkuasa di Aceh untuk memperkokoh kedudukannya, mereka mengatur siasat pemerintahan. Dalam penyusunan sistem pemerintahan di Aceh, Jepang tidak banyak mengadakan perubahan terhadap sistem; Pemerintahan yang telah diciptakan oleh Pemerintah Belanda. Struktur pemerintahan Belanda masih diteruskan, hanya saja sebutan nama-nama diganti dengan nama Jepang, demikian pula penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat pemerintahan dipegang langsung oleh pembesar-pembesar militer Jepang. Seperti diketahui pada masa pendudukan Jepang di Indonesia terdapat tiga pemerintahan militer pendudukan, yakni :

- (1) Tentara Keenambelas di Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kemudian dinamakan Jakarta),
- (2) Tentara kedua puluh lima di Pulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi, dan
- (3) Armada Selatan Kedua di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat dengan pusatnya di Makassar.¹¹

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa struktur pemerintahan Belanda tetap diteruskan. Di Sumatera pemerintahan Militer Jepang membentuk 10 keresidenan (*syu*), yang terdiri atas *bunsyu* (sub keresidenan), *gun* dan *son*. Kesepuluh *syu* yang dibentuk itu adalah Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka-Beliton.¹² Susunan pemerintahan di Aceh seperti yang telah diatur pada waktu pemerintahan Belanda adalah merupakan sebuah keresidenan, yang diperintah oleh seorang residen.

Keresidenan Aceh dibagi atas empat *afdeling* yang dikepalai oleh seorang asisten residen, yaitu: (1) *Afdeling Groot Atjeh* dengan ibukotanya Kutaraja, (2) *Afdeling Weskust van Atjeh*, dengan ibukotanya Meulaboh, (3) *Afdeling Noordkust van Atjeh* dengan ibukotanya Sigli, dan (4) *Afdeling Ooskust van Atjeh* dengan ibukotanya Langsa. *Afdeling*-*afdeling* ini dibagi lagi atas beberapa *onder afdeling* dikepalai oleh seorang *controleur*, yang jumlah seluruhnya 22 *onder afdeling*. Dari tingkat residen sampai *controleur* dipegang oleh bangsa Belanda. Selanjutnya *onder afdeling* dibagi lagi atas distrik-distrik yang dikenal dengan nama *uleebalangschap*. Distrik ini dibagi atas *mukim-mukim* dan selanjutnya dibagi atas *gampong* (Bahasa Indonesia; kampung)¹³ Sistem inilah yang diteruskan oleh Jepang dengan mengubah namanya.

Keresidenan diganti dengan nama *syu* dan kepalanya disebut *syu coker afdeling* menjadi *bunsyu* yang dipimpin oleh *busyucu*. *Onder afdeling* menjadi *gun* yang diperintah oleh *gunco*. Distrik

atau *uleebalangschap* dinamakan dengan *sen* yang dikepalai oleh *sonco* dan *gampong* dinamakan dengan *kumi* yang diperintah oleh *komico*.¹⁴ *syu cōkan* dan *busyoco* langsung dijabat oleh pembesar-pembesar Jepang, *gunco* dijabat oleh orang-orang Aceh. Di beberapa tempat yaitu di Sabang, Sinabang, Singkil, dan kutacane karena daerah-daerah ini dianggap daerah terpencil, diperintah langsung oleh Jepang dengan menempatkan seorang *cuzaikan*.

Aceh Syu Cokan (S. Iino) yang merupakan penguasa tunggal di daerah Aceh dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh badan-badan lain yang langsung di bawah *Aceh Syu Cokan*. Badan-badan itu antara lain:

- (1) *Aceh Syu Seico Somubuco* (Kepala Urusan Pemerintahan Umum), M. Yamamoto
- (2) *Aceh Syu Seico Sangyu Kotabuco* (Kepala Urusan Ekonomi dan Lalulintas), S. Masubuti
- (3) *Aceh Syu Seico Zaimubuco* (Kepala Urusan Keuangan), S. Yamaguti
- (4) *Aceh Seico Sendenmaco* (Kepala Urusan Sarana), S. Sagawa
- (5) *Aceh Syu Seico Sondonka Sinbunhanco* (Kepala Urusan Penerangan, T. Koderu)
- (6) *Aceh Syu Seico Keimuboco* (Kepala Kepolisian), B. Ueki
- (7) *Aceh Syu Seico Sihobuco* (Kepala Kehakiman), Aoki¹⁵

Di antara perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Jepang misalnya kekuasaan kepolisian dipisahkan dari pamongpraja dan berdiri sendiri. Di samping ada polisi umum (*Keimubu*) diadakan pula polisi bersenjata (*Tokubetu*).¹⁶ Dalam bidang pengadilan yang dulu terdapat bermacam-macam bentuk pengadilan yang dulu terdapat bermacam-macam bentuk pengadilan yaitu *districtgerecht*, *landschapsgerecht* *magistraatsgerecht*, *residentsgerecht*, sekarang hanya terdapat dua bentuk pengadilan yaitu *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin* yang dimulai pada 1 Januari 1944.¹⁷

Di Aceh selain terdapat *Tiho Hoin* dan *Ku Hoin* juga didirikan *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama). Hal ini jelas disebutkan dalam *Aceh Syu Mei* Nomor 10 (lampiran No. XI).

Ku Hoin didirikan untuk tiap *gun* dan *son* sedang *Tiho Hoin* didirikan untuk *Aceh Syu* dengan cabang-cabangnya di seluruh *bun syu*. Sebutan untuk ketua mahkamah disebut *Sa iban iba Co* dan untuk hakim disebut *Simpankan*. Pembentukan *Syu Kyo Hoin* didasarkan atas *Aceh Syu Mei Nomor 12* tentang susunan *Syu Kyo Hoin* (Mahkamah Agama) di dalam *Aceh Syu*.

Selain itu pemerintah pendudukan Jepang membentuk sebuah badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut dengan *Syu Sngi Kai* yang untuk ini diketahui oleh T. Nyak Arif, dengan para anggotanya (lihat lampiran no. XI).

Dengan demikian seolah-olah pemerintah telah memenuhi kewajibannya di mana mereka telah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat melakukan tugas-tugas demokrasi dari rakyat, pekerjaan ini semata-mata untuk menarik simpati dari rakyat. Membicarakan masalah sikap dari rakyat terhadap pemerintah Jepang, seperti yang telah disebutkan di muka bahwa pada mulanya memang kedatangan Jepang itu sangat ditunggu dengan penuh harap guna membebaskan negara dari tangan penjajah Belanda. Setelah Jepang mendapat rakyat Aceh terutama yang tergabung dalam barisan *Fujiwara Kikam* dan orang-orang PUSA memberikan bantuannya. Lebih jauh Dr. A.J. Piekaar menyebutkan dengan tugas bahwa pemerintah Jepang telah didirikan dengan dukungan yang militan dari para ulama yang telah bersatu dalam PUSA/8. Pemerintah Jepang menyadari bahwa dalam masyarakat Aceh di samping golongan ulama, juga terdapat golongan lain yang mempunyai peranan yang sama penting di dalam masyarakat yaitu golongan Ulee-balang. Karena itu mereka melakukan pendekatan terhadap ke dua golongan tersebut dalam suatu politik perimbangan yang dapat memperoleh jaminan dukungan dari kedua kelompok, yang memperoleh jaminan dukungan dari kedua kelompok, yang merupakan kelompok "hukum" dan kelompok "adat".

Politik pendekatan yang dilakukan Jepang ini berusaha menggunakan kekuasaan dari uleebalang yang berasal dari hukum, agar dapat memperkuat kekuasaan ulama yang berasal dari hukum agar dapat memperkuat pengaruhnya atas rakyat.¹

Lebih lanjut dalam prakteknya dapat dilihat untuk keperluan itu para ulama telah diikutsertakan dalam alat pemerintahan yang di bidangnya telah ditunjukkan di mana mereka dapat menjalankan kekuasaannya sebagai Lembaga Pemerintah yang resmi. Lembaga yang sengaja dibentuk ini adalah "MAIBKA-TRA" (Majelis Agama Islam Buat Kebaktian Asia Timur Raya) dan Pengadilan Agama. Sungguhpun usaha-usaha pendekatan terhadap rakyat dilakukan melalui dua jalur ini, namun sebaliknya akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat, bukan menambah simpati dari rakyat, tetapi terjadi sebaliknya di mana cara kebencian rakyat yang makin lama makin bertambah mendalam.

Rakyat diperlakukan dengan sewenang-wenang sebagai *romusya* guna kepentingannya. Tenaga rakyat diperas habis-habisan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar maupun kecil seperti pembuatan jalan, lapangan terbang, dan lain-lain. Kebencian terhadap Jepang yang telah begitu mendalam di mana-mana menimbulkan perlawanan di antaranya perlawanan di Bayu (Lhokseumawe) tahun 1942 dan di Pandrah (Jeunib) awal tahun 1945.²⁰ Mengenai kedua perlawanan ini akan dijelaskan lebih luas dalam bagian gerakan perlawanan dengan motivasi agama.

Selain kedua perkawanan ini juga masih terjadi insiden-insiden lainnya di beberapa tempat, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun oleh *Syu Gun* yang telah mereka latih. Tahun 1943 terjadi perlawanan di Blang Ara.²¹ Perlawanan *Gyu-Gun* yang pertama pecah di Meuredu dalam bulan Nopember 1944 dipimpin oleh T. Abdul Hamid, seorang perwira *Gyu-Gun*. Ia melarikan dua pleton *Gyu-Gun* ke gunung, tetapi terpaksa menyerah setelah Jepang menawan semua keluarganya sebagai sandera ancaman akan dibunuh.²²

Dari usaha rakyat melalui perlawanan-perlawanan yang telah disebutkan di atas dapatlah ditunjukkan betapa besarnya rasa benci dan dendam dari rakyat terhadap Jepang. Ini kesemuanya menunjukkan sikap rakyat Aceh yang menganggap bahwa Jepang itu adalah penjajah, sama halnya dengan bangsa Belanda. Rakyat sekarang ingin kemerdekaan, sebagaimana telah digambarkan pada permulaan kedatangan Jepang yang disambut Hangat karena mereka menganggap dengan datangnya Jepang, Indonesia akan segera merdeka.

7.2 Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat

Masalah penyelenggaraan hidup dalam masyarakat pada masa itu, baik kehidupan sosial maupun ekonomi dapatlah dimengerti adalah sangat sulit. Seperti telah disinggung di muka rakyat dalam zaman ini pada umumnya dipergunakan tenaga mereka sebagai *romusha* demi kepentingan bangsa Jepang. Penggunaan tenaga rakyat untuk kepentingan Jepang baik kepentingan militer/pertahanan dan kepentingan ekonomi, menyebabkan rakyat tidak mampu bahkan tidak sempat bekerja untuk kepentingan pribadi mereka.

Kehidupan sosial rakyat sangat menyedihkan, hal mana dapat dilihat rakyat selalu dikerahkan untuk mengerjakan proyek-proyek besar demi kepentingan bangsa Jepang. Di antara proyek-proyek besar yang dibangun Jepang yang memerlukan tenaga *romusha* secara besar-besaran adalah proyek jalan raya Takengon -- Blangkejeren dan proyek pertahanan gunung setan di Tanah Alas. Proyek jalan raya Takengon -- Blangkejeren dimulai pada 1 Januari 1944 dan selesai pada awal bulan Juli 1944. *Romusha* yang dikerahkan untuk mengerjakan proyek ini ditarik dari daerah Aceh sendiri dan dilakukan oleh sebuah badan yang bernama "Perkumpulan pekerja-pekerja untuk umum di Aceh Syu untuk membina Asia Raya".²³ Proyek pembuatan jalan ini berhasil diselesaikan dengan hanya *romusha* dari daerah Aceh saja. Proyek basis pertahanan gunung setan yang dikerjakan setelah jalan raya Takengon -- Blangkejeren hampir selesai. Para *romusha* yang dikerahkan untuk me-

ngerjakan proyek tersebut dikerahkan dari daerah Keresidenan Aceh, dan Keresidenan Sumatra Timur ditambah dengan *romusha* yang didatangkan dari Jawa. Proyek pertahanan militer ini memakan waktu yang lama. Hingga akhir Perang Dunia II, proyek ini belum selesai.²⁴ Dengan demikian dapatlah dimengerti betapa besarnya pengorbanan yang harus diberikan oleh rakyat melalui *romusha*, yang menyebabkan rakyat tidak dapat menyelenggarakan kehidupan sosial yang lebih layak.

Kehidupan di bidang ekonomi dalam zaman ini tidak banyak berbeda dengan kehidupan sosial. Jika kita perhatikan konsepsi yang telah diletakkan oleh Pemerintah Jepang dalam membangun ekonomi di Aceh sungguh menggembirakan, Aceh yang hanya dalam beberapa saat saja akan menjadi makmur. Konsepsi dapat dilihat sebagaimana yang telah digambarkan oleh S. Masubuti sebagai kepala urusan ekonomi dan lalu-lintas pada *Atjeh Syu*, seperti konsepsi dalam bidang pertanian, pengairan, kerajinan, peternakan dan pertambangan. S. Masubuti menyebutkan telah dibuat rancangan untuk memenuhi cita-cita prihal memajukan pekerjaan pengairan, supaya dengan adanya pengairan itu maka akan terhapuslah sawah "bersandar langit". Dan lain lagi dikandung untuk memperluas keadaan tanah sawah buat ditanami dengan bibit padi yang terpilih, supaya hasilnya memuaskan kelak. Demikian pula akan mendapat perhatian dan perbaikan tentang membajak tanah sawah. Dalam soal kerajinan kepada rakyat Aceh dianjurkan buat memajukan pekerjaan memelihara ulat sutra dan pekerjaan bertanam kapas, dengan maksud supaya rakyat sendiri dapat membuat pakaian dengan secukupnya. Soal ternak kini sedang dicita-citakan akan mengadakan satu latihan besar dari berbagai golongan pertanian (*Hosi Kurenzyo*) bagi pemuda Aceh. Mereka yang telah tamat menempuh latihan ini akan dikirim ke lain-lain tempat di seluruh Aceh untuk menjalankan kewajibannya bagi kepentingan memajukan pertanian dan kemakmuran negeri.²⁵ Demikianlah beberapa konsepsi yang telah didengungkan oleh pemerintah Jepang yang bertujuan memajukan ekonomi rakyat Aceh.

Namun demikian konsepsi tetap tinggal konsepsi sedangkan kehidupan rakyat sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah.

Pada zaman ini kehidupan rakyat di bidang ekonomi sangat merosot. Para pedagang bumi putra walaupun masih melakukan kegiatan-kegiatan mereka di bidang perdagangan namun tidak dapat mengembangkan usaha-usaha mereka. Tidak kurang diantara mereka pada zaman ini meninggalkan usaha-usaha dagang, sebab kebutuhan rakyat di bidang sandang dan pangan diusahakan oleh pemerintah dan disalurkan kepada rakyat melalui BDK yang telah dibentuk di tiap-tiap *son*. Tugas dari BDK ini bukan saja sebagai badan penyalur, juga bertindak sebagai penampung. Dalam usaha melakukan penampungan hasil-hasil bumi dari rakyat terutama yang menjadi sumber makanan pokok seperti padi adalah dikumpulkan dari petani-petani yang dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola BDK tersebut.

Setelah BDK mengumulkan hasil-hasil pertanian rakyat dengan secara pemaksaan dengan dalih bahwa untuk menjaga kemakmuran bersama, bahan-bahan tersebut dikumpulkan di tempat-tempat yang telah ditentukan untuk memudahkan pengambilannya. Dalam sistem yang dilakukan secara pemaksaan ini yang walaupun dibayar harganya kepada petani, namun harga yang dibayar itu adalah harga yang telah ditetapkan Jepang. Apabila orang-orang yang tidak mau memberikan padi mereka kepada BDK, kepada rakyat akan dikenakan berbagai hukuman terutama hukuman fisik. Akibat terjadinya perampasan padi rakyat oleh pemerintah lewat BDK ini, tidak kurang rakyat menderita kelaparan sebab yang diambil bukanlah padi yang sifatnya lebih untuk keperluan keluarga. Karena itu timbulah berbagai semoohan kepada pemerintah terutama kepada BDK ini yang dilontarkan oleh rakyat seperti disebutkan BDK dengan initial *Bagi Dan Kumpul*. Kemudian lebih terkenal lagi di hati rakyat dengan arti BDK adalah "*Bah Di Koe*" (Biar Untuk Aku) dan "*Bek Di Kah*" (Tidak Untuk Kamu)²⁶ Akibat dari usaha-usaha perampasan ini tidak kurang rakyat yang meng-

gantikan bahan makanan pokok dari beras ditukar jenis-jenis makanan yang lain seperti sagu, ubi dan lain-lain.

Di segi lain Pemerintah Jepang dalam melakukan usaha peningkatan produksi pertanian rakyat, adalah dilakukan usaha-usaha untuk membersihkan tali air di sawah-sawah dengan sistem gotong-royong. Dalam melakukan gotong-royong ini dilakukan dengan pemaksaan, artinya semua rakyat yang mendiami daerah-daerah yang kena pekerjaan gotong-royong harus ikut semua dan usaha gotong-royong seperti ini dipimpin langsung oleh orang-orang Jepang sendiri. Kalau kita perhatikan kepada konsepsi yang telah disebutkan di atas sebenarnya pemerintah akan membuka irigasi-irigasi untuk memajukan pertanian rakyat akan tetap hal ini tidak pernah terjadi sampai Pemerintah Jepang meninggalkan Aceh. Konsepsi-konsepsi yang telah dicanangkan oleh pemerintah tetap tinggal konsepsi dan tidak pernah dilaksanakan untuk rakyat.

Pada zaman pendudukan Jepang ini rakyat sangat sulit memperoleh bahan-bahan keperluan sehari-hari seperti kain, minyak tanah dan lain-lain. Bahan-bahan yang didatangkan oleh Jepang pada masa itu umumnya dipergunakan untuk kebutuhan militer dan bukan didatangkan untuk kepentingan rakyat banyak. Demikianlah sekadar gambaran umum dari kehidupan rakyat di bidang ekonomi dalam pendudukan Jepang.

Satu hal penting dalam masa pendudukan Jepang di Aceh diterbitkan sebuah surat kabar bersama *Atjeh Simbun* Pemimpin redaksi dan para redaktur yang pernah mengasuh surat kabar tersebut ialah Tgk. Ismail Jakoeb, A. Hasymi, Amelz Abdullah Arif, A. Gani Mutiara, T. A. Talsya, Ibnu Rasid, Djohan Ahmad (Apa Gambang) dan Abdoel Manaf, ditambah beberapa orang Jepang yaitu S. Sagawa, T. Koderu. K. Yamada dan H. Nagamatsu.²⁷ Surat kabar yang diterbitkan di Aceh ini adalah sebagai salah satu sarana untuk memberikan penerangan-penerangan kepada rakyat agar rakyat mencintai pemerintah pendudukan Jepang serta memuat berita-berita yang sifatnya sejalan dengan kebijaksanaan politik Jepang. Oleh karena yang

memimpin surat kabar ini adalah putra-putra Aceh, lambat laun berita-berita yang dimuat secara perlahan telah bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Mereka telah berani menyiarkan berita-berita atau artikel-artikel yang tidak menguntungkan bagi pemerintah. Pemimpin redaksinya A. Hasymi dan redaktur-redaktur seperti Amelz, Abdullah Arif, A. Gani Mutiara dan Talsya telah kerap kali diperingatkan oleh *gunseikanbu* atau *hodaka* atas kelalaiannya menunjang *Dai Nippon Tei koku*.²⁸ Berita yang sangat dilarang ketika itu adalah tentang kemajuan-kemajuan tentara Sekutu baik di front Eropa maupun di front Asia Timur. Peringatan yang diberikan kepada Pemimpin redaksi dan para redaktur adalah wajar, karena surat kabar *Atjeh Sinbun* ini diterbitkan oleh *Atjeh Syu Seico Hodaka*, sebagai media komunikasi pemerintah. Untuk mengawasi surat kabar ini akhirnya pemerintah pada pertengahan tahun 1944, pada dewan redaksi *Atjeh Sinbun* ditempatkan seorang Jepang bernama K. Yamada yang dipindahkan dari pusat pemerintahan Jepang Sumatra di Bukit Tinggi.²⁹ Dengan demikian setiap berita atau artikel telah mendapat pengawasan yang seketat-ketatnya.

7.3 Kehidupan Seni Budaya

Membicarakan masalah perkembangan pendidikan di Aceh pada zaman pendudukan Jepang adalah merupakan suatu masalah tersendiri. Pada zaman ini keadaan pendidikan secara umum boleh dikatakan mengalami kemunduran, jika dibandingkan dengan keadaan pendidikan pada akhir penjajahan Belanda. Kalau pada akhir penjajahan Belanda telah dapat bermacam-macam jenis pendidikan baik pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari *Volkshool* (Sekolah Desa) yang terdapat di desa-desa sampai kepada MULO yang terdapat di Kutaraja (Banda Aceh). Selain sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada masa ini juga terdapat sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh swasta seperti Muhammadiyah Taman Siswa dan lain-lain sekolah usaha masyarakat setempat misalnya Pasuka Peurelak, Rumah Perguruan Kita dan Rumah Perguruan Murid di Takengon.

Di samping pendidikan yang bersifat umum baik yang diusahakan oleh pemerintah dan swasta, juga masih terdapat lembaga pendidikan yang bersifat kejuruan pertanian (*Vervolgschool met Landbouw klas*), Sekolah Kejuruan Kewanitaan (*Meisjeskopschool*) dan sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama yang berkembang pada akhir penjajahan Belanda seperti Madrasah Saadah Abdyah di Sigli, Madrasah Iskandar Muda di Lampakuk, Madrasah Al Muslim di Matang Glupang Dua. Jadam di Montasik, Perguruan Islam Normal di Bireun dan lain-lain. Tidak kurang pula pada masa ini pesantren-pesantren hidup dengan baik di seluruh pelosok daerah Aceh.

Sesudah Acen berada di bawah pemerintahan militer Jepang keadaan pendidikan mengalami kemerosotan. Pada masa ini tidak dibenarkan sama sekali sekolah lanjutan yang diasuh oleh swasta. Hanya ada dua sekolah lanjutan negeri yaitu *Shu Gakko* (sekolah lanjutan lima tahun) dengan kepala sekolahnya orang Jepang yang bernama I. Hashimoto dan guru-gurunya orang Indonesia seperti Karim Duriat, Suratno, Ali Murtolo, Mukman, S. Burhanuddin Pasaribu, Hasjim MK, A. Azis Ibrahim, dan lain-lain. Yang kedua ialah *Sihang Gakko* Sekolah guru tiga tahun), sekolah ini juga dipimpin oleh orang Jepang. Guru-gurunya antara lain Burhanuddin Harapan dan Ibrahim.³⁰ Di bidang pendidikan dasar, semua sekolah dasar yang berjenis-jenis dari peninggalan Belanda dijadikan *Kokumin Gakko* (Sekolah Negara) yang pelajarannya enam tahun. Bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah dasar ini adalah Bahasa Melayu dan dimasukkan bahasa Jepang sejak dari kelas satu. Dua bahasa asing yang selama ini dipelajari yaitu Bahasa Belanda dan Inggris harus dihilangkan. Huruf Arab Melayu diganti dengan huruf-huruf Jepang *Katakana dan Hirakana*. Lagu-lagu Jepang seperti lagu *Kimigayo*, dan *Taiso* (Senam pagi) diajarkan kepada setiap murid di sekolah.³¹ Pelajaran anak-anak sekolah tidak begitu dihiraukan, hal ini sesuai dengan suasana negara dalam keadaan perang. Kepada anak-anak sekolah disuruh membuat kebun, bergotong-royong membuat jalan dan parit-parit. Pendidikan dalam masa ini agak dititik-beratkan dalam bidang kemiliteran

dan Jepang mengharapkan putra-putra Indonesia dapat membantunya dalam menghadapi perang. Untuk mengatur masalah pendidikan secara keseluruhan, pemerintah telah membentuk sebuah badan atau Kantor Pendidikan yang bernama *Bunkyo-ka* untuk mengatur pengajaran-pengajaran di seluruh Aceh yang berkedudukan di Kutaraja.³²

Pendidikan olah raga diberikan di semua sekolah dengan melakukan senam (*taiso*), bahkan juga diberikan di tiap-tiap kantor. Untuk kota-kota yang mempunyai listrik senam ini diikuti gerakannya lewat radio yang disebut *radio taiso*. Pendidikan agama pada umumnya sangat merosot. Pendidikan agama di rumah tangga amat lesu, pendidikan agama di menasah-menasah kampung, mesjid-mesjid juga amat sulit karena sukarnya mendapat minyak lampu, sebagian dari dayah-dayah seluruh Aceh menjadi sepi malah ada sebagian yang kosong.³³

Suatu hal yang menguntungkan dalam zaman Jepang di dalam pendidikan adalah adanya pendidikan kemiliteran. Dengan adanya pendidikan kemiliteran ini rakyat telah mampu mempertahankan negara dari agresi-agresi Belanda setelah Indonesia dinyatakan merdeka dan bekas-bekas anggota militer Jepang ini pula yang menjadi inti dalam pembentukan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Pendidikan kemiliteran yang diberikan kepada rakyat ialah *Gyun-gun*, *Heiho*, dan *Tokubetsu*.

Pembentukan *Gyu-Gun* sebagai tentara baris kedua adalah bersamaan waktunya dengan pembentukan PETA di Jawa. *Gyu-gun* secara arti harfiah adalah "Tentara Rakyat" tetapi nama dalam istilah bahasa Indonesia ini tidak populer di Sumatra.³⁴ Di Aceh penyusunan *Gyu-Gun* ini pada mulanya diserahkan kepada MAIBKATRA (Majelis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya) yang telah dibentuk dalam bulan Maret 1943 untuk menyerahkan pemuda-pemuda memasuki tentara garis kedua ini. Untuk membangun suatu garis pertahanan kedua oleh rakyat maka pemuda-pemuda dianjurkan agar memasuki *Gyun-Gun* yang akan dijadikan tentara pertahanan tanah air (PETA). Kerahan pertama akan dijadikan

hei tei (prajurit). Setelah melalui latihan-latihan dasar, beberapa di antara mereka dipilih dan diangkat menjadi *kasikan* (bintara) dan yang terbaik juga nantinya menjadi *Syako* (perwira).³⁵

Selanjutnya angkatan kedua direncanakan untuk menjadi *Syako* (perwira), hanya yang terlalu kurang dijadikan *kasikan* (bintara). Untuk angkatan kedua diusahakan mendapat pemuda-pemuda yang cakap, kecuali mereka yang mendapat prioritas karena pertimbangan-pertimbangan politis, seperti pemuda bekas anggota *Fujiwara Kikam* barisan "F" yang telah berjasa sebagai kolone ke-V sewaktu Jepang masuk dan anak-anak bangsawan.³⁶ Di Sumatra latihan calon perwira dan bintara dilakukan dalam dua gelombang; angkatan pertama dimaksud untuk dijadikan perwira-perwira dan bintara-bintara infantri Tentara Rakyat yang akan ditugaskan untuk mempertahankan daerah-daerah pantai dan pedalaman (*Gyu-Gun*), sedangkan angkatan kedua dimaksudkan untuk dijadikan perwira-perwira dan bintara-bintara infantri Tentara Rakyat yang ditugaskan mempertahankan lapangan terbang (*Gyu-Hikojo Kin Mutai*).³⁷

Mengenai latihan *Gyu-Gun* di Sumatra adalah berbeda dengan latihan PETA di Jawa yang dipusatkan untuk prajurit *renseitei* Bogor dan untuk perwira di *renseitei* Cimahi. Untuk Sumatra latihannya tidak terpusatkan dan dibagi ke dalam beberapa *renseitei*. Latihan angkatan pertama (untuk perwira dan bintara *Gyun-Gun* dimulai pada 8 Desember 1943 yang untuk daerah Aceh dilangsungkan di *renseitei* Idie. Latihan angkatan kedua (untuk perwira dan bintara *Gyu-Hikojo Kin muntai*) dimulai pada awal Maret 1944 yang untuk daerah Aceh dilangsungkan di *renseitei* Lhok Nga.³⁸

Organisasi *Gyun-Gun* yang terdapat di Aceh (Sumatra) sampai pada saat Jepang menyerah masih bersifat kompi ataupun pasukan-pasukan yang berdiri sendiri. Untuk sementara sebenarnya telah direncanakan untuk meningkatkan *Gyu-Gun* menjadi batalyon masing-masing satu batalyon atau lebih tiap-tiap keresidenan atau lebih banyak lagi sebagaimana direncanakan di daerah Aceh.³⁹ Karena di Daerah Aceh jumlah anggota

Gyu-Gun jauh lebih besar yaitu lebih dari 5000 orang sedangkan daerah-daerah lainnya di Sumatra rata-rata hanya terapat antara 1000 dan 1500 orang anggota *Gyu-Gun*.⁴⁰

Mengenai pembentukan kelompok-kelompok lain seumpama *Hei-Ho* (pembantu tentara), ini juga diambil dari rakyat. Semula pembentukan kesatuan-kesatuan *Hei-Ho* dimaksudkan untuk membentuk kelompok-kelompok tenaga pekerja kasar yang langsung dan setiap saat dapat dikerahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat dan kasar bagi keperluan kesatuan tentara Jepang. Karena itu kelompok ini lalu dimiliterisasi, digabung dalam kesatuan-kesatuan tentara Jepang, diberi gaji tetap, diberi pakaian seragam dan diberi tanda pangkat militer.⁴¹ Adapun yang menjadi motivasi pemuda-pemuda Aceh memasuki *Gyu-Gun*, *Hei-Ho*, *Hokejo Kin mutai*, *Tokubetsu Keisatsu Tai*, adalah karena tidak saja dirangsang akan diberikan kemerdekaan negaranya nanti dan dalam negara mana akan mendapatkan kedudukan-kedudukan yang baik. Sebaliknya itu adalah hal yang sangat mendorong mereka memasukinya adalah untuk menghindari kewajiban-kewajiban berat seperti *romusha* dan jenis-jenis kerja paksa lainnya.⁴²

Seperti telah disebutkan di atas dengan diberikannya pendidikan kemiliteran kepada rakyat hal ini membawa pengaruh yang positif kepada rakyat terutama pada saat-saat permulaan kemerdekaan, mereka telah memberikan andil yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. Walaupun pada saat Jepang menderita kekalahan atas Sekutu pemuda-pemuda yang terdorong dalam *Gyu-Gun*, *Hei-Ho*, *Mikojo Kin mutai*, *Tokubetsu Keisatsu Tai*, so, dan lain-lain organisasi pertahanan rakyat yang diorganisasi oleh Jepang dilucuti senjatanya dan disuruh pulang ke kampung masing-masing.

Setelah Indonesia dinyatakan merdeka, oleh Residen T. Nyak Arif dipanggil pula beberapa orang pemuda bekas opsir *Gyu-Gun* supaya membentuk dan menyusun tentara di seluruh Aceh yang terdiri dari bekas-bekas *Gyu-Gun*, *Hei-Ho*, *Mikojo Kin Mutai*, *Tokubetsu Keisatsu Tai*, dan juga dari bekas-bekas

tentara *Hindia* Belanda dahulu.⁴³ Dengan demikian berdirilah di Aceh satu angkatan yang dengan API (Angkatan Pemuda Indonesia) dengan markas daerah berkedudukan di Banda Aceh yang dipimpin oleh Syammaun Gaharu. Markas daerah (di sini terdiri atas empat wakil markas daerah (residen) yaitu: Wakil Markas Daerah Aceh Besar dan Pidi, Wakil Daerah Aceh Utara dan Aceh Tengah, Wakil Markas Daerah Aceh Timur, dan wakil Markas Daerah Aceh Barat dan Selatan.

Kehidupan kesenian pada masa ini sama sekali tidak berkembang. Rakyat pada masa ini tidak mempunyai waktu untuk melahirkan karya-karya seni seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Sesuai dengan suasana perang, rakyat secara keseluruhan dikerahkan untuk kerja paksa seumpama *romusha* seperti telah disebutkan di atas.

Di beberapa tempat, misalnya di pesantren-pesantren kebanyakan mereka hanya membaca dikayat-hikayat perang sabil yang semata-mata untuk membangkitkan semangat guna melanjutkan perjuangan menentang Pemerintah militer Jepang yang telah dirasakan kekejaman dan kezaliman. Pembacaan hikayat Perang Sabil ini tidak bisa dilakukan setiap saat, karena diawasi oleh Pemerintah Jepang. Pengawasan ini lebih ketat dilakukan setelah terjadi Pemberontakan Bayu dalam tahun 1942.

Di Sekolah kepada murid-murid hanya diajarkan senam (*taiso*) baik melalui *Radio Taiso* dan juga diajarkan lagu-lagu Jepang seperti lagu *Kimigayo* (lagu kebangsaan Jepang). Sebagai kebiasaan rakyat Aceh setiap tahun memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan upacara besar serta dengan mengadakan berzanji yaitu upacara-upacara zikir yang diucapkan secara berlagu bersama yang dalam Bahasa Aceh lebih terkenal dengan sebutan "*Dike Maulud*" pada masa ini juga jarang diperingati karena kesulitan-kesulitan terutama kesulitan di bidang ekonomi. Kesenian yang terdapat pada masa ini adalah sandiwara yang dipergunakan sebagai hiburan rakyat hanya di beberapa tempat saja. Bolehlah disebutkan bahwa selama masa pendu-

dukan Jepang kesenian di Aceh tidak berkembang bahkan yang telah adapun hampir-hampir mendekati kehancuran.

Walaupun Pemerintah Jepang telah berusaha sekuat tenaga untuk membawa rakyat agar dapat mengikuti kebiasaan peri kehidupan bangsa melalui sarana-sarana yang tersedia seperti sekolah-sekolah, namun pada akhirnya seni budaya Jepang sama sekali tidak mendapat pengaruh terhadap rakyat.

Melalui Sekolah Pemerintah Jepang mulai dari kelas I. Selain dari itu dipelajari juga lagu-lagu Jepang, *taiso* (senam) ala Jepang dan adat istiadat Jepang. Di mana-mana terdengar lagu *Kimi-gayo*, di mana-mana diucapkan "*Ohayo gazaimasu*" (selamat pagi), dalam ucapan-ucapan diteriakkan "*Tenno Heika Banzai*".⁴⁴ Seolah-olah rakyat Aceh dijadikan rakyat Jepang. Sebagai telah disebutkan bagaimanapun mereka berusaha menanamkan pengaruh senibudaya mereka kepada rakyat, namun ternyata usaha itu sia-sia saja. Pada diri rakyat tidak membekas pengaruh dari unsur-unsur seni budaya Jepang dalam semua aspek kehidupan.

7.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan

Guna memperoleh suatu gambaran mengenai perkembangan agama di Aceh pada masa pendudukan Jepang, terlebih dahulu harus dilihat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh pemerintah dalam masalah agama itu sendiri. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa Pemerintah Militer Jepang dalam menanamkan pengaruhnya di Aceh mempergunakan dua jalur kekuasaan yaitu jalur ulama yang memegang kekuasaan di bidang hukum dan jalur uleebalang yang memegang kekuasaan di bidang adat. Demikian pula halnya pada waktu Jepang mendarat di Aceh telah mendapat dukungan dari para ulama yang tergabung dalam PUSA. Karena itu Pemerintah Militer Jepang terus mendekati para ulama guna memperoleh dukungan secara terus menerus untuk masa-masa mendatang.

Kebijaksanaan Pemerintah Militer Jepang dalam menghadapi ulama di mana pemerintah telah membentuk sebuah

badan resmi yang dapat memberikan nasihat-nasihat kepada pemerintah di bidang Agama Islam. Seperti telah disebutkan bahwa badan ini bernama MAIBKATRA (Majelis Agama Islam Buat Kebaktian dan Kemakmuran Asia Timur Raya) yang di dalam bahasa Jepang disebut *Aceh Syu haikyo kyoryoku kai*. Di samping MAIBKATRA, untuk mengurus masalah-masalah yang menyangkut dengan agama Islam, di Aceh dikirim pula Mahkamah Agama yang disebut *Syukyo Hoin*. Dengan telah diresmikan MAIBKATRA dan Pengadilan Agama, kedua badan tersebut telah diberikan hak-hak dalam batas-batas tertentu untuk mengurus urusan-urusan yang menyangkut dalam bidang keagamaan.

Dalam bulan Januari 1943 Teuku Abdul Azis diangkat menjadi penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam untuk seluruh Aceh.⁴⁵ Pemerintah Jepang baik dengan mendirikan MAIBKATRA, Pengadilan Agama dan pengangkatan penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam mempunyai maksud agar dengan organisasi-organisasi ini dapat memberikan penerangan yang luas kepada rakyat tentang pendudukan Jepang di Aceh. Maksud ini jelas seperti yang diucapkan oleh *Aceh Syu Cokan* dalam pidato peresmian MAIBKATRA pada tanggal 10 Maret 1943. Disebutkan dalam pidato itu mengenai mana para ulama secara utama harus mengerahkan tenaganya untuk menyadarkan rakyat; yang pertama "kemurnian tujuan dari peperangan untuk Asia Timur Raya; yang kedua perlunya secara gotong-royong memikul beban dan kesenangan hidup negara dapat menjamin dicapainya kemenangan; yang ketiga perbedaan keadaan hidup dalam zaman perang dan damai adalah lebih tidak menguntungkan dalam keadaan peperangan di negara mana pun juga; keempat perlu adanya penghematan dan pada akhirnya yang kelima menasehatkan rakyat untuk tidak ikut campur tangan mengenai urusan pemerintah negara.⁴⁶ Dari ucapan-ucapan ini jelas mengandung maksud untuk dapat menciptakan suasana aman dan damai antara pemerintah dengan rakyat melalui badan-badan tersebut itu.

Walaupun pemerintah ingin berusaha, ke arah yang disebut di atas, namun, sebaliknya perkembangan keagamaan tidak mengalami banyak kesukaran yang disebabkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini kita dapat beranggapan bahwa dengan lebih banyak tampil para ulama ke depan, maka telah dapat diselamatkan ketaatan yang lebih keras mengenai undang-undang agama Islam. Misalnya dapat disebutkan dalam bulan puasa orang-orang tawanan pun diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa.⁴⁷

Di bidang mahkamah Agung Islam seperti telah dijelaskan terdahulu, telah dibentuk berdasarkan *Atjeh Syu Rei* Nomor 12 pada tanggal 15 Pebruari 1944. Dasar Pembentukan Mahkamah Agung (*Syu Kyo Hoin*) ini di Aceh seperti tercantum dalam fasal 1 *Atjeh Syu Rei* Nomor 12 tersebut adalah untuk menghormati dan menghargai Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam *Atjeh Syu*. Untuk melaksanakan *Atjeh Syu Rei* Nomor 12, dikeluarkan maklumat pemerintah (*Atjeh Syu Kokuzi*) nomor 35 yang mengatur tugas-tugas sejak dari *Syuko-Hoin*, *Kepala Kadli*, *Kodli S n* sampai kepada *Imam Mesjid*, *Chatib*, *Bilal dan Tengku Menasah*. Demikianlah kebijaksanaan pemerintah dalam bidang yang menyangkut dengan hukum yang perlu dilaksanakan untuk kepentingan rakyat khususnya dalam hukum Islam.

Dalam hubungan dengan perkembangan agama juga kita jelaskan sedikit tentang pendidikan agama. Sejak awal tentara pendudukan memperlihatkan meskipun telah merupakan teman sekutu dengan partai ulama-nya bahwa mempunyai pandangan yang terbuka mengenai bahaya yang terlihat kepada suatu pendidikan Agama Islam yang tidak cukup dikontrol. Sudah segera diperintahkan untuk mengadakan suatu pendaftaran yang lengkap mengenai sekolah-sekolah agama, di antara mana termasuk sekolah-sekolah yang telah dibentuk secara umum yang didasarkan atas Agama Islam.⁴⁸

Kecurigaan ini memang cukup beralasan Pemerintah Jepang terutama dengan terjadinya perlawanan Bayu, November 1942

di mana tenaga pelopor yang melakukan perlawanan tersebut adalah berasal dari pesentren yang merupakan lembaga pendidikan agama yang banyak terdapat di Aceh.

Karena itu pemerintah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua lembaga pendidikan agama, termasuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, Jamiatuddiniyah. Mereka harus memberikan keterangan-keterangan yang lengkap mengenai para tenaga pengajar yang bekerja pada sekolahnya, banyaknya tahun pelajaran, program pelajaran dan alat-alat pelajaran yang digunakan harus disampaikan kepada pemerintah.⁴⁹

Untuk melakukan pengawasan yang terhadap lembaga-lembaga pendidikan agama, pemerintah mengangkat seorang guru agama yang terkenal yakni Tengku Ismail Jakob menjadi inspektur dari pendidikan agama untuk Keresidenan Aceh. (*Atjeh Syu-Syukyo-Gakko-Syigaku*).⁵⁰ Dengan pengangkatan ini, pemerintah berarti telah membentuk suatu badan yang dapat memberikan pengawasan serta mengontrol secara terus menerus terhadap jalannya lembaga-lembaga pendidikan agama yang dilakukan oleh tenaga ahli di bidang pendidikan agama. Bila badan tersebut gagal dalam melakukan pengawasan, maka selalu masih ada kewaspadaan yang tidak pernah lalai dari kempetai.⁵¹

Pengawasan yang dilakukan meliputi tenaga pengajar, alat-alat pelajaran yang digunakan serta sistem pengajaran harus terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pemerintah. Meskipun tidak ikut campur tangan dalam rencana pelajaran yang sesungguhnya, tetapi setidaknya-tidaknya jiwa dari pendidikan dan sifat dari buku-bukunya yang dipergunakan berada di bawah kontrol yang keras.⁵² Dengan demikian pemerintah mengharuskan lembaga pendidikan agama harus sama dengan lembaga pendidikan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, yaitu dapat membantu kegiatan-kegiatan yang diusahakan oleh pemerintah sesuai dengan suasana perang dan jangan menjadi sumber kekacauan bagi pemerintah seperti peristiwa Bayu.

Kearah inilah yang akan diarahkan lembaga-lembaga pendidikan agama.

Selama masa pendudukan Jepang di Aceh, sejak 12 Maret 1942 telah banyak terjadi perlawanan-perlawanan yang dilancarkan oleh rakyat untuk menentang pemerintahan militer di Aceh seperti yang telah pernah kita singgung dalam bagian sikap rakyat terhadap pemerintah Jepang pada bagian yang lalu. Di antara gerakan-gerakan perlawanan yang telah dilancarkan ada yang didorong oleh sebab kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Jepang seperti pemberontakan yang dilakukan oleh barisan *Gyu-Gun* di bawah pimpinan T.A. Hamid di Mereudu. Ada juga yang disebabkan oleh motivasi agama seperti pemberontakan di Bayu dan Padrah. Dalam bagian ini akan dijelaskan dari pemberontakan ini bukan saja oleh karena disebabkan motivasi agama tetapi juga dari pemberontakan yang besar yang dilakukan oleh rakyat untuk menentang Pemerintah Militer Jepang.

Perang Bayu

Setelah beberapa bulan Pemerintah Jepang menduduki Aceh yang dimulai bulan Maret 1942, terjadilah perlawanan pertama dari rakyat yang terjadi pada tanggal 7 Nopember 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Djalil. Hal ini berarti hanya setelah sembilan bulan Pemerintah Militer Jepang berada di Aceh. Sebelum kita membicarakan pemberontakan Bayu, ada baiknya terlebih dahulu kita jelaskan secara cingkat tentang riwayat Tengku Abdul Djalil yang menjadi pemimpin perlawanan ini.

Tengku Abdul Djalil lebih dikenal dengan nama panggilan sehari-hari yaitu Tengku Cot Plieng atau Tengku di Bulah. Beliau dilahirkan di Desa Blang Ado Buloh, Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara pada Tahun 1909. Ayah beliau bernama Tengku Peutea Hasan Kepala Kampung Cot Seumuyong Kuta Makmur Aceh Utara dan Ibu Nya Cut Buleum seorang guru mengaji agama di kampung yang juga dari keturunan ulama.⁵³ Pada waktu ia masih berusia remaja, aktif dalam menuntut ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan umum mau-

pun pendidikan agama. Pada Tahun 1911–1921 ia belajar di *Volkschool* dan setelah keluar dari *Volkschool* secara terus-menerus belajar agama dan bahasa Arab di dayah-dayah terkenal antara lain di Bireunghang, Ie Rhot Bungkai (Muara Batu), Tanjong Samalanga, Mon Geudong, Cot Plieng, Krung Kale (Banda Aceh), Teuping Pungti dan pada Tahun 1937 kembali ke Dayah Cot Plieng, di bawah pimpinan Tengku Ahmad.⁴⁴ Setelah Tengku Ahmad meninggal dunia pada akhir Tahun 1937, secara resmi Tengku Abdul Djalil diangkat menjadi pimpinan Dayah Cot Plieng.

Selama ia memimpin *dayah* Cot Plieng, banyak terjadi perubahan-perubahan dan beliau mengadakan hubungan kerja sama dengan dayah-dayah lainnya yang terdapat di seluruh Aceh. Di samping itu semangat anti penjajah sudah mendalam di sanubarinya akibat ia membaca *Hikayat Prang Sabil* selama masih mengaji di pesantren.⁵⁵ Untuk memajukan dayah yang dipimpinnya, Tengku Abdul Djalil pernah mengunjungi beberapa dayah sampai ke Aceh Selatan. Setelah mengunjungi beberapa dayah di Aceh, ia secara terus-menerus memberi semangat patriotisme kepada murid-muridnya guna menghadapi penjajahan.

Dengan masuknya tentara Jepang ke Aceh, rupa-rupanya ia tidak terpengaruh dengan propaganda yang dilancarkan oleh Jepang serta PUSA dan barisan-barisan *Fujiwara Kikam*. Ia tidak sepakat dengan beberapa ulama yang tergabung dalam PUSA yang memprakarsai, pemasukan dan penerimaan Jepang di Aceh.⁵⁶ Justru itu ia terus-menerus berpidato di mana-mana menjelaskan kepada masyarakat tentang hal-hal yang akan timbul dengan masuknya Jepang dan menganjurkan kepada rakyat bahwa melawan Jepang *Fardhu 'Ain*.

Pada suatu malam dalam bulan Juli 1942, Tengku Abdul Djalil diundang untuk memberikan dakwah di Kampung Krueng Lingka Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.⁵⁷ Dalam dakwahnya ia membentangkan hal-hal yang membahayakan agama dan keadaan rakyat yang makin lama makin buruk ekonomi-

nya dan hak-hak rakyat tidak dipedulikan; oleh karena itu kita berjihad fisabilillah demi untuk membela agama dan karena itu kita harus melawan Jepang.⁵⁸

Karena isi pidatonya yang bernada anti Jepang mengajak rakyat untuk berjihad, orang yang terlalu memihak kepada Jepang merasa tidak senang dengan tindakan Tengku. Mereka memberikan laporan tentang isi pidato yang diucapkan Krueng Lingka kepada polisi Jepang yang berkedudukan di Sigli. Kepala polisi memerintahkan *Son Co Lhokseumawe* dan *Sonco Bayu* supaya Tengku Abdul Djalil segera datang ke kantor polisi Sigli guna mempertanggungjawabkan pidatonya di Krueng Lingka.⁵⁹ Panggilan ini sama sekali tidak dihiraukan oleh Tengku Abdul Djalil yang walaupun ia telah mendengar isu-isu bahwa ia akan ditangkap oleh Jepang. Ia malah lebih teguh lagi pendiriannya lebih baik ditangkap daripada menyerah.

Situasi mulai retak antara Tengku Abdul Djalil dengan Jepang. Selanjutnya ia mulai mempersiapkan usaha-usaha guna menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Di antara persiapan-persiapan yang dilakukan yaitu persiapan-persiapan seperti cara-cara mempergunakan tombak, pedang, rencong, dan parang. Bertindak sebagai pelatih adalah Tengku sendiri, Tengku Muhammad Taib (adik ipar), Tengku Cahi (adik ipar), dan Tengku Cot Rameh.⁶⁰ Pada pertengahan bulan syakban (Juli 1942), Tengku Abdul Djalil beserta pengikut-pengikutnya kurang - lebih 400 orang, mengadakan konsinyasi di Komplek *Dayah* Cot Plieng dan sejumlah pengikut tersebut telah bersumpah untuk melawan Jepang serta benar-benar bertekad fisabilillah apabila tentara Jepang datang untuk menyerang.⁶¹

Melihat kejadian-kejadian yang telah dilakukan itu, Pemerintah Jepang mulai menaruh kecurigaan yang lebih besar lagi dari yang sudah-sudah. Kejadian-kejadian di Cot Pleing ini telah menarik perhatian pihak pembesar-pembesar Jepang baik yang berkedudukan di Lhokseumawe, Sigli, bahkan di Kutaraja (Banda Aceh). Pemerintah masih berusaha untuk melakukan pendekatan serta berusaha untuk membujuk dengan mempergunakan berbagai cara. Berkali-kali melakukan pemanggilan-

pemanggilan bertingkat mulai dari *Kempetei Co* (komandan polisi militer Lhokseumawe), disusul oleh bupati (*bunsuco*) Sigli, dipanggil lagi oleh komandan *Kempetei Aceh*, tetapi Tengku tetap tidak memperdulikannya,⁶² Pemerintah masih tetap berusaha dengan jalan lain. Uleebalang-uleebalang yang berpengaruh seperti Tengku Mahmud, Abdul Azis, dan ulama-ulama lainnya bahkan bekas gurunya sendiri Tengku Haji Hasan Krueng Kale,⁶³ diutus untuk membujuknya, namun usaha mereka sia-sia saja,.

Di pihak rakyat, dengan dilakukan konsisnyasi ini, mereka memberikan bantuan terutama dengan mengantarkan bahan-bahan makanan ke Komplek *Dayah Cot Plieng*. Akibat kegagalan usaha membujuk Tengku Abdul Djalil tersebut, akhirnya pada hari Selasa 7 November 1942, *Kempetei* dari Lhokseumawe bernama Hayasi langsung datang ke Cot Plieng Bayu untuk membujuk Tengku Abdul Djalil.⁶⁴ Hayasi tidak diperkenankan masuk oleh penjaga-penjaga dayah yang berarti Hayasi tidak dapat berjumpa dengan Tengku Abdul Djalil. Hayasi bukan saja tidak sempat berjumpa dengan Tengku Abdul Djalil, tetapi ia menemui nasib yang malang di mana ia ditikam dengan tombak oleh salah seorang penjaga dayah. Hayasi menderita luka-luka dan dengan dibantu oleh teman-temannya ia dibawa pulang ke Lhokseumawe.

Dengan kejadian ini tidak ada lagi pilihan lain dari Jepang serta untuk menjaga agar tidak kehilangan mutu dari rakyat Aceh: mereka melakukan usaha penyerangan. Pada hari itu juga (7 November 1942) dikerahkanlah pasukan-pasukannya dari Bireun, Lhokseumawe dan Lhoksukon dengan persenjataan lengkap.⁶⁵ dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran yang berlangsung dari pukul 12.00, barulah pada pukul 16.00 tentara Jepang dapat menguasai Komplek Cot Plieng serta membakar habis semua bangunan *dayah*, mesjid, dan sebelas buah rumah rakyat yang berdekatan dengan dayah termasuk rumah Tengku Abdul Djalil sendiri. Dalam pertempuran ini telah gugur 86 syuhada pengikut Tengku Abdul Djalil.⁶⁶

Tengku Abdul Djalil beserta pengikutnya mengundurkan diri serta menyingkir ke Mesjid Paya Kambok di Kecamatan Merurah Mulia dan melalui Desa Neuheun dan bermarkas di Desa Neuheun ini, di rumah Panglima Perang Ahmad.⁶⁷ Di tempat ini pula terjadi pertempuran yang kedua, yang berlangsung pada 8 November 1942. Dalam pertempuran ini gugur lagi empat orang syuhada yaitu dua orang pria dan dua orang wanita.⁶⁸ Dari Desa Neuheun Tengku Abdul Djalil mengundurkan diri setelah terjadi penyerbuan ini, menuju Desa Bulouh Gampoung Tengguhah.

Setelah melakukan perjalanan selama dua hari, pada 10 November 1942 bertempat di Menesah Blang Buduh Gampuong Tengah terjadilah pertempuran yang paling dahsyat. Penyerangan ini dilakukan oleh Jepang setelah Tengku melaksanakan sembahyang Jum'at. Dalam pertempuran ini Syahidlah Tengku Abdul Djalil gugur pada pukul 18.00⁶⁹ setelah berjuang mempertahankan agama dan tanah air. Jenazahnya dibawa ke Lhokseumawe. Keluarganya dibawa kembali ke Bayu dan dikuburkan di Komplek Dayah Cot Plieng. Jumlah yang gugur dalam Perang Bayu adalah: (1) dalam pertempuran Cot Plieng sebanyak 86 orang, (2) dalam pertempuran di Desa Neuheun sebanyak 4 orang, (3) dalam pertempuran Menasah Blang Buloh 19 orang, dan (4) ditangkap selesai pertempuran tanpa dikembalikan lima orang.⁷⁰ Sedang di pihak Jepang tidak diperoleh data-data mengenai berapa jumlah yang meninggal akibat peristiwa ini.

Perang Pandrah

Perang Bayu hanya terjadi beberapa bulan saja Jepang menginjakkan kakinya di Aceh dan Perang Pandrah Jenieb justru terjadi hanya tinggal beberapa bulan lagi saat Jepang meninggalkan Aceh. Terjadinya Perang Pandrah selain bermotivasi ekonomi dalam mempertahankan hak milik akibat perampasan-perampasan yang terus-menerus oleh Jepang juga karena tiga tahun lebih di bawah tangan Jepang, rakyat sangat merasakan akibat-akibatnya. Maka timbullah berbagai daya upaya untuk melepas-

kan diri dari perampasan dan kerja paksa di antaranya dengan jalan peperangan.

Sebelum dilakukan penyerangan ke tangsi di Lheue Simpang, terlebih dahulu diadakan persiapan-persiapan dalam menghadapi Jepang. Sebagai langkah yang pertama, pada 24 April 1945 oleh Keucik Lheue Kepala Kampung Lheue Usman telah memprakarsai rapat dengan memanggil beberapa tokoh terkemuka untuk bermusyawarah guna mengadakan perlawanan terhadap Jepang.⁷¹ Rapat tersebut diselenggarakan di Lheue Simpang. Dalam musyawarah itu mereka membicarakan berbagai masalah baik tempat berkumpul maupun tentang waktu untuk melaksanakan perjuangan. Salah seorang ulama yang bernama Tengku Ibrahim Peudada dalam musyawarah itu menyarankan sebelum melakukan penyerangan terlebih dahulu berkumpul di suatu tempat yang bernama *Glee Banggalang* (Gunung Banggalang) juga diputuskan dalam musyawarah ini, sebagai pimpinan untuk melakukan penyerangan ialah Tengku Ibrahim Peudada sendiri.⁷² Selama melakukan pengasingan di *Glee Banggalang*, mereka berkhawatir/bersemadi selama 7 hari.

Penyerangan pertama terhadap tangsi Jepang di Pandrah dilakukan pada 2 Mei 1945 di bawah pimpinan Keuchik Djohan dan Panglima Prang Tengku Jakob.⁷³ Penyerangan ini dilakukan pada malam hari sewaktu tentara Jepang sedang tidur. Tentara Jepang yang menjaga pos Pandrah ini ternyata hanya 3 orang dan satu orang sempat meloloskan diri serta melapor ke asrama Jeunieb. Laporan ini segera diteruskan ke Bireun, Lhokseumawe Sigli dan Banda Aceh. Dengan kejadian ini pihak Jepang tidak tinggal diam dan mereka tidak menginginkan terulangnya peristiwa di Bayu.

Pada 3 Mei 1945 satu kompi tentara Jepang dari Bireun diperintahkan datang ke Pandrah. Dari Sigli datang wakil *Bunsuco Gunco* Bireun Teuku Muhammad Jakob, dengan dua regu polisi.⁷⁴ Mereka tidak mendapatkan orang-orang yang telah melakukan penyerangan, karena telah kembali ke *Glee Banggalang*. Oleh *Gunco* Bireun telah dikumpulkan beberapa orang untuk

diberikan penerangan-penerangan agar mereka yang telah pergi ke gunung dapat kembali ke kampung.

Karena orang-orang yang telah menyingkir tidak ada satu orang pun yang mau turun, akhirnya Jepang memusatkan tentaranya di Kampung Lheue Simpang. Tindakan selanjutnya ialah melakukan penangkapan terhadap rakyat, dengan maksud agar yang telah menyingkir ke gunung mau turun.⁷⁵

Pada 5 Mei 1945 pasukan muslimin dari Glee Banggalang mengadakan penyerangan ke tempat konsinyasi Jepang di Kampung Lheue Simpang di bawah pimpinan Tengku Ibrahim Peudada.⁷⁶ Dengan mengumandangkan azan, takbir dan zikir, pasukan muslimin melakukan penyerangan secara serentak. Mereka menebas orang-orang Jepang satu per satu, wakil *bun-suco*, dan serdadu-serdadu Jepang termasuk *gunco* sendiri (T. Muhammad Jakob) yang dikira oleh rakyat sebagai Jepang. Dalam pertempuran tersebut telah berjatuhan korban-korban dari kedua belah pihak. Di pihak kaum muslimin yang gugur sebanyak 43 orang dan seorang wanita (Siti Aminah) yang sedang hamil tua.⁷⁷ Mereka kesemuanya dikuburkan di Kampung Lheue Simpang dan terkenal dengan nama kuburan *peuet plooh peuet* (empat puluh empat), karena dimasukkan bayi yang masih dalam kandungan. Sedangkan di pihak Jepang yang gugur dalam pertempuran ini lebih banyak lagi sampai mencapai 200 orang dan korban-korban ini dibawa pulang ke Pandrah.⁷⁸

Setelah terjadi peristiwa ini, anak-anak dan wanita dari Kampung Lheue Simpang dijadikan tawanan dan setelah beberapa hari baru dilepaskan. Di samping itu pasukan muslimin yang masih selamat terus diadakan pengejaran dan orang yang tidak bersalah terus ditangkap. Mereka dikirim ke Bireun untuk dilakukan pemeriksaan dan yang ternyata tidak bersalah dikembalikan ke tempat, sedangkan yang bersalah menjalani hukuman ke Pematang Siantar sebanyak dua orang.⁷⁹ Mereka yang menjalani hukuman ada yang harus menjalani hukuman mati setelah Jepang menyerah hanya enam orang yang selamat kembali ke kampung.⁸⁰ Prang Pandrah ini adalah merupakan pem-

berontakan rakyat terakhir menjelang Jepang meninggalkan Aceh.

Kehidupan Intelektual

Membahas masalah kehidupan intelektual pada masa pendudukan Jepang, berarti kita membicarakan masalah orang-orang yang menjalankan peranan tertentu di dalam masa ini, seperti telah disebutkan berasal dari dua golongan yaitu dari golongan uleebalang dan dari golongan ulama. Dari golongan uleebalang misalnya seperti Teuku Mahmud dan Nya Arif, sedangkan dari golongan ulama seperti Tengku Daud Beureuh, Tengku Ismail Jakob dan lain-lain.

Dalam kehidupan mereka dapat dibagi pula ke dalam dua golongan yaitu golongan yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dan golongan yang menentang Jepang. Golongan pertama adalah mereka-mereka yang selalu mengajak rakyat untuk dapat memberikan bantuan kepada pemerintah. Mereka ini adalah dari golongan uleebalang yang kembali diberikan fungsi, misalnya yang diangkat menjadi anggota-anggota *Aceh Syu Syagi Kai* seperti Teuku Nya Arif, Teuku Panglima Polem, Muhammad Ali, Teuku Muhammad dan yang diangkat pada badan resmi pemerintah seperti Teuku Abdul Azis. Dari golongan ulama yang bekerjasama dengan pemerintah dapat disebut baik yang diangkat sebagai anggota *Aceh Syu Syangi Kei* seperti Tengku Muhammad Daoed Beureueh, Tengku Haji Hasan Krueng Kale, Tengku Muhammad Hasbi Assiddiqi dan juga yang diangkat pada badan-badan resmi lainnya seperti Inspektur Pendidikan Agama Tengku Ismail Jakob.

Golongan yang kedua adalah para ulama yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah serta menentang usaha-usaha ke arah kerjasama. Mereka ini dengan mempengaruhi rakyat untuk menggagalkan usaha-usaha pemerintah. Yang termasuk ke dalam golongan ini misalnya Tengku Abdurrahman Menasah Mecap dan Tengku Abdul Jalil.

CATATAN:

- 1) M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikam) di Aceh* (Banda Aceh: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh 1975), hal. 4-5.
- 2) *Ibid.*
- 3) *Ibid.*
- 4) M. Joenoes Djamil, *op. cit.*, hal. 6
- 5) Barisan "F" atau *Fujiwara Kikam* suatu organisasi yang dibentuk oleh Jepang untuk mengadakan siaran dan propaganda-propaganda tentang maksud dan tujuan masuknya ke Aceh yang bertujuan untuk memberikan kemerdekaan dan nama Fujiwara ini diberikan berdasarkan nama Komandan dari operasi gerakan ini yang bernama *Fujiwara Kikam*, barisan ini juga disebut barisan Kolone ke-V.
- 6) M. Joenoes Djamil: *op.cit.*, hal. 42.
- 7) *Ibid.*, hal. 76.
- 8) *Ibid.*, lihat juga A, Hasymy dan T. Alibasjah Talsya, *Hari-hari pertama Revolusi 45 di Daerah Modal*, (Banda Aceh: Kan-

- wil Dep. P dan K Prop. DI. Aceh - MSI Daerah Aceh. 1976), hal. 4.
- 9) *Majalah Minami*, nomor khusus Aceh.
 - 10) *Ibid.*, hal. 8.
 - 11) Sartono Kartodirdjo (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 5.
 - 12) *Ibid.*, hal. 8
 - 13) T. Alibasyah Talsya, *10 tahun Daerah Istimewa Aceh*, 9 (Banda Aceh: Pustaka Putro Tjanden, 1969) hal. 37.; Lihat juga: J. Jonggejans, *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*; (Holandia: Drukkerij N.V. Barn, 1939). hal. 276.
 - 15) *Majalah Minami*, *Loc. cit.*
 - 16) T. Ali Basyah Talsya, *Loc cit.*
 - 17) *Beberapa pemandangan tentang Kehakiman di Daerah Aceh Kutaradja*, (1944). hal. 32.
 - 18) A.J. Piekaar., *Atjeh en Oorlog met Japan*, (Bandung: N.V. Uitgeverijw? Van Hoeve — Sgravenhage, 1949 - hal. 274.
 - 19) *Ibid.*
 - 20) *Republik Indonesia Propinsi Sumatra Utara*, (Jakarta: Jawatan Penerangan Republik Indonesia), halaman 19.
 - 21) *Dua windu Kodam I/Iskandar Muda*, Jarahdan I/Iskandar Muda, 1972, halaman 75.
 - 22) *Medan Area Mengisi Proklamasi*, (Medan: Badan Musyawarah Perjuangan Republik Indonesia Medan Area, 1976), halaman 64.
 - 23) *Ibid*, halaman 699.
 - 24) *Ibid.*
 - 25) *Majalan Minami*, *op. cit.*
 - 26) T. Sabi Oebit, "Rakyat yang berjiwa patriotik melawan penjajahan facisme Jepang", *Berita Buana*, (Jakarta: Kemis 22 Mei 1975).

- 27) A. Hsmy, dan T. Alibasyah Talsya *op.cit.*, halaman 17.
- 28) *Ibid.*, halaman 7.
- 29) *Ibid.*
- 30) *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*, Banda Aceh: Yayasan Pembinaan Darussalam, 1969), halaman 329.
31. *Ibid*, halaman 374.
32. Nayan, Majalah Minami, *op.cit.*, halaman 50.
- 33) *Ismuha, Pendidikan Agama di Aceh*, prasarana diskusi MSI – Aceh, (Banda Aceh: Kanwil Departemen P dan K. Aceh – MSI Aceh, 1977, halaman 11.
34. Medan Area, *op.cit.*, halaman 50.
- 35) Syammaun Gaharu, *Beberapa catatan tentang perjuangan menegakkan Kemerdekaan di Aceh sejak Proklamasi sampai dengan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia*, (Medan: Prasarana pada Seminar Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai dengan Kemerdekaan Indonesia, 1976).
- 36) *Ibid.*
- 37) Medan Area, *op.cit.*, halaman 50.
- 38) *Ibid.*, halaman 51.
- 39) *Ibid.*, halaman 55.
- 40) *Ibid.*, halaman 51.
- 41) *Ibid*, halaman 56.
- 42) Syammaun Gaharu, *loc.cit.*
- 43) *Modal Revolusi 45*, Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh, 1960, halaman 30.
- 44) *10 Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan*, *op, cit.*, halaman 374.
- 45) A.J. Piekaar, *op.cit.*, halaman 275.
- 46) *Ibid.*
- 47) *Ibid.*, halaman 277.

- 48) *Ibid.*, halaman 284.
- 49) *Ibid.*, halaman 285.
- 50) *Ibid.*
- 51) *Ibid.*
- 52) *Ibid.*, halaman 286.
- 53) *Sejarah pertempuran Cot Plieng Bayu Lheue Simpang Pandrah melawan Fascisme Jepang*, laporan hasil penelitian Kabin Kebudayaan Departemen P dan K Kabupaten Aceh Utara, 1774, halaman 1.; T. Sabu Oebit, *op.cit.*
- 54) *Ibid.*
- 55) *Ibid.*, halaman 2.
- 56) Syamaun Gaharu, *op.cit.*, halaman 8.
- 57) *Sejarah pertempuran Cot Pleing Bayu . . . op.cit.* halaman 2.
- 58) T. Sabi Oebit, *Loc. cit.*
- 59) *Sejarah pertempuran Cot Pleing Bayu, Loc. cit.*, T. Sabi Oebit, *loc. cit.*
- 60) Dr. Muctar Y: Hasbi, Fauzi Hasbi, *Prang Bayu*, (Medan: Seminar Perjuangan Aceh, 1976).
- 61) *Sejarah Pertempuran Cot Pleing Bayu, op. cit.*, halaman 3.
- 62) Syammaun Gaharu, *op. cit.*, halaman 9.
- 63) *Ibid.*
- 64) *Ibid.*, T. Sabi Cebit, *loc. cit.* *Sejarah Pertempuran Cot Plieng Bayu, loc. cit.*
- 65) *Ibid*, halaman 10; T. Sabi Oebit, *loc. cit.* *Sejarah Pertempuran Cot. Plieng Bayu, Loc. cit.*
- 66) T. Sabi Oebit, *Ibid.*, *Sejarah pertempuran Cot Plieng Bayu, Ibid*, halaman 4.
- 67) *Ibid.*
- 68) *Ibid.*
- 69) *Ibid.*, hal. 5

70) *Ibid.*

71) *Ibid*, hal. 6

72) *Ibid.*

73) Muhammad Abdul Muthalib, *Riwayat Prang Pandrah Masa Jideug 1945*, (Kutaraja: Mahtabah Aceh Raya, 1960) hal.27.

74) Syammaun Gaharu, *op. cit*, hal. 11.

75) Muhammad Abdul Muthalib, *op. cit.*, hal. 35

76) Sejarah pertempuran Cot Pleing Bayu dan Lheue Simpang,
op. cit., hal. 7.

77) Muhammad Abdul Muthalib, *op. cit.*, jilid II, hal. 17.

78) *Ibid*, hal. 18

79) *Ibid*, hal. 18

80) *Ibid*, hal. 44.

BAB VIII ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 – 1977)

8.1 Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan

Pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada Sekutu. Di saat-saat kekalahan mereka, bangsa Indonesia mempergunakan kesempatan yang baik untuk memperumumkan kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diucapkan pada 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dan Hatta tidak dapat diketahui dengan segera ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah Aceh, sebab Jepang telah berusaha untuk menghalangi tersebar luasnya berita tersebut.

Sejak beberapa bulan sebelum penyerahan Jepang kepada Sekutu tentera Jepang telah menyita radio-radio agar penduduk tidak dapat mengetahui tentang berita-berita kekalahan Jepang dan perkembangan kemajuan Sekutu di fromt Pasifik. Kantor-kantor berita Jepang (*Domei*), sejak beberapa hari sebelum penyerahan Jepang kepada Sekutu, diambil alih oleh orang-orang Jepang sendiri dan melarang masuk pegawai-pegawai bangsa Indonesia, agar berita kekalahan Jepang tidak sampai tersiar ke luar.

Demikianlah pula tindakan-tindakan yang dijalankan Jepang terhadap para karyawan *Atjeh Simbun* di Kutaraja. Berita-berita yang dipancarkan oleh radio-radio Sekutu diawasi dengan ketat agar tidak dapat diterima oleh orang-orang, Indonesia. Berita-berita yang akan dimuat oleh surat kabar *Atjeh Simbun* disaring dengan ketat supaya tidak memuat berita-berita tentang perubahan sikap Jepang terhadap penduduk, yang mulai bertindak lebih lunak lagi. Pada 16 Agustus 1945 para opsir bangsa Indonesia yang tergabung di dalam *Gyu Gun*, *Heiho* dan *Hikoyo Tokubetsu* dikumpulkan oleh Jepang : dan pada saat itu diumumkan bahwa organisasi kemiliteran tersebut dibubarkan dan para anggota pasukan dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing, tanpa memberitahukan tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu.¹ Demikian pula dengan berita Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat dirahasiakan oleh Jepang sehingga terlambat diketahui bangsa Indonesia di daerah-daerah, seperti halnya di Aceh.

Meskipun Jepang berusaha menyembunyikan berita kemerdekaan Republik Indonesia, namun sejak 21 Agustus 1945 telah ada beberapa pemuda Aceh yang bekerja di Kantor *Hodoka* Kutaradja dan *Atjeh Simbun* yang mengetahui berita kemerdekaan tersebut. Berita resmi tentang Proklamasi Kemerdekaan RI baru diketahui oleh masyarakat Aceh, yaitu setelah kembalinya Mr. T.M. Hasan dan Dr. M. Amir dari Jakarta, Mereka tiba di Medan pada 29 Agustus 1945.

Mr. T.M. Hasan bersama Dr. M. Amir, kembali dari Jakarta ke Sumatera pada 24 Agustus 1945 dengan menyinggahi Palembang, Jambi, Bukit Tinggi, Tarutung dan tiba di Medan pada 29 Agustus 1945. Setelah tibanya Mr. T.M. Hasan inilah dengan cepat Proklamasi Kemerdekaan RI tersebar luas ke seluruh Sumatera, termasuk ke daerah Aceh.

Sejak saat itu kegiatan para pemuda bertambah besar dalam usaha menyebarluaskan berita kemerdekaan RI dan berusaha menggalang persatuan mengujudkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Berbagai organisasi dan badan-badan dan kelaskaran terbentuk di daerah Aceh. Pada 27 Agustus 1945 merupakan

saat yang bersejarah bagi pertumbuhan organisasi perjuangan bersejната di Aceh. Pada hari itu, para pemuda yang terdiri atas bekas opsir *Gyu-Gun, Heiho, Tokubetsu, Keisatsutai*, KNIL dan lain-lainnya, berkumpul di suatu ruangan Sentral Hotel Kutaradja dan dengan kebulatan tekak membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dengan tujuan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan RI yang telah diproklamasikan itu di daerah Aceh. Markas Daerah API berkedudukan di Kutaradja dengan susunan pengurus Syammauan Gaharu, sebagai komadan, T.A. Hamid Azwar sebagai kepala staf, Husin Yusuf sebagai sekretaris, dan Nyak Deh Rica, Said Usman, Said Ali, T.M. Daud Samalanga, T. Sarung, Bachtiar Idham, T. Abdullah (PM) dan Saiman anggota².

Pembentukan API ini kemudian meluas ke seluruh daerah Aceh. Di tiap-tiap kabupaten didirikan wakil Markas Daerah API. Dalam perkembangan selanjutnya, API berubah menjadi Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Sesuai dengan Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945, organisasi perjuangan di Indonesia dinamakan Tentara Keamanan Rakyat, maka API juga bertukar namanya menjadi TKR, yang dilantik oleh residen Aceh pada 12 Oktober 1945 menjadi pasukan resmi negara.

Sejalan dengan lahirnya API, di Aceh lahir pula berbagai barisan kelaskaran yang dipelopori oleh pemuda seperti : (1). Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), yang dalam perkembangan selanjutnya bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI), kemudian dinamakan pula Pemuda Rakyat Indonesia (PRI), yang setelah tahun 1947 diintegrasikan ke dalam Divisi Rencong dengan pimpinan umum Ali Hasyni; (2) Barisan Mujahidin, yang dalam perkembangannya dimasukkan ke dalam Divisi X/Tgk. Chik Ditiro, di bawah pimpinan Tgk. Paya Bangkong, yang dipimpin oleh Tgk. Amir Husin Al Mujahid. Selain itu terdapat pula dua buah resimen tentara pelajar yaitu Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) yang dipimpin oleh Yahya Zamzamid dan Resimen Tentara Pelajar Islam Indonesia (TPI) yang dipimpin oleh A.K. Yakobi.

Dengan lahirnya API dan barisan-barisan kelaskaran, timbulah perlawanan perlawanan terhadap Jepang di seluruh daerah

Aceh untuk mengambilalih persenjataan dari tangan Jepang, seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi di Seulimeum, pada tanggal 26 November 1945, Lhok Ngan dan Blang Bintang, pada 1 sampai 7 Desember 1945, Bireun, pada 18 November 1945, di mana Jepang menyerahkan sebanyak 320 pucuk senjata tanpa pertumpahan daerah, Sigli pada tanggal 22 Desember 1945.

Lhokseumawe pada 18 November 1945 dalam hal ini Jepang menyerahkan 300 pucuk senjata, Kampung. Juli dan Gelanggang Labu, Kabupaten Aceh Utara) pada 20 dan 22 November 1945, Krung. Panjuoe (Aceh Utara), pada 24 November 1945, Kuala Simpang, pada 24 Desember 1945, Kampung Upak dan Bukit Metuah (Kabupaten Aceh Timur pada 25 Desember 1945, dan Suah Timah, Peureumbeue, dan Teunom (Kabupaten Aceh Barat) pada 29 November 1945 sampai 22 Desember 1945, serta berbagai daerah lainnya.

Dari perlawanan-perlawanan dengan Jepang itu, sebagian senjata Jepang telah dapat diperoleh dari barisan-barisan perjuangan di Aceh dengan tebusan jiwa dari para pahlawan yang gugur di dalam pertempuran-pertempuran. Hanya dengan bermodalkan sebagian kecil senjata-senjata dari Jepang dan semangatlah yang mendorong para pemuda di Aceh, berjuang mempertahankan kemerdekaan RI, menghadapi serangan Belanda yang berusaha kembali untuk menjajah Indonesia. Usaha Belanda tersebut dilaksanakannya dengan melakukan agresi ataupun mendirikan negara-negara boneka yang memisahkan diri dari RI dan bernaung di bawah pemerintahan *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA), di bawah pimpinan Dr. A.J. van Mook dan pembantu utamanya Ch. O. van der Plas. Di Sumatera Timur, Belanda berhasil membentuk negara Sumatera Timur, di bawah pimpinan Dr. T. Mansur sebagai wali negara, akan tetapi terhadap rakyat Aceh, usaha Belanda tersebut tidak berhasil karena rakyat Aceh tetap tunduk kepada Pemerintah RI.

Di samping kegiatan para pemuda dan barisan-barisan kelas-karan untuk merealisasikan Pemerintah RI. di seluruh wilayah

RI, maka berdasarkan Ketetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tanggal 19 Agustus 1945, Wilayah Negara Republik Indonesia di bagi atas delapan propinsi, yaitu : provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Propinvisi Sulawesi, Provinsi Maluku, Provinsi Sunda kecil.

Sebagai gubernur Propinsi Sumatera kemudian diangkat Mr. T.M. Hasan, berkedudukan di Medan. Aceh ditetapkan sebagai salah satu karesidenan dalam Provinsi Sumatera dengan residen yang pertama T. Nyak Arif dan Wakil Residenya T.M. Ali Panglima Polem. Kegiatan pemerintah di daerah Aceh baru berjalan pada awal bulan Oktober 1945, setelah keluarnya penetapan gubernur NRI Provinsi Sumatera pada 3 Oktober 1945, tentang pengangkatan pejabat pemerintah NRI di seluruh Sumatera.³ Terlambatnya pelaksanaan roda pemerintahan di daerah ini dapat disadari, karena keadaan negara pada waktu itu masih dalam fase pembinaan dan dalam suasana perjuangan menghadapi Jepang serta Sekutu yang diboncengi NICA.

Di dalam melaksanakan pemerintahan di daerah Aceh, T. Nyak Arif dibantu oleh Komite Nasional Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 1/1945, 23 November 1945⁴. Di Aceh, sebagai Ketua Komite Nasional Daerah diangkat Tuanku Mahmud. Pemerintahan yang dijalankan oleh T. Nyak Arif tidak dapat berjalan lama. Pada awal tahun 1946, ia melepaskan jabatannya dan diganti dengan T. Daud Syah.

Usaha Belanda untuk mencari sekutu-sekutunya dengan memecah belah persatuan sesama bangsa Indonesia, di daerah Aceh telah melahirkan suatu tragedi yang dikenal dengan Pristiwa Cumbok, yang digerakkan oleh beberapa uleebalang yang berdomisili di daerah Lameulo (Kuta Bakti sekarang). Para Uleebalang ini diduga mempunyai hubungan yang erat dengan kaum bangsawan di Sumatera Timur, yang membentuk Komite van Ontvangst untuk menyambut kedatangan Belanda kembali.⁵ Dengan kembalinya kekuasaan Belanda, mereka mengharapkan akan memperoleh kembali nikmat kehidupan dengan

kedudukan tinggi seperti pada masa sebelum pendudukan Jepang dahulu. Kedudukan mana pada masa Jepang telah banyak beralih ke tangan kaum ulama yang tergabung di dalam maksud tersebut, mereka membentuk suatu organisasi yang bernama :

Markas Uleebalang

Markas Uleebalang dan membentuk tentera dengan nama *Barisan Penjaga Keamanan* (BPK), di bawah pimpinan Teuku Daud Cumbok, yang terdiri atas tiga kelompok yaitu : Barisan cap Bintang, Barisan cap Sauh, Barisan cap Tombak.

Sejak bulan November 1945, tentara-tentara uleebalang ini berusaha untuk memperoleh alat-alat persenjataan dari tangan Jepang yang masih berada di Sigli dan melakukan tindakan-tindakan liar, seperti : perampasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap setiap orang yang menurut mereka memihak kepada kaum Ulama.

Atas tindakan yang dijalankan oleh para uleebalang ini, menimbulkan reaksi spontan dari rakyat. Tidak lama sesudah Kota Sigli diduduki oleh para uleebalang, maka kaum Ulama dapat pula menggerakkan massa rakyat yang beribu-ribu orang jumlahnya, yang berasal dari kampung-kampung di sekitar kota sigli dengan maksud untuk mencegah jatuhnya senjata-senjata Jepang ke tangan para uleebalang.

Pertentangan di antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Pemerintah Daerah turun tangan dengan mengirim-kan TKR dari Kutaraja. Pertempuran di dalam Kota Sigli dapat dihindari, tetapi pertempuran di luar kota terus berlangsung dan menjalar ke beberapa daerah lainnya yang menimbulkan korban jiwa. Untuk menghentikan pertentangan ini, pada tanggal 21 Desember 1945, Pemerintah daerah bersama-sama dengan pimpinan TKR, membentuk Markas Besar Umum, yang terdiri atas: TKR, Polisi, barisan-barisan perjuangan rakyat, organisasi-organisasi massa lainnya untuk melawan tindakan kaum uleebalang.

Pemerintah Daerah pada tanggal 8 Januari 1946 dalam mak-lumatnya mengeluarkan pernyataan bahwa kaum Uleebalang yang berpusat di Cumbok dan tempat-tempat lain yang me-

angkatan senjatamengadakan perlawanan terhadap Rakyat umum, dinyatakan sebagai pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia.⁶

Atas kerja sama di antara pemerintah dengan rakyat, kekuatan para uleebalang di Lameulo dapat dipatahkan setelah melalui pertumpahan darah.

Selanjutnya, untuk mengurus segala hal yang berkenaan dengan harta benda uleebalang yang disita setelah peristiwa Cumbok, residen Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1, 24 Juni 1946, dan Peraturan Residen Nomor 09/NRI, 13 Agustus 1946, yaitu mengenai pembentukan Majelis Penimbang, yang merupakan suatu badan yang mengurus hal-hal yang mengenai harta benda uleebalang di sama. Semua anggota Majelis Penimbang terdiri dari orang-orang PUSA.⁷ Dengan patahnya kekuasaan para uleebalang di Aceh berarti pula tidak berhasilnya Belanda memperoleh dukungan usaha mengembalikan kekuasaannya ke daerah Aceh.

Sebagai residen Aceh yang kedua, sejak pertengahan bulan Januari 1946, diangkatlah T. Daud Syah, yang juga merangkap sebagai ketua Komite Nasional Daerah. Sedangkan sebagai Wakil Ketua adalah Mr. S.M. Amin. Pemerintahan yang dijalankan oleh Residen T. daud Syah berjalan sampai bulan Mei 1948 dengan tidak begitu banyak kegiatan, karena sejak bulan Agustus 1947, tepatnya 26 Agustus 1947, ditetapkanlah daerah-daerah Keresidenan Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo menjadi suatu Daerah Militer Istimewa, dan mengangkat Tgk. M. Daud Beureueh sebagai gubernur militer di Daerah tersebut dengan pangkat jendral mayor tituler.⁸ Perubahan bentuk di Aceh ini adalah sejalan dengan usaha untuk menyusun pertahanan yang kokoh dalam usaha mempertahankan Kemerdekaan RI dari pada Agresi Belanda. Peranan Rakyat Aceh pada masa ini sangat besar artinya.

Sejarah telah mencatat, daerah Aceh benar-benar merupakan satu-satunya wilayah Republik Indonesia yang tidak dapat diduduki kembali oleh Belanda dalam masa perang kemerdekaan.

an (Revolusi Fisik), sedangkan daerah-daerah lainnya telah dapat dikuasai Belanda setelah agresi pertama dan agresi kedua.

Masyarakat Aceh menghadapi agresi Belanda dengan kebulatan tekad dan persatuan yang teguh untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan. Segala perselisihan paham yang telah ada sebelum di antara kedua golongan masyarakat seakan-akan lenyap seketika. Setiap perhatian dan pemikiran ditujukan ke arah membina pertahanan negara. Di samping itu, bantuan-bantuan dari daerah Aceh baik dari segi moril maupun materi telah diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan daerah-daerah lainnya. Kepada pemerintah pusat telah disumbangkan dua buah pesawat terbang, yaitu : *Seulawah 001* dan *Seulawah 002* serta emas murni yang dipergunakan sebagai modal untuk membiayai perjuangan melawan Belanda dan membiayai anggota-anggota perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Memang pada tempatnyalah jika Aceh digelari dengan Daerah Modal, sebagaimana yang diucapkan oleh Presiden Sukarno dan para pemimpin lainnya.⁹ Partisipasi rakyat Aceh di dalam pertempuran di Sumatera Timur juga telah dibuktikan. Banyak tentara-tentara dan laskar rakyat dari Aceh yang dikirimkan ke Sumatera Timur untuk membantu perjuangan rakyat Sumatera Timur melawan Belanda di front *Medan Aera*. Kesatuan-kesatuan tentera dan laskar rakyat Aceh ini dikoordinasi di dalam Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) yang terdiri atas empat batalyon, yaitu : Batalyon I RIMA di bawah pimpinan Kapten Ali Hanafiah, Batalyon II RIMA di bawah pimpinan Kapten Nyak Adam Kamil, Batalyon III RIMA di bawah pimpinan Kapten Ali Hasan dan Kapten Hasan Saleh dan Batalyon IV RIMA di bawah pimpinan Kapten Burhanuddin.¹⁰

Pembentukan daerah Aceh sebagai Daerah Militer Istimewa telah berhasil menghempang usaha-usaha Belanda. Sebenarnya pembentukan Daerah Militer Istimewa, bentuk pemerintahan daerah di seluruh Indonesia mengalami perubahan lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22/1948 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Sumatera Nomor 10 Tahun 1948, yang

menetapkan bahwa, Daerah Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yaitu :

- (1) Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur MR. S.M. Amin.
- (2) Provinsi Sumatera Tengah, dengan, Gubernurnya Mr. M. Narun, dan
- (3) Provinsi Sumatera Selatan, dengan Gubernurnya Dr. Isa.

Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.¹¹ akan tetapi karena suasana/keadaan yang masih belum terjamin keamanannya, maka ketetapan-ketetapan tersebut tidak dapat berjalan/dilaksanakan. Daerah Militer Istimewa bagi Aceh, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Tanah Karo tetap berjalan. Segala pertanggungjawaban Pemerintah Sipil dan Militer dibebankan kepada gubernur militer. Tengku Muhammad Daud Beureueh, gubernur Sumatera Utara, hanyalah merupakan komisaris daerah yang bertugas untuk mengadakan pengawasan dan memberikan tuntutan terhadap jalannya pemerintahan.

Kekuasaan yang diberikan kepada gubernur militer ini diperkuat lagi berdasarkan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Nomor 21/Pem/PDRI, 16 Mei 1949 dan Keputusan kekuasaan sipil dan militer ketangan Gubernur Militer.

Adapun pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera adalah berdasarkan Instruksi Presiden RI., 19 Desember 1948 yang ditanda-tangani 1949 Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohd. Hatta, pada saat terjadinya agresi militer Belanda kedua, yang memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera dengan berkedudukan di Bukit tinggi. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1949 tentang kedudukan dan kekuasaan wakil perdana menteri yang berkedudukan di Sumatera, tertanggal 30 September 1949, diangkatlah Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Wakil perdana menteri, guna melancarkan jalannya roda pemerintahan.¹² Pusat pemerintahan di Sumatera ini dipindahkan ke Kutaraja, sejak Bukit Tinggi jatuh ketangan Belanda pada masa agresi kedua.

Pada masa pemerintahan wakil perdana menteri ini, bentuk pemerintahan di Sumatera Utara dan Aceh mengalami perubahan lagi. Berdasarkan peraturan wakil-wakil perdana menteri pengganti peraturan Pemerintah Nomor : 8/Des./WKPM tahun 1949, Provinsi Sumatera Utara dipecah menjadi dua provinsi yaitu : Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli Sumatera Timur yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1950. Sebagai gubernur Aceh diangkat Tgk. M. Daud Beureueh. Pembagian Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli Sumatera Timur telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Pembentukan Provinsi Aceh ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 22/1948 dan mempersulit pemerintah dalam usaha untuk merealisasikan semua hasil yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar.

Meskipun telah ada keberatan-keberatan dari pemerintah pusat, atas pembentukan Provinsi Aceh tersebut, namun pemimpin-pemimpin masyarakat di Aceh tetap berusaha untuk mempertahankan agar status otonom bagi Aceh tetap berjalan. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, maka oleh pemerintah Pusat pada bulan Maret 1950, mengirimkan suatu panitia penyelidikan mengenai pembentukan Provinsi Aceh yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo. Di dalam pertemuan yang diadakan, menteri dalam negeri mendengarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat Aceh, bahwa pembentukan Provinsi Aceh adalah merupakan keinginan dari rakyat Aceh.

Pemerintah benar-benar menghadapi suatu masalah yang rumit, terlebih-lebih di dalam pelaksanaan pembangian wilayah RI yang baru berdasarkan hasil persetujuan RIS-RI pada 19 Mei 1950 dan ketetapan Sidang Dewan Menteri pada 8 Agustus 1950, yang melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 14 Agustus 1950, yang menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia 10 provinsi.¹³

Unruk mengatasi masalah Provinsi Aceh, Pemerintah mengeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1950 14 Agustus 1950 yang memutuskan, mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM Tahun 1949, tentang pembentukan Provinsi Aceh sebagai mana tersebut di atas dan menetapkan pembentukan Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur.¹⁴

Dengan adanya ketetapan-ketetapan itu keadaan Aceh dalam suasana gelisah. Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Aceh mengajukan suatu mosi yang mengemukakan berbagai alasan agar Aceh tetap diberikan status otonomi sebagai satu provinsi. Pemimpin-pemimpin pemerintahan tetap mempertahankan kedudukannya, sehingga ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor Dari 13/9/19, 1 Agustus 1950, untuk membentuk suatu Panitia Penyelenggara Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, tidak dapat dijalankan di daerah Aceh.¹⁵

Untuk mengatasi keadaan ini, maka pemerintah mengirimkan wakil-wakilnya untuk membicarakan masalah pembentukan provinsi Sumatera Utara, dengan gubernur Aceh dan Dewan Pimpinan Daerah serta para Anggota DPR Daerah Aceh, pada tanggal 26 September 1950, terdiri atas Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat dengan sidampingi oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara (menteri keuangan) dan beberapa anggota Parlemen. Pada 27 November 1950 berkunjung pula Wakil Presiden Mohd. Hatta. Kedua kunjungan ini tidak membawa penyelesaian bagi penghapusan Provinsi Aceh.

Selanjutnya pada 23 Januari 1951, Perdana Menteri Muhammad Natsir berkunjung pula ke Aceh. Setelah mengadakan musyawarah, diperoleh persetujuan dari para pimpinan masyarakat Aceh untuk melaksanakan penggabungan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Pada saat itu pula dilaksanakan acara serah terima jabatan gubernur Aceh dari Tengku Muhammad Daud Beureueh kepada Perdana Menteri Muhammad Natsir.

Usaha Pemerintah untuk merealisasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 nampaknya berhasil baik, tetapi penggabungan daerah ke dalam Provinsi Sumatera Utara ini, kiranya

menimbulkan berbagai ekses yang lebih besar lagi, seperti terbukti dengan terjadinya Peristiwa Pemberontakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII).

Sejak terhapusnya Provinsi Aceh mulai terlihat kembali benih-benih pertentangan di antara kedua golongan masyarakat Aceh, yaitu antara kaum uleebalang dengan kaum ulama (PUSA). Kiranya pertentangan paham yang pernah terjadi pada waktu Peristiwa Cumbok dahulu belum dapat dihilangkan sama sekali.

Penghapusan Provinsi Aceh menimbulkan harapan baru bagi kaum uleebalang untuk menuntut hak azasi mereka, yang menurut mereka selama ini tidak adil dijalankan oleh para pemimpin termasuk Majelis Penimbang. Gerakan kaum uleebalang untuk melahirkan rasa tidak puas mulai menjadi kenyataan setelah terbentuknya Badan Keinsyafan Rakyat (BKR) pada 4 April 1951 di bawah pimpinan T. Mohd. Ali Lemlagang, di Kutaraja. Badan ini menyampaikan resolusi kepada pemerintah, yang menuntut :

- (1) Supaya Majelis Penimbang diganti dengan badan lain yang netral,
- (2) Pamong Praja supaya diganti dengan badan lain, sebab memihak kepada PUSA dan tidak cakap, demikian pula pegawai kehakiman dan kepolisian, dan
- (3) Supaya dilaksanakan Pemilihan Umum.¹⁶

Di lain pihak, orang-orang PUSA pun tidak tinggal diam. Para pemimpin PUSA juga melancarkan kampanye sampai ke desa untuk mencari pendukung dan mengemukakan tuntutan untuk memperoleh status otonomi bagi Aceh, seperti yang dibicarakan di dalam Kongres PUSA yang berlangsung di Kutaraja, bulan Desember 1950, Kongres PUSA di Kuala Simpang pada bulan Maret 1951 dan Kongres PUSA di Langsa pada tahun 1953. Di samping itu para pemimpin PUSA mulai menghimpun kekuatan seperti : Persatuan bekas Pejuang Aceh dan Pandu Islam; untuk menghadapi setiap tantangan terhadap lawannya

dan sekaligus sebagai tenaga inti dalam membentuk Negara Islam, seperti yang dicetuskan di dalam peristiwa pemberontakan DI/TII, pada 20 September 1953.¹⁷

Berdasarkan naskah proklamasi yang dikeluarkan oleh DI/TII, tertanggal, Aceh Darussalam 21 September 1953 dan berdasarkan Piagam Pernyataan Bate Krueng, jelas terlihat adanya hubungan yang erat antara pemberontak DI/TII di Aceh yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh dengan gerakan DI/TII di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Karto Suwiryo. Di mana Aceh dinyatakan sebagai suatu Negara Bagian dari Negara Islam Indonesia.

Peristiwa Pemberontakan DI/TII di Aceh ini, telah menimbulkan bencana yang sangat besar bagi masyarakat Aceh dan Pemerintah. Korban harta benda dan jiwa yang tak ternilai harganya terjadi di dalam peristiwa tersebut. Peristiwa pemberontakan DI/TII di Aceh benar-benar merupakan masalah Nasional yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Indonesia, sebagai mana yang diucapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastromijoyo di depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Oktober 1953.¹⁸

Untuk mengatasi Peristiwa DI/TII ini, DPR melalui sidangnya mengeluarkan usul mosi supaya pemerintah menunjuk Daerah Aceh sebagai daerah otonom. Pemerintah setelah mendengarkan pendapat dari berbagai pihak bagi penyelesaian peristiwa DI/TII tersebut, maka di tengah-tengah berkecamuknya peristiwa tersebut mengeluarkan Undang-undang Nomor 24/1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh yang terpisah dari Provinsi Sumatera Utara.¹⁹ Sebagai gubernur di angkat Ali Hasymi, berdasarkan Ketetapan Presiden 5 Januari 1957, Nomor 615/M Tahun 1957. Pelantikan Ali Hasymi sebagai gubernur/kepala daerah Provinsi Aceh yang pertama dilaksanakan pada 27 Januari 1957, Pembentukan Provinsi Aceh sebagai suatu provinsi otonom, berarti pemerintah mulai menempuh suatu jalan dengan penuh kebijaksanaan dalam penyelesaian Peristiwa/DI/TII di Aceh.

Sejalan dengan itu, dalam bidang kemiliteran di Aceh, sejak 22 Desember 1956, terjadi pula perubahan garis komando, di mana daerah Aceh ditetapkan sebagai daerah militer yang berdiri sendiri, yaitu sebagai Komando Daerah militer Aceh (KIMA) dengan panglima yang pertama Letnan Kolonel Syamman Gaharu. Ketetapan ini terjadi setelah terjadinya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Kolonel M. Simbolon, bekas panglima TTI/Bukit Barisan dengan Gerakan Gajahnya, sedangkan Aceh di bawah pimpinan komandan Resimen I/STA menyatakan tidak mengakui lagi pasukan RII/BB sebagai induk pasukannya. Dengan terbentuknya Daerah Aceh sebagai suatu provinsi Otonom dengan komando daerah militer yang terpisah dari Komando TTI/BB, usaha untuk mencapai pemulihan keamanan dapat dilaksanakan dengan lebih intensif lagi.

Melalui badan-badan perantara, mulailah adanya hubungan pembicaraan antara pemerintah daerah dengan pimpinan DI/TII. Dari hasil pembicaraan yang sangat penting di antara kedua belah pihak, lahirilah suatu ikrar yang terkenal dengan nama Ikrar Lam Teh, pada 7 April 1957, yang isinya :

- (1) Sama-sama berusaha untuk memajukan agama Islam,
- (2) Sama-sama bekerja untuk memberi kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat dan masyarakat Aceh.²⁰

Terciptanya Ikrar Lam Teh ini, mempunyai arti yang sangat penting dalam usaha-usaha pemulihan keamanan selanjutnya dan penyelamatan daerah Aceh dari kehancuran.

Selanjutnya, guna mempercepat terlaksananya pemulihan keamanan, Pemerintah mengirimkan suatu misi di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri I. Mr. Hardi untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan semua pihak, guna mencapai kata sepakat mengenai pemulihan keamanan. Misi ini dikenal dengan "Misi Hardi" yang menghasilkan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Misi/1959, 26 Mei 1959 tentang penetapan Daerah Swatantra Tingkat I Aceh sebagai Daerah Istimewa Aceh dengan otonomi yang seluas luasnya terutama dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan.²¹

Sebagai gubernur/kepala Daerah Istimewa Aceh diangkat kembali Ali Hasymi, berdasarkan hasil pemilihan DPRD dan Keputusan Presiden RI— tanggal 24 Desember 1959 Nomor 469/M/1959.

Pemberian hak otonomi yang luas bag Aceh, diikuti pula dengan mengadakan pembangunan di segala bidang terlebih-lebih lagi dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah tersebut, titik-titik terang dalam mencapai pemulihan keamanan di daerah Aceh semakin nyata kelihatan. Dari pihak DI/TII dengan dipelopori oleh para pemimpinnya, menyatakan tunduk kepada Pemerintah RI.

Pada awal tahun 1961, anggota-anggota DI/TII dengan perlengkapan senjatanya mulai turut kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Pemerintah menyambut dengan baik setiap anggota DI/TII yang penuh kesadaran kembali ke pangkuan Negera RI, tanpa tuntutan apa pun, meskipun mereka telah berusaha merongrong Pemerintah RI selam beberapa tahun. Presiden Republik Indonesia telah pula memberikan amnesti dan aboisi kepada semua anggota DI/TII yang kembali tersebut, berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 Tahun 1959, 15 Agustus 1959 dan Keputusan Presiden Nomor 449 Tahun 1961, 17 Agustus 1961 (lihat lampiran 1 dan 2).

Sebagai anggota DI/TII, diterima kembali sebagai aparatur Pemerintahan dan anggota militer setelah melalui penyaringan dan pendidikan. Pemulihan keamanan diseluruh Aceh tercipta kembali setelah Tengku Muhammad Daud Beureuh (pimpinan DI/TII) kembali ke pangkuan Negara RI. pada tanggal 8 Mei 1962.

Suasana damai ini diikuti dengan mengadakan suatu musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, yang berjuang untuk menciptakan kerukunan dan persaudaraan sesama masyarakat Aceh. Dengan adanya musyawarah tersebut, diharapkan pertentangan dan perpecahan yang terjadi di masa yang lampau dapat dihilangkan dan tidak akan terulang kembali. Akhir dari musyawarah tersebut telah mela-

hirkan pernyataan yang tercantum di dalam Piagam Blang Padang, yang menyatakan bahwa rakyat Aceh dengan penuh hikmat dan dengan hati murani yang putih bersih serta ikhlas setelah bulat mufakat untuk memelihara dan memupuk kerukunan yang bersinarkan persatuan dan silaturahmi yang abadi.²²

Dengan terujudnya kembali keamanan di daerah Aceh, berarti pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang besar dalam membina Negara Kesatuan Sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Undang-undang 1945.

Dalam mewujudkan persetuan warga TNI di Aceh, atas pimpinan Panglima Brigjen. T. Hamzah Benderal dibentuk pula inisiatif Badan Pembina Rumpun Iskandar Muda (Beperis) Di samping itu pada bulan Desember 1965 dibentuk pula Majelis Ulama, yang merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat Aceh dan sekaligus sebagai lembaga yang banyak membantu Pemerintah Daerah dalam bidang pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam. Lembaga lain yang tidak kurang pentingnya dalam membangun Aceh adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau yang dikenal juga dengan *Aceh Development Board* (ADB).

Dalam masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan di Aceh kelihatan lebih meningkat maju, anggapan-anggapan dulunya menganggap Aceh sebagai daerah yang terisolasi, saat ini sedikit demi sedikit sudah terhapus. Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang beribukotakan Banda Aceh pada saat ini meliputi delapan kabupaten dan dua kotamadya, yaitu : Kabupaten Aceh Besar dengan ibukota Banda Aceh, Kabupaten Pidie dengan ibukota Sigli, Kabupaten Aceh Utara dengan ibukota Lhok Seumawe, Kabupaten Aceh Timur dengan ibukota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukota Takengon, Kabupaten Aceh Barat dengan ibukota Meulaboh, Kabupaten Aceh Selatan dengan ibukota Tapaktuan, Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibukota Kutacane, Kotamadya Banda Aceh dengan ibukota Banda Aceh, dan Kotamadya Sabang dengan ibukota Sabang.

Adapun gubernur/kepala daerah yang telah memimpin pemerintahan di Aceh, sejak terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh hingga sekarang, adalah sebagai berikut :

- (1) Ali Hasymi; yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 459/M/1959 24 Desember 1959. Dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Presiden No. 79/M/1964, 17 Maret 1964,
- (2) Nyak Adam Kamil, yang diangkat sebagai Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden No. 79/M/1964 17 Maret 1964. Diberhentikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Presiden No. 197/1964, 20 Agustus 1964,
- (3) Nyak Adam Kamil, diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Presiden No. 197/1964, 20 Agustus 1964, dan diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Presiden No. 100/1967, 7 Juni 1967,
- (4) Hasbi Wahidi, diangkat sebagai Pejabat Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden No. 100/1967, 7 Juli 1967. Diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Presiden No. 117/1968, 23 Maret 1968, dan
- (5) A. Muzakir Walad, diangkat sebagai Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden No. 117/1968, 23 Maret 1968, 23 Maret 1968, sampai sekarang²³

8.2 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh

Setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah menghadapi berbagai masalah. Dalam Bidang Sosial ekonomi masyarakat, merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Pendudukan Jepang berakhir dengan meninggalkan masyarakat Indonesia dalam kemiskinan. Hal ini terjadi akibat tekanan-tekanan dan pemerasan-pemerasan yang dilakukan Jepang selama menjajah Indonesia. Jepang tidak pernah memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memproduksi dengan leluasa. Sebagian besar rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja rodi (*romusa*) pada proyek-proyek bangunan Jepang, sehingga banyak lapangan produksi yang terbengkalai, areal pertanian

yang ditinggalkan. Kemiskinan rakyat yang ditinggalkan Jepang ini ditambah pula dengan kembalinya para tawanan dan bekas *romusa* ke kota-kota tanpa pekerjaan. Kesempatan kerja dalam masyarakat di awal kemerdekaan boleh dikatakan terbatas sekali. Hal ini disebabkan tidak adanya proyek-proyek industri peninggalan penjajah. Di samping itu kemelut yang terjadi dalam menghadapi Belanda pada masa Revolusi Fisik, mengharuskan para Pemuda berjuang dan meninggalkan pekerjaannya masing-masing.

Dalam masa Revolusi Fisik ini daerah Aceh dibanjiri pula oleh para pengungsi dari Sumatra Timur, setelah Belanda mengadakan agresi ke daerah tersebut. Perusahaan-perusahaan perkebunan dan pertambangan minyak banyak yang tidak dapat berjalan. Kesulitan perekonomian lebih terasa lagi dengan adanya blokade Belanda terhadap pelabuhan-pelabuhan dan beberapa daerah, setelah mereka menguasai Sumatera Timur. Daerah Aceh seakan-akan terisolasi dari daerah-daerah lainnya.

Untuk mengatasi kebutuhan masyarakat, terutama dengan memperluas areal persawahan. Banyak tanah kosong yang ditanam ini banyak yang dikirim ke daerah Sumatera Timur, untuk menutupi kebutuhan bahan bagi masyarakat daerah tersebut.

Di samping itu, untuk mengatasi kekurangan barang-barang impor akibat blokade Belanda, diusahakan mengadakan perniagaan ke daerah Semenanjung Melayu dengan menembus blokade Belanda. Dalam usaha ini, besar sekali jasa Mayor John Lie dari Angkatan Laut Republik Indonesia.

Dalam bidang keuangan, hingga tahun 1946 pemerintah masih belum memiliki mata uang sendiri; dan sebagai alat pembayaran masih menggunakan uang Jepang. Oleh Belanda, mata uang Jepang palsu dicetak sebanyak mungkin dan disebar ke dalam masyarakat, sehingga menimbulkan inflasi.²⁴ Untuk mengatasi kesulitan ini pada akhir tahun 1946, Pemerintah Provinsi Sumatera mencetak mata uang yang berlaku dalam wilayah Provinsi Sumatera, yaitu Oeang Republik Indonesia

Provinsi Sumatera (ORIPS) dan mendirikan bank-bank untuk mengatur peredaran uang. Di daerah Aceh pada 11 Maret 1946 didirikan Bank Dagang Nasional Indonesia cabang Kutaraja. Nilai uang ORIPS kian hari kian merosot, sedangkan barang-barang keperluan sehari-hari sulit diperoleh di pasaran. Di samping itu oleh pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera, masing-masing telah pula mencetak mata uang tersendiri yang berlaku dalam daerah tersebut, seperti uang ORI-KA (Oeang Republik Indonesia Kabupaten Asahan), ORIST (Oeang Republik Indonesia Sementara Timur), ORILAB (Oeang Republik Indonesia Tapanuli). Untuk daerah Aceh, dicetak uang kertas yang bernama ORIBA (Oeang Republik Indonesia Bagian Aceh) sebagai alat membayar untuk memperlancar perekonomian di daerah Aceh).

Setelah pengakuan kedaulatan, perbaikan dalam kehidupan sosial ekonomi mulai terlihat melalui pembangunan pembangunan di berbagai bidang, setiap wilayah Republik Indonesia, tetapi pembangunan di Aceh belum lagi memungkinkan, karena kemudian Aceh terlibat pula di dalam peristiwa DI/TII dalam masa ini, kesulitan kesulitan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat dirasakan, akibat terputusnya hubungan dengan daerah luar dan terbengkalainya lapangan kerja, karena banyaknya penduduk yang mengungsi atau karena kurang terjaminnya keamanan, transportasi pada masa ini sangat buruk, sehingga terputusnya hubungan jalan-jalan raya hampir sebagian besar rusak, sehingga sarana pengangkutan yang lebih efektif pada masa ini adalah dengan kereta api, yang keadaannya, kapasitas dan daya angkutnya sebenarnya jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan kereta api di Sumatera Utara.

Keadaan sarana transportasi yang sedemikian buruknya ini, berjalan hingga memasuki masa Pelita I. Sebagai gambaran dapat kita lihat tabel di bawah ini:

Keadaan Jalan Tahun 1968	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jumlah
Baik	137.032 km	77,136 km	214,168 km
Sedang	146,820 km	642,300 km	789,620 km
Rusak ringan	127,244 km	257,520 km	384,364 km
Rusak Berat	78,304 km	308,544 km	386,848 km

Sumber: Aceh Dalam Angka 1972, hal. 185.

Setelah Pelita I, keadaan jalan ini sebagian besar telah mendapat perbaikan, sehingga arus lalu lintas dengan daerah luar telah dapat berjalan dengan lancar dan membawa perubahan bagi daerah Aceh. Namun kehidupan sosial ekonomi dari masyarakat Aceh saat ini, tidak banyak memperlihatkan perbedaannya, sebagaimana tahun tahun sebelum Pelita I. Daerah Aceh merupakan daerah agraris, yang luasnya + 55,390 Km² (5.539.000 ha). Sebagian besar dari daerahnya masih merupakan hutan-hutan yang belum dijamah oleh penduduk. Penduduk yang mendiami daerah Aceh ini, menurut statistik tahun 1976, berjumlah 2.276.037 jiwa.

Sesuai dengan keadaan daerahnya, yakni daerah agraris, sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Rincian jumlah penduduk ditinjau dari segi mata pencahariannya adalah: petani (75,25 %), pedagang (5,09 %), buruh (2,16 %), pegawai negeri (5,59 %), lain-lain (11,91 %).

Pendapatan per kapita penduduk Daerah Istimewa Aceh pada tahun 1972 adalah Rp.32.394,32²⁵

8.3. Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya.

Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan pendidikan di Indonesia umumnya sangat menyedihkan. Diperkirakan ada sekitar 93% dari jumlah penduduk di Indonesia yang buta huruf. Daerah Aceh merupakan salah satu dari sekian

daerah yang paling merosot (tertinggal) dalam bidang pendidikan. Keadaan ini sebenarnya harus kita cari ke belakang sebab-sebabnya.

Sesuai dengan perkembangan sejarah Aceh yang merupakan daerah yang paling akhir dapat dikuasai oleh Belanda, maka dalam hal pengenalan kepada sistem pendidikan umum (pendidikan umum (pendidikan secara Barat), daerah aceh juga merupakan daerah yang paling lambat dimasuki oleh pengaruh pendidikan Barat. Memang ada pendapat yang beranggapan bahwa masyarakat Aceh dahulu enggan sekali untuk masuk sekolah umum, karena anggapan yang berbahasa Melayu akan menjadi kafir (kaphe')²⁶ Ini tentunya disadari oleh adanya sikap fanatik masyarakat kepada agama Islam. Namun demikian terlepas dari anggapan itu, kenyataan yang kita hadapi, sebenarnya karena Pemerintah Belanda tidak begitu memperhatikan lapangan pendidikan di Aceh. Seakan akan Pemerintah Belanda tidak ingin memberikan kesempatan untuk mencerdaskan masyarakat Aceh.

Setelah kemerdekaan, sekolah sekolah banyak yang terbengkalai terlebih lebih di daerah Aceh..Sekolah sekolah banyak yang ditutup, karena banyak guru dan murid-muridnya yang masuk ke dalam barisan barisan perjuangan rakyat turut berjuang mempertahankan tanah air.

Usaha pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan pada masa ini adalah dengan mendirikan kursus kursus pendidikan guru, seperti Kursus Pengajar Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKPKB), dan membuka kursus kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Sekolah Desa disatukan kembali menjadi Sekolah Rakyat, dengan masa belajar selama enam tahun.

Perguruan perguruan Islam yang ada di Aceh (berjumlah kira-kira 180 buah (sejak 1 Nopember 1946 dintegrasikan kedalam sekolah Rendah Islam Negeri (SRIN), di bawah pengawasan pemerintah dowerah Aceh. Dan sejak tahun 1952, berdasarkan ketetapan Menteri Agama, 23 Desember 1952

No. 43 dan Ketetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1959, seluruh SRIN di Aceh berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Departemen Agama²⁷

Walaupun kita lihat dalam periode perang kemerdekaan (Revolusi Fisik) ada usaha ~~usaha~~ pemerintah untuk memperbaiki sarana pendidikan di Aceh, namun keadaan pendidikan di daerah Aceh pada masa ini sangat menyedihkan sekali. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, perkembangan pendidikan di daerah Aceh jauh ketinggalan daripada daerah lainnya, seperti di Sumatera Timur dan Tapanuli.

Berdasarkan data-data jumlah sekolah-sekolah yang ada di daerah Aceh pada tahun 1952/1953 adalah sebagai mana yang terlihat di dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
1.	SR	437 buah	89.372 orang
2.	S M P	7 buah	1.205 orang
3.	S T P	3 buah	200 orang
4.	ST (M)	1 buah	11 orang
5.	S M E P	1 buah	179 orang
6.	S K P	4 buah	398 orang
7.	S G B	2 buah	82 orang
8.	KPKBKB	14 buah	1.271 orang
9.	S M A	1 buah	67 orang
10.	S G A	1 buah	84 orang ²⁸⁾

Sejak tahun 1952 hingga tahun 1958, tidak terlihat kemajuan pendidikan di daerah Aceh; malahan dapat dikatakan pendidikan di daerah Aceh mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan karena daerah Aceh terlihat pula dalam peristiwa Pemberontakan DI/TII yang mengakibatkan sekolah-sekolah di desa-desa terbengkalai dan banyak gedung-gedung sekolah yang dihancurkan.

Pendidikan di daerah Aceh mulai berkembang pesat sejak tahun 1958, di mana pemerintah mulai menggalakkan pendidikan sebagai salah satu usaha pemulihan keamanan di daerah Aceh. Repelita kemajuan pendidikan ini menjadi kenyataan setelah dilaksanakan upacara peletakan batu pertama pembangunan Kampus Darussalam pada 17 Agustus 1958, atas prakarsa dari tokoh-tokoh pemimpin di daerah Aceh, seperti; Ali Hsymi (Gubernur Aceh), Kolonel Syammaun Gaharu (Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Mayor T. Hamzah (Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda), Tengku M. Ali Balay dan lain-lain.

Perletakan batu pertama tersebut dilaksanakan oleh Menteri Agama K.H. Mohd. Ilyas, yang mewakili Pemerintah. Kemudian pada 24 Agustus 1958, Menteri P dan K Prof. Dr. Priyono melaksanakan pula upacara perletakan batu pertama pembangunan gedung pertama di dalam Kampus Darussalam. Peresmian pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam berlangsung pada 2 September 1959, yang dilakukan oleh Presiden Sukarno.

Dengan diresmikannya Kampus Darussalam berarti kemajuan pendidikan di daerah Aceh mulai menjadi kenyataan. Tanggal 2 September merupakan hari yang bersejarah kenyataan. Tanggal 2 September merupakan hari yang bersejarah bagi masyarakat Aceh; tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh 5 Oktober 1960, Nomor 90/1960.

2 September 1959 juga merupakan peresmian berdirinya Fakultas Ekonomi; sedangkan Universitas Syah Kuala, berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Nomor 11/1961, tanggal 21 Juli 1961, yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1961 dan diresmikan oleh Presiden Sukarno dan Menteri PTIP pada tanggal 27 April 1962. Pada saat berdirinya Universitas Syah Kuala mempunyai 4 fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, sejak tahun 1963 hingga tahun 1968 dipisahkan dari Universitas Syah Kuala. Pemisahan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 232/63 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor 62 yo 161, Tahun 1963, yang menjadikan FKIP tersebut menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung Cabang Banda Aceh. Kemudian IKIP ini berjalan hingga Tahun 1968, karena kemudian berdasarkan Instruksi Dirjen Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 1968, 19 Maret 1968, IKIP Bandung Cabang Banda Aceh ini diintegrasikan kembali ke dalam Universitas Syah Kuala, menjadi dua fakultas yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keguruan.²⁹

Sebagai pimpinan Universitas Syah Kuala yang pertama, sejak 1 Juli 1961 sampai dengan 31 Juli 1963 dipegang oleh Kolonel M. Jasin (Panglima KODAM I/Iskandar Muda). Di dalam perkembangannya saat ini, Universitas Syah Kuala meliputi tujuh buah fakultas yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan, dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Dalam perkembangan Kampus Darussalam selanjutnya, dibangun pula sebuah perguruan tinggi Islam yang realisasinya dimulai dengan pendirian Fakultas Syariah IAIN Al Jamiah Al Hukumiyah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960, 12 Agustus 1960, yang diresmikan pada tanggal 2 September 1960 oleh Prof. R.H.A. Sunarjo SH, Presiden IAIN Al Jamiah Akl Hiumiyah, selaku mewakili Menteri Agama RI. Dalam Perkembangan IAIN selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963. Pada 20 September 1963, diresmikan Institut Agama Negeri (IAIN Jamiah Arraniri Banda Aceh sebagai IAIN yang berdiri sendiri dan merupakan IAIN yang ketiga di Indonesia.³⁰) Upacara peresmian IAIN Jamiah Arraniri dilaksanakan oleh Menteri Agama RI. K.H. Syaifuddin Zuhri pada 5 Oktober 1963.

Pada saat diresmikannya IAIN Jamiah Arraniri memiliki tiga fakultas, yaitu: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakul-

tas Ushuluddin, disertai dengan sebuah sekolah Persiapan IAIN. Sebagai PJ. Rektor IAIN yang pertama diangkat Gubernur H. Ali Hasymi. Di dalam perkembangannya, pada saat ini IAIN Jamiah Arraniri telah dilengkapi pula dengan fakultasnya yang keempat yaitu Fakultas Dakwah dan Publisistik.

Di samping kedua perguruan tinggi tersebut sejak tahun 1965, di Kampus Darussalam berdiri pula Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang merupakan lembaga pendidikan kader pamongpraja yang sangat penting artinya dalam perkembangan pemerintahan daerah Aceh, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga pamongpraja yang mempunyai keahlian khusus di bidang pemerintahan. Pendirian APDN tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12/1965, 15 Mei 1965. Sebagai pimpinan APDN Banda Aceh yang pertama adalah T. Usman Jakob.

Pada saat ini di dalam Kampus Darussalam juga telah dibina suatu lembaga perguruan tinggi Islam yang berbentuk *dayah* (pesantren) dengan nama Dayah Teungku Chik Pante Kulu. Peresmian pembukaan dayah tersebut dilaksanakan oleh Presiden Suharto pada 31 Agustus 1968.

Perkembangan pendidikan di Daerah Istimewa Aceh hingga Pelita II sudah jauh meningkat kemajuannya jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya sejak terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kesempatan dan fasilitas pendidikan hampir merata di setiap daerah, sebagaimana yang terlihat di dalam tabel di bawah ini:

**Perkembangan Pendidikan Umum di Daerah Istimewa Aceh
Tahun 1976**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Gedung	Jumlah murid	Jumlah Guru/Dosen
1.	SD	1.370	234.849	7.864
2.	SMP	181	39.564	1.651
3.	SMTA	69	16.584	992
4.	Perguruan Tinggi	5	4.197	359

Sumber: — Kantor Wilayah Departemen P dan K Daerah Istimewa Aceh.
 — Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh: Beberapa Informasi mengenai Daerah Istimewa Aceh Maret 1977, hal. 46 -- 47.

**Perkembangan Pendidikan Agama Islam di Daerah Istimewa
Aceh Tahun 1976**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Gedung	Jumlah murid	Jumlah Guru/Dosen
1.	Madrasah Ibtidaiyah	548	103.732	1.901
2.	Tsanawiyah	75	9.794	229
3.	Aliyah	52	10.537	251
4.	Dayah Pesantren	247	30.646	287
5.	Perguruan Tinggi Islam	4	1.278	82

Sumber: Sekretariat wilayah/Daerah Istimewa Aceh: *Beberapa Informasi Mengenai Daerah Istimewa Aceh* Maret 1977, hal. 48.

8.4 Alam Pikiran dan Kepercayaan Masyarakat Aceh

Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berjumlah 2.276.037 jiwa, sebagian besar adalah penganut Agama Islam. Dapat dikatakan semua penduduk "Suku bangsa Aceh" beragama Islam sedang penganut-penganut agama lainnya, seperti Agama Katholik, Agama Protestan, dan Agama Hindu/Budha pada umumnya adalah suku-suku bangsa pendatang yang berdomisili di daerah Aceh..

Melihat populasinya yang demikian besar ini, tidak mengherankan jika hampir semua aspek kehidupan masyarakat Aceh selalu berorientasi kepada unsur-unsur syariat Islam, seperti dalam masalah perkawinan, pembagian harta warisan dan lain-lain, sehingga daerah Aceh lazim pula disebut sebagai Serambi Mekah.

Berapa perbandingan jumlah penduduk Daerah Istimewa Aceh menurut agama, tidak dapat diketahui dengan pasti, karena belum ada data yang rinci. Jumlah rumah ibadat dari masing-masing agama di Daerah Istimewa Aceh tahun 1975 adalah sebagai berikut:

No.	Daerah	Mesjid	Meunasah	Gereja: Kuil/		
				Prot	Kath	Klenteng
1.	Banda Aceh	13	33	3	1	6
2.	Aceh Besar	108	6.675	—	—	—
3.	Pidie	165	1.274	—	—	—
4.	Aceh Utara	276	1.530	—	—	—
5.	Aceh Tengah	120	271	1	1	2
6.	Aceh Timur	195	837	5	—	—
7.	Aceh Barat	340	844	1	—	—
8.	Aceh Selatan	293	475	15	5	—
9.	Aceh Tenggara	116	241	61	9	—
10.	Sabang	14	24	1	1	—

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Aceh — Unsyiah:
Aceh Dalam Angka 1975. Banda Aceh, 1976.

Mengingat besarnya pengaruh Agama Islam inilah tentunya pemerintah menetapkan daerah Aceh sebagai suatu daerah istimewa dengan hak otonomi yang luas dalam bidang: keagamaan, peralatan dan pendidikan sejak 26 Mei 1959. Besarnya pengaruh Agama Islam ini tercermin pula di dalam pertumbuhan partai-partai politik yang berdasarkan Agama Islam. Sebelum pemerintahan Orde Baru, pengaruh partai-partai politik Islam sangat besar di dalam masyarakat Aceh. Pada umumnya partai-partai Islam mempunyai massa (anggota) yang sangat besar jumlahnya, dibandingkan dengan partai-partai lainnya, seperti terlihat berdasarkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPT). Pada waktu pembentukan DPR Provinsi perhitungan Aceh tahun 1959, jumlah seluruh anggota DPR (tingkat I) 30 orang, terdiri atas: MASYUMI sebanyak 23 orang, PERTI sebanyak 4 orang, PNI sebanyak 1 orang, PKI sebanyak 1 orang, PARKINDO sebanyak 1 orang.³¹

Jumlah anggota DPR Tingkat I Tahun 1961, adalah: PI PERTI sebanyak 6 orang, PSII sebanyak 2 orang, PNI sebanyak 2 orang, NU sebanyak 2 orang, PKI sebanyak 2 orang, PARKINDO sebanyak 1 orang, Angkatan Darat/Kepolisian sebanyak 3 orang, Koperasi sebanyak 1 orang, Alim Ulama Islam sebanyak 2 orang, Buruh sebanyak 1 orang, Wanita sebanyak 1 orang, Pemuda sebanyak 2 orang, Tani sebanyak 1 orang, Veteran sebanyak 1 orang, Perusahaan Nasional sebanyak 1 orang, Cendekiawan sebanyak 1 orang, dan Angkatan '45 sebanyak 1 orang.³²

Jumlah anggota DPR I berdasarkan hasil Pemilu Tahun 1971, adalah: PI PERTI sebanyak 4 orang, PSII sebanyak 3 orang, NU sebanyak 3 orang, PARMUSI sebanyak 6 orang, Partai Katholik sebanyak (-), PNI sebanyak (-), IPKI sebanyak (-), MURBA sebanyak (-), GOLKAR sebanyak 16 orang, ABRI sebanyak 6 orang, dan Bukan ABRI sebanyak 2 orang.³³

Jumlah anggota DPR I berdasarkan hasil Pemilu Tahun 1977, adalah: PPP sebanyak 18 orang, PDI sebanyak 1 orang,

GOLKAR sebanyak 13 orang, ABRI sebanyak 6 orang, dan Bukan ABRI sebanyak 2 orang.

Karena potensi Islam di Daerah Aceh sedemikian besar, maka tidak mengherankan jika kaum ulama sangat besar pengaruhnya (peranannya) di dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, dalam alam merdeka kaum ulama yang bergabung di dalam wadah yang bernama: Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), yang terbentuk sejak Tahun 1939 telah turut memainkan peranan penting di dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, pemerintah daerah tetap merangkul para ulama dalam usaha membangun daerah Aceh, terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam. Kedudukan para ulama saat ini dikenal di dalam lembaga yang bernama Majelis Ulama (MU), yang dibentuk sejak Tahun 1975.

CATATAN:

- 1) Biro Sejarah PRIMA, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, jilid I, (Medan; Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, 1967), hal. 69, Lihat juga (Kutaradja; Komite Musyawarah Angkatan 45 Dista, *Modal Revolusi 45*, 1960), hal. 65.
- 2) Sendam I/Iskandar Muda, *Dua Windu KODAM I/Iskandar Muda* (Banda Aceh, 1972), hal. 81 Lihat juga, Komite Musyawarah Angkatan 45, *op.cit.* hal. 30.
- 3) Biro Sejarah PRIMA, *op. cit.*, hal. 12 dan 749.
- 4) Mr. Amrah Muslim, *Ichtiisar Perkembangan Otonomi Daerah* (1903–1958), (Jakarta: Lembaga Administrasi Neara, 1960), hal. 28.
- 5) Biro Sejarah PRIMA, *op. cit.*, hal. 151. Lihat juga, , Kementerian Penerangan RI, Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Utara, 1953, hal. 63–64.
- 6) Mr. S.M. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdaarah Di Aceh*; Dja-karta: N.V. Soeroengan, n.d.) hal. 13.

- 7) Kem. Pen. RI, *Keterangan dan Jawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh*; 1953, hal. 22.
- 8) Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 124.
- 9) T. Alibasjah Talsya, *Sejarah dan Dokumen dokumen Pemberontakan di Aceh*, (Kutaradja: Kesuma, n.d.), hal. 15. Lihat juga, Sendam I/Iskandar Muda, (Kutaradja: Karya Bakti TNI-AD Di Aceh Sejak 1945 s/d 1969, 1970), hal. 51.
- 10) Komite Musyawarah Angkatan 45 Dista, *op. cit.*, hal. 67.
- 11) S.M. Amin *op. cit.*, hal. 271–272.
- 12) *Ibid.*, hal. 279–281.
- 13) Amrah Muslim; *op. cit.*, hal. 53.
- 14) S.M. Amin: *op. cit.*, hal. 284.
- 15) T. Alibasjah Talsya: *op. cit.*, hal. 29.
- 16) Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 29.
- 17) T. Alibasjah Talsja, *op. cit.*, hal. 165.
- 18) Kementerian Penerangan RI. *op. cit.*, hal. 44
- 19) Amrah Muslim, *op. cit.*, hal. 51
- 20) Sendam I/Iskandar Muda, *op. cit.*, hal. 244.
- 21) Sendam I/Iskandar Muda, (Kutaradja: Karya Bakti TNI-AD Di Aceh, Sejak 1945 s/d 1969, 1970), hal. 32.
- 22) *Ibid.*, hal. 33
- 23) T. Alibasjah Talsja; *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*, (Banda Aceh: Pustaka Putroe Tjanden, 1969), hal. 64.
- 24) Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 532.
- 25) Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh Beberapa Informasi Mengenai Daerah Istimewa Aceh", 1977), hal. 7.
- 26) Yayasan Pembina Darusalam, (Darusaalam: 10 tahun Darusalam. Dan Hari Pendidikan, 1969), hal. 327.

- 27) Yayasan Pembina Darussalam, *op. cit.*, hal. 403.
- 28) Kementerian Penerangan RI., *Pendapat Pemerintah Mengenai Laporan Panitia DPR—RI Tentang Keadaan DI Aceh* 1954, hal. 381. Lihat juga, Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sumatera Utara, op. cit.*, hal. 752-753.
- 29) Yayasan Pembina Darussalam, *op. cit.*, hal. 194.
- 30) *Ibid.*
- 31) T. Alibasjah, 10 Tahun Daerah Istimewa Aceh, *op. cit.*, hal. 83.
- 32) *Ibid*, hal. 87.
- 33) Badan Perencanaan Pembangunan Aceh — Unsyah: (Banda Aceh: *Aceh Dalam Angka* 1972, 1973), hal. 43.

DAFTAR PUSTAKA

Bab I.

Gettschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto., Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia 1975.

Ibrahim Alfian, T., "Catatan singkat tentang Sejarah Lokal", *Lembaran Sejarah* Yogyakarta: Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada,, Juni 1974.

..... "Wajah rakyat Aceh dalam lintasan sejarah", *Dewan Bahasa* jilid XVI, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.

Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, Djakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan, Lembaga Sejarah Hankam, 1968.

Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial dalam Sedjarah Indonesia*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 1967

. "Metode dan Didaktik Sejarah" *Lembaran Sejarah* 9, Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, juni 1974.

- "Sekali lagi pemikiran sekitar Sejarah Nasional" *Lembaran Sejarah* 9, Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastera Universitas Gajah Mada, Juni 1974.
- Soeri Soeroto, "Penulisan Sejarah Lokal, Pemikiran tentang Kemungkinan pelaksanaannya", *Lembaran Sedjarah* 6, Yogyakarta Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastera Universitas Gajah Mada, 1970.
- Sutjipto, F.A., "Beberapa Tinjauan tentang Sejarah Lokal" *Lembaran Sejarah* 9, Yogyakarta : Seksi Penelitian Jurusan Sejarah Fakultas Sastera Universitas Gajah Mada, Juni 1974.
- Taufik Abdullah, "Aspek Historis Kulturil Perjuangan Bangsa" *Bulletin Yapena* No. 5, Jakarta : Yayasan Perpustakaan Nasional Pebruari 1975.

Bab II

- Bemmelen, R.W. van, *The Geology of Indonesia*, The Hague, 1949.
- Butzer, K.W., *Environment and Archeology : An Introduction to-Pleistocene Geography*, Chicago : Aldine Publishing Company, 1971.
- Clark, Graham and Stuart Piggot, *Pre history Society*, New York, 1967.
- Fairsevis, W.A., *The Origin of Oriental Civilization*, diterjemahkan Anwar, Djakarta : P.T. Kinta.
- Harrison, J.S. Wiener, Tenner, Barnicot, *Human Bology*, Oxford, 1964.
- Harrison Tom., *The Great cave Nyah Preliminary report on Borneo Prehistory man*, 1975.
- Hawkes, J., "History of Mankind, Cultural and Scientific Development", dalam *Prehistory* Vol I, 1965.

- Heekeren, H.R. van *The Stone Age of Indonesia* (1972).
-, *Cock Painting and other discoveries near Maros*, Laporan Tahunan Dinas Purbakala R.I., 1950.
- Jacob, T., "Diagnosis Phitecanthropus", Berita Ilmu Kedokteran Universitas Gajah Mada, Hokyakarta, 1971.
-, Studi tentang variasi manusia di Indonesia, *Yogyākarta*, 1973.
- Some probelems pertaining to the Racial History of the Indonesia, Utrecht, 1967.
- Movious, H.L. Jr., *The Lower Palaelithic cultures of Southern and Eastern Asia*. (1948).
- Oakley, K.P., *Framework for dating fossil mans*, Chicago : Aldine Publishing company, 1964.
- Soejono, *Sejarah Nasional Indonesia I*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Soejono, "Prehistory Irian Barat "MISI, (1963).
- Trevor J.C. & Brothwell, P.R., *The Human remaines of Mesolithic and neolithic data from Gua Kalatan* : F.M.J. 1962.

Bab III

- Burger, D.H. dan Prajudi, *Sedjarah Ekonomis Sosilogis Indonesia*, Djakarta : Pradnjapramita, 1962.
- Cowan, *B.K.I.* 1833.
- Dasgupta, A.K., "Aceh in Indonesia Trade and Politic 1600 - 1961", unpublished Ph. D. Thesis, Cornell Unibersity, 1962.
- De Casparis, J.G., *Perkembangan pengetahuan Sejarah Indonesia*, lama, terjemahan Said Raksakusumah, Bandung ; 1961.
- Groeneveldt, W.P., *Histoical Note, of Indonesia, Malaya Compiled from Chines Soueces*, *Djakarta Bhrutara*, 1960.
- Hall, D.E.G., *A History of South East Asia*, London : Macmillan & Co Ltd 1960.

- Hoesein Djajadiningrat, "Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervatte Gegevens over Geschiedenis van het Sultanaat van Atjeh, *Bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde van Nederlandsch Indie*, selanjutnya disingkat B.K.I. 65, 1911, hal.
- Ibrahim Alfian, T., *Kronika Pasei*, Yogyakarta : Gajah Mada University 1911, hal.
- Iskandar, T., *de Hikayat Atjeh* s-Gravenhage : N.V. De Nederlandsche Boek -en Steendrukkerij V.H.H.L. Smits, 1959.
- Krom, N.J., *Zaman Hindu*, terjemahan Arif Efendi, Djakarta : P.T. Pembangunan, 1956.
- ..., "De Naam Sumatra", *B.K.I.* deel 1000, 1941.
- Leur, J.C. van, *Indonesia Trade and Society*, s-Gravenhage : A. Mantrau, W. van Hoove, 1955.
- Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Medan : Penerbit Pengarang sendiri 1961.
- Morgan, Kenneth, W., (Editor), *Islam Djalan Mutlak*, Jakarta : P.T. Pembangunan, 1963.
- Morley, J. A.E., "Arabs and the Estern", *J.M.B.R.A.S.* vol. XXII Pt. I, 1949.
- M. uette, J.P., *De Oudeste Vorsten van Samudera Pasei*, R.O.C. 19
- Najib Al Attas, *Preleminary Statement on A General Theory of the Islamization of the Maday - Indonesia Archipelagi* Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969.
- Niemann, G.K. *Bloemlezing Uit Maleische Geschrften*, tweede stuk, 1892.
- Paulus, J., "Aceh" *Eneyclópaedila van Nederlandsch Oost Indie I*, 1917.
- Sartono Kartodirdjo (es), *Sejarah Nasional I, II*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hidu Djawa dan munculnya negara-negara Islam di Nusantara* Jakarta : Bhratara 1968.

Tichelman, *De Indische Gids* 61 Amsterdam : N.V. Drukkerij Ingervry, 1939.

Tome Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires* Vo. 1, translated and edited by Armando Cortesao, London : Printed for the Hakluyt - Society, 1944.

Uka Candrasasmita, "Riwayat Penyelidikan Kepurbakalaan Islam di Indonesia, 50 tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Indonesia (1913 - 1963), Jakarta : 1977.

Vlekke, B.H.M. *Nusantara. A. History of Indonesia*, Bruxelles ; Let Editions A. Manteax A.A. 1961.

Winstedt, R.O. *A. History of Malaya* London : Luzak & Co., 135.

Yamin. Muh. *Gadjah Mada*, Djakarta : Balai Pustaka, 1956.

Zakaria Ahmad,

Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerjaan Aceh 1520 - 1675* Medan : Monora, 1972.

Bab IV

Al Attas, Syed Muhammad Naguib, "Raniry and the Wujudiyah of 17 th Century Aceh" *Munographs of the Malaysia Branch Royal Asiatic Society III*, Singapore : Malaysia Printers Limited, 1966.

Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague : Martinus Nijhoff, 1971.

Braddel, T. "On the history of Acheen" *The Journal of India Archipel-ago and Eastern Asia*, selanjtnya disingkat *JIAEA*, vol. V. Singapura : 1851.

Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis, Indonesia*, Djakarta : Pradnja Pramita, 1960.

- Cowan, H. K.J. *De Hikayat Malem Dagang*, s—Gravenhage : Koninklijk Instituut Voor de Taal, Land en Volkenkuende Nederlansch-Indie.
- Dam, Pieter van, *Beschrijvingen van de Oost Indische Connpag nie dell I*, s—Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931.
- Das Gupta, A.K., "Acheh in Indonesia Trade and Politic 1600 - 1641" Unpublished Ph. D. Thesis, Cornell University, 1967.
- Gerlaeh, A.J.A., *Athih en de Athinezen Arnhem*, 1873.3.
- Hill, C.A. Gibson, "On the Alleged Death of Sultan Alaudin of Johor at Acheh in 1613" *JMBRAS*, vol XXIX part I, May, 1956.
- Hurgronje, C. Snouck, *De Atjehers*, Leiden : E.J. Brill, 1893.
- Husein Djajadiningrat, R.A., Critisch Overzicht van de in Maleische Werken Vervette Gegevens de Geschiedenis van het Sultanaat van Atjeh" *Bijdragen tot de Taal Land en Volende van Nederlandsch Indie*, 65., 1911.
- . . . , *Atjehsch - Nederlandsch woordenboek met Nederlandsch-Atjehsch Refister*, Batavia : Landsdrukkerij, 1934.
- . . . , "De Stichting Van Het "Goenongan" geheeten monument te Kutaraja, *TBG* 57, 1916.
- Ibrahim Alfian, T., "Emas Kafir dan Maut", *Nusantara*, No. 2., Kuala Lumpur : Juli 1972.
- . . . , "Wajah Rakyat Aceh dalam Lintasan Sejarah", *Dewan Bahasa*, jilid XVI, Kualalumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.
- Iskandar, T. "Aceh dalam lintasan Sejarah" suatu tinjauan kebudayaan, *prasaran PKA* (Banda Aceh : Panitia Pusat Pekan Kebudayaan Aceh II, 1972.
- Jakob, Julius, *He Familie en Kampong Leven op Groot Atjeh II*, Leiden : E.J. Bril, 1894.
- Jongejans, J., *Land en Volk van Atjeh Vroeger en Nu*, Hollandia : Drukkerij. N.V. Baar, tanpa angka tahun.

- Kremer, J., *Atheh I*, Leiden : N.V. Boekhandel en Drukkerij Voor Heen, E. J. Brill, 1923.
- Langen, K.F.H. Van, "De Inrichting van het Atjesche Staats-bertuur Onder Het "Sultanaat", *BKJ* 37 (1888).
- Lenehan, W., "History of Pahang" *JMBRAS*, (Mei 1936).
- Luckman Sinar, Tengku, *Sari Sejarah Serdang*, Medan : tanpa penerbit dan angka tahun.
- Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, Medan : Penerbit pengarang sendiri 1961.
- Muktu Ali, A., *An Introduction to the Government of Acheh's Sultanate*, Yogyakarta : Nida, 1970.
- Nuruddin ar Ranniri, *Bustanis Salatin*, disusun oleh T. Iskantar, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966.
- Rouffaer, G.P., "de Hindustansche Oorsprong Van Het "Negen-voudig Sultan Zegel Van Atjen", *BKI* 59, (1906).
- Ryan, N. J., *Sejarah Semenanjung Tanah Melayu*, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1966.
- Sartono Kartodirdjo, "Religious and Economic Aspects of Portuguese Indonesia relation" dalam *Seperata de Studia-revista Quardrimentral* 29, Lisboa : April 1970.
- Schrieke, B.J.O., *Indonesia Sociological Studies* vol. I. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Tolson, G.P., "Acheh Commonly Celed Acheen" *Journal of the Royal Siatic Society Staits Branch*, (JSBRS) V, Singapore (1880).
- Tichelman G. L., "Tjakara Donja", *De Indeche Gids* 61 Amsterdam : N.V. Drukkerij Inrervy, 1939.
- Tiele, P.A., "De Europeers in de Maleische Archipel", *BKI* 35 (1886).
- ..., "Frederick de Houtman in Atjeh, *Indische Gids*, (1881).
- Velmen T.J., "Nota over de geschiedenis van Het Landschap" Pedir", *Tijdschrift Bataviasch Genootschap (TBG)*, 58

- Vieth, P.J., *Achin en Zijne Betrekkingen tot Nederland* Leiden : Gralthe Kolff, 1887.
- Wap, Het. *Gezantschap van den Sultan van Achin A^o 1602 aan Prins Maurits van Nassau en de oud Nederlansche Republiek*, Rotterdam : H. Nijhg, 1862.
- Winstedt, Richard, "Note en the History of Kedah" JMBRAS, vol XIV. Par 14 Singapore : Desember 1936.
- Yule, H., "On Northen Sumatra and Especially Achin" *BKI* VII (1873).
- Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh 1500 - 1675*, Medan : Monora, 1972.

BAB – V

- Anderson, John, *Acheen and The Port On North And East Coasts Sumatra*, with in introduction by A.J.S. Reid, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1971.
- ... , *Mission To The East Coast Of Sumatra In 1823*, with an introduction by Nicholas Tarling, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1971.
- "Atjeh", *Beknopte Encyclopaedie Van Nederlandsch Oost Indie*, Leiden : E.J. Brill, 1921.
- Beamer, Charles R., "The Acehnese - Dutch War and its Effect on the Acehnese People : Their Land, Customs and Institution", *Conference On Modern Indonesia History*, Juli, 18 - 19, 1975, Madison : Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin.
- Damste, H.T. (ed), "Hikayat Prang Sabi", *BKI* 84, (1928).
- Doup, A., *Korps Marechaussee Atjeh*, Medan : N.V. Deli Courant, 1930.
- Gould, James W., *Americans in Sumatra*, (The Hague : Martinus Nijhoff, 1961.
- Hasjmy, A., *Hikayat Perang Sabi Mendjiwai Perang Atjeh Lawan Belanda, Banda Atjeh : Firman Pustaka* Faraby, 1971.

- Hazil, *Teuku Umar dan Tjut Nya' Din, Sepasang Pahlawan Perang Atjeh*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 1955.
- Ibrahim Alfian, T., "*Emas, Kafir dan Maut, Catatan singkat mengenai Pengalaman Dua orang Perancis di Aceh pada akhir-akhir abad ke XIX*", Darussalam - Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Aceh, 1976.
- ..., *Mengenai Masyarakat Aceh yang sedang membangun*, (Sebuah catatan), Darussalam Banda Aceh : Pusat Latihan Penelitian Ilmu Ilmu Sosial, Aceh, 1976.
- ..., "Sejarah Singkat Perang di Aceh", A. Sartono Kartodirdjo (Ed). *Sejarah Perlawanan-perlawanan terhadap Kolonialisme*, Jakarta : Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- Jakub, Ismail, *Teungku Tjhik Di Tiro (Muhammad Saman) : Pahlawan Besar Dalam Perang Atjeh (1811 - 1891)*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1960.
- Jongeijans, J., *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu*, Hollandia : Drukkerij N.V. Baar, tanpa angka tahun.
- Kielstra, E.B., *Beschrijving van den Atjeh-Oorlog*, 3 jilid, s-Gravenhage : De Gebroeder van Cleef, 1885.
- Klerck, E.S. De, *De Atjeh Oorlog*, jilid I s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1912.
- Kreemer, J. *Atjeh*, 2 jilid, Leiden : E.J. Brill, 1922.
- Langhout, Joh., *Viiftig Jaren Economische Staatkunde in Atjeh*, Den Haag : N.V. Boekhandel v/h W.P. van Stockum & Zoon, 1923.
- Reid, Anthony, *The contest for North Sumatra, Atjeh. The Nederland and Britain 1858 - 1898*, Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1969.
- Said, Mohammad, *Atjeh Sepanjang Abad*, Medan : Penerbit pengarang sendiri, 1961.
- Siegel, James T., *The Rope of God*, Berkely University of California Press, 1969.

- Snouck Hurgronje, C., *De Atjehers*, 2 jilid, Batavia : Landsdukkerij, 1893.
- Staat, J., "De Misigit Raija in Atjeh", *De Indische Gids* (1812).
- Szekely — Lulofs, M.H., *Tjoet Nja Din, Riwayat Hidup Seorang Puteri Atjeh*.
- Thamrin M.Z., *Pengaruh Pendidikan Islam pada Rakyat Aceh dalam menentang penjajahan Belanda*, Skripsi, Sarjana Keguruan, Universitas Syiah Kuala, 1975.
- Veer, Paul Vanth, *De Atjeh Oorlog*, Amsterdam : Uitgeverij De Arbeiders—pers, 1969.
- Veth, P.J., *Atchin en Zijne Betrekkingen tot Nederland* (Leiden : Geraeth Kolff, 1887).
- Zainuddin, H.M., *Tarich Atjeh dan Nusantara* (Medan; Pustaka Iskandar Muda 1961).
- ... , *Srikandi Atjeh* (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1966).
- Zentgraaff, H.C., *Atjeh* (Batavia : Koninklijke Drukkerij De Unie, tanpa angka tahun).

Bab VI

1. *Sumber-sumber Arsip*
Kern. H. *Koleksi*, MS H. 797, Koninklijke Instituut voor Taal Land en Vokenkunde, Leiden.
Mail rapporten, 1901 — 1940, Kementerian Dalam Negeri Belanda, Den Haag.
Tractaten van Sumatra, 1800 — 1900, Algemeen Rijkarchief, Den Haag.
2. *Sumber-sumber resmi yang telah diterbitkan*.
Handelingen Volksraad, 1927 — 1930.
Koloniale Verslagen, 1990 — 1913.
3. *Surat kabar*
Sinar Atjeh, Kutaradja, 1908.
4. *Buku-buku dan Artikel*

- C.L., "School en Huwelijk op Atjeh", *TBB* (1915), iv
- H.M. Zainuddin, Bungong Rampoe (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1965).
- Hooyer, G.B. *De Krijgsgeschiedenis van Nederlandsch-Indie van 1811 tot 1894*, Jilid-III (Den Haag : De Gebroeders van Cleef, 1897).
- Hortz, G.D.E.J. *Beknopt Geschiedkundig Overzicht van den Atjeh Oorlog* (Breda : De Koninklijke Militaire Academie, 1924).
- Jongejans, J., *Land en Volk van Atjeh, Vroeger en Nu* (Baarn : Hollandia Drukkerij, 1939).
- Kreemer, J., *Atjeh*. 2 Jilid (Leiden : E.J. Brill, 1922-3).
- Menyambut Konperensi Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Atjeh Ke-26 tahun 1962*. (Kutaradja : Panitia Konperensi Muhammadiyah Daerah Istimewa Atjeh ke-26, 1962).
- Nawawi dan J.L. O'Brien, "De Sumatranen", dalam *Gedenkboek voor Nederlandsch-Indie tot gelegenheid van het Regeerings jubileum van H.M. de Koningin 1898 - 1923* (Batavia : G. Kolff, 1923).
- Piekaar, A.J., *Atjeh en de Oorgog met Japan* (Den Haag - Bandung : W. van Hoeve, 1949).
- Swettenham, Frank, *British Malaya* (London : John Lane, The Brodley Hoad, 1907).
- T' Ibrahim Alfian, "Modern Education in Aceh. A Preliminary Note", *Sixth International Conference on Asia History, IAHA*, Yogyakarta, 1974.
- ... , "Sebuah Studi Pendahuluan tentang Kontek Kebudayaan di Atjeh pada Awal Abad XX", *Bulletin Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, No. 1, 1969.
5. *Thesis yang belum diterbitkan* :
 Nasruddin Sulaiman, *Perguruan Taman Siswa di Aceh* (Thesis Sarjana Perguruan, Universitas Syiah Kuala, 1976).

Bab VII

Abdul Muthallib, Muhammad, *Riwayat Prang Pandrah Masa Djidueg Jeupang* Kutaradja, Maktabah Atjeh Raja, 1960.

Alibasjah Taisja, T., *10 Tahun Daerah Istimewa Atjeh*, Kuta-
raja 1944.

Beberapa Pemandangan Tentang Kehakiman Di Atjeh, Kutaraja
1944.

Dua Windu Kodam – I/Iskandar Muda, Sedjarah Militer Kodam
– I/Iskandar Muda, 1972.

Hasjmy, Ali dan Alibasjah Talsja, T. *Hari-hari Pertama Revolusi
45 Di Daerah Modal*, Banda Aceh, Kanwil Dep. P dan K
Daerah Istimewa Aceh 1976.

Ismuha, *Pendidikan Agama Di Aceh* Banda Aceh : Kanwil Dep.
P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh, MSI Aceh, 1977.

Joenoed Djamil, M. *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan)
Di Aceh* Banda Aceh, Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial Aceh,
1975.

Madjalah Minami, Nomor Khusus Atjeh.
Medan Area Mengisi Proklamasi, Medan : Badan Musyawa-
rah Pujangga Republik Indonesia Medan Area, 1976.

Modal Revolusi 45, Komite Musyawarah Angkatan 45 Daerah
Istimewa Atjeh, 1960.

Mochtar Y Masbi dan Fauzi Hasbi, *Perang Bayu*, Medan : Semi-
nar Pujangga Aceh, 1976.

Piekaar, A.J., *Atjeh en de Oorlog met Japan*, Dan Haag – Ban-
dung : W. van Hoeve, 1949.

Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Djawatan Pene-
rangan Republik Indonesia.

Sabi Ubit, T., "Rakyat yang Berjiwa Patriotik Melawan Pen-
jajahan Facisme Jepang", *Berita Buana*, Jakarta : Kamis,
22 – 23 Mei 1977.

Sartono Kartodirdjo (editor), *Sejarah Nasional Indonesia VI*,
Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Sejarah Pertempuran Cot Plieng Bayu, Lheu Simpang Pandrah Melawan Facisme Jepang, Kabin Kebudayaan Departemen P dan K, Kabupaten Aceh Utara.

Sjamaun Gaharu, *Beberapa Catatan Tentang Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan Di Aceh*, Prasaran pada Seminar Pujangga Aceh, Medan : Panitia Seminar, 1976.

10 Tahun Darussalam Dan Hari Pendidikan, Banda Aceh : Yayasan Pembina Darussalam, 1969.

Bab VIII

Amin, Mr. S.M. : *Sekitar Peristiwa Berdarah Di Atjeh*, Djakarta : N.V. Soeroengan.

Arif, Abdullah : *Kongres Besar PUSA / P. PUSA, Tinjauan Sejarah Pergerakan Di Atjeh*. Panitia Raya Kongres Besar PUSA/P. PUSA, Kutaradja, 1950.

Ariwiadi, *Gerakan Operasi Militer – VII*, Penyelesaian Peristiwa Atjeh, Pusat Sedjarah Angkatan Bersentjata (SAB), Djakarta : Mega Bookstore.

Badan Perencanaan Pembangunan Aceh—Unsyiah : *Aceh Dalam Angka 1972* Banda Aceh : 1973.

..., *Aceh Dalam Angka 1975*, Banda Aceh, 1976.

Biro Sejarah PRIMA, *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid I, Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan : 1976.

Boland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, The Hague, Martinus Nijhoff, 1971.

Dalimunte, A. Hakim, *Gerak-Gerik Partai Politik*, Langsa : Toko Buku Gelora 1951.—

Djamil, M. Junus, *Gadiah Putih Iskandar Muda*, Lembaga Kebudayaan Atjeh, Kutaradja.

Gelanggang, A.H. *Rahasia Pemberontakan Atjeh Dan Kegagalan Politik*, Mr. S.M. Amin), Kutaradja : Pustaka Murniati, 1956.

- Hasjmy, Ali, "Detik-detik Menjelang Proklamasi 45 di Atjeh", Badan Seminar Masyarakat Sedjarahwan Indonesia, Banda Aceh : 1976.
- Hoesin, Muhammad, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Kutaradja : 1970.
- Insider, *Atjeh Sepintas Lalu*, Djakarta, Fa. Archapada, 1950.
- Kelompok Kerdja SAB, Sejarah Singkat Perdjuangan Bersendjata Bangsa Indonesia, Staf Angkatan Bersendjata, Djakarta, 1964.
- Kementerian Penerangan RI : Republik Indonesia, Propinsi Sumatra Utara, 1953.
- . . . , Keterangan Dan Djawaban Pemerintah Tentang Peristiwa Daud Beureueh, Djakarta : 1953.
- . . . , Pendapat Pemerintah Mengenai Laporan Panitia DPR RI. Tentang Keadaan di Atjeh, Jakarta : 1954.
- Meuraza, Dada, *Atjeh 100 tahun dan Peristiwa Teungku Daud Beureueh* Cs. Medan : Pustaka Hasmar (tanpa tahun).
- . . . , *Perjuangan Rakyat Di Atjeh*, Medan : Megabook Store (MBS).
- Muslim, Mr. Amrah, *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1960.
- Nasution, Djenderal TNI Dr. A.H. *Sedjarah Perdjuangan Nasional. Di Bidang Bersendjata*, Jakarta : Mega Book Store, 1964.
- . . . , *Menuju Tentera Rakyat*, Jajasan Penerbit Minang, Jakarta.
- Pemerintah RI Daerah Atjeh : Revolusi Desember '45 di Atjeh Atau Pembasmian Penghianat Tanah Air, Kutaraja.
- Polim, TMAP : Memoir (Tjatanan) TMA Panglima Polim, Kutaradja : Alhamra 1972.
- Sekretariat Panitia Pusat PKA-II : Brosur PKP-II, Banda Aceh, 1992.

Sekretariat Wilayah/Daerah Istimewa Aceh, Beberapa Informasi
Mengenai Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, Maret 1977.

Semdam—I/Iskandarmuda, Karya Bhakti TNI—AD DI Atjeh
Sedjak tahun 1945 s/d 1969, Kutaraja : 1970.

... , Dua Windu Kodam—I/Iskandarmuda, Banda Aceh, 1972.

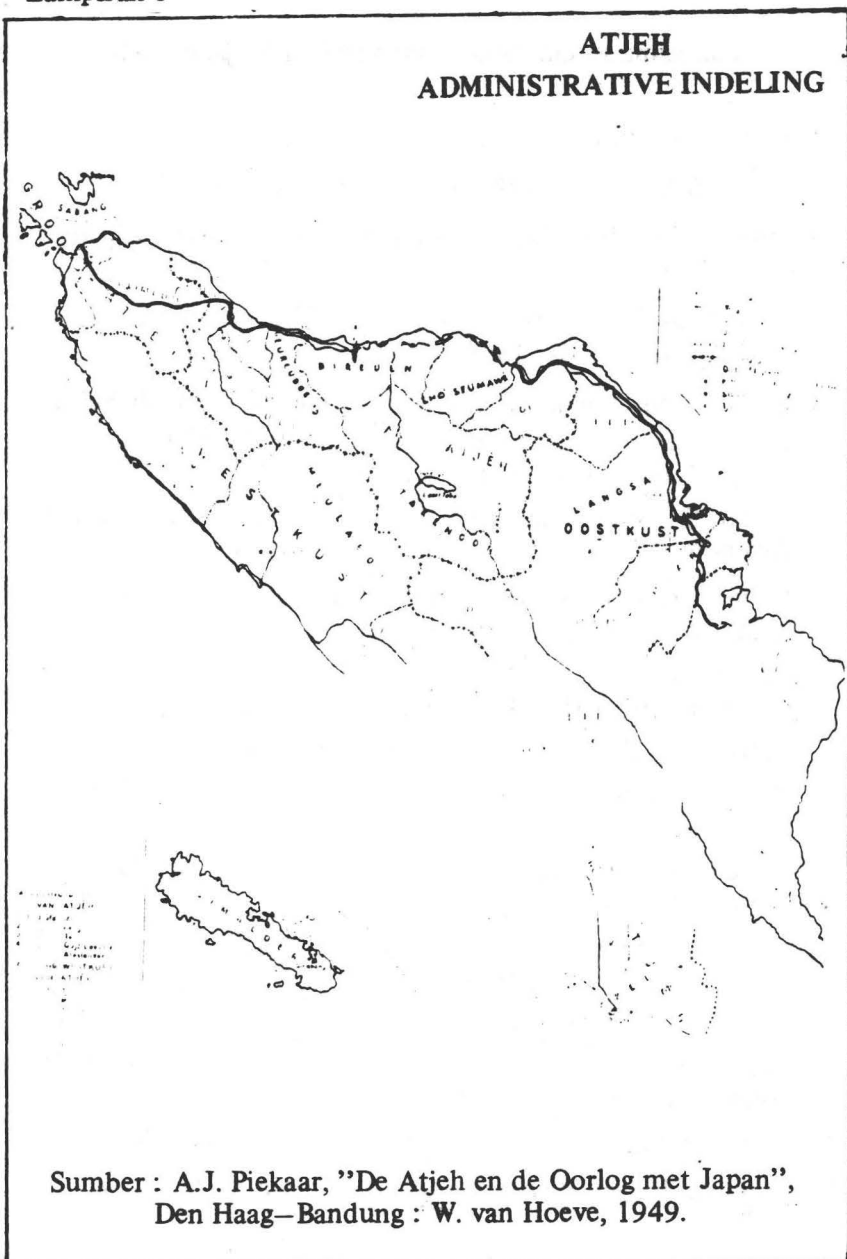
Talsja, T. Alibasjah, *Sedjarah dan Dokumen-Dokumen Pem-
berontakan Di Atjeh* Djakarta : Kesuma (tanpa tahun).

... , 10 Tahun *Daerah Istimewa Atjeh*, Banda Aceh : Pustaka
Putroe Tjanden, 1969.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Aceh Administratieve Indeling.
2. Nama-nama sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Aceh.
3. Surat Prins Marits Kepada Sultnn Aceh.
4. Nama-nama Para Pejabat Gubernur Militer/Sipil Belanda yang pernah memerintah di Aceh.
5. Atjeh Syu Rei No. 10 "Oendang-oendang tentang soesoenan Hakim dan Mahkamah di Daerah Atjeh.
6. Atjeh Syu Rei No. 12 "Oendang-oendang tentang soesoenan Syukyo Hoin (Mahkamah Agama) di dalam Atjeh Syu.
7. Daftar Nama Anggota Atjeh Syu Sangi Kai (DPRD Aceh pada masa Jepang).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1959.

Lampiran 1



Lampiran 2

Nama-nama sultan yang memerintah di kerajaan Aceh

1. Sultan Aki Mūhayat Syah ± 1514–1528.
2. Sultan Salahuddin, anak laki-laki dari 1, 1528–1537.
3. Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahhar, anak laki-laki dari 1, 1537–1568.
4. Sultan Ali Riayat Syah atau Sultan Husein, anak laki-laki dari nomor 3, 1568–1575.
5. Sultan Muda, anak laki-laki dari nomor 4, menjadi Sultan hanya atas nama sebagai anak, berumur 4 bulan dan meninggal 7 bulan kemudian.
6. Sultan Sri Alam, anak laki-laki dari nomor 3, sebagai abang dari nomor 4.
7. Sultan Zainal Abidin, anak laki-laki dari abang dari nomor 6, jadi cucu dari nomor 3.
8. Sultan Alaudin dari Perak atau Sultan Mansyur, anak laki-laki dari Sultan Ahmad dari Perak, 1577–1586.
9. Sultan Ali Riayat Syah atau Raja Bujung, ± 1586–1588.
10. Sultan Alaudin Riayat Syah, anak laki-laki dari Firman syah ± 1588–1604.
11. Sultan Ali Riayat Syah atau Sultan Muda, anak laki-laki dari nomor 10, 1604–1607.
12. Sultan Iskandar Muda, cucu dari nomor 10, 1607–1636.
13. Sultan Iskandar Thani 1636–1641 anak laki-laki dari Sultan Ahmad dari Pahang, menantu dari nomor 12.
14. Sultanah Tadj al Alam Syafiatuddin Syah atau putri Sri Alam Permaisuri, 1641–1675..
15. Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah, 1675–1678.
16. Sultanah Inayat Syah atau Putri Raja Setia, 1678–1688.

17. Sultanah Kamalat Syah, 1688–1699.
18. Sultan Badrul Alam Syarif Hasjim Djamaluddin, 1699–1702.
19. Sultan Perkasa Alam Syarif Lamtui bin Syarif Ibrahim, 1702–1703.
20. Sultan Djamal al Alam Badr al Munir, 1703–1726, anak laki-laki nomor 18.
21. Sultan Djuhar Alam, Maharaja dari kampung Pahang dan meninggal 20 hari setelah dia dinobatkan menjadi Sultan.
22. Sultan Syamsul Alam, atau Wandu Tebing. Ia menjadi Sultan hanya beberapa hari.
23. Sultan Alaudin Ahmad Syah atau Maharaja Lela Melayu, 1927–1735.
24. Sultan Alauddin Hohan Syah atau Pocut Auk, 1735–1760. Anak laki-laki dari nomr 23.
25. Sultan Mahmud Syah atau Tuanku Radja, 1760–1781 anak laki-laki dari nomor 24.
26. Sultan Alaudin Muhammad Syah atau Tuanku Muhammad, 1781–1795, anak laki-laki dari nomor 25.
27. Sultan Alaudin Jauhar Alam Syah, 1795–1824, anak laki-laki dari nomr 26, belum dewasa masih di bawah pengawasan ibunya dan pamannya dari pihak ibu, baru dalam 1802 memegang pemerintahan sendiri.
28. Sultan Muhammad Syah, juga dinamakan Sultan Buyung, 1824–1836 anak laki-laki dari nomor 27.
29. Sultan Sulaiman, ± 1836–1857, anak dari nomor 28.
30. Sultan Ali Alaudin Mansur Syah (Ibrahim) 1857–1970, anak laki-laki dari nomor 27.
31. Sultan Mahmud Syah 1870–1874, anak laki-laki dari nomor 29.
32. Sultan Muhammad Daud Syah, 1874–1903, cucu dari nomor 30.

Lampiran 3

**TERJEMAHAN SURAT PRINS MAURITS
KEPADA SULTAN ACEH**

Pada tahun 1598 berangkat, atas perintah beta, dua buah kapal dagang dari propinsi-propinsi ini untuk berdagang di Hindia Timur dan pada tanggal 15 Agustus tahun ini mereka telah pulang kembali. Pedangang-pedagang itu melaporkan kepada beta mengenai penerimaan yang baik atas perkenan Sri Paduka dan bukti keramahan yang telah mereka temui, ketika mereka sampai dalam kerajaan Seri Paduka. Di samping itu mereka mengisahkan kepada beta, bahwa mereka, berangkat kembali dalam suasana persahabatan, menjalankan perdagangan dengan segala kejujuran dan dengan kebulatan demikian, sebagaimana yang ditemui orang dalam watak dan kebiasaan bangsa kami.

Tetapi orang-orang Potugis, rakyat dari raja Spanyol dan musuh-musuh negeri kami, setelah mengetahui kapal-kapal tersebut di atas mendapat bantuan dan perlindungan dengan titah Seri Paduka, mereka telah pun berbohong kepada Seri Paduka, dan dengan dustanya mereka hendak mempersesat Seri Paduka, dengan mengatakan bahwa pedagang-pedagang Belanda sebagai bajak-bajak laut, dan kedatangan mereka untuk merampat negeri bajak-bajak laut, dan kedatangan mereka untuk merapat negeri dan merampok rakyat Seri Paduka; akibatnya, Frederik Houtman, pemimpin kapal-kapal tersebut di samping beberapa awak kapal, telah Seri Paduka titahkan untuk ditawan, hal mana telah menyedihkan hati beta.

Walaupun demikian, percaya akan sikap yang adil dan belas kasihan Seri Paduka perkenankanlah beta mengharap sudi-kiranya Seri Paduka menitahkan agar mereka diperlakukan dengan baik, sebagaimana juga telah berlaku terhadap mereka yang telah kembali dari kerajaan Seri Paduka, pulang dengan penuh kebebasan; beta percaya, bahwa kepada tawanan-tawanan

tersebut, yang telah tinggal di sana akan mendapat perlakuan yang serupa.

Demikian juga mereka telah memberitahukan kepada beta mengenai peperangan Seri Paduka yang dilancarkan oleh Portugis terhadap kerajaan Seri Paduka atas perintah raja Spanyol, berusaha merampas kemerdekaan penduduk-penduduk dan menjadikannya sebagai budak, sebagaimana mereka telah berusaha melakukannya lebih dari tiga puluh tahun di negeri kami. Tetapi Tuhan Yang Mahakuasa tidak mengizinkannya. Sebaliknya kami telah melawan dengan kekuatan senjata, seperti yang terus menerus sedang kami lakukan.

Oleh karena itu beta bermohon kepada Seri Paduka agar tidak melimpahkan kepercayaan kepada orang-orang Portugis itu; dan semoga Seri Paduka berkenan, sejak hari ini ke masa yang akan datang, berkenan tidak akan menaruh curiga kepada mereka yang datang dari negeri beta untuk berniaga dalam kerajaan Seri Paduka, maka beta telah menitahkan dan memberi kuasa penuh kepada mereka yang membawa surat ini; yakni : kepada empat orang nahkoda, dengan nama Cornelis Bastidause, Jant Tonneman, Matthys Antonisse, dan Cornelis Adriaanz dan sebanyak itu pula utusan yang nama-namanya adalah : Gerard de Roij, Laurens Begger, Jan Jacobz dan Nicolass van der Lee- yang berangkat lagi dengan empat kapal dan atas nama beta, berunding dengan Seri Paduka untuk dapat memberikan bantuan yang mungkin diperlukan oleh Seri Paduka.

Demikian pula beta telah menugaskan mereka, untuk mempersembahkan bingkisan ke hadapan Seri Paduka sesuai dengan adat kebiasaan negeri kami, sebagai tanda idam-idaman beta untuk mengulurkan tangan persahabatan ke hadapan Seri Paduka. Beta mohon semoga Seri Paduka berkenan di hati menerimanya sebagaimana juga halnya beta mempersembahkan-nya.

Den dengan ini beta berdo'a ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, semoga Seri Paduka mendapat perlindungan Illahi dan bertambah luas kerajaan sesuai dengan harapan beta.

Dari Den Haag di Holland pada 11 Desember tahun 1600.

Cium tangan Seri Paduka
dari perhamba,

Maurice de Nassau

Lampiran 4

**Nama-nama Para Pejabat/Gubernur Militer/Sipil Belanda
Yang pernah memerintah di Aceh**

No.	N a m a	Jabatan	Tahun
1. :	Nieuwenhuijzen	: Komisari Pemerintah Untuk Aceh	: 1873—April 1873
2. :	J.H.R. Kohler	: Panglima Agresi—I	: 1973—April 1873
3. :	J.Van Swieten	: Komisaris Pemerintah/ Panglima Agresi—II	: 1873—April 1874
4. :	J.L.J.H. Pel	: Militair en Civiele Bevel- hebber	: 1874—1876
5. :	J.B. Th. Wiggres Van Kerhem	: Militair en Civiele Bebel- hebber	: 1876
6. :	A.J.F. Diemont	: Militair en Civiele Bevel- hebber	: 1876—1877
7. :	A. Pruijs Van der	: Civiele en Militair Gou- verneur	: 1881—1882
9. :	P.F. Laging Tobias	: sda	: 1882—1884
10. :	H. Demmeni	: sda	: 1884—1886
11. :	H.K.F. Van Teijn	: sda	: 1886—1891
12. :	F. Pompe Van Meerder voort	: sda	: 1891—1892
13. :	C. Deijkerhoff	: Civiele Gouvernuer	: 1892—1896
14. :	Letnah Jenderal J-A.	: Commandant der Leger/ Gouvernement Commis- saris	: 1896—(April) Juli
15. :	J.J.K. de Moulin	: Civiele en Militair Gou- verneur	: 1896 (Juli).
16. :	JW. Stemfoort	: Wakil Civiele en Militair Gouverneur	: 1896 (Juli— Oktober)
17. :	C.P.J. Van Vliet	: Civiele en Militair Gou- verneur	: 1896—1898

		Jabatan	Tahun
18. :	J.B. Van Heutsz	: sda	: 1898—1904
19. :	Jhr. J.C. Van ser Wjick	: sda	: 1904—1905
20. :	C.E. Van Daalen	: sda	: 1905—1908
21. :	H.N.A. Swart	: sda	: 1908—1918
22. :	A.G.H. Van Sluijs	: Siviele Gouverneur	: 1918—1923
23. :	A.M. Hans	: sda	: 1923—1926
24. :	Goedhart	: sda	: 1926—1930
25. :	Philips	: sda	: 1930—1933
26. :	A.Ph. Van Aken	: sda	: 1933—1936
27. :	J. Jongejans	: Wakil (fd) Gouverneur (Resident)	: 1936—1940
28. :	J.Pauw	: Resident Aceh	: 1940—1942

Lampiran 5

Gunseikanbu Aceh Syu Sityo

K U T A R A J A

ACEH SYU REI No. 10 – SYOWA 19 ITI-GATUL

**Undang-undang tentang susunan
Hakim dan Mahkamah
di daerah Aceh.**

Pasal 1

Menurut pasal 1, ayat penghabisan dari bahagian penmbahan Tomi Sei Rei otu No. 10 yaitu dari Undang-undang tentang aturan Hakim dan Mahkamah seterusnya akan disebutkan. Undang-undang tentang Hakim dan Mahkamah, maka diadakan Undang-undang tentang susunan Hakim dan Mahkamah di daerah Aceh.

Undang-undang ini ditetapkan untuk mengatur, selain dari susunan pengadilan Gubernemen di Aceh, peraturan Hakim dan Mahkamah.

Di daerah Aceh diadakan Hoin (Mahkamah) seperti tersebut di bawah ini dan tentang mengadakan Syu Kyo Hoin (Mahkamah Agama) akan ditetapkan dengan aturan yang lain (tersendiri) :

1. Ku-Hoin.
2. Tiho - Hoin.

Pasal 2

Ditiap-tiap Gun dan Son diadakan Ku-Hoin.

Pasal 3.

Perkara-perkara yang disebutkan di bawah ini, diperiksa dan diputuskan oleh Ku-Hoin.

1. Perkara Minzi : Persengketaan yang pokok perselisihannya tiada lebih jumlahnya dari f 200,- (dua ratus rupiah).
2. Perkara Keizi : Persengketaan yang hikumannya di bawah 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya f 100,- (seratus rupiah)
3. Dan perkara lain-lain yang masuk dalam kekuasaannya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 4

Ku-Hoin terdiri dari lebih 3 orang Sinpan - In (anggota) dan musti dihadiri oleh seorang Ulama sebagai Penasehat, dan seorang Syoki. Tetapi kalau orang yang berperkara bukan umat Islam, maka perkara itu tidak perlu dihadiri oleh Ulama.

Salah seorang dari Sinpan - In diangkat menjadi Saiban Tyo (Ketua Mahkamah).

Jika Sinpankan (hakim) dari Tiho Hoin merasa perlu, maka ia boleh menjadi Saiban - Tyo dari Ku-Hota.

Ku - Hoin memutuskan perkara dengan semufakat Sinpan In.

Di Ku-hoin dari tiap-tiap Son, Santyo menjadi pengawas supaya perkara-perkara jangan terlambat diputuskan dari semes-
tinya, dan urusan pengadilan dapat berjalan dengan baik.

Pasal 5

Perkara yang diputuskan oleh Ku Hoin boleh dibantingkan (apel) kepada Tiho Hoin.

Pasal 6

Tiho-hoin diadakan di Kutaraja dan cabangnya di dirikan di tiap-tiap Bunsyu terkecuali di Dai Aceh Bunsyu.

Pasal 7

Tiho-Hoin memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang termasuk dalam golongan yang tersebut di bawah ini.

No. 1 Perkara Minzi dan Keizi :

- a. Sebagai pengadilan yang pertama perkara yang tiada masuk dalam kekuasaan Ku - Hoin.
- b. Perkara-perkara bandingan yang melawan keputusan Ku-Hoin.

No. 2. Dan lain-lain perkara yang ditentukan kekuasaannya oleh Undang-undang.

Pasal 8

Tiho-Hoin terdiri dari :

Simpankan, satu orang.

Kosel-In (anggota), lebih dari dua orang dan perlu dihadiri oleh Ulama sebagai penasihat dan satu orang Syoki.

Walaupun demikian, jikalau orang berperkara itu bukan Umat Islam, maka tiada perlu dihadiri oleh Ulama.

Simpankan menjadi Saiban-tyo.

Tiho-hoin mengadili perkara dengan semufakat Simpankan dan Kosei-Hoin.

Pasal 9

Perkara-perkara yang diputuskan oleh Tiho Hoin sebagai pengadilan yang pertama, boleh dibandingkan kepada Koto-Hoin yang diatur oleh Undang-undang tentang aturan Hakim dan Mahkamah.

Pasal 10

Simpankan. Kond-In dan Ulama dari Tiho-Hoin dan Simpan-In dan Ulama dari Ku-Hoin, diangkat dan diperhentikan oleh Tuan Besar Tyokan.

Pasal 11

Jika sesuatu keputusan dari Hoin yang dimaksud dalam Undang-undang ini, baik dalam perkara Minzi maupun dalam

perkara Keizi, yang tidak dapat ditarik kembali dan ternyata bahwa keputusan itu tidak adil, maka Tiho-Hoin Kutaraja berhak memeriksanya kembali.

Pemeriksaan kembali seperti yang dimaksud di atas boleh dilakukan karena jabatan (ex-officio) terhadap perkara-perkara Minzi, dan terhadap perkara-perkara Keizi dilakukan pemeriksaan kembali atas permintaan Kensatu Kan (Opsir Yoestisi).

Pasal 12.

"Kensatu" dilakukan menurut Undang-undang tentang aturan Hakim dan Mahkamah.

Pasal 13

Dalam hal aturan Hakim dan Mahkamah, kekuasaan dan tuntutan Hukum dari peraturan ini, dilakukan menurut peraturan "Musapat" yang lama. Tetapi tentang aturan tuntutan hukum. Tiho Hoin-Tyo (Ketua dari Tiho Hoin) Kutaraja boleh menunjukkan perubahan jika dianggapnya perlu, baik yang umum ataupun yang teristimewa untuk Tiho-Hoin yang dikerualnya dan Hoin-hoin yang lain di dalam jajahannya.

Aturan tambahan.

Undang-undang ini berlaku mulai tanggal 1 bulan Satu Syowa 19 Aceh Syu Rei No. 1 dan No. 2 tidak berlaku lagi. Pengadilan yang menurut Aceh Syu Rei No. 4 dilakukan oleh Guntyo dan Santyo, akan dilakukan oleh Ku Hoin.

Kutaraja. Syowa 19 Iti Gatu I.

Gunsetkanbu Aceh Syu Tyokan.

S. I I N O.

Lampiran 6

Gunseikanbu Aceh Syu Seityo**KUTARAJA,****Aceh Syu Rei No. 12.****Syowa Ni Gatu 15 Nati**

**Aceh Syu () (undang-undang Aceh)
Tentang susunan Syukyo Hoin (Mahkamah Agama)
di dalam Aceh Syu**

Pasal 1

Untuk menghormati dan menghargai Agama Islam dan untuk menjalankan Syara' Agama Islam yang patut dan sesuai di dalam Aceh Syu. diadakan Syukyo Hoin di Kutaraja.

Dan sebagai badan di bawahnya dari Syukyo Hoin akan diadakan seorang "Kepala Kadli" dan beberapa orang anggota majelisnya di tiap-tiap Bunsyu, Hoin seorang "Kadli Son" di tiap-tiap Son.

Pasal 2

Syukyo Hoin mengurus pekerjaan yang tersebut di bawah ini :

1. Bermufakat dan menetapkan tentang melakukan urusan nikah dan segala perkara yang bersangkutan dengan dia dan urusan faraidli, menurut ketentuan syafa'
2. Memutuskan pekerjaan (keberatan) tentang hukum yang dilakukan oleh Kepala Kadli dan Kadli Son :
mengubah dan memperbaiki hukum itu menurut kekuasaan jabatan.
3. Menjaga, menyelidiki dan memimpin Kepala Kadli dan Kadli Son.
4. Dan lain-lain yang diperintah oleh Aceh Syu Tyokan, yang mengenai urusan Agama Islam.

Pasal 3

Syukyo Hoin terdiri dari "Zyoninlin" (anggota-anggota harian) dan "lin" (anggota-anggota biasa).

Salah seorang dari Zyonin lin akan diangkat "lintyo" (Ketua).

Aceh Syu Tyokan mengangkat dan memperhentikan Zyonin lin dan lin menurut unjukan dari Tiho Hointyo Kutaraja, dari Ulama-ulama yang cerdik pandai, jujur dan berpengaruh di dalam Aceh Syu.

Intyo akan diunjukkan oleh Aceh Syu Tyokan

Pasal 4

- a. Kepala Kadli anggota-anggota majelisnya dan Kadli Son mengurus pekerjaan dalam jajahannya masing-masing menurut ketentuan yang akan ditetapkan.
- b. Kepala Kadli dan anggota-anggota majelis yang diangkat dan diperhentikan oleh Aceh Syu Tyokae, menurut unjukan Tihio Hontyo Kotaraja.
- c. Keadli Son diangkat dan diperhentikan oleh Sontyo atas persetujuan Syukyo Hoin.

Pasal 5

Tiho-Hointy Kutaraja menjagai dan menyelidiki Syukyo Hoin dan badan di bawahnya menurut perintah dan Aceh Syu Tyokan.

Tambahan :

Undang-undang ini berlaku mulai pada tanggal Syowa 19 Sagatu 1 Niti.

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melakukan undang-undang tersebut akan ditetapkan dengan Kadli (Mahkamah Pemerintah)

Kotaraja Syowa 19, Ni Gatu Niti
Gunseikanbu Aceh Syu Tyokan

S. IINO.

Lampiran 7

Daftar Nama anggota Aceh Syu Sangi Kai

I. Anggota-anggota yang dipilih mewakili GUN (Kawedanaan)	II. Anggota-anggota yang diangkat
Kutaraja — Teuku Ad/ T.M.Amin	1. T. Ahmad/T. Cut. Ahmad
Seulimun — Teingku Syeh Ibrahim/Tengku Abdul Wahab.	2. T.Hanafiah Meulaboh
Sabang — R.Dhohan/ Ahmad Kamil.	3. T.P.P.M.Ali
Sigli — T. Muhammad/ T.Tjoet Hasan	4. Teuku Nyak Afif 5. Tgk. Daud Beureueh
Lammeulo — T. Bentara Hasan/ T. Mahmood.	6. Tgk.H.Hasan Kruengkale
Meureudu — T.Aii Basuah/ T. Sabi Bireuen — T.Tjoet Hasan/ Tengku Syech Abdul Hamid	7. Tgk. M. Hasbi 8. Tuanku Mahmood. 9. Dr. Muhammad Mahjudin.
Takengon — Radja Zainuddin/Chalidin Abubakar	10. Ali Murtholo. 11. Mr. S.M. Amin.
Lhokseumawe — T.Tjoet Radja Pait/ T.Wahi	12. Tjek Ahmad Blangpidie.
Lhoksukon — T.Muchd Adj/ T.Radja Mahmood.	13. T. Tjhi' Mahmood.
Idie — T.T.M. Daoedsyah.	14. Dr. F.J. Nainggolan.
Langsa — T. Said Umar/ A. Azis	15. T. Laksamana Umar Ndjong
Tamiang — T. Radja Soeloeng.	16. Thie Kie Sam.

- Alas — Radja Maribeen. 17. T.T. Mohd. Taib Wood
Meulaboh.
- Gayo Luas — Matrahim/M. Aman Sar.
- Calang — Nyak Mansur/Tgk. A. Rachman.
- Meulaboh — T.M. Ali/Tgk. Hasan Hanafiah.
- Tapaktuan — Tjek Ahmad/T. Radja Pait.
- Bakongan — Tgk. Adnan Mahmud/T. Ramli Angkasah.
- Singkil — Tengku Ibrahim Meuraxa.
- Sinabang — Tengku Ibrahim.

Sumber : Said Abubakar, "Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
"Majalah DPRD Daerah Istimewa Aceh Nomor
2 Tahun 1977 hal. 31 - 32.
Anggota Aceh Syu Sangi Kai (DPRD Aceh) pada
pelantikan pertama 30 orang, kemudian terjadi
penggantian dan penambahan sehingga berjumlah
40 orang anggota.

Lampiran 8

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 180TAHUN 1959.
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat Menteri Pertahanan/Pertahanan tanggal 15 Agustus 1959;
- Menimbang** : Bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh untuk kembali ke pangkuan Negara : Bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan Daud Beureueh di Aceh yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan membaktikan diri kepada Negara dihadapan Penguasa Perang Daerah Aceh.
- Mengingat** : Undang-undang Dasar Pasal 14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan Pemberontakan Daud Beureueh di Aceh, yang sebelum ditetapkan keputusannya ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Aceh.
- KEDUA** : 1. Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama dihapuskan.

2. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama ditiadakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 1959.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

S U K A R N O

Diundangkan

Pada tanggal 15 Agustus 1959.

MENTERI MUDA KEHAKIMAN

d.t.o.

S U H A R D J O

Sumber : *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, (Kutaraja : Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972), hal. 430 - 404.

Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Barat dan lain-lain Daerah, Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Pemberontakan Karto Suworyo di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, pemberontakan "Republik Maluku Selatan" di Maluku yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah melaporkan dan menyediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia, yang disertai menurut sumpah menurut agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut :

Pertama: "Saya bersumpah setya kepada Undang-undang Dasar, Menifestopolitik yang telah menjadi garis-garis besar haluan Negara, nusa dan bangsa, revolusi dan pemimpin besar revolusi, dihadapan penguasa setempat yaitu penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Kedua : Amnesti dan Abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan Pertama mengenai tindak pidana yang mereka lakukan dan yang merupakan kejahatan.

1. Terhadap keamanan Negara (Bab I buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
2. Terhadap martabat Kepala Negara (Bab II Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
3. Terhadap kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan (Bab. IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
4. Terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
5. Terhadap keamanan Negara (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
6. Terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara).
7. Terhadap kewajiban Dinas (Bab. III dan Bab. V Buku II Kitab Undang-undang Hukum Tentara).

8. Terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara)

dan tindak pidana lain yang ada hubungannya sebagai akibat atau hubungan atau tujuan dan upaya dengan tindak Pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 di ata.

Ketiga : (1) dengan pemberian Amnesti, semua akibat Hukum Pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua, dihapuskan.

(2) dengan pemberian Abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pertama dan kedua diiadakan.

Keempat : Dengan keluarnya keputusan ini, maka Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. Tahun 1959 No. 303 tahun 1961 tidak diperlukan lagi dan dengan keputusan ini dicabut.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam penetapan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tgl. 17 Agustus 1961
PRESIDEN R.I.

ttd.

S U K A R N O.

Diundangkan di Jakarta.
Pada Tgl. 17 Agustus 1961
SEK. NEGARA.

ttd.

MOHD. IHSAN

Sumber : *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, (Kutaraja : Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972).
Hl. 405 - 407.







005126.1

G3.2